EDITOR ZAHRA AMIN

yang MUDA
MERAWAT BANGSA

yang MUDA MERAWAT BANGSA

Diterbitkan oleh:

Didukung oleh:

yang **MUDA MERAWAT BANGSA**

Editor: Zahra Amin
Desainer sampul: Zannoism
Layout: Jumee
Proofreader: Ocllivia DP

Cetakan 1, November 2022

xii + 306 halaman
14 x 20,5 cm

DAFTAR ISI

PENGANTAR

Membincang Anak Muda yang Merawat Bangsa

Oleh: ZAHRA AMIN

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki Indonesia. Namun dalam realitasnya, dinamika ekspresi keberagaman dan keberagamaan di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antar-masyarakat, antar-umat beragama atau bahkan internal umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan moderasi salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan bangsa.

Moderasi beragama dapat diukur dalam empat indikator diantaranya toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, serta pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi-kultural dan multi-agama. Untuk itu, keempat indikator tersebut harus selalu dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat sebagai upaya menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan.

Media memiliki peran strategis bagi umat dalam menggerakkan moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Oleh sebab itu, tugas penguatan kerukunan umat beragama di samping

dilakukan oleh pemerintah, juga harus dilakukan oleh pegiat media. Di kalangan sindikasi media keislaman yang moderat, Mubadalah.id dianggap sebagai situs Islam utama yang secara khusus mengusung narasi keadilan gender atau hak-hak perempuan dalam Islam, di samping narasi kebangsaan toleransi dan perdamaian, sebagai upaya kampanye positif terkait moderasi beragama di Indonesia.

Sebagai salah satu media online, Mubadalah.id dihidupi oleh berbagai kontributor yang dilatih dan dibekali untuk menarasikan nilai-nilai baik dalam kehidupan. Para penulis ini berperan penting dalam menarasikan berbagai macam isu dengan menggunakan metode dan semangat nilai mubadalah sebagai pedoman utamanya. Melalui buku kumpulan artikel populer di Mubadalah.id yang selama 7 bulan ini dipublikasikan, menjadi salah satu cara yang dilakukan anak-anak muda untuk merawat nilai-nilai kebangsaan. Saya merasa Indonesia akan baik-baik saja, jika semakin banyak orang yang punya kesadaran kritis dan literasi yang baik, menggelisahkan setiap hal, lalu membaginya melalui tulisan.

Untuk catatan tambahan, pada 2019 Mubadalah.id telah mengkompilasi sejumlah artikel yang pernah diposting di web dengan judul "Insipirasi Keadilan Relasi". Lalu di tahun 2021, Mubadalah.id juga membukukan sejumlah artikel yang terbagi menjadi tiga tema besar, "Perdamaian dan Kebangsaan, Keadilan Gender, dan Perlindungan Alam/Keberlanjutan Lingkungan", dengan melibatkan tiga orang kontributor sebagai kompilator. Pemilihan tema-tema ini, selain terkait dengan tiga Fatwa KUPI, yakni Pencegahan Kekerasan Seksual, Pencegahan Perkawinan Anak, dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan, juga relevan dengan kondisi keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan kita saat ini, yang semakin hari kian tergerus oleh perubahan teknologi, gaya hidup, serta pandangan hidup masyarakat.

Kemudian di tahun 2022 ini, Mubadalah.id kembali mengkompilasi sejumlah artikel yang ditulis bersama anak-anak muda 15 kontributor terpilih, dengan tiga tema utama antara lain, pertama kebangsaan, toleransi dan perdamaian. Kedua, kesetaran

dan keadilan gender. Lalu ketiga lingkungan berkelanjutan. Dalam tema kebangsaan, toleransi dan perdamaian mengambil judul "Yang Muda Merawat Bangsa". Hadirnya buku tentang kebangsaan ini salah satunya adalah sebagai ikhtiar anak-anak muda, artikel dari para kontributor terpilih, untuk mengembangkan sikap cinta tanah air, dan merawat nilai-nilai toleransi, tenggang rasa, saling pengertian, empati, kemanusiaan, dan kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah membaca buku ini diharapkan mampu membangun kesadaran pembaca bahwa kita saat ini hidup dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Antara satu dengan yang lain memang kita diciptakan secara berbeda. Maka memaksakan untuk menyatukan perbedaan artinya kita melanggengkan konflik. Apalagi memaksakan keadaan untuk sama sesuai dengan keyakinan kita, tak ubahnya dengan seseorang yang mendamba bahagia, namun tetap membiarkan hari-harinya berlalu tanpa warna, dan cinta. Demikian. Selamat membaca! []

INSPIRASI KEBANGSAAN

IBU KOTA NEGARA BARU: *Maslahat* atau *Mafsadat*?

Oleh: IRFAN HIDAYAT

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru, yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kebijakan pemindahan ibu kota tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kebijakan tersebut merupakan hasil kajian pemerintah Indonesia selama kurang lebih tiga tahun dan masuk ke dalam salah satu proyek prioritas strategis.

Alasan pemerintah terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara antara lain karena beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat untuk menjadi pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat bisnis, pusat jasa, pusat perdagangan, dan juga bandar udara serta pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Selain itu, Jakarta bahkan Pulau Jawa pada umumnya yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang parah, polusi air dan udara yang semakin rusak, dan kerusakan-kerusakan yang lain.

Dalam tulisan pendek ini, penulis hendak sedikit mengkaji kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Apakah kebijakan tersebut suatu maslahat atau sebaliknya, akan menimbulkan mafsadah?

PANDANGAN FIKIH *SIYASAH*

Dalam kajian Fikih *Siyasah*, kebijakan seorang pemimpin seyogianya mepmerhatikan aspek maslahat dan mafsadah. Seperti yang diungkapkan A. Djazuli dalam *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (2014), bahwa terdapat kaidah *siyasah* tentang kebijakan seorang pemimpin yang artinya: "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*".

Apabila dilihat dari segi *maslahat* secara substansial, kebijakan ini termasuk ke dalam *maslahah hajiyah* atau kemaslahatan sekunder. Dalam buku *Ushul Fiqh* karangan Abd. Rahman Dahlan, *maslahah hajiyah* ialah sesuatu yang dibutuhkan seseorang dalam memudahkannya menjalani hidup serta menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok *maqashid syari'ah,* yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Kebijakan pemindahan ibu kota negara dengan bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota dan memudahkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan apabila suatu saat terjadi bencana perkotaan yang akan melanda ketika ibu kota masih berada di Jakarta, termasuk *maslahah hajiyah*.

Selanjutnya, kebijakan pemindahan ibu kota ini masuk ke dalam *maslahah al-mursalah*, yaitu seperti diungkapkan Abd. Rahman Dahlan, kemaslahatan yang tidak mendapat ketegasan dari justifikasi *syara*' atau tidak didukung *syara'*, dan juga tidak ditolak

syara' melalui dalil yang rinci. Atau dengan kata lain, tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau menolak kebijakan pemindahan ibu kota ini.

BEBERAPA POLEMIK YANG MUNCUL

Meskipun sudah sesuai dengan konsep *maslahat* terkait kebijakan seorang pemimpin, dalam realisasi kebijakan pemindahan ibu kota ini banyak memunculkan polemik dan penolakan dari masyarakat. Mulai dari penolakan warga Jakarta hingga penolakan dari warga Kalimantan sebagai penduduk asli lokasi ibu kota baru tersebut. Dari beberapa media berita nasional, beberapa polemik dari kebijakan pemindahan ibu kota yaitu:

Pertama, alasan pemerintah memindahkan ibu kota karena Jakarta sering dilanda banjir, kemacetan, hingga terancam tenggelam merupakan alasan salah kaprah. Seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah-masalah tersebut, bukan malah memilih untuk memindahkan ibu kota.

Kedua, biaya perpindahan ibu kota yang mencapai Rp 466 triliun yang 19% menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara yang masih bermasalah, salah satunya disebabkan pemasukan negara sangat rendah dikarenakan harga minyak dunia masih mengalami penurunan.

Ketiga, mega-proyek pemindahan ibu kota ini menjadi ancaman bom waktu terhadap kehidupan masyarakat adat Kalimantan Timur. Budaya Dayak akan berpotensi hilang seiring masuknya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan. Pembangunan ibu kota pasti akan menggusur masyarakat adat. Seperti diketahui, masyarakat adat setempat saat ini saja sudah mengalami penggusuran dan sering berkonflik dengan perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Keempat, pemindahan ibu kota mengancam kelestarian flora dan fauna endemik disana. Proyek pembangunan ibu kota di Kalimantan yang merupakan wilayah dengan ekosistem hutan yang

luas dan merupakan tempat berbagai macam flora dan fauna, pembukaan lahannya pasti dengan cara menebang, membabat habis bahkan membumihanguskan hutan demi efisiensi pembukaan lahan. Tindakan tersebut dapat mengancam bahkan bisa membunuh berbagai macam flora dan fauna yang ada di sana.

Kelima, dilihat dari dampak lingkungan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan berpotensi menimbulkan kerusakan alam di sana. Di daerah yang sudah berada di bawah tekanan parah dari deforestasi seperti Kalimantan, menghancurkan lahan gambut Kalimantan akan melepaskan sejumlah besar emisi. Lahan gambut yang dikeringkan sangat rentan dan berpotensi tinggi menimbulkan kebakaran dengan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius. Artinya, pembukaan hutan utuh dan lahan gambut dalam jumlah besar untuk pembangunan ibu kota baru akan mengundang munculnya bencana alam yang lebih besar.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG DAPAT DILAKUKAN

Dalam kajian fikih *siyasah*, terdapat kaidah "*menghilangkan mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*". Mencegah ke-*mafsadat*-an lebih baik daripada mengambil kemaslahatan untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Apabila mega-proyek ini tetap diteruskan, setidaknya ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah, di antaranya:

Pertama, membuat undang-undang baru terkait perlindungan hak masyarakat adat, serta memfasilitasi pemetaan wilayah adat di daerah calon ibu kota negara. Hal ini menjadi penting supaya eksistensi adat tidak pudar seiring pemindahan Ibu kota negara ke Kaltim.

Kedua, menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan. Melibatkan utusan masyarakat adat dalam seluruh penentuan kebijakan ibu kota negara, baik dalam persiapan hingga selama proses pembangunan.

Ketiga, menjamin bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah dan pusat harus memperhatikan keseimbangan agar masyarakat

adat dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan bangsanya.

Keempat, menyusun langkah strategis nasional berkaitan dengan dampak lingkungan yang diakibatkan pembangunan ibu kota terhadap ekosistem hutan Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. Selain itu, harus dilakukan penanaman kembali lahan-lahan gundul akibat pertambangan batu bara, serta relokasi flora dan fauna endemik Pulau Kalimantan.

Demikianlah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi ke-*mafsadat*-an yang ditimbulkan dari mega-proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Karena dalam hal mewujudkan kemaslahatan masyarakat, harus memperhatikan dan meminimalisasi mafsadah yang dapat terjadi.[]

MEMBACA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2021

Oleh: SULMA SAMKHATY MAGHFIROH

Tahun politik 2022 akan segera dimulai, tidak mengherankan jika rapor demokrasi Indonesia pada 2021 menjadi penting untuk dicermati sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan. Kali ini, rapor demokrasi Indonesia dipaparkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) dalam bentuk indeks demokrasi dunia. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, EIU bagian dari Economist Group atau The Economist Newspaper Limited, sebuah perusahaan media yang berkantor di Inggris, kembali merilis indeks demokrasi tahunan. Hal ini telah mereka lakukan sejak 2006 untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara, dimana Indonesia menjadi salah satunya.

Rapor dalam bentuk indeks demokrasi ini adalah rata-rata tertimbang berdasarkan jawaban dari 60 indikator pertanyaan yang dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: (1) Proses elektoral dan pluralisme; (2) Fungsi pemerintahan; (3)

Partisipasi politik; (4) Budaya politik dan (5) Kebebasan sipil. Dari lima kategori itulah, kemudian muncul empat klasifikasi demokrasi, yakni demokrasi penuh, demokrasi tidak sempurna, rezim hibrida, dan rezim otoritarian. Negara dengan demokrasi penuh seperti mayoritas negara di Eropa Barat, Kanada, Jepang, dan Korea Selatan. Adapun negara demokrasi tidak sempurna seperti Amerika Serikat dan Prancis. Untuk negara dengan rezim hibrida, contohnya Turki. Sedangkan untuk negara rezim otoritarian contohnya Korea Utara, Cina, Kuba, dan Iran. Oleh EIU, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori negara demokrasi tidak sempurna, dengan kata lain, Indonesia berada satu grup dengan Amerika Serikat dan Prancis.

Pada 2010, Indonesia berada di peringkat 60 dengan skor 6,53, pada 2011 stagnan di peringkat 60 dengan skor 6,53. Kemudian pada tahun 2012 Indonesia naik ke peringkat 53 dengan skor 6,76, yang kemudian turun ke peringkat 54 dengan skor 6,83 di tahun 2013. Peringkat demokrasi Indonesia kembali naik pada tahun 2014 dengan perolehan skor 6,95 di peringkat 49 dan kembali stagnan di tahun 2015 pada peringkat 49 dengan skor 7,03. Di tahun 2016 demokrasi Indonesia naik ke peringkat 48 dengan skor 6,97 dan kembali mengalami penurunan ke peringkat 68 dengan skor 6,39 di tahun 2017. Kemudian pada 2018 indeks demokrasi Indonesia kembali naik dengan skor 6,39 pada peringkat 65, disusul dengan skor 6,48 dan peringkat 64 di tahun 2019. Tahun 2020 rangking indeks demokrasi Indonesia stagnan di urutan 64 dengan skor 6,30. Barulah di tahun 2021, rangking Indonesia naik ke urutan 52 dengan skor 6,71.

Tahun 2021 posisi Indonesia naik secara signifikan dimana saat ini Indonesia berada di rangking 52 dengan skor 6,71 dari skala 0-10. Dengan kata lain, hari ini Indonesia berada di atas Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia berada di atas mayoritas negara di Asia dan juga di atas negara-negara Islam. Sebagai perbandingan, skor Turki hanya 4,35 dan Arab Saudi berada di skor 2,08. Namun, meski menempati peringkat ke 52 dari 167 negara, ternyata Indonesia masih berada di bawah skor dan peringkat dari Timor Leste

yang berada di peringkat ke 43 dengan skor 7,06 dan Malaysia yang berada di peringkat 39 dengan skor nilai 7,24.

Ada tiga kategori yang mengalami kenaikan pada indeks demokrasi Indonesia. Ketiga kategori itu adalah kategori keberfungsian pemerintah yang semula berada pada skor 7,50 di tahun 2020 menjadi 7,86 di tahun 2021. Kemudian kategori kebebasan sipil juga mengalami kenaikan dari skor semula 5,59 di tahun 2020 menjadi 6,18 di tahun 2021. Dan yang terakhir adalah pada kategori partisipasi politik yang melesat dari skor 6,11 pada tahun 2020 menjadi 7,22 di tahun 2021. Di samping itu, ada pula kategori yang stagnan dari indeks demokrasi Indonesia yakni pada proses elektoral dan pluralisme yang bergerak di skor 7,92 dan budaya politik yang tetap di skor 4,38.

Disinilah kesalingan memegang peranan penting dalam mengawal proses elektoral, pluralisme, serta budaya politik dalam demokrasi Indonesia. Pemilu yang Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya hubungan kesalingan antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat Indonesia.

Pun dengan pluralisme, dimana Indonesia sangatlah plural baik dari sisi suku, agama, ras, hingga golongan. Dari keragaman inilah toleransi akan lahir, dan secara pasti, toleransi tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada kesalingan di sana. Saling hormat-menghormati, saling berbuat baik, saling tolong-menolong, dsb. Dan ketika pluralisme telah berjalan semestinya, maka budaya politik yang sehat, yang berpegang pada ke-bhinneka-an, juga menghindari polarisasi dan perpecahan akan terbentuk. Dengan begitu, kita dapat memastikan rapor demokrasi Indonesia di tahun-tahun mendatang akan jauh lebih baik.[]

NUR HAYATI: Inspirasi Nasionalisme dari Seorang Perempuan

Oleh: **WAFIROH**

Perempuan adalah tiang negara. Baik-buruknya suatu negara tergantung kepada baik-buruknya perempuan (kalam hikmah Arab)

Ungkapan yang disinyalir oleh banyak pihak sebagai hadis tersebut, kerap digunakan untuk memberikan motivasi dan afirmasi positif kepada perempuan. Baik itu ceramah, seminar, konten media sosial atau nasihat para tokoh. Walaupun setelah proses *takhrij* oleh para ulama, ungkapan di atas terbukti sebagai hadis *maudu'* (palsu). Namun ungkapan tersebut tetap memiliki kandungan makna yang sangat dalam dan tentunya benar.

Kenapa begitu? Perempuan adalah madrasah pertama. Tiap generasi yang lahir akan belajar banyak hal pertama dari sosok ibu. Perilaku, cara bersikap dan pengetahuan dasar lainnya diperoleh dari seorang ibu. Selain itu, sekuat dan sehebat apa pun seorang laki-laki, dia memiliki sosok perempuan yang menjadi tempatnya 'pulang' dan alasan-

nya untuk berbuat banyak hal. Ada ibu, istri, anak perempuan dan saudara perempuan yang kerap menjadi alasan seorang laki-laki untuk bertindak.

Oleh karena itu, tak heran jika dari ibu yang serakah, akan lahir seorang koruptor; ibu yang pemaaf akan melahirkan anak yang toleran; ibu yang jujur dan pemberani akan melahirkan anak yang tak kalah jujur dan tegas dalam bertindak; dan sejumlah contoh lainnya. Pada tahap selanjutnya, generasi tersebut pulalah yang akan mengisi kehidupan dalam sebuah negara. Mulai dari pemimpin hingga rakyatnya, masing-masing mereka adalah generasi yang mengenyam didikan dan contoh perilaku pertama dari seorang perempuan: ibu. Di sinilah poin perempuan sebagai 'tiang'. Karena dari perempuanlah, pengetahuan dan perilaku dasar generasi sebuah negara terbentuk.

Melihat Indonesia dewasa ini, maka peran perempuan sebagai 'tiang' harus kita ilhami dengan lebih baik lagi. Memperbaiki kualitas perempuan dengan pendidikan maupun keterampilan yang berbasis karakter positif menjadi satu hal yang urgen. Alih-alih perempuan dimarginalkan, dibatasi pendidikannya dan sejumlah tindakan patriarkis lainnya.

Baru-baru ini, beredar berita tentang seorang perempuan yang bernama Nur Hayati yang berani menjadi pelapor dugaan korupsi kepala desa bernama Supriadi. Perempuan ini dengan berani menempatkan dirinya dalam posisi rentan namun sangat mulia. Korupsi yang merugikan uang negara sekitar 800 juta tersebut 'terendus' oleh pihak berwajib sedikit banyak karena peran yang diberikan oleh Nur Hayati.

Sayangnya, bukannya mendapatkan penghargaan (sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2018) karena telah berjasa membantu tugas pemerintah membasmi korupsi, Nur Hayati justru harus menelan kenyataan pahit. Tak dinyana, status tersangka korupsi justru disematkan kepada dirinya. Walaupun kini status tersebut telah dicabut kembali karena berbagai alasan (berkas tidak lengkap atau memang dihentikan oleh Menko Polhukam), namun masih

banyak hal yang tersisa untuk dijadikan pelajaran dari peristiwa ini. Khususnya pelajaran yang telah diberikan oleh Nur Hayati untuk diilhami dengan baik oleh perempuan lain maupun manusia secara umum tentunya. Berikut beberapa pelajaran yang penulis dapatkan:

1. KEBERANIAN UNTUK BERTINDAK

Sebagai seorang perempuan yang hidup dalam bangsa yang masih relatif misoginis, tindakan yang dilakukan Nur Hayati terlihat sangat berani. Dia tidak takut untuk dicaci maupun dimarginalkan lebih lanjut oleh lingkungan dan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Bahkan laki-laki yang ada dalam lingkungan yang sama dengannya, belum tentu berani melakukan hal yang sama.

Tindakan yang dipilih Nur Hayati ini sesuai dengan redaksi hadis riwayat Abu Daud: “jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim”. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa melakukan hal besar. Yaitu jihad mengatakan kebenaran sekalipun lawan yang dihadapi adalah atasan dan birokrasi yang bisa jadi tidak menguntungkan dirinya.

2. NASIONALISME

Melakukan hal-hal yang berpotensi mendatangkan kebaikan kepada negara, baik secara langsung ataupun tidak adalah gambaran dari sikap nasionalisme yang tinggi. Kesetiaan dan rasa cinta yang besar kepada negara yang pada tahap berikutnya diwujudkan dalam tindakan nyata (Bahan Ajar Pusdiklat BPS 2020. https://pusdiklat.bps.go.id). Sikap inilah yang sedang dicontohkan oleh Nur Hayati melalui tindakannya menjadi pelapor kasus korupsi—atau menjadi saksi menurut sumber berita lain.

Dapat dibayangkan andai sikap ini tidak dimiliki olehnya, maka dia akan memilih untuk diam dan mencari jalan aman untuk dirinya sendiri. Atau bahkan, dia akan ikut menikmati korupsi yang dilakukan atasannya. Alih-alih melakukan hal tersebut, Nur Hayati justru memilih untuk mempertahankan nasionalismenya yang dalam hal ini menjaga aset negara dari tangan-tangan yang tidak bertang-

gung jawab. Bahkan sebenarnya, penghargaan layak dia peroleh sebagaimana Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas.

Tindakan Nur Hayati ini, merupakan salah satu interpretasi dari tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi (Al-Baqarah ayat 30). Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi (juz 1 hal. 263) bahwa yang dimaksud sebagai khalifah adalah manusia dalam kaitannya sebagai pelaksana perintah dan larangan Allah Swt. Dalam peristiwa ini, aparat desa satu ini menjalankan tugasnya sebagai khalifah sebaik mungkin. Yaitu dengan usahanya untuk mencegah pencurian, pengkhianatan kepercayaan dan dusta yang ketiganya merupakan larangan Allah dan terangkum dalam tindakan korupsi.

3. AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Amar makruf nahi munkar adalah upaya menganjurkan kebaikan dan mencegah terjadinya pelanggaran (agama, sosial dan negara). Tindakan melaporkan tindak pidana korupsi, merupakan sebuah tindakan heroik yang masuk dalam kategori nahi munkar (mencegah pelanggaran). Perilaku ini juga merupakan perintah eksplisit sejumlah ayat dalam Al-Quran.

Term amar makruf nahi munkar disebutkan sekitar 9 kali dalam Al-Quran. Yaitu surat Ali Imron: 104, 110, 114, Al-A'raf: 157, At-Taubah 67, 71, 112, Al-Hajj 41 dan Luqman 17. Walaupun idealnya amar makruf hendaknya didahulukan daripada nahi munkar, namun keberanian untuk nahi munkar yang dilakukan Nur Hayati merupakan perilaku yang patut dicontoh. Apalagi, kita tidak tahu apakah langkah amar makruf sudah dilakukan olehnya atau belum. Karena yang belakangan viral di media sosial hanyalah pada poin nahi munkarnya saja.

Dari peristiwa Nur Hayati, kita dapat belajar banyak hal. Terutama bagi perempuan, peristiwa ini menjadi semacam *alert* bagi kita bahwa peran besar bahkan dalam skala 'menjaga negara' dapat dilakukan oleh perempuan. Namun tentunya dengan porsi kita masing-masing. Dari Nur Hayati pula, kita mendapatkan sosok inspiratif untuk belajar nasionalisme, khususnya dari seorang perempuan. *Allahu A'lam*.[]

ISLAM, PEREMPUAN, DAN POLITIK: Analisis Mubadalah terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Oleh: **IRFAN HIDAYAT**

Keterlibatan perempuan dalam ranah politik merupakan wacana yang masih menjadi isu utama di berbagai belahan dunia. Terlebih di negara yang sistem demokrasinya belum mapan seperti Indonesia, di mana budaya patriarki masih sangat kental. Wacana perempuan dan politik di Indonesia selalu memicu perdebatan sengit. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam kepentingan, mulai dari politik, historis, agama hingga budaya dan tradisi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (12-03-2022), perempuan Indonesia berjumlah hampir 50% dari total jumlah penduduk Indonesia. Akan tetapi, menurut data kemenpppa.go.id (27-02-2021), keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019.

Sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam segala bidang, termasuk politik. Hal itu terlihat dalam beberapa pasal yang membahas persoalan hak asasi dengan tidak adanya diksi yang membedakan jenis kelamin seseorang. Sebab, diksi yang sering digunakan dalam pasal di setiap undang-undang ialah 'warga negara'.

Misalnya, dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang secara jelas menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak serta mempunyai kedudukan setara di depan hukum.

Begitu juga dalam pasal yang mengatur tentang persyaratan menjadi presiden. Tidak pernah ada syarat yang membatasi hak perempuan untuk menjadi pemimpin negara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) Indonesia Tahun 1945, bahwa 'Presiden ialah warga negara Indonesia'.

Kedua pasal di atas mengandung dua ketentuan yang bersifat umum. *Pertama*, perempuan diperbolehkan menjadi presiden atau pemimpin politik. *Kedua*, kedudukan perempuan dan lelaki adalah setara di hadapan undang-undang. Dengan begitu, seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap peranan sosial dan politik terhadap kaum perempuan.

PERATURAN TENTANG KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA

Posisi perempuan dalam ranah politik di Indonesia mulai mendapat perhatian semenjak dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2003 yang mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 2008 hingga UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Sejak UU tersebut dikeluarkan, perempuan mulai ikut serta berkiprah dalam ranah politik di Indonesia.

Ketiga UU tersebut menjelaskan bahwa partai politik memuat keterwakilan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Selain itu, di dalam setiap tiga nama kandidat, setida-

knya terdapat paling sedikit satu kandidat perempuan (*Zipper System*).

Seiring berjalannya waktu, dikeluarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan perubahan terakhir dari ketiga UU Pemilu sebelumnya. UU tersebut juga mengamanatkan keterlibatan perempuan dalam ranah politik di Indonesia. Pasal 173 ayat 2 point (e) menjelaskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat.

Kemudian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2017 yang mengusulkan keterwakilan perempuan 30% diperluas hingga kabupaten/kota. Hal itu merupakan upaya KPU dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam ranah politik di Indonesia yang kemudian dipertahankan hingga Pemilu 2019 dengan dimasukkan kembali ke dalam PKPU Pemilu 2019.

Dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 8 Tahun 2012, hingga UU No. 7 Tahun 2017, dan PKPU No. 7 Tahun 2017 dan 2019 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam politik, seharusnya menjadi titik terang terhadap keterlibatan perempuan dalam ikut serta dan mengambil peran dalam gelanggang dunia politik di Indonesia. Namun, keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi dengan baik.

KEKURANGAN UU NO. 7 TAHUN 2017

Seperti sudah dijelaskan di atas, dalam UU No. 7 Tahun 2017 sudah diatur mengenai kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dan ketentuan satu orang perempuan dalam setiap tiga kandidat yang diajukan dalam daftar calon legislatif (*Zipper System*). Tujuannya ialah untuk meningkatkan peluang terpilihnya perempuan dalam legislatif.

Akan tetapi, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penentuan anggota DPR dipilih berdasarkan suara terbanyak, sehingga men-

jadi kontradiktif dengan pengaturan kuota minimal 30% untuk perempuan dan *zipper system* yang juga diatur dalam UU tersebut menjadi percuma dan tidak berjalan dengan baik karena mekanisme akhir yang digunakan tetap dengan suara terbanyak.

Apabila sistem suara terbanyak ini tetap diberlakukan dalam setiap gelaran pemilu di Indonesia, maka upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif tetap saja memiliki peluang yang sangat kecil. Hal itu bisa dilihat dari data suara hasil pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun dengan perolehan suara terbanyak mayoritas laki-laki. Padahal, lembaga legislatif seharusnya menjadi representasi masyarakat untuk semua kalangan termasuk perempuan.

BEBERAPA PERMASALAHAN LAIN

Nur Asikin Thalib (2014), dalam karyanya berjudul: "Hak Politik Perempuan Pasca-Putusan MK", menjelaskan bahwa penerapan *zipper system* dan pengaturan kuota minimal 30% untuk perempuan menjadi tidak efektif karena sistem proporsional terbuka. Penentuan keterpilihan dari suara terbanyak yang ditekankan Putusan MK 22-24/PUU-VI/2008 membuat peluang calon legislatif perempuan terpilih menjadi lebih kecil.

Selain itu, keadaan masyarakat Indonesia yang masih patriarkis juga menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia. Meskipun partai politik sudah mengusung perempuan lebih dari 30% dalam pencalonan *zipper system* dalam pemilu proporsional terbuka, tetapi jika masyarakat sebagai pemilih belum ramah perempuan, keterpilihan perempuan minimal 30% di DPR belum mampu tercapai secara maksimal.

Mentari A. Ramadhianty dalam opininya di rumahpemilu.org (08-03-2021), mengungkapkan data penelitian dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) 2010 yang menjelaskan persepsi masyarakat Indonesia terhadap kandidat perwakilan perempuan. Masyarakat sebagai pemilih calon memiliki beberapa

pertimbangan. 35% masyarakat memilih berdasarkan kecerdasan (*intelligence*), 26% berdasarkan pengetahuan status calon yang bebas dari korupsi (*lack of corruption*), dan 20% berdasarkan pengalaman berpolitik (*experiences in politics*).

KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK PERSPEKTIF MUBADALAH

Dalam tulisan ini, penulis hendak menggunakan mubadalah sebagai pisau analisis terhadap efektivitas UU No. 7 Tahun 2017 dalam hal keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia.

Faqihuddin Abdul Kodir (2019), dalam *Qira'ah Mubadalah* menjelaskan bahwa di ruang publik, termasuk wilayah politik, konsep mubadalah meniscayakan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara di mata hukum. Sehingga, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga perlu diberikan kesempatan yang luas supaya bisa berkontribusi dalam dunia politik dan mengambil manfaat darinya. Seperti dijelaskan dalam QS. at-Taubah ayat 71, bahwa laki-laki dan perempuan didorong untuk berkiprah dalam kerja-kerja yang dapat menghadirkan kebaikan (amar makruf) dan menghindarkan keburukan (nahi munkar) dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik.

Dalam konsep mubadalah, kemampuan dan kapasitas setiap individu, laki-laki dan perempuan, haruslah diperhatikan. Tetapi secara prinsip, salah satu jenis kelamin tidak boleh dibebani dari salah satu ruang (publik/domestik) tersebut sendirian, atau memperoleh manfaatnya sendirian.

Konsep mubadalah pada intinya menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek yang setara di hadapan teks-teks otoritatif, termasuk teks dan kaidah yang membicarakan rumusan mengenai kemaslahatan publik.

Dalam hal keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2017, jika dilihat dari perspektif mubadalah, maka UU tersebut belum mampu menciptakan ataupun menjaga kemaslahatan publik dalam hal kesetaraan gender. Hal itu bisa dilihat dari belum maksimalnya keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif (DPR-RI) atau dalam jabatan politik lainnya dikarenakan belum sempurnanya UU Pemilu itu sendiri.

Selain itu, kepemimpinan yang baik dalam konsep mubadalah adalah kepemimpinan yang secara substansi mendasarkan pada kerja sama, kepercayaan, kebersamaan, dan apresiasi. Bukan berdasar pada autoritarianisme, hegemoni kekuasaan, dan ketakutan seperti kebanyakan kepemimpinan politik dalam budaya patriarki.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (2019), kepemimpinan yang baik ialah yang mampu memberikan ruang yang nyaman bagi laki-laki dan perempuan untuk berekspresi dan berpartisipasi secara maksimal demi menghadirkan kebaikan bagi masyarakat.

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN

Seperti sudah dijelaskan di atas, UU No. 7 Tahun 2017 secara substansi materi masih belum mampu mengatur secara efektif terkait keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam ranah politik di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender dalam politik di Indonesia. Bagi penulis, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah harus membuat pengaturan baru yang lebih jelas dan lengkap untuk menjamin keterlibatan perempuan dalam politik, baik itu berupa kebijakan baru, ataupun program khusus dari pemerintah dalam bentuk *affirmative action.*

Kedua, sebagai implementasi dari konsep mubadalah, hak politik perempuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 harus diikuti dengan 'sistem nomor urut dari hulu ke hilir'. Artinya, harus mampu mengombinasi antara mekanisme internal dan eksternal Parpol, yaitu

pencalonan dan penempatan daftar calon serta dukungan konstituen dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Ketiga, untuk mengoptimalkan *zipper system* serta kuota minimal 30% untuk perempuan seperti tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017, diperlukan kedisiplinan partai politik terhadap komitmen kuota gender dengan *zipper system* serta penyadaran masyarakat untuk memilih caleg perempuan dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR.[]

PRESIDEN RI TIGA PERIODE: Potensi Mafsadat dari Propaganda Politik di Media

Oleh: **IRFAN HIDAYAT**

Wacana terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indoneia (RI) bukanlah fenomena baru. Tahun 2019 yang lalu, guru besar Hukum Tata Negara IPDN, Prof. Juanda mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode, seperti dilansir sindonews.com (01-12-2019). Selain itu, dilansir dari okezone.com (18-08-2010), juru bicara Partai Demokrat saat itu, Ruhut Sitompul, melontarkan usulan agar masa jabatan presiden diperpanjang atau menjadi lebih dari dua periode.

Kemudian, dilansir dari kompas.com (23-11-2019), wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI juga sempat diusulkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid yang menyebutkan bahwa secara informal, ada anggota fraksi di MPR yang mengusulkan jabatan presiden dapat kembali dipilih sebanyak tiga periode.

Lalu, dilansir dari tempo.co (19-06-2021), sejak awal Juni tahun 2021, penasihat Jok-Pro 2024 sekaligus Direktur eksekutif lembaga survei Indo Barometer, M. Qodari memunculkan gagasan Jokowi tiga periode. Qodari optimis dengan diberlakukannya masa jabatan presiden selama tiga periode dapat mengurangi dampak buruk dari polarisasi politik.

Tidak berhenti di situ, yang masih hangat dan menjadi perbincangan publik, khususnya di media sosial ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden RI menjadi tiga periode, seperti dilansir kabar24.bisnis.com (13-03-2022).

Meskipun wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah ditolak oleh Presiden Jokowi secara langsung, akan tetapi isu ini terus menguat dan memanas di berbagai media, baik televisi, media online, media cetak, hingga media sosial yang kemudian menuai pro-kontra di kalangan masyarakat.

SEJARAH KONSTITUSI PENGATURAN BATASAN MASA JABATAN PRESIDEN YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

Pada mulanya, ketentuan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Menurut Q. Dina Latansa (2019), dalam jurnalnya yang berjudul “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, Pasal tentang masa jabatan presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi sehingga ada peluang seorang presiden dapat menjabat terus-menerus sebagaimana yang dilakukan Ir. Sukarno dan Soeharto.

Selain itu, Menurut Putera Astomo (2014), dalam *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik*, ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 juga pernah dilakukan penyimpangan secara terang-terangan. Pada tahun 1963, MPR Sementara RI melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indo-

nesia menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup dengan jelas menyatakan Ir. Sukarno menjadi Presiden RI seumur hidup.

Kemudian, pergantian konstitusi negara dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) tahun 1949 menimbulkan berbagai perbedaan, di antaranya ialah tidak adanya pengaturan masa jabatan presiden. Hal tersebut dapat dipahami karena sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia pada masa KRIS 1949 ialah sistem parlementer.

Selain itu, di masa KRIS 1949, Indonesia tidak menggunakan jabatan wakil presiden sebagai atribut federal negara. Hal itu kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) KRIS 1949 yang memberikan kewenangan atributif terhadap perdana menteri dalam menjalankan pekerjaan presiden ketika sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Kemudian, dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 juga tidak ditemukan pengaturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Bedanya, dalam UUDS 1950 dikenal kembali jabatan wakil presiden.

Menurut Darmini Roza (2021), dalam jurnalnya yang berjudul: "Prospek Amandemen Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024", tidak adanya pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UUDS 1950 disebabkan sistem pemerintahan yang dianut dalam UUDS 1950 masih sistem parlementer dengan menempatkan presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat.

Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Sejak saat itu, kedudukan dan peranan Presiden RI dalam berbagai bidang kehidupan sangat dominan. Momentum kembali terpilihnya Soeharto untuk ketujuh kalinya pada tahun 1997 kala itu memicu demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan reformasi dalam segala bidang, termasuk perubahan terhadap UUD 1945, khususnya terkait Pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Hingga dalam Rapat Paripurna Sidang Umum MPR ke-12 tanggal 19 Oktober 1999, rancangan rumusan Pasal 7 UUD 1945 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama. Hasil rapat tersebut di antaranya ialah mengatur kembali masa jabatan presiden selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

PROPAGANDA POLITIK MEDIA

Mencuatnya wacana masa jabatan presiden tiga periode di berbagai media merupakan suatu propaganda politik. Meskipun masih dalam bentuk wacana, namun hal tersebut sudah banyak memunculkan berbagai tanggapan atau argumen dari para elite politik dan masyarakat di Indonesia, baik pro maupun kontra.

Meilan Suzity (2021), dalam skripsinya berjudul: "Propaganda Politik di Media Sosial Twitter - Wacana Kekuasaan Masa Jabatan Presiden 3 Periode", menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 5 metode yang digunakan dalam propaganda politik media terkait dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Pertama, propaganda dan bahasa dalam wacana (*glittering generalities*). Dalam penggiringan opini di media, bahasa dan propaganda politik mempunyai hubungan erat. Supaya masyarakat percaya terhadap opini tersebut, yang dijadikan sebagai suatu komoditas oleh pelaku propaganda ialah 'bahasa'. Diksi yang digunakan oleh pelaku propaganda ialah yang ada di dalam wacana kekuasaan masa jabatan presiden 3 periode ini.

Kedua, propaganda politik dan label (*name calling*). Pemberian label terhadap suatu kelompok atau seseorang sangat penting di dalam propaganda. Pemberian label yang tidak baik digunakan oleh pelaku propaganda secara terus-menerus agar publik percaya dengan label tersebut. Dalam propaganda politik di media terkait wacana masa jabatan presiden tiga periode, para pelaku propaganda membuat diksi menarik supaya orang dapat menolak wacana tanpa menguji kebenarannya.

Ketiga, simbol dan propaganda (*card stacking*). Propaganda politik yang terdapat di dalam wacana masa jabatan presiden tiga periode ialah ketika MPR menegaskan bahwa wacana tersebut bukan dari pihaknya, tetapi dari persepsi masyarakat atau publik. Hal itu dilakukan untuk menggiring persepsi masyarakat supaya mereka dapat membangun sebuah kasus sehingga publik percaya dengan apa yang mereka sampaikan.

Keempat, kebenaran tujuan (transfer). Di dalam propaganda politik media terkait wacana masa jabatan presiden tiga periode, terdapat beberapa kebenaran tujuan yang digunakan oleh pelaku propaganda. Di antaranya ialah partai-partai politik yang mereka gunakan. Melalui MPR yang menyatakan pernyataan seperti di atas, propaganda politik media dilakukan melalui identifikasi maksud dengan lambang otoritas yang mengandung nilai yang dialihkan kepada masyarakat umum untuk menerimanya.

Kelima, otoritas (testimonial). Di dalam propaganda media biasanya pelaku propaganda menggunakan kalimat-kalimat menarik sehingga publik percaya dengan apa yang telah disampaikan. Dengan menyebarkan wacana atau menciptakan peristiwa tertentu dan menanamkannya secara sistematis, komunikator dalam propaganda wacana masa jabatan presiden tiga periode ialah wakil dari organisasi yang berusaha melakukan pengontrolan terhadap masyarakat.

POTENSI MAFSADAT DALAM PROPAGANDA POLITIK WACANA MASA JABATAN PRESIDEN RI 3 PERIODE DI MEDIA

Islam hadir dalam upaya merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, serta berupaya menghilangkan segala macam kesulitan dan mafsadat. Fhaturrahman Djamil (2007), dalam *Filsafat Hukum Islam*, menjelaskan bahwa tujuan syariat Islam ialah menjaga, melestarikan serta mempertahankan lima unsur/kebutuhan pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*) di antaranya:

Pemeliharaan terhadap agama (*hifzh ad-di*n). Propaganda politik wacana masa jabatan Presiden RI 3 periode di media akan berdam-

pak negatif terhadap kehidupan beragama di tengah masyarakat, seperti munculnya konflik yang disebabkan fanatisme gerakan organisasi atau masyarakat berbasis agama. Setiap kelompok agama berusaha untuk mendukung pendapat mereka dan menghina kelompok agama lain karena tidak sependapat. Hal tersebut tidak bisa dimungkiri mengingat isu agama sering kali dijadikan senjata dalam propaganda politik di Indonesia.

Pemeliharaan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*). Propaganda politik wacana masa jabatan Presiden RI 3 periode di media telah memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Pertikaian di media sosial mulai bermunculan dari pihak pro maupun kontra. Apabila tidak disikapi dengan serius oleh negara, pertikaian terkait pro-kontra mengenai wacana masa jabatan Presiden RI 3 periode di media sosial ini akan berlanjut ke pertikaian masyarakat fisik.

Pemeliharaan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Propaganda politik wacana masa jabatan Presiden RI 3 periode di media dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan materi. Ekonomi sangat sensitif dan rentan terhadap informasi media yang merupakan sinyal terkait bagaimana para pelaku ekonomi bertindak.

Pemeliharaan terhadap akal (*hifdz al-aql*). Propaganda politik wacana masa jabatan Presiden RI 3 periode di media berdampak buruk bagi kesehatan mental. Dilansir dari kompas.com (08-10-2019), para psikolog sepakat bahwa berita palsu, temasuk propaganda politik di media, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti sindrom stres pasca-trauma (PTSD) yang menyebabkan kecemasan, hingga kekerasan.

Pemeliharaan terhadap keturunan/generasi (*hifzh an-nasl*). Propaganda politik wacana masa jabatan Presiden RI 3 periode di media dapat berdampak buruk terhadap anak-anak dan remaja. Penyebaran propaganda politik di media tanpa filter memungkinkan anak dan remaja mengakses informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, generassi muda akan

mudah terjerumus ke dalam sikap intoleransi, bahkan kebencian terhadap pihak atau kelompok tertentu.

Dari penguraian singkat di atas, pemerintah diharapkan dapat bertindak tegas terkait dengan fenomena propaganda politik di media terkait wacana masa jabatan Presiden RI 3 periode, atau wacana politik lain yang beredar di masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan serta keresahan yang terjadi, bukan malah menjadi pelaku propaganda.

Untuk itu, penulis bermaksud mengajak pembaca untuk lebih memilah dan memilih informasi yang dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan kebenarannya, dari informasi yang bertujuan untuk menyesatkan dan memberikan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang artinya:

> "*Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.*"[]

R.A. KARTINI, SOSOK PEREMPUAN INSPIRASI BANGSA

Oleh: **MOH. RIVALDI ABDUL**

"Memangnya, apa yang telah dilakukan oleh Kartini?" tanya orang-orang yang masih mempertanyakan kiprah Kartini.

Ada yang berpikir bahwa Kartini tidak mengangkat senjata melawan penjajah. Dia juga bukan pendiri organisasi pergerakan di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sosoknya tidak berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Terus, kenapa bisa Kartini menjadi pahlawan nasional, bahkan setiap tahun ada satu hari khusus untuk memperingati sosoknya?

Dengan tergesa-gesa sebagian orang menstigma bahwa Kartini hanya produk kolonial Hindia-Belanda yang telah dikenal sebelum kemerdekaan. Sehingga, pasca-kemerdekaan, tatkala Sukarno didesak soal kenapa belum ada pahlawan nasional yang perempuan, maka dipilih saja Kartini. Menurut golongan ini, kiprah Kartini sebenarnya biasa saja.

Kartini memang telah dikenal sebelum kemerdekaan Indonesia, dan penyebab utamanya adalah surat-suratnya. Pengumpulan surat Kartini, pasca dia meninggal, dilakukan oleh Tuan Abendanon. Orang Belanda itu mengumpulkan, mengurasi, dan menerbitkan surat-surat Kartini menjadi sebuah buku yang katanya diperuntukkan sebagai penggambaran kesuksesan Politik Etis Hindia-Belanda. Buku kumpulan surat Kartini diberi judul *Door Duisternis Tot Licht* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*.

Katakanlah, pengumpulan surat-surat Kartini sarat dengan kepentingan kolonial untuk mengampanyekan kesuksesan Politik Etis Hindia-Belanda. Namun, itu tidak serta-merta menjadikan Kartini sebagai produk Belanda. Dan, yang membuat buku Kartini laris manis di Eropa bukan semata karena kampanye kesuksesan Politik Etis, melainkan karena mereka yang membaca surat Kartini terkagum-kagum dengan gagasan kritis seorang perempuan dari negara jajahan. Buah pena Kartini berhasil menyugesti banyak pembaca akan kesadaran kemerdekaan dan keadilan untuk semua manusia.

PENA KARTINI UNTUK BANGSA INDONESIA

Jangan dikira surat-surat Kartini hanya memberi kekaguman pada orang-orang Eropa. Tidak. Banyak para pejuang kemerdekaan Indonesia yang mendapat semangat dan inspirasi bergerak dari membaca buku kumpulan surat Kartini. Satu di antaranya adalah Sujatin Kartowijono yang merupakan tokoh Sumpah Pemuda dan juga inisiator Kongres Perempuan Indonesia.

Hanna Rambe dalam *Sujatin Kartowijono: Mencari Makna Hidupku*, mengutip perkataan langsung dari Sujatin: "Pada waktu aku (Sujatin) gadis remaja... aku mendapat hadiah buku *Door Duisternis Tot Licht*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Habis Gelap Terbitlah Terang*.... Tak ada buku bacaan lain, di antara sekian buku bacaan yang pernah kunikmati, yang lebih berpengaruh kepadaku selain yang satu ini. Bukan saja menamatkannya, bahkan membacanya berulang kali." Sujatin juga berkata: "Cita-cita Kartini

merasuk ke dalam sukmaku. Aku ingin meneruskan perjuangannya yang terbengkalai karena maut (Kartini meninggal di usia muda)."

Nadya Karima Melati dalam *Membicarakan Feminisme*, menjelaskan bahwa ketika Indonesia masih berupa wilayah-wilayah kerajaan dan kesultanan, ide tentang sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan hadir dalam benak para pendiri bangsa Indonesia. Pemikiran R.A. Kartini melalui kumpulan surat-suratnya, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, adalah satu jalan bagi imajinasi kemerdekaan tersebut. Surat-surat Kartini menjadi buku wajib para *founding father* dan *mother*, karena kesadaran keperempuanan yang berasaskan kemanusiaan menjadi pencetus awal dari kesadaran kebangsaan.

Dari sini bisa dipahami bahwa meski Kartini tidak mengangkat senjata melawan penjajah, dan bukan pendiri sebuah organisasi pergerakan, namun banyak dari para pendiri bangsa yang menemukan spirit perjuangan lewat buah pena Kartini. Sehingga, bukan sesuatu yang aneh ketika diskursus kenapa belum ada sosok perempuan dalam daftar pahlawan nasional menyuat di era Sukarno, lantas para *founding father* dan *mother* memandang Kartini sebagai salah satu sosok yang tepat.

Dan peringatan Hari Kartini sejatinya adalah refleksi untuk mengingat pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya. Buah pena yang memberi imajinasi kepada para pendiri bangsa Indonesia akan kesadaran kemerdekaan dan kemanusiaan.

Kartini memang tidak pernah mengangkat bambu runcing, sebab perjuangan kemerdekaan yang dilakukannya adalah dengan pena. Surat-surat (tulisan) Kartini menjadikan namanya dikenang dalam sejarah bangsa Indonesia.

KARTINI DAN HADIRNYA TAFSIR AL-QURAN BAHASA JAWA

Selain itu, hal luar biasa yang dilakukan Kartini tidak hanya berhasil menyugesti para pembaca surat-suratnya akan kesadaran kemerdekaan, namun juga ada satu momen di mana lisan Kartini membangkitkan kesadaran Kiai Sholeh Darat untuk menulis tafsir

al-Quran dengan bahasa Jawa. Satu peristiwa yang tentu berpengaruh dalam khazanah tafsir Nusantara.

Dalam suratnya kepada Stella Zeehandelaar, Kartini pernah mengeluhkan bahwa dia tidak tahu makna al-Quran yang sering dibacanya: "Di sini, orang belajar al-Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Aku pikir adalah gila orang diajar membaca, tapi tidak diajar makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris, tapi tidak memberi artinya...."

Kerisauan Kartini yang tertuang dalam surat tersebut menemukan cahaya, ketika di rumah pamannya, Bupati Demak Pangeran Ario Hadiningrat, dia melihat pengajian Kiai Sholeh Darat yang sedang menguraikan tafsir surah al-Fatihah. Kartini pun menyempatkan diri mengikuti pengajian tersebut. Dia menyimak setiap makna ayat al-Fatihah yang disampaikan Kiai Sholeh Darat.

Setelah pengajian usai, Kartini meminta pamannya untuk bertemu dengan Pak Kiai. Dan, terjadilah dialog antara Kiai Sholeh Darat dengan Kartini.

Nur Said dalam *Politik Etis Kepahlawanan RA Kartini: Menguak Spiritualitisme Kartini yang Digelapkan* menguraikan isi dialog tersebut, sebagaimana dikutip dari Ajie Najmuddin:

"Kiai, perkenankan saya bertanya bagaimana hukumnya apabila seorang berilmu menyembunyikan ilmunya?" ucap Kartini.

"Kenapa Raden Ajeng bertanya begitu?" balas Kiai Sholeh Darat.

"Kiai, selama hidupku baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surah al-Fatihah.... Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku." Kiai Sholeh Darat tertegun mendengarnya dan mulai memahami apa yang dimaksud Kartini tentang menyembunyikan ilmu. Lanjut Kartini, "Bukan buatan rasa syukur hati ini kepada Allah. Namun, aku heran mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran al-Quran ke bahasa Jawa. Bukankah al-Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia?"

Dari pertemuan itu, Kiai Sholeh Darat terdorong untuk menulis tafsir al-Quran dalam bahasa Jawa. Mengingat, waktu itu Belanda

melarang (tidak mengizinkan) penerjemahan al-Quran ke bahasa Jawa, sehingga Kiai Sholeh Darat menggunakan aksara Arab-Melayu atau aksara Pegon dalam menyusun kitabnya. Kitab tersebut diberi judul *Faidhur Rahman,* yang konon merupakan kitab tafsir berbahasa Jawa pertama. Dan, pada momen pernikahan Kartini dengan R.M. Joyodiningrat, Bupati Rembang, Kiai Sholeh Darat menghadiahkan Kitab *Faidhur Rahman* kepada Kartini.

Bagaimana-pun Kartini bukan sosok yang biasa saja. Dia sosok perempuan yang telah menginspirasi bangsa. Hal itu tentu menjadikan sosoknya sangat pantas dikenang dalam sejarah Nusantara. Sebagaimana W.R. Supratman, dalam lagu *Ibu Kita Kartini*, bahwa sosok "...ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia."[]

***PRESIDENTIAL THRESHOLD* 0%:** Hilangnya *Maqashid al-Ammah* dan Sistem Presidensial Inefisien

Oleh: **IRFAN HIDAYAT**

Gotfridus Goris Seran (2013), dalam *Kamus Pemilu Populer: Kosakata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, menjelaskan bahwa *presidential threshold* adalah ambang batas perolehan suara yang harus didapatkan oleh partai politik dalam gelaran pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Artinya, *presidential threshold* menjadi syarat bagi seseorang untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden dalam pemilu.

Menjelang gelaran Pemilu 2024 mendatang, ambang batas terkait pencalonan presiden kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Perdebatannya pun seringkali muncul di media bahkan seolah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat.

Para pakar, pengamat politik, hingga politisi kembali menjadi tayangan utama media, mulai dari siaran TV nasional hingga media online. Masing-masing mengemukakan argumentasinya terkait angka yang relevan untuk kemudi-

an diterapkan sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden mendatang.

Pihak pendukung ambang batas pencalonan 0% beberapa kali mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dilansir dari republika.co.id (19-02-2022), ketentuan yang digugat ialah Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan: "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya".

Akan tetapi, MK beberapa kali menolak permohonan tersebut. Dilansir dari sindonews.com (24-02-2022), alasan MK menolaknya karena ambang batas pencalonan presiden merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembentuk undang-undang. Artinya, yang dapat mengajukan ambang batas 0% hanyalah DPR atau presiden. Menurut MK, pasal terkait ambang batas pencalonan merupakan *open legal policy* yang dapat diubah kapan saja oleh DPR.

Sebenarnya, ambang batas pencalonan 0% ini berdasar terhadap rujukan dari penerapan di negara lain. Misalnya di Amerika Serikat (AS) dan Prancis, tidak berlaku ambang batas pencalonan presiden seperti di Indonesia. Bahkan terdapat pencalonan presiden melalui jalur independen (non-partai) seperti di AS.

Pertanyaannya ialah, apakah ambang batas pencalonan 0% relevan diterapkan di Indonesia? Lalu apakah hal tersebut dapat menjadikan pemerintahan Indonesia lebih efektif serta dapat memperkuat sistem presidensial di republik ini? Atau justru malah merusaknya?

PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PRESIDENSIAL DAN FORMAT PEMILU AS, PRANCIS, DAN INDONESIA

Penerapan sistem presidensial dan format pemilu di Indonesia berbeda dengan di Amerika Serikat (AS). Dilansir dari *Desain Sistem Pe-*

milu: Buku Panduan Baru International IDEA" terbitan IDEA Institut (2016), meskipun sistem pemerintahan AS menggunakan presidensial murni, akan tetapi presidennya dipilih tidak secara langsung, yaitu oleh perwakilan (*electoral college*) yang ditentukan dengan sistem *First Past the Post* (FPTP) yang merupakan peraih suara terbanyak yang ditetapkan menjadi pemenang.

Selain itu, menurut Didik Supriyanto (2007), dalam *Demokrasi dan Pemilu*, pemilu legislatif di AS menggunakan sistem FPTP yang memunculkan kemungkinan penyederhanaan sistem partai menjadi sistem dua partai yang dominan. Sistem dua partai FPTP seperti di AS dianggap lebih relevan untuk menciptakan pemerintahan efektif.

Beda halnya dengan Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial tetapi memakai sistem multipartai dan sistem pemilu proporsional-representatif. Hasil pemilu dalam sistem seperti ini memungkinkan tidak adanya parpol yang menjadi mayoritas tunggal, sehingga, partai pemenang dalam pemilu harus membentuk koalisi apabila hendak mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Koalisi tersebut tidak lain untuk memenuhi syarat ambang batas 20% jumlah kursi DPR. Selain itu, supaya mendapatkan dukungan mayoritas di DPR jika pasangan calon (paslon) tersebut berhasil memenangkan pemilu.

Begitu juga dengan Prancis. Menurut Didik Supriyanto (2007), Prancis menganut sistem pemerintahan yang berbeda dengan Indonesia, yaitu semi-presidensial. Sistem ini menjadikan pemilihan pPresiden secara langsung oleh rakyat dengan metode *popular vote*. Akan tetapi, Prancis juga mempunyai perdana menteri yang bertanggung jawab terhadap presiden. Perdana menteri tersebut dipilih oleh parlemen.

Sistem yang digunakan Prancis ini memunculkan kemungkinan adanya *check and balancing* di antara lembaga pemerintahan untuk lebih efektif. Presiden mempunyai legitimasi kuat karena dipilih oleh rakyat secara langsung, bahkan kepentingan mayoritas di par-

lemen menjadi terwakilkan dengan adanya perdana menteri tersebut.

Format pemilu di Prancis juga menggunakan sistem yang memungkinkan penguatan presidensial. Pemilihan presiden dilakukan sekitar satu bulan sebelum pemilu legislatif. Presiden terpilih sangat berpengaruh terhadap pemilihan anggota parlemen, sehingga pemerintahan yang akan berjalan mempunyai dukungan dari mayoritas parlemen.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh format pemilu di Prancis yang menganut *Two Round System*, yang memberi peluang terhadap kandidat dari partai pengusung presiden terpilih untuk memperoleh banyak dukungan dari pemilih.

Kondisi tersebut berbeda dengan sistem dan format pemilu di Indonesia, yaitu sistem proporsional-representatif. Dukungan terhadap calon legislatif cenderung lebih stabil untuk berbagai parpol karena pola kandidat sentris. Hal itu juga membuat tidak adanya mayoritas tunggal dalam hasil pemilu di Indonesia.

PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% TERMASUK *MAQASHID AL-'AMMAH*

Saiful Ansori (2020) dalam "*Maqashid Syariah dan Praktik Sistem Presidential Threshold di Indonesia*", mengutip pemikiran Jasser Auda (seorang profesor hukum Islam yang berfokus terhadap kajian *Maqashid* Syariah), menjelaskan bahwa *maqashid al-'ammah*, merupakan *maqashid* yang bersifat universal yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'*, seperti keadilan, kesalingan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lain sebagainya.

Sistem *presidential threshold* 20% dalam pemilu di Indonesia termasuk ke dalam kategori *maqashid al-'ammah*. Hal ini dapat dilihat dari kemaslahatan yang ditimbulkannya termasuk ke dalam kategori *maqashid al-'ammah.* Di antaranya:

Pertama, *presidential threshold* 20% secara tidak langsung mengarahkan para parpol untuk berkoalisi dengan partai lain, sehingga sila keempat Pancasila terkait musyawarah mufakat dan juga prinsip *mu'syarah bil ma'ruf* lebih tecermin dengan tidak membiarkan

setiap partai politik mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Kedua, *presidential threshold* 20% juga akan mengatasi masalah multipartai pasca gelaran pemilu. Parpol akan membentuk dua poros (pengusung dan oposisi), sehingga masih memungkinkan terjadinya *check and balancing* sebagai upaya efektivitas berjalannya sistem pemerintahan.

Ketiga, *presidential threshold* 20% juga memberikan peluang terhadap setiap parpol untuk dapat mengusung calonnya menjadi presiden atau wakil presiden dengan melalui musyawarah atau koalisi dengan parpol lain. Artinya, seseorang dengan latar belakang partai minoritas masih memiliki peluang untuk menjadi presiden. Atau dengan kata lain, tidak hanya partai yang berkuasa yang dapat mencalonkan anggotanya menjadi presiden.

Maka apabila ambang batas 0% ini diberlakukan, akan berpotensi terhadap hilangnya *maqashid al-'ammah*. Sebagai contoh, jika terdapat 12 parpol, maka akan memunculkan 12 pasangan calon yang diusung. Hal ini mempersulit pemilih karena terlalu banyak calon yang muncul dalam pemilu.

AMBANG BATAS PENCALONAN 0% DAN SISTEM PRESIDENSIAL INEFISIEN

Di satu sisi, ambang batas pencalonan 0% memang berdampak positif bagi demokrasi. Sistem tersebut memberi kesempatan terhadap warga negara yang potensial untuk bisa ikut andil berkompetisi menjadi calon presiden atau wakil presiden di Indonesia.

Akan tetapi, apabila ambang batas pencalonan 0% diterapkan dalam sistem pemilu yang tidak tepat, maka dapat menimbulkan pemerintahan yang inefisien. Hal itu dikarenakan dapat menjadi penyebab pemerintahan terpecah-belah, bahkan bisa menjurus ke instabilitas politik di Indonesia.

Menurut Philipus Ngorang, seorang pengamat politik, pemberlakuan ambang batas pencalonan 0% juga berpotensi memperparah terjadinya politik uang, seperti dilansir populis.id (15-02-2022),

mengingat siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai presiden hanya dengan modal banyak uang.

Ambang batas pencalonan presiden 0% lebih relevan jika diterapkan dalam sistem pemilu mayoritarian, khususnya di negara yang menganut sistem *first past the post* dan *two round system*. Sistem ini telah berhasil menciptakan mayoritas tunggal di parlemen setidaknya pada dua negara demokrasi seperti di AS dan Prancis dengan sistem pemerintahan presidensial yang cukup efektif.

Sebaliknya, *presidential threshold* 20% seperti di Indonesia memungkinkan terciptanya sistem presidensial yang efektif. Dengan terkondisikan parpol untuk dapat berkoalisi pada pra-pemilu, sistem presidensial Indonesia menjadi terjaga agar bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Pemilu.

Selain itu, presidential threshold 20% juga bertujuan supaya pembentukan koalisi mayoritas pendukung presiden di DPR dapat terbentuk sebagai antisipasi terjadinya pemerintahan yang terbelah.

Apabila dipaksakan pada sistem multipartai dan sistem pemilu proporsional-representatif seperti di Indonesia, ambang batas pencalonan 0% pada pencalonan presiden dapat menjadi penyebab praktik ‘politik belah bambu’ bagi parpol yang menjadi oposisi pasca pelaksanaan pemilu apabila presiden dan wakil presiden terpilih berasal dari parpol minoritas.[]

EMPAT ALASAN BAHASA INDONESIA LAYAK MENJADI BAHASA RESMI ASEAN

Oleh: **SULMA SAMKHATY MAGHFIROH**

"Kami juga setuju dan berterima kasih kepada Presiden karena setuju dengan Malaysia untuk memperkuat bahasa Melayu, bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun... Jadi kami sepakat, siap dengan antarbangsa. Saya, seperti Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi kita dan kita sepakat bahwa jika kita bekerja sama untuk memperkuat bahasa rumpun Melayu ini, bahasa rumpun Melayu, mungkin suatu saat bisa dijadikan bahasa ASEAN." Begitulah penggalan pernyataan Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia dalam keterangan pers bersama dengan Presiden Joko Widodo di kanal YouTube Sekretariat Presiden yang telah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia pada Jum'at 1 April 2022.

Namun, menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, pernyataan dari PM Ismail Sabri Yaakob hanyalah sebuah bentuk usulan yang

masih memerlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan tertulisnya yang dilansir dari laman resmi milik Kemendikbudristek. “Saya sebagai Mendikbudristek, tentu menolak usulan tersebut. Namun, karena ada keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional. Saya imbau seluruh masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus berdayakan dan bela bahasa Indonesia”. Jika mencermati pernyataan Menteri Luar Negeri RI dan Mendikbudristek RI sangat jelas bahwa keduanya berpendapat bahwa pernyataan PM Malaysia baru bersifat usulan bukan ketetapan.

Menurut Nadiem, bahasa Indonesia lebih layak untuk dikedepankan sebagai bahasa resmi ASEAN dengan mempertimbangkan keunggulannya pada historis, hukum, dan linguistik. Ada empat alasan bahasa Indonesia layak untuk dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN, yaitu:

Pertama, di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan penyebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Menurut Statista, salah satu portal data dan statistik paling terkenal yang berasal dari Jerman, jumlah penduduk Indonesia pada 2021 adalah 272,25 juta jiwa bahkan proyeksi populasi ini diperkirakan menjadi 274,86 juta pada 2022. Sedangkan jumlah populasi warga ASEAN adalah 665,30 juta jiwa pada 2021, hal ini berarti 40,92% dari penduduk ASEAN adalah penduduk Indonesia yang juga penutur bahasa Indonesia. Menjadi sangat layak jika bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN, mengingat jumlah penuturnya paling banyak jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Kedua, pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat

BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Sebagaimana kita ketahui, BIPA bertujuan untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, menyampaikan informasi tentang Indonesia, termasuk memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia. Dengan kata lain, BIPA memiliki peran yang besar sebagai penunjang keberhasilan diplomasi kebahasaan Indonesia di dunia internasional.

Ketiga, bahasa Indonesia telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Bukan tanpa alasan mengapa bahasa Indonesia dijadikan salah satu mata kuliah di sana. Karena bagaimanapun di kalangan akademisi, bahasa Indonesia diperlukan untuk menunjang kerja sama riset dan pendidikan tinggi antaruniversitas negara tersebut. Bahkan dengan bahasa Indonesia, hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara sahabat menjadi meningkat.

Keempat, bahasa Indonesia diperkuat dengan payung hukum dari undang-undang dan peraturan-peraturan hukum. Sebagaimana telah tertuang dalam UUD RI Pasal 36, bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Juga dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal ini kemudian diperjelas dan diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi bahasa Indonesia. Kemendikbud juga mengambil perannya dalam memperkuat bahasa Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional kebahasaan dan Kesastraan. Tidak hanya itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan bahasa Indonesia juga turut memperkuat legalitas bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia terbukti memiliki penutur terbanyak di antara negara-negara ASEAN lainnya, bahkan ada 428 lembaga yang telah menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), yang menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia diminati oleh banyak penutur asing. Selain itu, bahasa Indonesia telah men-

jadi salah satu mata kuliah yang diajarkan di berbagai universitas Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Asia, sehingga kemajuan dan kerja sama akademik, riset, perdagangan, hingga investasi menjadi peluang besar yang tidak terbantahkan. Selain itu, payung hukum yang melindungi dan melestarikan bahasa Indonesia sudah ada dan sangat kuat. Bukankah ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sangat layak untuk dijadikan bahasa resmi ASEAN?[]

ALASAN KENAPA PEMILU ONLINE BELUM SIAP DILAKSANAKAN DI INDONESIA

Oleh: **IRFAN HIDAYAT**

Menjelang gelaran pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang, beberapa perdebatan mengenai sistem pemilu mulai mencuat diperbincangkan di media. Pro-kontra mengenai sistem *E-Voting* dalam pemungutan suara, hingga yang terbaru adalah terkait rencana penerapan sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai perbaruan sistem pendaftaran partai politik sebagai peserta dalam pesta demokrasi, masih menjadi perbincangan hangat.

Salah satu yang paling menarik, bagi saya, ialah usulan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate terkait *E-voting* pemilu yang disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Maret 2022.

Secara sekilas, usulan tersebut tampak menjanjikan dan sangat tepat, mengingat kondisi Indonesia yang masih di-

landa pandemi Covid-19. Apalagi, gagasan pemilu *online* juga didukung dengan argumentasi efisiensi anggaran biaya hingga terkait pencegahan akan munculnya korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Gagasan pemilu *online* sebenarnya patut untuk diapresiasi sebagai salah satu alternatif terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pemilu *online* memang menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan pemilu *offline* atau manual, salah satunya ialah pengurangan anggaran biaya cetak dan distribusi surat suara.

Selain itu, menurut Policy Paper International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Institut: 2011), pelaksanaan pemilu secara *online* juga memungkinkan proses tabulasi serta perhitungan suara yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan secara manual.

Akan tetapi, apakah kemudian implementasi pemungutan suara *online* pada gelaran Pemilu 2024 mendatang merupakan kebijakan yang tepat?

BEBERAPA PERSOALAN

Selain memiliki beberapa kelebihan seperti di atas, gagasan pemilu *online* juga memiliki beberapa kelemahan. Apalagi diterapkan di negara sebesar Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia yang memiliki persoalan serta tantangan pelaksanaan pemilu *online* yang begitu kompleks, di antaranya:

Pertama, kesenjangan digital di Indonesia masih sangat tinggi. Smith (2002) dalam *Digital Corporate Citizenship*, mendefinisikan kesenjangan digital (*digital divide*) merupakan perbedaan antara individu satu dengan lain dalam hal kepemilikan atau hak akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan kata lain, kesenjangan digital merupakan keadaan di mana akses terhadap layanan internet yang tidak merata.

Kesenjangan digital di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup serius, khususnya terkait kondisi infrastruktur digital di In-

donesia yang tidak merata di daerah-daerah. Padahal, di lain sisi, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII: 2021), penetrasi internet secara signifikan mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir.

Kedua, Indonesia belum memiliki pengalaman dalam mengadakan pemilu *online* di tingkat daerah, seperti pilkada. Padahal, Pemilu 2024 merupakan pemilu yang gigantis, yang terdiri dari beberapa pemilu. Artinya, dalam pelaksanaannya, dibutuhkan persiapan yang maksimal dan juga efisien.

Dalam Pemilu 2024 mendatang, beberapa pemilu akan dilangsungkan, di antaranya yaitu pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR pusat, daerah, hingga Pilkada serentak untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota. Sedangkan, satu-satunya pengalaman pemilu *online* yang pernah dilakukan di Indonesia baru di tingkat desa, yaitu pilkades pada 2019 lalu melalui sistem dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Ketiga, pemilu *online* memunculkan risiko peretasan yang cukup tinggi. Terdapat suatu ungkapan '*no system is safe*' di dunia digital. Hal ini menjadi penting mengingat rentannya peretasan sistem pemilu *online* oleh orang luar, atau bahkan oleh orang dalam yang memiliki akses terhadap keamanan sistem tersebut.

Meskipun Indonesia telah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan tugas keamanan siber, tetapi situs BSSN juga pernah diretas oleh *hacker* secara memalukan pada tahun lalu. Artinya, Indonesia belum memiliki keamanan sistem pemilu *online* yang efektif.

ANALISIS *MUBADALAH* TERKAIT WACANA PEMILU *ONLINE* 2024 TERHADAP KEMASLAHATAN PUBLIK

Wacana pemilu *online* pada 2024 mendatang harus dipertimbangkan secara maksimal dan cermat. Apabila dilihat dari perspektif *mubadalah*, maka setiap kebijakan publik haruslah berdasar kemaslahatan publik. Seperti dalam *Qiraah Mubadalah* (2019) karya

Faqihudin Abdul Kodir, bahwa dalam hal kemaslahatan publik, terdapat suatu kaidah fikih yang berbunyi *"tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah".*

Kemaslahatan publik dalam perspektif *mubadalah* harus benar-benar memberikan dampak positif yang besar terhadap seluruh masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip:

Pertama, memberikan perlindungan dan jaminan kemaslahatan terhadap orang-orang lemah, miskin, termarginal, rentan, tertinggal, dan minoritas. *Kedua*, memastikan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus yang bersifat '*qodrati*'. *Ketiga*, partisipasi dari kaum *marginal* tadi dalam perumusuan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan supaya manfaat yang akan mereka terima benar-benar nyata.

Berangkat dari perspektif *mubadalah*, maka gagasan pemilu *online* pada gelaran pemilu 2024 masih belum siap dalam menciptakan kemaslahatan publik. Masih banyaknya '*digital divide*', minimnya pengalaman, serta risiko yang cukup tinggi merupakan persoalan yang benar-benar harus dipertimbangkan.

LANTAS BAGAIMANA?

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan secara singkat tadi, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu terkait pelaksanaan pemilu *online* di lingkup daerah sebelum nanti diterapkan pada gelaran pemilu nasional. Upaya tersebut dapat dimulai di daerah yang telah memiliki 'ekosistem digital' cukup mapan.

Kedua, pelaksanaan pemilu *online* tidak perlu dilakukan di seluruh daerah secara menyeluruh. Artinya, beberapa daerah tertentu tetap melakukan pemilu secara konvensional/manual. Hal itu dilakukan dengan cara mengakomodasi '*digital divide*' yang masih terjadi di Indonesia.

Di perkotaan yang memiliki infrastruktur digital yang baik dan memadai, pemilu *online* dapat digelar bahkan menjadi pilihan utama. Namun, bagi daerah pedesaan, terpencil, atau daerah-daerah perbatasan, pelaksanaan pemilu tetap dilakukan secara manual. Hal itu dilakukan mengingat persoalannya bukan hanya terkait kesenjangan infrastruktur, melainkan juga literasi digital.

Ketiga, sebelum beranjak lebih jauh pada wacana pemilu *online*, hal yang paling penting sebenarnya adalah kepercayaan publik (*public trust*) yang harus dibangun oleh negara. *Public trust* merupakan hal yang mutlak dibutuhkan, mengingat pemilu *online* sering kali mendapat penolakan karena dinilai lemah dalam sisi transparansi serta rawannya peretasan.

Selain itu, yang tak kalah penting, negara juga harus melakukan persiapan matang terkait landasan yuridis dengan melakukan perubahan terhadap berbagai regulasi perundang-undangan yang mengatur sistem kepemiluan.

Maka dari itu, menurut penulis, memulainya secara evolusioner, bertahap, merupakan langkah yang paling efektif dan rasional. Bukan dengan memaksakannya secara drastis. Penyelenggaraan pemilu yang baik bukan terkait dengan banyak tidaknya pemanfaatan teknologi digital.

Esensi pemilu yang baik terletak pada pemenuhan prinsip utama dari pemilu, yaitu bebas, jujur dan adil, serta berintegritas. Selain itu, setiap kebijakan publik harus mampu menghadirkan kemaslahatan publik. Jangan sampai dengan dipaksakannya pelaksanaan pemilu *online* yang digadangkan lebih praktis dan efisien, justru malah mengabaikan prinsip utama dari pemilu itu sendiri.[]

MELIHAT RELASI GENDER DENGAN KACAMATA BUDAYA NUSANTARA

Oleh: **MOH. RIVALDI ABDUL**

Tiap masyarakat itu unik. Masing-masing memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khas. Masyarakat Barat dan Nusantara tentu memiliki kebudayaan (keunikan) masing-masing, dan bukan tidak mungkin juga memiliki kekhasan paradigma dalam hal relasi perempuan dan laki-laki.

Signe Howell dalam "*Ethnography*", menjelaskan bahwa upaya memahami masyarakat adalah '*...to achieve an understanding of local knowledge, values, and practices 'from the native's point of view*' (mencapai pemahaman terhadap pengetahuan, nilai, dan praktik lokal 'dari sudut pandang masyarakat asli')." Jadi, dalam konteks ini, paradigma masyarakat Nusantara penting untuk dipahami dalam upaya mempribumikan feminisme.

Meski harus diakui bahwa memahami konsep relasi dalam kearifan Nusantara termasuk upaya yang sulit. Sebagaimana Nadya Karima Melati dalam *Membicarakan Femi-*

nisme menjelaskan, "Harus saya akui, memahami konsep kekuasaan dan keluarga dalam tradisi Jawa dengan cara berpikir dari abad ke-21 sangat menjebak. Salah membaca, saya bisa menganggap hal-hal tertentu bernilai patriarkis dan merendahkan peran domestik dibanding peran maskulin." Sehingga, dalam upaya mempribumikan feminisme perlu hati-hati dalam membaca konsep relasi gender di Nusantara.

Penjelasan Wasisto Raharjo Jati dalam "*Wanita, Wani Ing Tata: Konstruksi Perempuan Jawa dalam Studi Poskolonialisme*," agaknya menarik ditelik dalam topik ini. Menurutnya, relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Jawa sebenarnya tidak subordinasi dengan memosisikan perempuan sebagai makhluk kelas dua, melainkan bersifat hubungan senioritas. Dalam hal ini, pria Jawa mendapatkan status sebagai "kakak" sedangkan wanita Jawa adalah "adik". Maka, dalam konstruksi kakak-adik, laki-laki menjalankan peran melindungi, menjaga, dan memuliakan kehormatan perempuan.

Sekilas paradigma ini tampak bagus. Hubungan senioritas dalam relasi menuntut laki-laki untuk memuliakan dan menjaga perempuan. Namun, paradigma ini menjadi bias, bahwa status laki-laki sebagai "kakak" perlu mendapatkan penghormatan dari perempuan yang dalam masyarakat statusnya hanya sebagai "adik". Dari sini konstruksi relasi tersebut banyak mengalami anomali makna budaya yang kemudian mengkristal pada bentuk subordinasi laki-laki terhadap perempuan. Sehingga, jika paradigma senioritas yang digunakan dalam relasi, maka modelnya bukan senioritas yang menuntut penghormatan satu pihak, melainkan senioritas yang menuntut upaya untuk saling menjaga dan memuliakan kedua pihak.

Jika dalam masyarakat Jawa terdapat konstruksi senioritas dalam relasi, pada masyarakat Bugis justru menekankan status sosial ketimbang status gender. Sebagaimana Nurul Ilmi Idrus dalam "*Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender, dan Relativisme Budaya di Indonesia*," mengulas karya S.B. Millar berjudul *On Interpreting*

Gender in Bugis Society, yang mendedahkan bahwa gender pada masyarakat Bugis tidak lebih penting daripada status sosial secara hierarkis. Jadi, status sosial lebih penting daripada klasifikasi gender.

Laki-laki dan perempuan distratifikasikan berdasarkan status sosial dan pencapaian diri bukan berdasarkan gender. Karena itu yang menjadi tolok ukur bukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, melainkan pencapaian diri dalam kehidupan. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya peluang untuk dapat eksis dengan berbagai capaian.

Dari dua model relasi yang telah dijelaskan, pada dasarnya, tidak ada yang memosisikan laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Sehingga, penting untuk dipahami adalah, dalam masyarakat Nusantara, posisi perempuan tidak lebih rendah daripada laki-laki. Sekalipun dalam model relasi senioritas yang dimaksud bukan perempuan dipandang lebih rendah, sehingga dituntut untuk hormat, melainkan pembagian peran dalam upaya saling menjaga dan memuliakan kedua pihak.

Selain itu, eksistensi diri manusia bukan ditentukan pada jenis kelamin, melainkan pada pencapaian diri dalam kehidupan. Maka, sebagaimana laki-laki yang dapat eksis dengan ragam prestasi, perempuan juga seharusnya memiliki peluang untuk berkarya.[]

FEMINISME NUSANTARA, MUNGKINKAH?

Oleh: MOH. RIVALDI ABDUL

Pada beberapa tulisan sebelumnya, saya sering kali menyuarakan untuk mempribumikan feminisme, atau menggali konsep kesetaraan gender dari khazanah Nusantara. Upaya ini bisa dibilang sebagai kerja mendiskusikan konsep "feminisme Nusantara".

Tentu saja pembaca bisa bertanya, meragukan, bahkan bersikap keberatan dengan pemikiran ini: "Mungkinkah menggali relasi kesetaraan gender dari khazanah Nusantara dan merumuskan konsep feminisme Nusantara?"

Ah, kalaupun mungkin: "Memangnya untuk apa ada konsep feminisme Nusantara?"

Dalam tulisan ini, saya akan coba menjawab pertanyaan pertama, dan untuk pertanyaan kedua akan coba saya jawab pada tulisan selanjutnya. Meski, sebenarnya jawaban dua pertanyaan tersebut sudah saya tuangkan dalam tulisan-tulisan sebelumnya, dan tentu juga masih akan saya bahas

pada tulisan berikutnya, seputar mempribumikan feminisme. Sebab, satu esai jelas belum cukup untuk mendiskusikan feminisme Nusantara.

Mendiskusikan feminisme Nusantara merupakan upaya untuk mempribumikan feminisme dan juga melihat relasi gender dari kacamata Nusantara. Sehingga, tetap menjadi pribumi yang maju dengan pemikiran kesetaraan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai ke-Nusantara-an.

Kalau dalam feminisme Islam, sebagaimana Hasanatul Jannah dalam *Ulama Perempuan Madura* menjelaskan, feminis Muslim dengan spirit kesetaraan mengkaji ulang ajaran Islam dengan merujuk pada sumber-sumber utama Islam. Maka, dalam feminisme Nusantara kajian kesetaraan gender merujuk pada sumber khazanah Nusantara.

Apakah hal ini mungkin dilakukan? Mengingat kebudayaan Nusantara sering dilekatkan dengan stigma sebagai *setting* sosial yang patriarki, tidak memberi ruang terhadap perempuan, dan berbagai stigma lain yang seakan meragukan Nusantara punya khazanah kesetaraan gender.

Memang tidak dapat dimungkiri bahwa ada kebiasaan di Nusantara yang tidak ramah perempuan. Kebiasaan yang lekat dengan patriarki. Misalnya, kebiasaan menikah dini yang dilanggengkan oleh sebagian oknum Nusantara. Ini jelas tidak baik, dan perlu ada upaya pencegahan. Saya menyebut ini kebiasaan, bukan budaya maupun tradisi Nusantara, sebab sikap seperti ini lebih tepat disebut sebagai perilaku "oknum" Nusantara dan bukan budaya masyarakat Nusantara.

Adanya kebiasaan oknum Nusantara yang tidak ramah perempuan bukan berarti kita bisa mengecap bahwa setiap budaya Nusantara pasti ujub-ujub adalah patriarki. Sebab, jika menelik sejarah dan coba memahami berbagai budaya Nusantara dengan lebih mendalam, maka akan tampak kalau sosial budaya Nusantara sejatinya memberi ruang, menghargai, dan memuliakan perempuan.

Sehingga tidak heran jika banyak perempuan Nusantara yang tampil sebagai sosok pemimpin seperti Sultanah Safiatuddin Tajul Alam Syah, sebagai ulama layaknya Rangkayo Rahmah El Yunusiyah, sebagai pejuang dan pemikir misalnya Sujatin Kartowijono, dan perempuan lain yang mewarnai bidang penting dalam perjalanan bangsa ini.

Ini tentu menggambarkan bahwa sejatinya sosial budaya Nusantara tidak membatasi ruang gerak perempuan. Ada kesetaraan gender dalam budaya Nusantara. Perspektif budaya Nusantara tidak memandang perempuan sebagai *the second sex* atau makhluk yang dipandang sekadar alat untuk memproduksi manusia, melainkan memosisikan dan menghargai perempuan sebagai manusia layaknya laki-laki sehingga punya peluang setara untuk berkarya.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan Nadya Karima Melati dalam *Membicarakan Feminisme*, tujuan feminisme sederhana adalah untuk memanusiakan perempuan. Hal ini membuat feminisme sangat mungkin dipribumikan. Sebab, pada dasarnya budaya dan tradisi Nusantara terkait perempuan adalah ingin memuliakan, menghargai, dan memberi ruang untuk perempuan.

Misalnya, dalam masyarakat Bolaang Mongondow terdapat tradisi Momoton yang merupakan tradisi memingit perempuan selama beberapa hari pada fase haid pertama. Sekilas tradisi ini tampak seperti budaya patriarki yang membelenggu perempuan. Namun, jika ditelusuri lebih dalam dan dilakukan reinterpretasi makna dengan spirit feminisme, maka dapat dipahami bahwa Momoton merupakan tradisi edukasi bagi perempuan Bolaang Mongondow.

Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam esai "Momoton, Tradisi Perempuan Bolaang Mongondow pada Saat Haid Pertama", bahwa tradisi Momoton pada dasarnya bukan bertujuan untuk membelenggu perempuan. Melainkan, satu upaya edukasi bagi perempuan pada saat haid pertama, agar dapat memahami tubuhnya dengan baik dan menjadi pribadi yang mampu mengontrol diri dalam menjalani kehidupan.

Sampai di sini, sudah dapat dipahami bahwa sangat mungkin merumuskan feminisme Nusantara. Upaya ini adalah kerja untuk menggali konsep relasi kesetaraan gender dari khazanah Nusantara, dan mempribumikan feminisme ke dalam budaya Nusantara. Sehingga lahir satu konsep pemikiran kesetaraan gender dan feminisme yang tidak mengabaikan karakter budaya masyarakat Nusantara.[]

PANCASILA DAN AGAMA: Sebuah Refleksi Memperingati Hari Lahir Pancasila

Oleh: **WAFIROH**

Islam yang damai, Islam yang konstruktif dan Islam yang dapat mengayomi bangsa ini. Dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama dan lain-lain. Itu Islam yang benar. Keislaman harus satu napas dengan ke-Indonesia-an dan kemanusiaan

–Buya Syafii Maarif–

Tanggal 1 Juni, adalah tarikh bersejarah dan merupakan salah satu hari besar bangsa Indonesia. Pasalnya, pada tanggal yang sama, pada 1945 Ir. Soekarno dalam salah satu sidang BPUPKI mengajukan 5 poin sebagai dasar bernegara. Kelima poin tersebut kini kita kenal sebagai Pancasila. Tanggal tersebut diresmikan sebagai salah satu hari besar negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 2016, tepatnya pada masa jabatan Presiden Joko Widodo. Meski baru diresmikan beberapa tahun silam, tetap tak dapat

dimungkiri bahwa Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh bagi Indonesia.

Quotes dari Buya Syafii Maarif di atas, merangkum nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana yang disebutkan oleh bapak bangsa kita. Yaitu kebangsaan, nasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan Yang Maha Esa. Keberagamaan, dalam hal ini Islam sejatinya tidak melulu hubungan vertikal dengan Tuhan semata. Namun secara horizontal, Muslim juga dituntut untuk memiliki hubungan yang sama baiknya. Internalisasi nilai-nilai toleransi dalam Pancasila sama sekali tak menafikan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan hemat penulis, nilai-nilai keluhuran dalam Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran semua agama yang ada di Indonesia.

Dalam rangka menghadapi-menjalani bulan dasar negara kita dilahirkan, penulis berinisiatif menulis sebuah serial pendek. Serial yang dimaksudkan untuk mengkaji secara reflektif perjalanan Pancasila dalam usianya yang ke-77 tahun. Besar harapan semoga tulisan ini menjadi media bagi penulis maupun pembaca dalam menginternalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Barangkali, Pancasila dengan 'kesaktiannya' dapat memperkuat kembali nasionalisme-toleransi yang ada dalam diri kita masing-masing. Serial ini akan diawali oleh tulisan berisi tentang relasi antara Pancasila dengan agama. Secara khusus dalam tulisan ini adalah Islam. Bagaimana tiap butir sila sejatinya tidak terlepas sedikitpun dari ajaran agama Islam. Sementara edisi berikutnya adalah tentang pendapat para tokoh terkait relasi Pancasila dan agama Islam.

Kita mulai dari sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, Tuhan itu satu. Tidak memiliki sekutu. Esa. Kepercayaan dan keimanan untuk mengesakan Tuhan dalam Islam dikenal dengan istilah tauhid. Al-Quran, sebagai kitab suci agama Islam secara eksplisit berulang kali menyatakan mengenai hal ini. Yang sering disampaikan dalam banyak tulisan, diskusi, ceramah dan lain sebagainya adalah surat Al-Ikhlas.

"Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia".

Selain itu, kita dapat menemukan ayat lain dengan esensi sama. Di antaranya, Al-Baqarah ayat 163 "dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"; Annisa ayat 171 "sesungguhnya Allah adalah Tuhan Yang Esa, Mahasuci dari memiliki anak..." dan banyak lagi ayat lainnya.

Kata 'Esa' tidak menafikan keimanan agama-agama lain di Indonesia. Jika muncul pertanyaan, bukankah Pancasila itu sangat bias? Bagaimana dengan keimanan agama lain yang memiliki Tuhan lebih dari satu? Di sini penulis ingin mengutip tulisan Binsen Samuel Sidjabat. Dia mengatakan bahwa sila pertama bagi orang Kristen, sama sekali tidak bertentangan. Karena makna Esa adalah Allah menyatakan diri-Nya sebagai Bapa yang Kekal, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Atau yang dikenal dengan istilah Tritunggal.

Untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, hemat penulis ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian *pertama*: kemanusiaan, secara umum bisa diejawantahkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Tinggal bagaimana mereka bisa melatih kepekaan dan perilaku yang mengutamakan kemanusiaan secara umum daripada kepentingan individu. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Q.S. Al-Hujurat ayat 13: "wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal". Poin saling mengenal di sini merangkum semua sikap baik 'mengenal'. Dari menghargai, menghormati, membantu dan lain sebagainya.

Sementara bagian *kedua*: keadilan, erat kaitannya dengan kebijakan para pemimpin. Penulis ingat bunyi satu kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Keputusan imam (pemimpin) untuk rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan (kebaikan)". Ini berarti, pemimpin tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Namun dia harus memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya.

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan penulis kepada Q. S. Al-Ma'idah ayat 2: "tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...". Ayat ini menegaskan poin paling penting dari persatuan. Yaitu saling menolong, saling membantu dan saling mendukung sebagai salah satu wujud dari adanya persatuan yang kuat dalam satu komunitas terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila keempat, fokus pada poin permusyawaratan perwakilan. Musyawarah, berdiskusi untuk mencapai satu mufakat adalah satu ciri persatuan yang hakiki. Dengan adanya musyawarah, maka beban dan persoalan yang bisa jadi sebelumnya ditanggung secara individu, bisa menjadi tanggung jawab bersama hingga bisa lebih mudah untuk diselesaikan. Hal ini selaras dengan bunyi surat Ali Imron ayat 159: "...dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan...".

Sementara untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki nilai bahwa semua elemen bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan—bukan kesamaan—dalam semua sektor. Baik itu dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nasihat untuk bersikap adil kepada semua pihak di antaranya dapat kita temukan dalam Q. S. Al-Ma'idah ayat 8: "hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil". *Allahu a'lam*.[]

MENYEMAI CINTA TANAH AIR

JIHAD PERJUANGAN TIMNAS SEPAK BOLA WANITA DI PIALA ASIA

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Saya selalu skeptis ketika banyak orang berbusa-busa menyampaikan argumentasi bela negara melalui panji-panji Islam anti-Barat dengan berdemo atau meneriakkan *jihad fii sabilillah* di lapangan terbuka. Konsep bela negara tadi sepertinya dipahami dengan sempit, bahwa menjadi Muslim di Indonesia dengan utuh perlu direalisasikan dengan menerapkan hukum Islam pada peraturan-peraturan yang ada, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Perspektif ini kemudian mendorong semacam argumen bahwa berwawasan Pancasila justru tidak membuat seorang Muslim bisa menginternalisasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam hanya karena Pancasila tidak berfondasi pada syariat Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk kita. Pemahaman yang salah kaprah tersebut tentu tak cocok diterapkan di negara kita yang heterogen. Kita bukan Arab Saudi yang cenderung homogen, penduduk kita bukan ha-

nya Muslim. Memaksakan tafsir tertutup kita dalam menjalin hubungan sosial, tak hanya membuat jalinan silaturahmi kian rapuh, tapi juga kian memarginalkan kelompok-kelompok minoritas.

Padahal, merujuk pada teori Imam al-Syâthibi dan juga Jasir Audah, bela negara menurut Islam dalam kerangka nasionalisme memiliki konsep yang luas, dan secara umum dibagi dua jenis. *Pertama*, bersifat *protective* yakni dengan menjaga segala kekayaan dan potensi sumber daya alam yang ada dalam negara tersebut, menjaga dari serangan dan segala bentuk kolonialisme penjajahan. *Kedua*, *productive–developmental*, yakni dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam negara tersebut, baik pulau, tanah, laut, hutan, budaya, untuk dikembangkan dan dikelola demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat bangsanya, sehingga negara ini menjadi *baldatun thayyibah* negara yang adil makmur (Q. S. Saba' [34]:15).

Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, tentu tindakan kedua jauh lebih relevan untuk diterapkan karena Indonesia berbeda dengan Palestina, yang masih diduduki penjajah. Oleh karenanya tugas kita semua, terutama umat Muslim perlu lebih menginternalisasi bela negara secara *productive–developmental*. Lantas, bagaimana realisasi nyatanya? Tentu, kita perlu merefleksi diri secara personal untuk mengembangkan kapasitas masing-masing yang kemudian diejawantahkan dalam tindakan yang mengarah pada kemanfaatan seluas-luasnya.

Salah satu tindakan bela negara yang kerap tidak diakui dan bahkan dipandang sebelah mata adalah 'jihad' timnas sepak bola wanita yang beberapa waktu lalu berlaga di AFC Women's Cup (Piala Asia Wanita) 2022 di India. Kegagalan mengemas satu poin pun dalam tiga laga membuat mereka dihujat dan dirundung secara online. Tergabung di Grup B, bersama Australia, Thailand, dan Filipina, Garuda Pertiwi memang merupakan kesebelasan paling lemah. Australia dan Thailand terdaftar di 50 besar peringkat FIFA, sedangkan Filipina menduduki posisi ke-64. Indonesia jauh di bawah, menempati urutan ke-94 dunia.

Kekalahan beruntun pada turnamen bergengsi tadi menjadikan Indonesia sebagai lumbung gol bagi tim lawan, hal yang lalu ditanggapi secara negatif oleh netizen dengan melontarkan kata-kata demotivasi yang tak mengenakkan untuk dibaca. Memang betul, timnas wanita kita kalah kelas. Namun dibalik itu, 'jihad' mereka perlu diapresiasi tinggi karena telah mengharumkan nama bangsa melalui sepak bola, cabang olahraga yang selalu identik dengan sisi maskulinitas.

Terlebih, mayoritas pemain yang menjadi bagian dari Garuda melewati berbagai tantangan dan diskriminasi berlapis untuk berada di posisi mereka saat ini. Seperti yang dialami oleh Zahra Muzdalifah, yang masih terus berjuang menuntut keadilan di lapangan hijau. Sejak belia, ia mengaku kerap menghadapi diskriminasi ketika berjuang masuk klub sepak bola yang lebih banyak dihuni oleh para laki-laki. Namun, hal itu tak menyurutkan niatnya, berbagai cara dilakukan hingga ia punya kapasitas mumpuni sebagai pesepakbola. Hingga akhirnya ia menjadi salah satu pemain andalan dan ikon Timnas Wanita saat ini.

Keuletan Zahra dan kawan-kawan dalam gerakan 'jihad' di bidang olahraga tentu bukan tanpa alasan. Olahraga seperti sepak bola sejatinya memberikan banyak dampak positif, tak hanya kepada kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Data dari Women's Sports Foundation memperlihatkan bahwa ketika perempuan aktif berolahraga, mereka memiliki risiko 20% lebih rendah untuk terkena kanker payudara. Tak hanya itu, statistik menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat wanita pekerja merasa bahwa partisipasi olahraga membantu meningkatkan citra diri mereka di lingkungan sosial. Bahkan, keterlibatan anak perempuan dalam olahraga berkorelasi erat dengan tingkat kebahagiaan keluarga yang lebih tinggi, baik dalam kondisi keluarga orangtua tunggal maupun lengkap.

Berdasarkan data tadi, tentu bela negara di bidang olahraga yang dilakukan oleh pemain timnas wanita kita tak perlu dicaci maki, justru harus diapresiasi tinggi. Bagaimana tidak? Untuk bisa berlaga di lapangan hijau, mereka harus berjuang menghadapi berbagai

tantangan sosial yang pelik. Padahal aktivisme olahraga perempuan telah terbukti jauh lebih memberikan manfaat positif daripada negatif. Ruang 'jihad' sepak bola wanita di satu sisi juga tak bertentangan dengan tugas wanita sebagai *khilafah fil ardh*, seperti yang disampaikan Kiai Sahal (Rais Aam PBNU 1994-2014), beliau menyampaikan bahwa perempuan boleh berperan besar dalam keluarga dan lingkungan eksternal, baik sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidik, juru dakwah maupun penggerak sosial. Oleh karenanya, memberi ruang dan menghargai perjuangan mereka dalam turnamen sepak bola bisa dikatakan sebagai bentuk upaya kecintaan kita terhadap tanah air di era modern yang tidak lagi menuntut jihad dengan mengangkat senjata lewat perang, tetapi berjuang pada berbagai bidang yang kita geluti, termasuk dalam sepak bola. *Wallahu a'lam*.[]

KLITHIH DAN URGENSI PROFIL PELAJAR PANCASILA

Oleh: **SULMA SAMKHATY MAGHFIROH**

Minggu 3 April 2022, kita semua dikejutkan dengan meninggalnya seorang pelajar kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta di Jalan Gedongkuning Yogyakarta. Sebagaimana diberitakan di banyak media, kematiannya disebabkan oleh alat seperti gir yang diikat dengan kain dan dihantamkan kepadanya. Kejadian yang mencederai semangat Pancasila inilah yang kemudian dikenal publik dengan "*klithih*" di mana pada aksinya, banyak melibatkan anak-anak usia SMA.

Menurut Arie Sujito, sosiolog Universitas Gajah Mada, makna asli dari istilah *klithih* adalah kegiatan keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Jika merujuk pada istilah ini, jelas *klithih* tidak berbahaya apalagi mencederai Pancasila. Namun, ternyata *klithih* mengalami pergeseran makna menjadi fenomena kejahatan yang identik dengan aksi kekerasan dengan senjata tajam. Umumnya *klithih* dilakukan

oleh siswa usia SMA, tentu dengan ragam aksi seperti perundungan, penjarahan, perampokan, hingga penyiksaan fisik.

Klithih yang melibatkan pelajar usia SMA tentu saja membuat banyak pihak harus mengelus dada, prihatin sekaligus kecewa. Perilaku yang jauh dari kata beradab dan berpendidikan sungguh mencoreng citra baik bangsa. Padahal, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 telah berupaya menjaga, memperbaiki dan mewujudkan karakter pelajar dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah sebuah perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Urgensi dari profil pelajar Pancasila menjadi makin nyata pasca munculnya aksi *klithih* di Yogyakarta yang telah merenggut nyawa seorang penerus bangsa. Enam ciri dari profil pelajar Pancasila yakni (1) Bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; (2) Berkebinekaan global; (3) Bergotong royong; (4) Mandiri; (5) Bernalar kritis; (6) Kreatif, diyakini mampu menghentikan aksi *klithih* jika dapat diajarkan secara intensif kepada seluruh pelajar di Indonesia umumnya, dan Yogyakarta khususnya.

Bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, sebagai ciri profil pelajar Pancasila memiliki lima elemen kunci, yakni akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Aksi *klithih* jelas tidak mencerminkan takwa kepada Tuhan dan akhlak mulia, karena sarat akan kekerasan yang tidak jarang berakhir dengan penyiksaan fisik. Dalam perspektif *mubadalah* pun, aksi *klithih* tidak mendapatkan pembenaran karena telah keluar dari visi besar Islam yang *rahmatan lil alamin* dan misi besar kenabian Muhammad, *akhlakul karimah*.

Ciri kedua dari profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global, dimana pelajar Indonesia diminta untuk terus mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, namun tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan sesamanya. Kekerasan yang terjadi dalam tiap aksi *klithih* sudah pasti bukan merupakan budaya luhur, lokalitas dan identitas bangsa Indonesia, karena In-

donesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi moralitas budaya, kearifan lokal bangsa, serta menjaga marwah identitas bangsanya.

Gotong royong dengan titik tekan pada kepedulian menjadi ciri profil pelajar Pancasila selanjutnya. Hal ini juga tidak tersirat dalam aksi *klithih* yang dilakukan oleh para pelajar. Bagaimana tidak, aksi kekerasan dengan menghantamkan gir kepada sesamanya hingga berujung maut jelas tidak mencerminkan sebuah sikap peduli antar-sesama. Disusul dengan mandiri yang menjadi ciri profil pelajar Pancasila keempat dengan titik tekan pada sikap tanggung jawab, kesadaran diri dan regulasi atas diri. Menurut hal ini pun para pelaku *klithih* masih jauh dari sikap tanggung jawab baik kepada korbannya maupun terhadap dirinya sendiri.

Dua ciri terakhir dari profil pelajar Pancasila yakni bernalar kritis dan kreatif dengan titik tekan pada kemampuan memproses informasi dari tahap menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, sehingga mampu mengambil keputusan untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak. *Klithih* tidak mencerminkan kemampuan para pelakunya dalam memproses informasi, sehingga keputusan yang diambilnya bukanlah merupakan hal yang bermakna dan bermanfaat. Yang terjadi justru sebaliknya, keputusan yang diambilnya merugikan banyak pihak.

Urgensi profil pelajar Pancasila kian mendesak. Jika pemerintah sudah memulainya di hulu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Permendikbud sehingga kompetensi profil pelajar Pancasila masuk ke dalam kurikulum sekolah, maka inilah waktunya para pendidik bersama orangtua dan wali siswa untuk berjuang di hilir demi mewujudkan pelajar Pancasila, tumpuan harapan bangsa di masa mendatang. Dengan menanamkan enam ciri profil pelajar Pancasila dalam diri setiap pelajar, diharapkan *klithih* dapat kembali ke makna awalnya, yakni sebagai salah satu sarana *healing* dari segala kepenatan di siang hari.[]

BAGAIMANA CARA MENCINTAI TANAH AIR VERSI ISLAM DI ZAMAN SEKARANG?

Oleh: IRFAN HIDAYAT

Sebelum terlalu jauh membahas 'cinta tanah air', dalam tulisan ini saya akan membatasi pembahasan dari makna 'tanah air' dari pengertian sederhana. Istilah 'tanah air' berasal dari dua kata yang merepresentasikan dua unsur, yaitu tanah dan air. 'Tanah' menunjukkan segala sesuatu yang ada di atas serta di dalam permukaan bumi Indonesia. 'Air' menunjukkan akan luasnya laut dan samudra, danau, sungai, dan sumber-sumber air lainnya.

'Tanah air' merupakan representasi dari kawasan daratan dan lautan yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara geografis, Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau serta gugusan kepulauan. Di dalamnya terdapat suatu interaksi kehidupan masyarakat dengan berbagai budaya, tradisi, bahasa, hingga kepercayaan yang kemudian di satukan dalam semboyan negara: "*Bhinneka Tunggal Ika*".

Berkaitan dengan itu, mengutip pendapat Syekh Mahmoud Ashour, mantan wakil Al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam Mesir yang menjelaskan tentang konsep *al-wathan* (tanah air) dalam Islam, yaitu sebidang tanah yang dihuni sekelompok orang yang menjadi tempat tinggal tetap dan tempat mata pencaharian mereka bagi keluarga serta keturunannya, yang kemudian menjadi tugas mereka semua untuk membangun serta melindunginya.

Selanjutnya, dalam tulisan Lina Yuliatin (2013) yang berjudul: "Upaya Penanaman Rasa Cinta Tanah Air Pada Para Santri Di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah Kabupaten Jombang", mengutip pendapat dari Santoso yang menjelaskan pengertian dari 'cinta tanah air', adalah perasaan bangga menjadi warga negara Indonesia dengan khazanah budaya yang ada dan menerima segala konsekuensinya, yakni menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap peraturan berupa norma maupun hukum yang tertulis, ikut serta dalam usaha pembelaan terhadap negaranya.

CINTA TANAH AIR DIANJURKAN DALAM ISLAM

Dari beberapa sumber yang didapat, berikut adalah dalil-dalil yang berbicara terkait pentingnya menjaga dan menerapkan rasa cinta tanah air dalam Islam:

Pertama, M. Alifudin Ikhsan (2017), dalam tulisannya yang berjudul: "Nilai-nilai Cinta Tanah Air dalam Prespektif Al-Qur'an", menjelaskan bahwa konsep cinta tanah air terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Kedua, dilansir dari nu.or.id (10-06-2018), untuk mempertegas cinta tanah air dalam perspektif Islam, KH Ahmad Ishomuddin mengungkapkan beberapa dalil mengenai cinta tanah air dalam

perspektif ajaran Islam, salah satunya QS. An-Nisa' ayat 66 yang artinya:

> "*Dan sesungguhnya jika seandainya Kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik): "Bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu!" niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka…*".

Ketiga, Saiffuddin (2020), dalam tulisannya yang berjudul: "Cinta Tanah Air dan Nasionalisme Perspektif Hadis", menjelaskan bahwa terdapat hadis riwayat Al-Bukhari, Ibn Hibban dan al-Tirmidzi mengenai pentingnya cinta tanah air, yang artinya:

"Diriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi Saw. ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah."

Keempat, Sandi Kurniawan (2021), dalam tulisannya yang berjudul: "Integrasi Nilai-nilai Keislaman dan Kebangsaan dalam Pendidikan Pesantren", menjelaskan hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw. telah memberi contoh terkait bagaimana mencintai tanah air ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, yang artinya:

> "*Alangkah baiknya kau sebagai negeri (kota) dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu (Makkah), niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu.*" (HR At-Tirmidzi).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mencintai tanah air tidak bertentangan dengan agama, bahkan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib diamalkan. Setiap orang, khususnya yang beragama Islam, wajib mencintai tanah airnya (selain mencintai agama yang dianut) dengan cara memahami serta mengamalkannya dengan benar.

MENCINTAI TANAH AIR VERSI ISLAM DI ZAMAN SEKARANG

Pada zaman penjajahan, Hadlratusy Syekh KH. Hasyim Asy'ari menyerukan ungkapan *hubbul wathan minal iman* yang artinya 'cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan' yang kemudian turut disebarluaskan oleh para kiai, ajengan, guru dan para ulama seluruh Nusantara. Prinsip *hubbul wathan minal iman* ini membangkitkan sikap bela negara yang kemudian mampu menggetarkan mental para penjajah.

Dalam konteks hari ini, setiap orang, khususnya seorang Muslim, harus tetap setia dalam mencintai tanah airnya, mempertahankan serta melindunginya dengan segala cara. Hal ini menjadi penting mengingat sikap cinta tanah air dianjurkan dan menjadi keharusan dalam ajaran Islam.

Selain itu, prinsip cinta tanah air juga perlu diterapkan oleh generasi muda saat ini. Penanaman konsep *hubbul waton minal iman* harus dilakukan dan digalakkan sejak dini. Konsep tersebut harus diimplementasikan ke dalam pendidikan, akhlak, serta budi pekerti, sehingga akan memunculkan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara dalam wujud keberagaman sosial budaya, bahasa, serta sumber daya alam yang melimpah ruah yang kemudian menjadi awal terbentuknya sikap rela berkorban untuk melindungi, mempertahankan, dan melestarikan bangsa dengan semangat juang yang tinggi tanpa didasari paksaan dari pihak lain.

Salah satu contoh kecil dari perilaku cinta tanah air yang harus ada dalam diri generasi muda adalah rasa cinta terhadap barang ataupun produk-produk lokal, baik itu hasil bumi, kreativitas/karya, dan lainnya.

Selain itu, ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara rajin belajar, menjaga dan melestarikan lingkungan dari kerusakan ataupun perusakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian, yang tidak kalah penting ialah menghindari fanatisme yang berlebihan dan menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Dengan menumbuhkan dan menjaga rasa toleransi ini, tentunya diharapkan dapat mengurangi perselisihan atau bahkan konflik yang bisa saja terjadi di masyarakat Indonesia. Rasa toleransi ini juga merupakan indikator dari implementasi *hubbul wathan minal iman* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai penutup, tampaknya kita harus sejenak merenungi kembali salah satu semboyan/slogan yang diungkapkan oleh presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno, bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya“. Karena tidak dipungkiri bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang bisa kita rasakan dan nikmati saat ini adalah berkat hasil perjuangan para pahlawan, termasuk para kiai, santri, dan ulama-ulama Nusantara.[]

BAGAIMANA PERAN ISLAM DALAM MERAWAT '*BHINNEKA TUNGGAL IKA*?'

Oleh: **IRFAN HIDAYAT**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan katadata.id (20-02-2022), pada tahun 2020 saja, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 273.523.615 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai latar belakang; ras, suku dan agama yang diikat oleh suatu semboyan negara '*Bhinneka Tunggal Ika*' yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu.

Dari segi agama, pemerintah setidaknya telah mengakui keberadaan enam agama di Indonesia melalui Pasal 1 Undang-undang Penetapan Presiden (UU PNPS) No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang berbunyi: "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius)".

Selain itu, pemerintah juga mengakui adanya aliran-aliran kepercayaan masyarakat yang menjadi landasan

hidup bagi penganutnya. Namun, pengakuan kepercayaan tersebut bukan dalam bentuk agama, melainkan hanya sebagai *local wisdom* atau *cultural heritage*. Sehingga, para penganut aliran kepercayaan tertentu masih banyak yang mengaku menjadi pengikut atau bagian dari salah satu dari keenam agama resmi tadi.

Umat Islam saat ini memiliki tantangan yang cukup besar. Munculnya stigma negatif terkait 'radikalisme' Islam terhadap hadirnya kelompok-kelompok 'garis keras' yang mengaku beragama Islam. Selain itu, stigma negatif 'anti-kebinekaan' atau 'anti-Pancasila' juga muncul dan menjadi 'label' dari beberapa masyarakat.

Stigma negatif tersebut diperkuat oleh laporan Setara Institut (2018), bahwa tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok atau figur yang mengaku Muslim masih marak terjadi. Berkaitan dengan itu, pemerintah kemudian memunculkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Dengan adanya Perppu tersebut, setidaknya beberapa kelompok organisasi masyarakat (ormas) telah dibubarkan karena dianggap anti-kebinekaan dan anti-Pancasila.

Terlepas dari apakah Perppu tersebut hanya ditujukan untuk kelompok umat Islam saja atau tidak. Namun, kenyataannya, hingga saat ini hanya ormas Islam saja yang dijerat atau terkena imbas dari Perppu tersebut. Dalam hal ini, yang paling penting ialah langkah pemerintah dalam upaya menjaga ideologi dan keutuhan bangsa memang harus dilakukan.

Dalam tulisan pendek ini, penulis bermaksud mencari dan mengkaji kembali mengenai hubungan antara Islam dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Hal ini diharapkan dapat menjawab terkait pertanyaan apakah Islam bertentangan dengan ideologi Pancasila dan kebinekaan di Indonesia, yang hari ini 'label' anti-Pancasila atau anti-kebinekaan sering ditujukan kepada umat Islam.

BEBERAPA DALIL TENTANG KEBINEKAAN

Terdapat beberapa dalil yang berbicara dan membahas mengenai kebinekaan, di antaranya ialah QS. Al-Hujurāt ayat 13 yang artinya:

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu*".

Kebinekaan juga merupakan *sunnatullah* sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 48 yang artinya:

"*Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan*".

Kebinekaan dalam Islam bukan hanya terkait suku dan bangsa, namun juga menyangkut keberagaman agama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Yunus ayat 99 yang artinya:

"*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman*?"

Selain itu, pemaksaan keimanan tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana jelas tertulis di QS. Al-Baqarah Ayat 256 yang menyatakan *lā iqrāha fi-ddīn*. Dalam kitab *Asbābu Nuzūl* karangan Al-Wahidi, menjelaskan bahwa ayat ini turun karena datang seorang Muslim Anshar yang memiliki dua anak laki-laki dan keduanya memilih beragama Nasrani. Muslim Anshar tersebut lalu datang kepada Rasulullah Swa. dan bertanya terkait masalahnya. Lalu turunlah ayat ini sehingga Muslim Anshar tersebut melepaskan kedua anaknya.

Dalam Islam, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Swt. Penguasa semesta alam. Namun bukan berarti Islam memperbolehkan untuk menghina atau melecehkan Tuhan dari agama lain. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 108 yang artinya:

> "*Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka ...*".

PERAN ISLAM DALAM MERAWAT *BHINNEKA TUNGGAL IKA*

'*Bhinneka Tunggal Ika*' merupakan moto resmi negara Republik Indonesia. Moto tersebut muncul dalam sebuah lambang Garuda Pancasila pada suatu gulungan yang dicengkeram kuat kaki Garuda. Secara eksplisit, motto tersebut muncul pada pasal 36A Undang-undang Dasar (UUD) yang berbunyi: "Lambang nasional negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan moto *Bhinneka Tunggal Ika*".

Belakangan ini banyak kasus radikalisme oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang agama dengan perilaku intoleran terhadap perbedaan dan kebinekaan. Tindakan-tindakan kelompok tersebut cenderung ekstrem dalam menanggapi masalah dan menjadikan kekerasan sebagai suatu penyelesaian.

Tindakan kekerasan oleh kelompok radikalis tersebut dengan memaksakan pemahaman dan menganggap bahwa pemahaman mereka adalah yang paling benar dan mutlak (baik yang mengatasnamakan 'Islam' atau tidak), merupakan suatu 'penyakit kebinekaan' yang harus disembuhkan atau bahkan dibumihanguskan.

Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, keberagaman dan perbedaan merupakan sebuah fitrah manusia. Memaksakan sebuah perbedaan sama saja melanggar fitrah tersebut, apalagi dengan melakukan kekerasan.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dalam bukunya yang berjudul: "*Islamku Islam Anda Islam Kita*" (2006), bahwa Islam diturunkan sebagai agama yang bertujuan mewujudkan keselamatan dan perdamaian. Dengan begitu, segala bentuk tindak kekerasan, anarkisme, terorisme, dan ketidaksetujuan terhadap perbedaan merupakan perilaku yang bertentangan dengan visi dan misi serta karakteristik agama Islam.

Prinsip-prinsip mengenai hak, kebebasan, dan menghormati perbedaan telah lama dipraktikkan Islam dari sejak zaman Rasulullah Saw. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam isi piagam Madinah yang merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia dengan membuat dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti dalam pembukaannya yang berbunyi:

> "*Ini adalah piagam dari Muhammad Saw. di antara kaum mu'minin dan muslimin dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka*".

Dalam konteks '*Bhinneka Tunggal Ika*', khususnya dalam keberagaman agama di Indonesia, terbentuknya Pancasila merupakan perwujudan dari keinginan untuk mengembangkan *kalîmatun sawâ* dalam Islam, yaitu pengambilan kebijakan yang bersifat *win win solution* sebagai jembatan perbedaan pendapat dalam pembentukan Pancasila.

Penerimaan Pancasila tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin Islam di Indonesia sangat mengutamakan kerukunan serta integritas nasional daripada hanya memikirkan kepentingan kelompok.

Selain itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengajarkan cara dalam menyikapi perbedaan, menciptakan kedamaian, persaudaraan, serta kemanusiaan yang mendalam.

Label negatif terkait agama Islam adalah agama yang anti-Pancasila atau anti-kebinekaan merupakan label yang salah kaprah. Karena sebaliknya, Islam sendiri telah mengajarkan terkait bagaimana menghargai dan menghormati keberagaman, bahkan melarang keras adanya pemaksaan pemahaman dan keyakinan, apalagi dengan cara-cara kekerasan.[]

KEPEMIMPINAN RATU-RATU NUSANTARA YANG TENGGELAM OLEH SEJARAH

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Jika saya menyebut dua nama tokoh Nusantara di masa lampau yakni Ratu Shima dan Gajah Mada, manakah yang lebih familier di telinga kalian? Saya perkirakan teman-teman akan jauh lebih mengenal Gajah Mada daripada Ratu Shima. Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi ini. Alasan dibalik ketimpangan ini terkuak jelas oleh suatu studi di Amerika yang menjelaskan bahwa tingkat popularitas figur laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dikarenakan jumlah penulis kolom dan catatan sejarah didominasi oleh kaum Adam. Dengan sistem sosial kita yang masih kental akan dominasi patriarki, tentu tren yang sama juga berlaku di Indonesia. Buku-buku sejarah yang dirujuk oleh seluruh pelajar Indonesia kaya akan tokoh-tokoh pria yang kemudian tak hanya dibincangkan dan didiskusikan, tetapi juga dikenang melalui pencatutan sebagai nama ruang publik, dari nama jalan hingga gedung bertingkat. Sebaliknya, sedikitnya

jumlah tokoh perempuan dari sejarah Nusantara yang diperkenalkan melalui referensi-referensi akademis berdampak pada rendahnya kuantitas tokoh perempuan yang dikenal oleh publik.

MENGAPA PENTING BAGI KITA UNTUK MEMOPULERKAN TOKOH PEREMPUAN?

Sejak lama, sejarah hanya ditulis oleh orang-orang terpelajar: dari era Herodotus Yunani kuno yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, hingga biarawan abad pertengahan seperti warga Inggris bernama Bede, dan profesor universitas abad ke-20 yang dikenal dengan nama Eric Hobsbawm. Mereka kerap menuliskan kisah-kisah orang-orang hebat, perang besar, dan jejak kerajaan yang berjuang untuk menaklukkan dunia. Sayangnya, sudut pandang mereka amatlah bias. Apa yang mereka tulis hanya berdasarkan perspektif penguasa, jarang mengambil pengalaman dari korban perang, kaum papa, hingga kelompok perempuan yang dahulu acap dimarginalkan. Pada abad ke-20, karena pendidikan mulai terjangkau akhirnya situasi ini mulai berubah. Orang-orang dari berbagai latar belakang pun mulai turut menulis sejarah dan berupaya agar suara mereka didengar. Pengalaman dan pandangan mereka yang amat berbeda dari mayoritas sejarawan laki-laki yang lebih tua dan dari golongan ningrat, lalu mendorong lebih banyak kelompok masyarakat lain mencatatkan apa yang mereka alami dan rasakan (Loffler, 2021).

Keberadaan tokoh perempuan dalam catatan sejarah juga bermakna penting ketika dikaitkan dengan motivasi dan program pemberdayaan. Barbara Baikie, Presiden Dewan Perempuan Nasional Australia menyampaikan bahwa sosok perempuan sukses dapat menjadi teladan sesama perempuan lain untuk mengikuti jejaknya, terutama dalam mempromosikan cara berpikir yang lebih baik terhadap pendidikan dan menjadikannya tujuan prioritas. Lebih lanjut, riset dari Penelope Lockwood dan koleganya (2004) menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan dalam suatu bidang ternyata memberikan efek positif bagi kelompok perempuan gene-

rasi penerus untuk bisa melampaui bias gender, stigma negatif dan kultur patriarki yang menghalangi perempuan untuk mencapai apa yang ia cita-citakan.

Dalam hal ini, jika kita kaitkan dengan kondisi Indonesia, tenggelamnya cerita heroik tokoh perempuan dalam sejarah kemudian turut menciptakan kesenjangan gender yang berlaku sekarang. Bahkan dalam perkembangannya, watak dan ideologi misoginisme ini disuburkan atas nama agama maupun budaya, misalnya dengan menyematkan label, "adat ketimuran" atau "kodrat perempuan menurut Islam" (Al Qurtuby, 2020).

KIPRAH PEREMPUAN INDONESIA DALAM SEJARAH

Padahal, jika ditilik dari sejarah, banyak tokoh perempuan Nusantara yang menjadi pemimpin adil dan dapat menyejahterakan rakyatnya, salah satunya adalah Ratu Shima yang tadi saya sebutkan di awal artikel. Ratu Shima sendiri berasal dari Kerajaan Kalingga. Ia dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas dalam memimpin. Sang Ratu juga menjunjung tinggi hukum dan tak pernah ragu menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Itulah kenapa, rakyat sangat patuh dan loyal kepadanya.

Bahkan kisah tentang ketegasan Ratu Shima bergaung hingga ke berbagai negara, dan kemasyhurannya tercatat dalam Babad Parahyangan yang memuat riwayat kepemimpinan raja-raja Sunda. Sebagai penganut ajaran Hindu-Siwa yang religius, ia juga tak lantas bersikap ekstrem. Ia justru sangat toleran terhadap siapa pun, termasuk anggota keluarganya. Ia bebaskan semua orang di wilayahnya untuk memeluk agama apa pun. Ratu Shima memimpin Kalingga hingga kurang lebih 60 tahun. Rakyat begitu menghormatinya karena ia mengajarkan kejujuran dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Sepeninggal Ratu Shima, kerajaan tersebut runtuh karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya.

Tak hanya Ratu Shima yang berjaya di era Nusantara lama, sosok pemimpin perempuan lain yang arif bijaksana adalah Gayatri Rajapatni. Ia merupakan sosok penting di balik berdirinya kerajaan

Majapahit. Menurut catatan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (2012), Gayatri adalah putri bungsu dari Kertanegara, Raja Singasari. Setelah serbuan yang dilakukan oleh kerajaan Kediri terhadap kerajaan Singasari dan mengakibatkan orangtuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singasari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa kejayaan kerajaan Singasari. Meski kemudian saat pertumpahan darah semakin tajam, Gayatri memilih untuk tidak menjadi raja Majapahit saat Jayanegara wafat, namun keputusannya tersebut mampu menghentikan pembalasan dendam turun temurun antara kerajaan Kediri dan Singasari. Resolusi konflik yang dipilih Gayatri selanjutnya menebarkan kedamaian yang telah dinanti-nanti pada zaman Jawa kuno.

Kiprah kedua tokoh perempuan dalam sejarah Nusantara tadi menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah hal asing dalam budaya Indonesia. Sehingga, memberikan label kebarat-baratan dalam jejak publik perempuan di masa sekarang justru kurang tepat. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menyadari bahwa mendorong agensi perempuan dalam kepemimpinan juga merupakan suatu cara untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa.[]

LEGENDA MALAHAYATI DARI ACEH YANG JAUH DARI STEREOTIP NEGATIF JANDA

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Hari Janda Internasional diperingati pada tanggal 23 Juni setiap tahunnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi para janda dan anak-anak mereka di beberapa negara. Peringatan tersebut ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajak publik memfokuskan perhatian terhadap pengalaman para janda dan bagaimana ke depannya komunitas dapat memberikan dukungan penuh pada mereka yang membutuhkan.

Di saat yang sama, peringatan tersebut memberikan kesempatan untuk pihak-pihak berwajib untuk selanjutnya mengambil tindakan lebih komprehensif dalam membantu janda-janda kurang mampu untuk memenuhi hak dan pengakuan penuh bagi mereka. Seperti pembagian yang adil dalam harta warisan, tanah, sumber daya produktif, perlindungan sosial yang tidak didasarkan pada status perkawinan, pekerjaan yang layak dan upah yang setara, kesempatan pela-

tihan, pendidikan, dll. Menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak, penting untuk memastikan hak-hak janda seperti yang diabadikan dalam hukum internasional.

Memperingati hari ini juga merupakan cara menentang stereotip negatif pada kelompok janda yang diidentikkan dengan penggoda, hingga perebut suami orang. Belum lagi ternyata beberapa kelompok perempuan pernah dilarang ikut andil dalam politik, sehingga kegiatan yang dapat dilakukan kaum Hawa pun terbatas. Stereotip tadi amat berbanding terbalik dengan berbagai sosok perempuan hebat dalam sejarah Indonesia. Salah satunya adalah Keumalahayati, atau yang lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati dari Aceh.

Dalam catatan sejarah, Malahayati adalah laksamana laut pertama di dunia. Dia digambarkan sebagai panglima perang Kesultanan Aceh yang mampu menaklukkan armada angkatan laut Belanda dan bangsa Portugis (Portugal) pada abad ke-16 Masehi.

Ditilik dari segi keturunan, Malahayati adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah bin Laksamana Muhammad Said Syah. Sedangkan kakeknya merupakan putra Sultan Salahuddin Syah yang memimpin Aceh pada periode 1530-1539.

Lahir dan tumbuh besar di daerah pesisir dan memiliki keluarga yang punya pengalaman luar biasa di bidang kelautan, tak heran bila kemudian Malahayati akrab dengan dunia angkatan laut. Untuk meningkatkan kapasitas, ia sempat mengenyam pendidikan akademi militer dan memperdalam ilmu kelautan di Baital Makdis atau Pusat Pendidikan Tentara Aceh. Di sana ia belajar banyak dari para pengajarnya yang merupakan para perwira dari Turki. Pada waktu itu Kasultanan Aceh Darussalam mendapatkan bantuan dari Kesultanan Turki Ustmani.

Tak lama setelahnya, Malahayati bertemu dengan seorang perwira muda yang kemudian menjadi pendamping hidupnya, Tuanku Mahmuddin bin Said Al Latief. Usai menikah, pasangan ini tidak selalu menikmati kehidupan nan penuh kedamaian. Ujian

mereka datang ketika keduanya harus terlibat dalam peristiwa perang di perairan Selat Malaka. Pasukan kesultanan Aceh waktu itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukammil yang dibantu dua orang laksamana, salah satunya suami Malahayati. Pertempuran yang berlangsung sengit tersebut dimenangkan oleh pasukan Kesultanan Aceh. Namun, suami Malahayati justru tewas dalam pertempuran ini.

Sepeninggal suaminya, Malahayati membentuk armada yang terdiri dari para janda yang suaminya gugur dalam pertempuran melawan bangsa Portugis. Armada pasukannya diberi nama Inong Balee atau Armada Perempuan Janda. Pangkalannya berlokasi di Teluk Lamreh, Krueng Raya. Di sana terdapat 100 kapal perang dengan kapasitas 400-500 orang. Tiap kapal perang juga dilengkapi dengan meriam. Bahkan, kapal paling besar dilengkapi lima meriam.

Malahayati juga membangun benteng yang dinamai Benteng Inong Balee bersama pasukannya. Karier militer Malahayati terus menanjak hingga ia menduduki jabatan tertinggi di Angkatan Laut Kerajaan Aceh kala itu. Sebagaimana layaknya para pemimpin zaman itu, Laksamana Malahayati ikut bertempur di garis depan melawan kekuatan Portugal dan Belanda yang hendak menguasai jalur laut Selat Malaka.

Reputasi Malahayati sebagai penjaga pintu gerbang kerajaan membuat Inggris yang hendak masuk ke wilayah Aceh memilih untuk menempuh jalan damai. Surat dari Ratu Elizabeth I yang dibawa oleh James Lancaster untuk Sultan Aceh membuka jalan bagi Inggris untuk menuju Jawa dan membuka pos dagang di Banten.

Setelah Inggris, Belanda kemudian datang. Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang tiba di Indonesia, juga mencoba menggoyang kekuasaan Aceh pada 1599. Namun, komplotan mereka pun tak berdaya di hadapan Malahayati. Pasukan tersebut berhasil dipukul mundur oleh armada Inong Balee. Cornelis de Houtman tewas di tangan Laksamana Malahayati pada 11 September 1599. Usai pimpinannya tiada. Upaya Belanda tak berhenti sampai di situ.

Prins Maurits yang lalu mewakili Belanda, berupaya memperbaiki hubungan dengan Aceh. Keduanya menggelar perundingan awal hingga tercapai sejumlah persetujuan.

Dari catatan heroik Malahayati, kita bisa melihat bahwa stereotip negatif yang kerap disematkan oleh masyarakat kini tak satu pun lekat dengannya. Ia bahkan tak hanya mengurus kebutuhan domestik, tetapi juga maju di garda terdepan dalam melawan pendudukan negara asing. Atas keberaniannya, nama Malahayati saat ini dijadikan nama jalan, pelabuhan, rumah sakit, perguruan tinggi hingga nama kapal perang, yakni KRI Malahayati. Bahkan lukisannya diabadikan di Museum Kapal Selam, Surabaya, Jawa Timur. Kontribusi Malahayati seakan memperlihatkan bahwa kehilangan pasangan bukan akhir dari segalanya.[]

RAHMAH EL YUNUSIYYAH MENGIBARKAN MERAH-PUTIH DI PADANG PANJANG

Oleh: **MOH. RIVALDI ABDUL**

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya *his-story*, namun juga *her-story*. Suatu fakta sejarah yang tidak bisa dielakkan, bahwa perempuan Nusantara dengan penuh keberanian turut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Ada yang bergerak di garis belakang dan ada yang ikut maju ke garis depan. Satu dari banyaknya nama perempuan pejuang itu adalah Rahmah El Yunusiyyah.

Febrian Fachri dalam esai "Rahmah El Yunusiyyah, Perempuan Pejuang dari Padang Panjang," mengutip perkataan Fauziah Fauzan El Muhammady—Direktur Diniyyah Putri Padang Panjang, "Orang mengatakan beliau (Rahmah El Yunusiyyah) multitalenta, punya kecerdasan jamak, seorang guru agama, seorang pemimpin, pejuang perang, *bundo kanduang*, dan dia juga seorang bidan."

Multitalenta Rahmah El Yunusiyyah disertai keberanian yang tinggi dan semangat memajukan nasib bangsanya,

khususnya kaum perempuan. Dia berani menolak tawaran Belanda untuk kerja sama pembangunan Diniyyah Putri dan melawan ordonansi sekolah liar yang diterapkan penjajah. Dengan gagah dia menentang praktik *jugun ianfu*—perempuan Nusantara yang dijadikan budak nafsu tentara Jepang di masa penjajahan. Rahmah membela nasib perempuan kala itu.

Dalam urusan membela nasib kaum perempuan dan perjuangan kemerdekaan, tak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Rahmah El Yunusiyyah adalah perempuan pejuang yang tidak kenal kata takut dan gentar dalam setiap gerakannya. Untuk perjuangan kemerdekaan, khususnya gerakan memajukan nasib perempuan, dia selalu berani menerobos setiap badai.

Dalam buku *Perempuan yang Mendahului Zaman*, sebuah novel biografi tentang Rahmah El Yunusiyyah yang disusun Khairul Jasmi, diceritakan bahwa, pada 19 Agustus 1945, Engku Sjafe'i–salah satu tokoh di Sumatra–mendapat kabar kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Malamnya, Engku Sjafe'i segera mengumpulkan tokoh-tokoh sentral Sumatra, khususnya Padang Panjang, di rumah Rasyidin. Satu dari nama yang diundang dalam pertemuan itu adalah Rangkayo Rahmah El Yunusiyyah. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa: "Kita merdeka dan Sumatra mengakui proklamasi itu dan kita bagian dari Indonesia, bangsa yang bulat satu."

Meski telah mendapat kabar Indonesia merdeka, orang-orang masih bimbang, ragu, untuk mengibarkan bendera Merah-Putih. Mengibarkan Merah-Putih pasca-proklamasi tidak semudah sekarang. Penjajah masih berkeliaran, kalau ditembak bagaimana? Nyawa urusannya.

Namun, Rahmah El Yunusiyyah tanpa ragu mengumpulkan murid-muridnya di Diniyyah Putri. Dan, kemudian menyampaikan kabar yang teramat menggembirakan: "Anak-anak sekalian, baru saja tadi malam saya bertemu Engku Sjafe'i dan para tokoh di rumah Engku Dokter Rasyidin. Engku Sjafe'i memberitahu, bangsa kita telah merdeka, Indonesia merdeka."

Mendengar kabar dari perempuan panutan mereka, para murid Diniyyah Putri dengan semangat berteriak “Merdeka”. Kumpulan perempuan tersebut—Rahmah dan murid-muridnya—saat itu juga tanpa rasa ragu segera bertindak menyiapkan upacara pengibaran Merah-Putih di halaman sekolah Diniyyah Putri Padang Panjang.

Segera mereka siapkan bendera. Kain merah dirajut secepat mungkin, namun tetap dengan penuh ketelitian, dengan bahan dan alat yang ada di sekolah, dan untuk kain putih dipakai kain kerudung murid Diniyyah Putri. Mereka gunakan bahan terbaik yang ada saat itu untuk membuat bendera Merah-Putih.

Setelah bendera siap, segera dilaksanakan upacara pengibaran Merah-Putih di halaman Diniyyah Putri. Bendera penjajah diturunkan saja dengan serampangan, diganti dengan Merah-Putih yang dinaikkan dengan sebaik mungkin. Orang-orang yang lewat, “Berhenti. Tercengang. Nanap. Takut. Rakyat menyaksikan dengan dada bergemuruh, Etek Amah, semoga tak celaka ditembak Jepang. Rakyat yang berkaki telanjang itu kelu Mata mereka memandang bendera baru tersebut mulai dinaikkan”.

Haru menyelimuti dada semua yang menyaksikan upacara itu. Ada yang mengatakan bahwa pengibaran Merah-Putih di halaman Diniyyah Putri Padang Panjang terjadi pada 19 Agustus dan ada juga yang bilang pada 20 Agustus. Yang mana pun, yang jelas pascaproklamasi kemerdekaan, Rahmah El Yunusiyyah berserta murid-murid Diniyyah Putri adalah yang pertama mengibarkan bendera Merah-Putih secara resmi di Padang Panjang, bahkan menurut Khairul Jasmi di Sumatra.

Kabar Indonesia merdeka dan Rahmah El Yunusiyyah yang melakukan upacara pengibaran Merah-Putih di Diniyyah Putri tersebar dengan cepat. Sehingga, semakin banyak Merah-Putih yang berkibar di Padang Panjang setelahnya.[]

PEREMPUAN DALAM ARUS PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Oleh: MOH. RIVALDI ABDUL

"Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat", begitu tema peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 pada 17 Agustus 2022. Tema tersebut selain menjadi motivasi bangkit dari pandemi yang melanda negeri ini, juga menggambarkan tekad juang bangsa Indonesia yang pantang menyerah dalam upaya memajukan bangsa.

Berbagai episode perjuangan kemerdekaan Indonesia tersaji dengan epik dalam pentas sejarah. Para pahlawan berjuang melawan penjajah. Gagal, berjuang lagi. Jatuh, bangkit lagi. Penjajah hanya dapat mematahkan bambu runcing, dan tidak pernah mampu mematahkan tekad juang bangsa Indonesia untuk merdeka. Hingga akhirnya, pada 17 Agustus 1945, para pahlawan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Bicara soal kepahlawanan, umumnya, yang paling banyak dikenal adalah pahlawan laki-laki ketimbang perem-

puan. Membahas proklamasi tentu yang terbayang adalah Sukarno-Hatta sebagai proklamator kemerdekaan. Bicara perang melawan penjajah, Pangeran Diponegoro terkenal dengan keberaniannya mengibarkan panji perang melawan penjajah. Soal gagasan mencerdaskan bangsa di masa perjuangan kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara tampil dengan gerakan Taman Siswa-nya. Dan, sosok pahlawan laki-laki lain berserta kiprah mereka.

Ruang kepahlawanan dipandang sebagai ranah keberanian yang sering disalah-artikan merupakan arena laki-laki, sementara perempuan dibayangkan sebagai sosok inferior yang berjuang dari garis belakang.

Tulisan ini tidak bermaksud membandingkan peran antara laki-laki dan perempuan. Melainkan, ingin mengingatkan bahwa perempuan juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Episode perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak miskin dari unsur *her-story*. Banyak perempuan yang berjuang. Para perempuan yang dengan berani dan elegan tampil sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.

SOSOK PEREMPUAN DI MEDAN PERANG MELAWAN PENJAJAH

Dalam perjuangan kemerdekaan di medan perang, salah satu sosok perempuan yang sudah sangat dikenal adalah Cut Nyak Dien. Tentu dalam sejarah perjuangan bangsa tidak hanya Cut Nyak Dien saja perempuan yang tampil dengan berani di garis depan medan perang, namun juga masih banyak, satu di antaranya adalah Nyi Ageng Serang.

Nyi Ageng Serang merupakan salah seorang perempuan pemimpin yang turut serta dalam Perang Diponegoro.

Ketika pecah Perang Diponegoro pada 20 Juli 1825 M, Pangeran Diponegoro meminta bantuan pasukan kepada Nyi Ageng Serang. Permohonan itu, sebagaimana berdasarkan Mashoed Haka dalam *Dunia Nyi Ageng Serang*, disambut oleh Nyi Ageng Serang dengan terjun langsung memimpin pasukannya ke medan perang. Kehadiran Nyi Ageng Serang kala itu, yang selain memimpin pasukan juga

sebagai salah satu paranpara (penasihat) perang, tentu sangat penting dalam memperkuat barisan Diponegoro melawan penjajah.

Nyi Ageng Serang merupakan satu dari banyaknya sosok perempuan yang dengan berani tampil di garis depan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

GAGASAN PEREMPUAN DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Tidak hanya tampil di garis depan medan perang, perempuan juga menyumbangkan gagasan kemajuan dalam perjuangan kemerdekaan. Sosok seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika tentu sudah sangat dikenal. Namun, tidak hanya kedua perempuan itu, melainkan masih ada banyak nama perempuan lain yang turut menyumbangkan gagasan dalam perjuangan kemerdekaan, seperti Sujatin Kartowijono.

Perempuan yang diakui sebagai kolega perjuangan oleh Ki Hajar Dewantara ini memang tidak mengangkat senjata di medan perang. Namun, dia bertempur melalui gagasan kemerdekaannya, khususnya untuk perbaikan nasib perempuan.

Sebagaimana Hanna Rambe dalam *Sujatin Kartowijono: Mencari Makna Hidupku* mengutip perkataan langsung Sujatin Kartowijono bahwa, “Perjuangan kemerdekaan dan perbaikan hak serta nasib wanita menjadi titik utama dalam hidupku sebagai orang muda.”

Sejak 1922, Sujatin Kartowijono terlibat aktif sebagai anggota Jong Java bagian perempuan. Dia terus bergerak terutama dalam memajukan pendidikan. Pada 1926, Sujatin Kartowijono bersama rekan lainnya mendirikan organisasi untuk guru-guru perempuan yang diberi nama Putri Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Suratmin, dkk., dalam *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama* bahwa Sujatin Kartowijono merupakan ketua pertama dari Putri Indonesia.

Sebagai penggerak Jong Java sudah barang tentu Sujatin Kartowijono juga menjadi tokoh Sumpah Pemuda. Dalam tulisannya “Apa Arti Sumpah Pemuda bagi Diriku”, Sujatin Kartowijono menjelaskan, “Setelah Sumpah Pemuda didengungkan, maka kami merasa

pula, bahwa kaum wanita harus dibangkitkan dari keadaan yang masih agak pasif dan diberi semangat nasional. Maka pada suatu waktu oleh organisasi Putri Indonesia diputuskan, supaya mengadakan suatu pertemuan antara kaum wanita. Gagasan ini saya bawa kepada beberapa pemimpin: almarhum Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantoro, Dr. Soekiman, Ibu Soekonto dan lain-lain."

Upaya yang diinisiasi oleh Sujatin Kartowijono itu menghasilkan satu peristiwa bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk pertama kali terselenggara Kongres Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Selain memajukan gerakan perempuan Indonesia kala itu, kongres tersebut juga berperan dalam menggalang semangat nasionalisme menuju Indonesia merdeka.

Demikian bukti bahwa perempuan juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Ada yang dengan berani tampil di garis depan medan perang melawan penjajah, dan ada juga yang dengan elegan menyumbangkan gagasan dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. []

MERAWAT PERDAMAIAN

ASAS KESALINGAN UNTUK POLEMIK WADAS

Oleh: SULMA SAMKHATY MAGHFIROH

Pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah dimulai sejak 2017 silam. Desa Wadas menjadi salah satu desa yang mempunyai peran krusial dalam proyek ini. Hal itu dikarenakan Desa Wadas mempunyai banyak tambang batu andesit yang menjadi bahan utama dalam proses pembangunan Bendungan Bener. Namun, perjalanan proyek ini tidaklah semulus perkiraan banyak orang, karena hingga kini polemik pro dan kontra akan salah satu PSN ini masih mewarnai proses pembangunan bendungan ini.

Hingga maraknya tagar #WadasMelawan di twitter, aku masih bertanya-tanya akan urgensi pembangunan bendungan. Ternyata, menurut paparan Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Sumber Daya Air PUPR, bahwa bendungan itu bermanfaat untuk mengairi lahan seluas 1.940 hektare, menyediakan air baku 1.500 liter per detik dan sebagai

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 6 megawatt. Tidak hanya itu, bendungan itu juga bertujuan untuk mengurangi banjir, konservasi dan pariwisata. Bukankah kesemuanya itu merupakan tujuan baik dari pihak pemerintah untuk kesejahteraan warganya? Lantas mengapa warga Wadas masih terang-terangan menunjukkan sikap perlawanannya?

Dalam wawasan kebangsaan, setidaknya ada enam asas yang mengatur tentang komitmen bersama antara warga dengan pemerintah. Keenam asas itu adalah kepentingan atau tujuan yang sama, solidaritas, keadilan, kerja sama, kejujuran, dan kesetiaan terhadap kesepakatan. Jika melihat pada keenamnya, sudahkah terjadi pada Wadas? Apakah kepentingan pemerintah sudah mengakomodir kepentingan dari warga Wadas? Warga Wadas sangat menjaga lingkungan mereka, sebagai tanah air peninggalan nenek moyang mereka, tempat mereka hidup dan menghidupi keluarganya. Butuh kesalingan antara pemerintah dan Wadas, agar kepentingan dan tujuan baik dari keduanya dapat terselenggara dengan baik.

Perihal solidaritas pada asas kedua wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai bentuk kesalingan dalam rasa dan nasib. Hal ini penting untuk dilakukan agar pemerintah maupun warga Wadas dapat saling merasakan dan mengerti keadaan satu atas lainnya. Sehingga keadilan yang merupakan asas lainnya dapat dilakukan oleh keduanya. Dengan keadilan, maka tidak akan ada lagi perasaan paling dirugikan atau diuntungkan, karena semuanya berjalan sudah sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dan asas keadilan ini sangat berkaitan erat dengan asas selanjutnya, yakni kerja sama. Hanya dengan saling bekerja sama yang dilandasi dengan asas kejujuran, Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan dengan minim polemik.

Dan asas yang terakhir dalam wawasan kebangsaan, yakni kesetiaan terhadap kesepakatan menjadi asas penentu dari semua asas yang sudah ada sebelumnya. Jika dalam proyek pembangunan Bendungan Bener yang melibatkan Wadas sudah menjalankan keenam asas dengan penuh kesalingan, aku yakin proyek ini tidak lagi menjadi polemik melainkan menjadi sarana penguatan rasa kebangsa-

an bagi setiap warga negara. Kemudian, muncul lagi pertanyaan tentang bagaimana langkah awal untuk melakukan keenam asas tersebut? Jawaban yang tebesit di benakku hanya ada satu, yakni komunikasi. Komunikasi mampu menjadi jembatan penghubung dari semua asas wawasan kebangsaan yang ada.

Ada enam pola komunikasi yang dicontohkan dalam Al-Quran, yakni: (1) Dengan perkataan yang benar (*qaulan sadida*) "*...wal yaquulu qaulan sadiida*" (...dan katakankah perkataan yang benar. QS. An-Nisa:9); (2) Tepat sasaran, komunikatif, dan mudah dimengerti (*qaulan baligha*) "*..waqul lahum fii anfusihim qaulan baliigha*" (...dan katakankah kepada mereka perkataan yang berbekas di jiwa mereka. QS. An-Nisa:63); (3) Perkataan yang baik (*qaulan ma'rufa*) "*...wa qulna qaulan ma'ruufan*" (...dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. QS. Al-Ahzab:32); (4) Perkataan yang mulia (*qaulan karima*) "*...waqul lahumaa qaulan kariima*" (...dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. QS. Al-Isra:23); (5) Perkataan yang lembut (*qaulan layyinan*) "*...faquulaa lahu qaulan layyinan*" (...maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. QS. Thaha:43-44); dan (6) Perkataan yang ringan (*qaulan maysura*) "*...faqul lahum qaulan maysuura*" (...maka katakankah kepada mereka perkataan yang mudah. QS. Al-Isra:28).

Setidaknya jika dalam pembangunan Bendungan Bener yang melibatkan Wadas, melibatkan kesalingan antara pemerintah dan warga dalam memenuhi keenam asas wawasan kebangsaan dengan saling mengerti kepentingan keduanya, solidaritas, saling berlaku adil, bekerja sama, jujur, dan setia yang dimulai dengan komunikasi kesalingan dalam berkata benar, tepat sasaran, baik, mulia, lemah lembut, dan mudah dimengerti, maka polemik antara warga Wadas dengan pemerintah akan segera berakhir. Sehingga harmoni kebangsaan akan terjalin di antara keduanya.[]

MENCEGAH ULTRANASIONALISME INDIA TUMBUH DI INDONESIA

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Dalam beberapa hari terakhir, kejadian diskriminatif terhadap Muslim di India semakin menjadi-jadi. Kasus ini berawal dari keputusan pemerintah daerah di Distrik Udupi untuk mendukung sekolah-sekolah memberlakukan larangan jilbab kepada para siswi pemeluk agama Islam, tak ayal kebijakan itu menyebabkan protes dan kekerasan yang meluas. Video-video rekaman yang viral di media sosial memperlihatkan bagaimana keputusan kontroversial itu menumbuhkan aksi brutal lain dari kalangan massa India yang merisak siswi berjilbab ketika berangkat sekolah, dari sengaja menyiramkan air hingga meneriaki mereka dengan kata-kata tak pantas.

Pekan lalu, perguruan tinggi lain di negara bagian yang sama juga mulai memberlakukan larangan setelah beberapa siswa Hindu, yang didukung oleh kelompok Hindu sayap kanan, memprotes bahwa jika jilbab diizinkan di ruang kelas,

mereka harus diizinkan memakai selendang safron. Safron adalah warna yang telah menjadi umum dikaitkan dengan nasionalisme Hindu. Alih-alih mengakomodir kepentingan semua pihak, kelompok sayap kanan yang menguasai pemerintahan malah mengembuskan isu bahwa pembolehan jilbab akan semakin menumbuhsuburkan bibit terorisme muslim di wilayah India. Tak pelak, kasus diskriminasi pun berlarut-larut dan masih berlanjut sampai sekarang.

Di tingkat global, fenomena ultranasionalisme berbalut agama seperti di India sedang banyak tumbuh di negara-negara bercorak demokrasi. Meluasnya penggunaan seruan politik yang diilhami agama dapat dideteksi juga di Turki, Amerika Latin, Eropa Barat, dan negara-negara pasca-Uni Soviet. Salah satu faktor pemicunya adalah propaganda beragam politisi yang menghalalkan segala cara untuk meraih simpati secara instan dari masyarakat. Sementara itu, di Indonesia, merujuk riset akademisi Universitas Muhammadiyah Malang: Sihidi, Roziqin, dan Suhermanto (2020), dan Universitas Sumatra Utara: Prayogi dan Adela (2019), pilpres dan pilgub DKI lalu telah menjadi bukti bahwa gerakan politik berbasis nasionalisme agama nyatanya berkembang kian ekstrem dan menjurus diskriminatif.

Hal ini tentu merupakan alarm bagi kita agar peristiwa di India tidak semakin berkembang dan kian memarginalkan kelompok-kelompok minoritas di sini. Apalagi laporan terakhir dari Setara Institute (2021) menunjukkan, jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang paling banyak terjadi oleh aktor non-negara yakni tindakan intoleransi, yakni 62 tindakan. Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, melanjutkan, secara lebih rinci ada 32 tindakan pelaporan penodaan agama, 17 tindakan penolakan mendirikan tempat ibadah, dan 8 tindakan pelarangan aktivitas ibadah yang dilakukan aktor non-negara.

Tindakan-tindakan diskriminatif tadi tentu menjadi PR bagi kita semua agar ke depannya dapat lebih menghargai kelompok yang berbeda keyakinan. Terlebih Nabi Muhammad Saw. sendiri telah

meneladankan bagaimana kaum mayoritas yang dipimpinnya tidak pernah bertindak sewenang-wenang kepada kaum Nasrani dan Yahudi. Hal ini termaktub dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Husein Haikal, seorang tokoh pembaharu politik Mesir. Belajar dari contoh Rasul sebagai pemimpin politik, alih-alih memaksa semua warganya memeluk Islam, Nabi Muhammad justru membangun komunitas religio-politik semasa di Madinah. Di sana kaum Muslim, Nasrani, dan Yahudi hidup berdampingan dan saling mengupayakan konsolidasi melalui perumusan Piagam Madinah. Piagam Madinah dalam realitasnya dapat dikatakan sebagai dokumen politik yang menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, jaminan atas keselamatan harta benda, dan larangan melakukan kejahatan. Menilik poin-poin utamanya, sangat jelas telihat bahwa corak politik Rasulullah tidak berporos pada ultranasionalisme ekstrem berbalut agama, justru sebagai pemimpin yang bijak, beliau justru mempersilakan kaum non-Muslim memperoleh hak yang sama, seperti layaknya umat Islam.

Lalu, mengapa paham ultranasionalisme berbalut agama kian mengemuka di berbagai negara? Merujuk pendapat dari Associate Professor yang juga Kepala Center of Islamic Finance di Comsats University Lahore, Pakistan, Dr. Abdus Sattar Abbasi, salah satu penyebabnya adalah runtuhnya era keemasan peradaban Islam yang berdampak pada lambatnya pembangunan SDM yang mengakibatkan mispersepsi ajaran dan nilai-nilainya oleh umat Muslim. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemerintahan yang kuat berintegritas selama masa-masa itu, yang akhirnya mendorong mayoritas masyarakat Muslim untuk mengamankan kepentingan lokal atau pribadi mereka. Belum lagi dampak negatif kolonisasi yang semakin memperburuk kecerdasan intelektual dan komunal masyarakat Muslim.

Padahal jika melihat sejarah Islam masa lampau, peradaban Islam menciptakan negara super-kontinental, di dalam dominasinya hidup ratusan juta orang, dari berbagai keyakinan dan asal etnis. Islam menciptakan kepemimpinan yang tercerahkan yang meme-

lihara budaya, keberlanjutan, keragaman, dan keberanian yang menghasilkan 800 tahun penemuan dan kemakmuran. Jangkauan perdagangan mereka meluas dari Amerika Latin hingga Cina. Kini, yang terjadi justru fanatisme sempit yang memandang bahwa segala budaya lokal harus ditolak mentah-mentah, seperti kejadian pembuangan sesajen di Semeru dan penolakan tradisi sedekah laut beberapa waktu lalu.

Sedangkan kalau kita menginginkan Indonesia tidak tersegregasi seperti di India, kuncinya bukan ultranasionalisme berbasis agama. Justru, menurut Kiai Yusuf Hasyim, Ketua PCNU Kabupaten Pati masa khidmah 2019-2014, Islam dan nasionalisme harus diinternalisasi secara sinergis. Islam dan nasionalisme sepatutnya berjalan beriringan dan berkesalingan. Tidak harus selalu mengedepankan label atau simbol-simbol Islam. Yang terpenting nilai-nilai Islam secara substantif bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[]

MENGUATKAN DAKWAH PERDAMAIAN INDONESIA DI TINGKAT GLOBAL

Oleh: HASNA AZMI FADHILAH

Perdamaian... perdamaian...
Perdamaian... perdamaian...
Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai

Penggalan lirik lagu "*perdamaian*" dari grup Nasida Ria tersebut kian relevan di tengah konflik membara di beberapa wilayah dunia. Terakhir, perang antara Rusia dan Ukraina meledak setelah bertahun-tahun terus terjadi gesekan akibat berbagai isu sosial politik. Merujuk kantor berita Al Jazeera, pertikaian antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah panjang, yang bisa ditelusuri hingga 1.200 tahun yang lalu. Menariknya, dua negara ini sejatinya sama-sama muncul dari tepi Sungai Dnieper, di Kievan Rus. Walau begitu, karakteristik keduanya amatlah berbeda, baik dari segi sejarah, bahasa, hingga dinamika pemerintahan. Terlepas dari perbedaan yang ada, Vladimir Putin, Presiden Rusia

sekarang berulang kali menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina sesungguhnya bagaikan saudara karena merupakan satu bagian dari peradaban Uni Soviet. Klaim dari Putin tadi justru tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak Ukraina. Terlebih pada Senin, 21 Februari 2022 lalu, pemerintah Rusia malah memberikan dukungan penuh terhadap dua wilayah Ukraina Timur yang ingin memerdekakan diri, yakni Donetsk dan Luhansk.

Akibat campur tangan Rusia dalam persoalan politik Ukraina, pemerintah Ukraina pun tak tinggal diam. Usai Rusia memulai melancarkan serangan ke Ukraina, militer Ukraina terus memberikan perlawanan. Dilansir dari BBC, pasukan tentara Ukraina mengaku telah menembak jatuh sebuah pesawat Rusia yang mengudara di wilayah mereka. Serangan itu disebut-sebut sebagai tindakan balasan atas apa yang dilakukan Rusia kepada pasukan penerjun payung Ukraina di Bandara Luhansk pada tahun 2014.

PELUANG INDONESIA SEBAGAI JURU DAMAI

Memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina tentu tak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga stabilitas ekonomi politik global. Menurut analisis Jason Furman, seorang profesor Universitas Harvard sekaligus mantan penasihat Presiden Amerika Serikat Barack Obama, efek langsung perang Rusia-Ukraina terhadap kondisi umum internasional mungkin tak langsung terasa, namun bisa dipastikan bahwa konsekuensi ekonomi jangka panjang untuk seluruh dunia akan jauh lebih ringan daripada Rusia, tetapi tantangannya akan terus-menerus ada bagi para pembuat kebijakan. Salah satu risikonya ditengarai akan mengakibatkan inflasi yang tak terkendali. Dan, jika itu benar terjadi, pekerjaan rumah bank sentral tentu akan semakin bertumpuk.

Lebih lanjut, anggaran pertahanan mungkin akan semakin meningkat di Eropa, AS, dan beberapa negara lain. Meski tidak akan mengurangi pertumbuhan PDB, tetapi kesejahteraan rakyat bisa jadi terancam, karena sumber daya yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk konsumsi atau investasi di bidang pendidikan, layan-

an kesehatan, atau infrastruktur, justru akan dialihkan ke urusan militer.

Melihat panasnya pertikaian antara Rusia dan Ukraina, sebagai negara sahabat, tentu Indonesia tidak bisa tinggal diam. Apalagi, merujuk sejarah masa lampau, Indonesia merupakan salah satu inisiator gerakan Non-Blok di tahun 1961, yang salah satu tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan dunia akibat perang dan untuk mendorong terwujudnya perdamaian internasional. Peran Indonesia sebagai juru damai yang ingin membantu menengahi konflik inilah yang harus dilestarikan, terutama ketika Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Apalagi Indonesia telah sejak lama menjalin hubungan kerja sama, baik dengan Rusia dan Ukraina. Dari sana, Indonesia berpeluang untuk bisa memanfaatkan kedekatan hubungan dan posisi untuk ikut mendorong penyelesaian perang melalui meja perundingan, bukan lewat medan perang.

TELADAN DAKWAH PERDAMAIAN RASUL

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dakwah perdamaian Indonesia juga mengakar kuat dari ajaran Islam. Bahkan Islam berasal dari kata سَلِمَ yang artinya selamat, bebas dan damai. Kemudian, terdapat istilah السَّلاَمُ الْعَلَم yang diartikan perdamaian dunia. Dari situ saja, sangat terlihat jelas bahwa Islam menitikberatkan keselamatan umat manusia.

Dakwah perdamaian Islam ini dicontohkan pula oleh Rasul dan para sahabatnya semasa hidup. Selama melakukan syiar Islam, Rasulullah Saw. selalu berupaya keras menghindari pertumpahan darah, meski itu semua tak mudah dalam prosesnya. Pribadi luhur beliau dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam terlihat nyata dari bagaimana beliau memberlakukan tawanan perang. Tak pernah sedikit pun beliau berperilaku kasar, meski itu kepada musuh bebuyutan. Justru sebaliknya, beliau tetap memberikan perlindungan dan memperhatikan kesehatan mereka.

Jauh sebelum ekspansi Islam ke luar jazirah Arab tepatnya pada saat memimpin masyarakat Madinah, Rasulullah Saw. bahkan sukses mengembangkan prinsip toleransi dan desentralisasi menyangkut keberadaan agama-agama lain. Dengan toleransi, Rasulullah Saw. menginginkan agar umat Islam memandang agama lain bukan sebagai musuh, namun sebagai kawan dalam menciptakan masyarakat damai. Dengan desentralisasi, Rasulullah Saw. memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk menjalankan agamanya meskipun penyelenggara pemerintahan adalah umat Islam.

Khazanah Islam yang sarat nilai-nilai perdamaian tadi tentu merupakan modal berharga bagi Indonesia untuk terus melanjutkan misi dakwah mulia tersebut, tak hanya di tingkat nasional, tapi juga global. Hal tersebut selaras dengan pesan dalam QS. Al Hujurat: 9, "..dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."[]

MEMBUMIKAN KARAKTER BANGSA DALAM REPRESENTASI MEDIA

Oleh: HASNA AZMI FADHILAH

Ada dua berita baik yang muncul di berbagai lini masa media sosial pada bulan Maret 2022. Pertama, aktivis sosial sekaligus perintis pendidikan alternatif asal Indonesia, Butet Manurung terpilih menjadi salah satu figur yang direplika menjadi 12 boneka edisi khusus dari Barbie, dalam rangka menandai Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2022 lalu. Boneka Barbie Butet ditampilkan dalam busana daerah yang memakai atasan dari batik berwarna merah muda dipadukan dengan kain batik bernuansa merah muda dan hitam dengan corak bunga. Butet tak hanya sendiri dalam menampilkan keberagaman citra perempuan, ia tampil bersama 11 perempuan dari berbagai belahan dunia lainnya untuk memperkenalkan pada anak-anak seluruh dunia bahwa karakter perempuan di dunia tak hanya sebatas yang berkulit putih, tapi ada yang berkulit cokelat, mata sipit, dan bahkan berambut ikal.

Merujuk laman resmi perusahaan produsennya, Mattel, pembuatan '*Barbie Role Models*' bertujuan untuk mendorong anak-anak untuk menemukan inspirasi dari tokoh-tokohnya yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, ras, dan agama. Di saat yang sama, perusahaan boneka asal negeri Paman Sam tersebut menyadari bahwa selama ini mereka menerapkan kebijakan yang terlalu eksklusif karena lebih banyak menampilkan tokoh kulit putih saja. Tak hanya itu, harapan ke depannya adalah Barbie dapat berkontribusi dalam usaha pemberdayaan anak perempuan dan menginspirasi mereka untuk mengejar impian apa pun yang mereka miliki.

Kabar positif lainnya berasal dari buku ajar bagi sekolah dasar terbaru yang ditampilkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dalam edisi terbaru bahasa Indonesia, laman sampulnya memperlihatkan tiga anak SD: seorang anak perempuan berjilbab, teman laki-lakinya yang penyandang disabilitas, dan anak perempuan lain berkulit sawo matang dan berambut keriting. Halaman depan yang memotret karakter heterogen dari pelajar sekolah dasar di Indonesia tadi, tentu patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, selama ini buku referensi sekolah kita cenderung monoton, dan terdapat ketidaksesuaian antara konsep dan materi yang disajikan (Asy'ari, 2017). Oleh karenanya, inovasi yang diterapkan oleh Kemendikbud perlu diapresiasi, agar tidak hanya sebatas dalam periode jangka pendek saja, tetapi ketika tampuk pimpinan sekarang diganti, tradisi baik ini dapat terus dilanjutkan.

MENGAPA PENTING UNTUK MENAMPILKAN BERAGAM REPRESENTASI INDIVIDU DI MEDIA?

Meski terkesan sepele, keberagaman representasi yang ditampilkan oleh Mattel dalam bonekanya, dan Kemendikbud dalam ilustrasi bahan ajarnya menunjukkan bahwa representasi di media memegang peranan penting dalam upaya internalisasi nilai-nilai luhur pada generasi muda (Qian dkk, 2015).

Lebih rincinya, media yang kita konsumsi, baik itu cetak maupun daring memiliki pengaruh besar terhadap cara kita melihat, memahami, dan memperlakukan orang. Dan dampaknya sendiri ternyata amat luas, tidak sebatas pada sesama atau dari ras atau etnis kita sendiri, tetapi juga lintas budaya hingga negara. Beberapa dekade terakhir, banyak penelitian memperlihatkan bagaimana representasi etnis-rasial di media memengaruhi orang dewasa dalam bersikap, dan selanjutnya mendorong mereka memberikan label, mana yang dicap sebagai "normal" dan "baik" atau "berbeda" dan "buruk". Dan representasi tersebut secara tidak langsung memiliki implikasi dunia nyata dari waktu ke waktu. Untuk anak-anak, representasi media mungkin lebih bermakna karena mereka mencari isyarat di lingkungan sosial mereka untuk mengembangkan dan membentuk pemahaman mereka tentang kelompok etnis-ras (Rogers, dkk, 2021; Shivega, 2021).

Tak heran, sedikitnya representasi karakter yang dimunculkan di media selama beberapa dekade lalu hingga saat ini, turut berdampak pada bagaimana rasisme dan ektremisme muncul. Kabar buruknya, jika ada karakter non-kulit putih yang ditampilkan di media, acapkali mereka digambarkan secara negatif. Di Amerika misalnya, meskipun 18% dari populasinya berasal dari kelompok warga Latin, namun mereka hanya ditampilkan dalam media dengan proporsi hanya 5% dari film-film Hollywood yang ada. Bahkan karakter individu dari golongan kulit berwarna dalam acara yang paling banyak ditonton oleh anak-anak usia 2 hingga 13 tahun lebih cenderung digambarkan sebagai pelaku kekerasan. Sedangkan untuk tokoh perempuan dari semua kelompok etnis-ras non-kulit putih dalam program dewasa lebih cenderung muncul sebagai penggoda, atau karakter lain yang lekat dengan objektifikasi seksual (Mastro dan Robb, 2021).

Melihat kondisi ini, tentu mengapresiasi langkah Mattel dan Kemendikbudristek saja tidak cukup. Orangtua, pelaku pendidikan hingga pekerja media perlu berupaya keras untuk tidak hanya menampilkan karakter mayoritas dalam berbagai konten yang mereka

buat. Pembuat konten memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keragaman dan meningkatkan inklusi di media yang mereka buat untuk para generasi muda. Sebab, mereka memiliki kesempatan luar biasa untuk menggunakan kekuatan mereka melalui beragam jenis cerita, tokoh yang dibalut dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Apalagi dengan modal sosial cukup tinggi, diversitas Indonesia pasti akan dinikmati beragam kalangan, tak hanya sebatas warga lokal semata. Dan efek jangka panjangnya adalah pemilik media ini akan membantu kita semua membentuk dunia yang kita inginkan, dimana *Bhinneka Tunggal Ika* tidak hanya dijadikan sebagai slogan. Namun, direalisasikan secara nyata lewat media.[]

SALAWAT BANI HASYIM, SALAWAT PERDAMAIAN

Oleh: ASPIYAH KASDINI

اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى اله وسلم تسليما

Salawat ini dikenal dengan salawat Bani Hasyim. Dalam tradisi ikhwan TQN Ponpes Suryalaya, salawat ini merupakan salah satu amaliyah yang memiliki banyak faedah bagi para pengamalnya, terutama tentang hajat dan meminta pertolongan dalam kondisi yang sangat mendesak. Dalam literatur lisan yang dipercaya dan masyhur, salawat ini didapatkan oleh Abah Sepuh (Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad) saat diminta oleh gurunya, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, untuk mengambil ijazah dan *ngalap barokah* kepada Syekh Kholil Bangkalan.

Di antara 12 orang murid Syekh Tolhah yang diminta untuk berangkat dari Cirebon ke Madura, hanya Abah Sepuh seorang diri sajalah yang dapat tiba di Madura dan bertemu Syekh Kholil. Oleh beliau, Abah Sepuh diberikan

ijazah salawat Bani Hasyim ini dan kemudian diberikan pula perahu yang dapat dinaiki untuk satu orang, untuk kembali ke Cirebon. Siapa yang dapat menyana, salawat ini menjadi keistimewaan untuk Abah Sepuh bahkan sejak pertama kali diberikan kepadanya. Dengan melantunkan salawat tersebut, Abah Sepuh dapat sampai kembali di Cirebon dengan selamat dan waktu yang tergolong cepat. Kedatangan Abah Sepuh telah dinanti oleh gurunya, Syekh Tolhah/ Mama Guru Agung, dengan bahagia karena muridnya tersebut telah selesai menjalankan tugas yang diberikan olehnya dengan baik.

Oleh Abah Sepuh, salawat Bani Hasyim ini diijazahkan kembali kepada anaknya, Abah Anom, untuk terus diamalkan dan dilestarikan. Salawat ini bagi para pengamalnya memiliki banyak keistimewaan yang berbeda antara satu pengamal dan pengamal lainnya. Hal tersebut dikarenakan hajat dan masalah kehidupan manusia yang berbeda-beda. Hingga saat ini, salawat tersebut masih terus dilantunkan dan diamalkan sebagai wirid oleh para pengamal TQN Ponpes Suryalaya.

Semua umat Muslim mengakui, bahwa membaca salawat kepada Kanjeng Nabi memiliki banyak manfaat dan merupakan perintah-Nya (QS. Al-Ahzab: 56), sehingga tidak sedikit kaum musliminmuslimat yang memberikan waktu khusus untuk dapat membaca salawat kepada Kanjeng Nabi dengan beragam bacaan dan jumlah tertentu. Tidak hanya syafaat akhirat yang akan diterima oleh para pembacanya, tetapi juga syafaat dunia yang dapat langsung dirasakan oleh mereka. Bagaimana salawat ini dapat menjadi penolong di dunia? Salah seorang wakil talkin dari Abah Anom, Almarhum KH. Nur Muhammad Suharto, menjelaskan hal tersebut dengan mengklasifikasinya menjadi dua kategori:

Pertama, pertolongan yang bersifat zahir. Salawat dapat menjadi penolong di dunia bagi siapa pun yang dengan tulus-ikhlas melantunkannya kepada Kanjeng Nabi. Seperti para pengamal salawat Bani Hasyim, salawat ini terbukti banyak memberikan pertolongan-pertolongan duniawi kepada mereka, seperti terhindar dari hujan, selamat dari begal, dimudahkan pada saat ujian, penyakit

tumor yang menghilang, dan masih banyak lagi. Pertolongan-pertolongan yang dapat dibuktikan pula oleh orang lainnya ini adalah pertolongan yang merupakan buah dari pengamalan salawat yang bersifat zahir atau dapat diindrai (dibuktikan dan dirasakan oleh kelima pancaindra).

Kedua, pertolongan yang bersifat batin. Salawat dapat menjadi penolong yang bersifat batiniah adalah ketika ia dibacakan, ia dapat memberikan pengaruh pada ketenangan, kedamaian, kerelaan, dan kebahagiaan jiwa para pembacanya. Menurut KH. Nur Muhammad Suharto, pengaruh tersebut dapat dirasakan apabila setiap insan mampu menghayati setiap kalimat berikut makna yang terkandung dalam salawat yang diwiridkan.

Khususnya dalam salawat Bani Hasyim, dalam salawat tersebut ditegaskan bahwa Kanjeng Nabi adalah seorang Nabi yang berasal dari bangsawan Bani Hasyim. Seperti yang tertulis dalam sejarah, Hasyim bin Abdul Manaf adalah buyut Kanjeng Nabi dari jalur ayahnya, dan marga Bani Hasyim merupakan marga paling terhormat dalam suku Quraisy. Mereka yang terlahir dari garis keturunan ini merupakan orang-orang terpandang di Makkah. Hingga saatnya Kanjeng Nabi diutus menjadi rasul, pertentangan datang dari para pemuka sosial di sana, termasuk oleh pamannya sendiri yang juga berasal dari kaum Bani Hasyim, ia adalah Abu Lahab.

Nama Abu Lahab tentunya tidak asing bagi setiap umat Muslim, karena namanya dan istrinya diabadikan dalam Al-Quran berserta karakternya yang sangat memerangi ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi (lihat QS. Al Lahab 1-5). Abdul Uzza bin Abdul Muthallib adalah nama asli dari Abu Lahab, ia ditakdirkan lahir sebagai tokoh yang memerangi dakwah Kanjeng Nabi yang berasal dari keluarganya sendiri. KH. Nur Muhamamd Suharto menambahkan, dalam konteks salawat Bani Hasyim, di dalamnya kita juga senantiasa memohonkan keselamatan untuk Abu Lahab yang merupakan bagian dari Bani Hasyim.

Tentunya penafsiran ini akan bersifat kontroversi, mengingat akhlak Abu Lahab yang sangat kuat dalam memerangi ajaran yang

dibawa Kanjeng Nabi. Namun bukan akhlak Abu Lahab yang menjadi titik utamanya, melainkan sifat menerima dan *legowo* atas perbuatan zalim yang mungkin diterima seseorang selama menjalani kehidupan di dunia. Siapa pun itu pasti pernah merasa tidak cocok terhadap suatu pemahaman, ideologi atau juga sikap yang ditunjukkan orang lain terhadap dirinya. Perbedaan akan hal-hal tersebut acap kali menimbulkan beragam konflik di tengah masyarakat yang heterogen. Terlebih jika kita menunjukkan respons perlawanan yang serupa, tentu konflik akan terjadi tanpa dapat dihindari. Konflik ini tentu memberi banyak kerugian yang bersifat batiniah dan psikis, seperti ketakutan, resah, marah, dengki, hasud, dan lainnya.

Kendati makna *Alu*/keluarga Nabi dalam teks salawat itu beragam (bisa dimaknai keluarga seiman, bisa juga dimaknai keluarga sedarah), dalam penafsiran KH. Nur Muhammad Suharto beliau memasukkan semua makna tersebut untuk memperoleh maksud yang lebih komprehensif. Maksud yang menekankan bahwa dunia ini diciptakan secara seimbang, apa pun itu selalu memiliki dua sisi yang berbeda, ada baik dan buruk, ada terang dan gelap, ada panas dan dingin, semuanya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Mengetahui segalanya.

Termasuk tentang sifat dan akhlak manusia, Abu Lahab kah atau justru itu kita, kita semua berpotensi untuk menjadi baik dan buruk, sehingga pemaknaan KH. Nur Muhammad Suharto agar salawat, Bani Hasyim khususnya, dapat menjadi penolong secara batiniah ialah agar kita senantiasa berfokus untuk mengevaluasi akhlak diri, bukan akhlak orang lain. Juga agar kita semua senantiasa terus mendoakan kebaikan serta keselamatan untuk siapa pun tanpa terkecuali (baik yang menyayangi ataupun yang memerangi kita). Dengan demikian, jiwa akan terasa tenang, damai, dan bahagia. Jika masing-masing pribadi mampu menciptakan kedamaian dalam dirinya, maka ia tidak akan menimbulkan perpecahan terhadap sesamanya.[]

3 PESAN DAMAI DALAM BERKURBAN

Oleh: **ASPIYAH KASDINI**

Salingers[1], bahagia sekali kita masih diberi usia untuk bertemu kembali dengan bulan Dzulhijjah yang mulia. Kita akan kembali merayakan hari besar yang selalu dinanti-nanti, hari besar yang identik dengan penyembelihan hewan kurban dan diharamkannya berpuasa selama tiga hari bagi kita yang mengimaninya. Sungguh bulan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan buat kita semua. Namun, apakah semarak hari raya ini hanya sebatas bersifat lahiriah saja, yang akan hilang seiring dengan daging kurban yang habis disantap bersama? Tentunya kita tidak ingin demikian, berikut saya rangkumkan 3 pesan damai dalam berkurban yang dapat kita jadikan santapan setiap harinya sebagai oleh-oleh hari raya yang agung ini:

Pertama, damai terhadap diri sendiri. Jika melihat pada alur sejarahnya, semua agama Abrahamik meyakini bahwa

1 Panggilan untuk pembaca mubadalah.id

peristiwa kurban adalah peristiwa yang melibatkan dua Nabi dan juga Rasul yang merupakan orangtua dan anak yang saling mencintai. Ketaatan mereka diuji dengan perintah untuk menyembelih sang anak, Ismail. Rayuan iblis tidak membuat gentar Nabi Ibrahim untuk tetap menaati perintah-Nya, hingga akhirnya Allah Swt. mengganti sosok Ismail dengan domba sebagai jawabannya.

Nas tentang kisah inilah yang kemudian menjadi dasar bagi umat Muslim untuk melakukan kurban. Tentunya tidak semua Muslim mampu melaksanakan kurban, namun sejatinya kita semua dapat melakukan kurban yang hakiki, yakni kurban pada diri sendiri. Seperti isi khutbah yang sering disampaikan KH. Sandisi dalam salat Idul Adha tiap tahunnya di Masjid Nurul Asror Pondok Pesantren Suryalaya, bahwasanya Idul Adha adalah momen untuk muhasabah diri, momen agar umat Muslim menyembelih sifat-sifat hewani yang terdapat dalam diri, seperti riya, dengki, takabur, ujub, bakhil, buruk-sangka, tamak, pemarah, dan lainnya.

Sifat-sifat tersebut harus dikikis dan dikontrol, karena sifat-sifat tersebut merupakan sifat tercela yang dapat membawa diri pribadi seorang Muslim menuju kepada kesengsaraan hidup. Sebagaimana yang dikatakan Abah Sepuh dalam nasihat yang ditujukan untuk murid-muridnya, "...karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. (Tanbih: 1956)" Dengan demikian, jika mengharapkan kebahagiaan dan perdamaian diri, tidak lain caranya adalah dengan mengorbankan serta melepaskan seluruh akhlak tercela yang terdapat dalam diri kita, bukan menuntut dan menunggu pengorbanan yang dilakukan oleh orang lain.

Kedua, damai terhadap sesama. Pada hari raya Idul Adha tentu banyak umat Muslim yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk melaksanakan kurban atas dirinya, maupun orang-orang yang dikasihinya. Hewan kurban yang dipilih tentu beragam, ada yang berkurban dengan unta, sapi, kambing, domba, dan hewan lainnya yang sesuai dengan tuntunan *syara'*. Hewan kurban yang disembelih ini tentu tidak dikonsumsi sendiri oleh mereka yang berkurban,

melainkan dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat yang berada di dalam atau bahkan di luar lingkungan dari tempat mereka tinggal. Dari sini dapat terlihat, dengan berbagi terhadap sesama akan mendatangkan kebahagiaan yang mendamaikan bagi jiwa-jiwa yang berkurban

Daging adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki harga yang cukup mahal, sehingga mendapatkan daging kurban bagi masyarakat umum adalah suatu hal yang sangat membahagiakan, karena dapat menikmati lezatnya daging tanpa harus mengeluarkan sejumlah nominal tertentu. Daging diolah dengan berbagai macam racikan, dan dinikmati dengan berkumpul bersama orang-orang terkasih. Sungguh menjadi momen yang membahagiakan yang dapat mendatangkan kedamaian dalam jiwa siapa pun yang merasakannya. Di saat kebahagiaan terpancar dari si pemberi dan penerima, di saat itulah doa-doa kebaikan terucap dari lisan-lisan umat Muslim yang dipanjatkan dengan tulus-ikhlas, sehingga kebahagiaan dan kedamaian adalah hak dan milik bersama yang diberikan oleh-Nya.

Hal ini senada dengan hasil penelitian Profesor Michael Norton, Harvard University, yang menyatakan bahwa dengan memberi akan meningkatkan kebahagiaan dalam diri orang yang bersangkutan. Juga hasil penelitian Jorge Moll, National Institute of Health, yang membuktikan bahwa dengan berbagi akan mengaktifkan bagian-bagian otak yang terhubung dengan kenikmatan, koneksi sosial, dan kepercayaan yang keseluruhannya menciptakan efek pendar yang hangat. Demikianlah cara Tuhan menyampaikan rahman-rahim-Nya melalui *syara'*-Nya.

Ketiga, damai sebagai anugerah Tuhan Yang Esa. Sebagai bentuk syukur dan penghambaan kepada-Nya, maka umat manusia melaksanakan ibadah-ibadah yang semata-mata dilakukan hanya karena-Nya. Walaupun semua hasil dari ibadah tadi akan kembali kepada yang melakukannya, namun pada niat dan kesungguhannya haruslah karena-Nya. Karena Dia yang memiliki kuasa untuk menyempurnakan usaha manusia untuk menyembelih sifat hewani

dalam dirinya, dan juga atas kuasa-Nya lah orang-orang dapat berbagi atas rezeki yang ditakdirkan atas mereka, sehingga senantiasa menghadirkan-Nya dalam segala sendi kehidupan merupakan KUNCI untuk mewujudkan dan menciptakan perdamaian dalam segala bentuk relasi yang ada.

Ringkasnya, esensi dari berkurban adalah tentang mengingat-Nya, tentang wujud diri-Nya yang dapat ditemukan dalam jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang akan melahirkan segala bentuk perdamaian. Semoga hari raya Idul Adha kali ini, kita semua dapat merasakan kehadiran Tuhan yang sangat dekat dengan kita, sebagaimana janjinya, bahwa “Kami lebih dekat darinya daripada urat lehernya (QS. Qaf:16).[]

MEMASTIKAN KEBIJAKAN RAMAH PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN

PEREMPUAN, KEBANGSAAN, DAN KEADILAN GENDER

Oleh: IRFAN HIDAYAT

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dengan begitu, segala wujud dan bentuk kebebasan diperbolehkan di Indonesia selama tidak keluar atau bertentangan dengan lima sila Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) negara, termasuk dalam permasalahan gender di tengah masyarakat.

Sila ke-lima dari Pancasila berbunyi 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia'. Hal ini berarti keadilan yang dimaksudkan ialah semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut harus bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, bukan oleh segelintir orang, kelompok atau golongan tertentu.

Implementasi keadilan bukan cuma sebatas memberikan sanksi yang sepadan terhadap seseorang atau pelaku yang melanggar hukum. Akan tetapi, memberikan hak-hak

yang sama bagi seluruh masyarakat dan memosisikan masyarakat secara setara dalam hidup bernegara. Karena di dalam ideologi Pancasila tidak ada istilah mayoritas maupun minoritas. Semua rakyat Indonesia mempunyai hak kesetaraan dan dilindungi oleh Undang-undang.

KEADILAN SOSIAL PEREMPUAN

Secara garis besar, rakyat dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tinggal di dalam sebuah negara tertentu, dengan tanpa adanya pengecualian terhadap jenis kelamin, usia, agama, suku, ras, ataupun orientasi seksualnya. Maka dari itu, perempuan merupakan bagian utuh dari pengertian rakyat itu sendiri, bukan justru hanya dianggap sebagai pelengkap dari definisi rakyat.

Keadilan bagi perempuan dalam mendapatkan ruang sosial yang sama harus menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan sila ke-lima Pancasila. Sebab, keadilan sosial tidak akan pernah bisa terwujud jika kasus diskriminasi gender perempuan masih marak terjadi.

Contohnya dalam hal berpenampilan, seksualitas, bekerja di luar atau di dalam rumah tangga, dan tanggung jawab keluarga yang merupakan sebuah peran gender setiap individu perempuan ataupun laki-laki yang harus mendapatkan keadilan yang sama rata.

Bukan hanya karena seseorang terlahir sebagai perempuan, dan peran gender dapat dibatasi, dihilangkan, atau bahkan dilarang untuk dilakukan. Padahal, perempuan juga mempunyai hak dalam menentukan atau tidak menentukan untuk melakukan peran gendernya sendiri.

Diskriminasi gender terhadap perempuan masih sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya dalam dunia kerja, beberapa perusahaan, bahkan lembaga, masih ada yang tidak menerima seorang perempuan yang sudah menikah untuk bekerja di perusahaan atau lembaganya. Atau dalam hal berpakaian, beberapa perusahaan masih banyak yang mengharuskan pegawai perempuannya untuk menggunakan pakaian-pakaian ketat dan seksi.

Selain dalam aspek dunia pekerjaan, diskriminasi gender terhadap perempuan juga terjadi dalam aspek dunia keluarga. Dunia keluarga atau rumah tangga merupakan babak pertama dalam kehidupan seseorang, termasuk perempuan, untuk menjalani dan mendapatkan kehidupan yang adil, bukan malah sebaliknya.

Misalnya, dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dimana ketika seorang perempuan disakiti secara psikis atau bahkan fisiknya secara sengaja oleh anggota keluarga yang lainnya.

Akar masalah KDRT sering kali disebabkan oleh ketidakadilan gender bagi seorang perempuan di lingkungan keluarga (istri/ibu dan adik/kakak perempuan) itu sendiri. Hal itu dikarenakan perempuan selalu dianggap sebagai manusia yang lemah, sehingga anggota keluarga 'laki-laki' seolah merasa dengan mudah dalam melakukan kekerasan, bahkan hingga kekerasan seksual hingga pembunuhan.

LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DIUPAYAKAN

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan apa yang diungkapkan Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm seperti dilansir Republika.co (04 Desember 2020) bahwa Islam telah menegaskan kemanusiaan seorang perempuan sejak awal kehadirannya. Artinya, laki-laki dan perempuan sama-sama berstatus 'hamba Allah' yang mengemban amanah sebagai *Khalifah fil Ardh*. Keduanya menjadi subjek penuh sistem kehidupan sehingga sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan di muka bumi, sekaligus berhak menikmatinya.

Kita sama-sama tahu, bahwa alih-alih menciptakan keadilan sosial, diskriminasi-diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan hanya akan menciptakan dan memperpanjang kesenjangan sosial. Langkah awal dalam menciptakan keadilan sosial salah satunya adalah dengan cara berhenti melakukan diskriminasi dalam bentuk, wujud, dan ranah apa pun.

Hal yang paling sederhana dan dapat dilakukan oleh semua kalangan, khususnya kaum laki-laki, ialah dengan cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya berpikir, bersikap, dan bertindak secara

adil terhadap perempuan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, organisasi, hingga tempat kerja. Selain itu, pemahaman terkait 'kedudukan yang sama' sebagai 'hamba Allah' di muka bumi harus menjadi prinsip dalam setiap kehidupan. Sehingga, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama harus menyadari bahwa keduanya tidak boleh saling mendiskriminasi dengan alasan apa pun.

Kemudian, menjamin hak-hak perempuan melalui jaminan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya. Salah satu alternatif yang paling jitu dan sangat urgen saat ini ialah pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang hingga hari ini belum ada kabar baik terkait perkembangannya.

Dikarenakan diskriminasi ini tidak melulu terjadi di ranah publik, melainkan juga di ranah privat seperti keluarga, sehingga negara juga harus berperan dan bertanggung jawab serta mengatur jaminan keadilan sosial perempuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam sila ke-lima Pancasila sedikit harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kaum perempuan. Hal-hal kecil yang dapat menimbulkan diskriminasi gender dalam bentuk apa pun harus dihindari sedini mungkin.[]

LANGIT-LANGIT KACA PEREMPUAN PENYELENGGARA PEMILU

Oleh: SULMA SAMKHATY MAGHFIROH

Beberapa hari yang lalu, pimpinan Bawaslu RI dan KPU RI masa jabatan 2022-2027 telah dilantik oleh DPR. Dua perasaan yang bertolak belakang, berkecamuk tidak karuan. Bagaimana tidak, di satu sisi sebagai perempuan aku merasa sangat bangga dengan adanya perwakilan perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri juga, rasa kecewa yang mendera kala menyadari bahwa 30% keterwakilan perempuan di sana, masih saja diabaikan. Seakan ada langit-langit kaca yang menjadi pembatas keterlibatan perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu negeri ini.

Ada 14 nama calon pimpinan KPU RI dengan komposisi 10 laki-laki dan 4 perempuan dan 10 nama calon pimpinan Bawaslu RI dengan komposisi 7 laki-laki dan 3 perempuan yang akan diikutsertakan dalam uji kelayakan dan kepatutan publik (*fit and proper test*). Ini berarti ada persentase

28,57% keterwakilan perempuan sebagai calon pimpinan KPU RI yang mana masih berada di bawah ambang batas minimum keterwakilan perempuan yang diisyaratkan oleh UU namun sudah cukup mendekati dan 35,71% untuk calon pimpinan Bawaslu RI. Menurut Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR, ada banyak pertimbangan dalam seleksi calon pimpinan KPU dan Bawaslu RI, seperti integritas, kapabilitas, kapasitas, independensi, dll. Juga banyaknya faktor yang diperhitungkan setelahnya.

Hasil seleksi itu menghasilkan 1 perempuan dari 7 pimpinan KPU RI yang secara persentase hanya 14,29% dan 1 perempuan dari 5 pimpinan Bawaslu RI yang secara persentase adalah 20%. Hal ini jelas tidak sejalan dengan UU No. 15 Tahun 2011 sebagai revisi dari UU No. 22 Tahun 2007 dimana dengan jelas menyatakan "Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)" – Pasal 6 ayat 5 dan "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)" – Pasal 72 ayat 8. UU jelas mengatakan komposisi keanggotaan, bukan lagi tentang calon keanggotaan. Mengapa meski sudah ada UU yang mengatur tentang persentase minimum bagi keterwakilan perempuan, masih saja sulit dipenuhi? Sekali lagi, fenomena langit-langit kaca membatasi eksistensi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Puskapol FISIP UI pada 2014 pernah merilis hasil riset terkait "langit-langit kaca" atau hambatan-hambatan tidak kasat mata yang dihadapi oleh perempuan dalam partisipasinya sebagai penyelenggara pemilu. Setidaknya ada empat hambatan yang dialami oleh perempuan dalam hal ini, yaitu: (1) Masalah budaya. (2) Pengetahuan Kepemiluan. (3) Letak Geografis. (4) Regulasi. Dimana budaya patriarki masih meraja, maka banyak perempuan menjadi tidak berdaya. Patriarki selalu menempatkan laki-laki sebagai tokoh dan diidentikkan dengan pemimpin, hal ini semakin menyulitkan perempuan untuk setara dengan laki-laki di ruang publik. Tidak

hanya itu, efek lain yang dialami oleh para perempuan adalah kendala izin yang tidak dikantonginya dari suami atau orangtua saat hendak berkiprah dalam penyelenggara pemilu.

Pengetahuan kepemiluan yang minim dari perempuan membuat mereka mudah sekali tersisih dari laki-laki dalam seleksi ini. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki saat mendalaminya. Mudah ditebak jika hal ini berkaitan erat dengan ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan, seperti subordinasi, marginalisasi, stigmatisasi buruk, kekerasan terhadap perempuan, dan beban ganda. Kesemuanya ini adalah langit-langit kaca yang lain, yang tentu saja menjadi hambatan bagi majunya perempuan dalam kiprahnya sebagai penyelenggara pemilu. Seandainya saja perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam belajar hal-hal terkait kepemiluan, sepertinya hambatan ini menjadi tidak berarti.

Hambatan "langit-langit kaca" selanjutnya adalah letak geografis yang ada di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi sebab terhalangnya peran perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri, karena Indonesia memang memiliki kontur alam yang istimewa. Gunung dan laut Indonesia memiliki tantangan medannya masing-masing, dimana beberapa darinya masih belum ramah bagi perempuan. Namun hal ini dapat saja diatasi jikalau laki-laki sebagai pihak yang diberi anugerah lebih dari Tuhan secara fisik berkenan dan berbesar hati untuk turut mendukung dan memfasilitasi para perempuan dalam mempermudah jalan kiprah mereka sebagai penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, regulasi menjadi langit-langit kaca terakhir yang menghambat perempuan dalam kiprahnya sebagai penyelenggara pemilu, baik dalam hierarki KPU atau Bawaslu. Jika kita melihat dari hierarki terbawah dari penyelenggara pemilu jajaran, KPPS misalnya, syaratnya harus minimal lulusan SMA dan umur 17 tahun. Padahal di banyak tempat, anak-anak yang telah lulus SMA memilih untuk merantau dan bekerja di luar wilayah tempat ting-

gal mereka, sehingga yang terjadi adalah tidak adanya regenerasi KPPS di sana. Meski ada pilihan lain, yakni anak yang telah lulus S1 bahkan S2, mereka jarang sekali terpilih menjadi penyelenggara lantaran minimnya pengalaman dalam hal penyelenggara pemilu. Jika hal ini terus dilanggengkan, akan sampai kapan mereka-mereka yang memiliki kapasitas terganjal jalannya lantaran minimnya pengalaman, saat pengalaman itu hampir mustahil mereka dapatkan.

Terlepas dari langit-langit kaca yang terus menghambat perempuan, setidaknya aku turut berbangga kepada Ibu Betty Epsilon Idroos dan Ibu Lolly Suhenty sebagai anggota KPU RI dan Bawaslu RI terpilih untuk tahun 2022-2027. Meskipun 30% keterwakilan perempuan yang menjadi indikator keadilan gender, kesetaraan akses partisipasi perempuan dan kesetaraan peluang perempuan untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan lagi-lagi tidak terpenuhi, kepada dua Srikandi itu aku menaruh harapan besar agar keduanya mampu mewarnai dunia penyelenggara pemilu dengan warna yang ramah untuk perempuan.[]

PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP ANAK DARI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Oleh: IRFAN HIDAYAT

Pernikahan di bawah umur bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, (20-05-2021), Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 saja, jumlah pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak meningkat sebanyak 10,82 persen.

Pernikahan di bawah umur terjadi di wilayah perdesaan sebanyak 15,24 persen dan 6,82 persen di daerah perkotaan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga mencatat terdapat 34 ribu lebih dispensasi pernikahan sepanjang Januari hingga Juni 2020. Dari jumlah tersebut, pengajuan kompensasi oleh anak di bawah umur (<18 tahun) lebih dari 60 persen, dengan sebagian besar adalah perempuan.

Jumlah pengajuan kompensasi pernikahan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun sebelum-

nya, yaitu sebanyak 23.700. Pengajuan kompensasi dilakukan dikarenakan salah satu atau bahkan kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.

DARI UU NO. 01 TAHUN 1974 MENJADI UU NO. 16 TAHUN 2019

Pengaturan mengenai batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah semestinya didasarkan terhadap kemaslahatan bagi pelaku pernikahan serta bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Pada awalnya, batas usia minimal perkawinan ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan yang kemudian tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga seperti tercantum dalam Pasal 28 b ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, UU tersebut juga dinilai telah memunculkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak seperti tercantum dalam Pasal 28 b ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, apabila usia minimal perkawinan perempuan lebih rendah dari usia laki-laki, maka secara hukum perempuan bisa lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Kemudian, atas dasar permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU perkawinan terbaru ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

KEKURANGAN UU NO. 16 TAHUN 2019

Dalam UU No. 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Kenaikan batas usia minimal yang awalnya dari 16 tahun menjadi 19 tahun tersebut diharapkan dapat mem-

bawa kemaslahatan dan mencegah laju kelahiran yang tinggi serta menurunkan risiko kematian ibu dan anak.

Akan tetapi, dalam substansi materi UU tersebut masih banyak ditemukan kekurangan yang akan berdampak terhadap hilangnya maslahat dalam konteks perkawinan di Indonesia. Salah satunya ialah UU tersebut tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelanggar, sehingga penentuan hukuman bagi pelaku pelanggar batas usia tersebut akan sulit dijatuhkan.

Pengaturan mengenai hukuman bagi pelanggar batas usia minimal pernikahan tersebut menjadi penting mengingat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan atau kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga yang kemudian mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan istri. Bahkan, UU tersebut malah memberikan dispensasi dalam pernikahan apabila kedua calon mempelai tidak mencapai usia 19 tahun.

EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019

Menurut Agus Khalimi (2021) dalam karyanya yang berjudul "*Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah*", mengungkapkan bahwa efektivitas penerapan suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu. Faktor-faktor tersebut di antaranya ialah efektif atau tidaknya hukum tersebut dibuat, penegak hukum atau para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, penerapan hukum dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kebutuhan masyarakat, dan budaya hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat.

Iwan Ramadhan (2020) dalam karyanya yang berjudul "Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah", menjelaskan bahwa apabila dilihat dari dasar pertimbangannya ialah merujuk kepada pasal 01 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, anak diartikan seseorang yang belum

berusia 18 tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Artinya, seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.

Maka dari itu, UU No. 16 Tahun 2019 dibuat pemerintah sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi, UU tersebut tidak memberi ketegasan hukuman terhadap pelaku yang melanggar ketentuan batas usia minimal perkawinan. Hal itu menyebabkan masih terbukanya potensi untuk melakukan pernikahan di bawah umur dikarenakan tidak adanya sanksi tegas. Maka dari itu, bagi penulis, UU ini kurang efektif dalam perlindungan anak.

Kemudian, Pasal 7 ayat (2) dalam UU ini menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia, orangtua pihak laki-laki atau pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan disertai alasan sangat mendesak dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat tersebut membuka celah untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa disertai pasal atau ayat yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggar. Oleh karena itu, ketegasan dan sanksi dalam undang-undang ini menjadi penting untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

PERLUNYA REVISI TERHADAP UU NO. 16 TAHUN 2019

Bagi penulis, UU No. 16 Tahun 2019 ini perlu direvisi ulang. Seharusnya dalam hal orang yang melanggar ketentuan usia dalam UU ini, harus mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut, kedua mempelai, orangtua atau pejabat yang menikahkan, serta orang-orang yang ikut terlibat dalam pernikahan di bawah umur, semuanya harus dijatuhkan sanksi.

Dengan ketegasan tersebut, perlindungan terhadap anak dapat terpenuhi sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adanya UU yang mengatur secara tegas tentang per-

nikahan di bawah umur dapat memunculkan suatu kemaslahatan. Selain itu, pejabat yang berwenang juga dapat berpedoman terhadap UU tersebut dalam upaya melindungi anak dan mencegah pernikahan di bawah umur.

Selain itu, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan amanat dari Pasal 1 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam *Fiqh Siyasah*, terdapat kaidah *tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah* yang artinya "tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan." Kaidah tersebut menjelaskan bahwa tindakan, hukum, dan kebijaksanaan pemimpin atau penguasa haruslah sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan rakyatnya. Setiap aturan yang dikeluarkan haruslah berlandaskan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat yang mungkin terjadi.

Dalam hal UU No. 16 Tahun 2019, diperlukan revisi kembali supaya dapat menghadirkan kemaslahatan dan menjauhkan mafsadat yang dapat muncul dari kurang tegasnya sanksi dalam UU ini. Mafsadat dalam konteks ini merupakan sebab akibat dari kurang maksimalnya substansi materi UU perkawinan itu sendiri, sehingga memerlukan *maslahah hajiyyah* sebagai penyempurnaan kemaslahatan pokok untuk mempertahankan dan memeliharanya.

UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam menjamin kemaslahatan masyarakat melalui larangan perkawinan di bawah umur dengan bermuara pada maslahat. Untuk menyempurnakannya, diperlukan revisi dengan menambahkan pasal atau ayat yang mengatur tentang sanksi atau hukuman bagi pelanggar batas minimal usia perkawinan tersebut. Hal tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita ideal dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu kemaslahatan.[]

SAMPAI DI MANA KESENJANGAN GENDER DALAM KONTEKS SOSIAL POLITIK INDONESIA

Oleh: **SULMA SAMKHATY MAGHFIROH**

World Economic Forum baru saja mengeluarkan hasil riset yang bertajuk *Global Gender Gap Report 2021*. Riset ini berisi tentang kesenjangan dan ketimpangan gender yang masih banyak terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan laporan itu, Indonesia pada 2021 berada di peringkat 101 dari 156 negara. Hal ini berarti Indonesia mengalami penurunan sebanyak 16 peringkat dari tahun sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya, posisi Indonesia masih berada di bawah Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. Karena Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 11 negara Asean.

Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai, membuat ketimpangan dan kesenjangan gender makin terasa di Indonesia. Sebagaimana telah diulas oleh katadata.co.id, telah terjadi penurunan tajam pada porsi perempuan di level senior dalam pekerjaan. Yang semula berada di angka 54,9%

menjadi hanya 29,8% atau mengalami penurunan sebanyak 25,1% dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal sebanyak 81,8%, sedangkan laki-laki yang bekerja di sektor informal berada di angka 79,4%, sekali lagi masih ada gap kesenjangan meski berada di angka 2,4%. Belum lagi jika kita berbicara tentang kesenjangan pemberdayaan politik di Indonesia.

Tahun 2021, kesenjangan pemberdayaan politik menjadi lebih besar 0,8% dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berada di angka 15,6%, maka pada 2021 menjadi 16,4%. Alasan melebarnya angka kesenjangan gender pada perempuan di bidang politik ditandai dengan penurunan porsi menteri perempuan yang semula berada di angka 23,5% menjadi hanya 17,1% per Januari 2021. Meskipun tidak dapat dipungkiri jika jumlah perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 17,4% di tahun 2019 menjadi 21% pada 2021.

Ada banyak tantangan khususnya bagi perempuan Indonesia dalam menyikapi kesenjangan gender yang hampir tidak pernah usai. Seperti partisipasi perempuan dalam sistem politik Indonesia yang masih sangat rendah. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR-RI) berada di angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR-RI. Dengan kata lain, 455 atau secara persentase 79,2% anggota legislatif DPR-RI adalah laki-laki. Meskipun kebijakan afirmatif dengan pemberian kuota 30% bagi perempuan telah diatur dalam UU Pemilu Legislatif No.12 tahun 2003, dan No.10 tahun 2008, juga UU Partai Politik No.31 tahun 2002, UU No.2 tahun 2008 dan UU No.2 tahun 2011, hal ini masih saja sulit dipenuhi.

Selanjutnya, yang menjadi tantangan bagi perempuan di Indonesia adalah partisipasi dan kesenjangan gender di sektor pekerjaan yang semakin memburuk dengan adanya pandemi. Aku teringat cerita temanku tentang hal ini, pabrik tempatnya bekerja lebih memilih untuk memberhentikan pekerja perempuan dan mempertahankan pekerja laki-lakinya. Hal ini didasarkan stigma yang selama

ini melekat di masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam rumah tangga, sedangkan perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Sehingga memberhentikan perempuan dari pekerjaannya dinilai tidak begitu berdampak bagi rumah tangganya. Inilah yang mati-matian aku sangkal. Bagaimana tidak, yang terjadi di lapangan justru hampir sebaliknya. Penghasilan para perempuan di pabrik dinilai jauh lebih mapan daripada laki-laki yang bekerja serabutan. Bahkan tidak sedikit juga, perempuan yang harus menjadi kepala rumah tangga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya dengan ragam alasannya.

Kesenjangan gender selanjutnya ada pada tingkat literasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak dapat disangkal jika selama ini praktik kekerasan berbasis gender secara sosial terhadap perempuan masih terjadi. Marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi, stereotip, hingga beban ganda terus menghantui perempuan Indonesia. Pendidikan bagi laki-laki masih dianggap lebih penting daripada diberikan kepada perempuan. Bahkan di era digital seperti saat ini, perempuan Indonesia yang memiliki akses terhadap internet hanya 20%, seperti yang disampaikan oleh Dedy Permadi, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Kebijakan Digital pada 2019. Bukankah kesenjangan ini terlalu jauh bagi perempuan?

Sejatinya, perempuan dan laki-laki keduanya adalah sama-sama hamba Allah yang sama-sama mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Keduanya ada untuk saling tolong-menolong, bahu membahu, dan bermitra dalam kebaikan. Maka seluruh perangkat dalam misi sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah seyogianya diberikan secara adil. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berkiprah di ruang publik seperti ruang politik, keduanya juga berhak untuk diperlakukan setara dalam hal pekerjaan dan upah, bahkan keduanya juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Bukankah kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang buruk? Mengapa tidak kita sudahi saja kesenjangan ini sejak kini?[]

PESAN INKLUSIF DALAM PERJUANGAN TIMNAS SEPAK BOLA AMPUTASI MENUJU PIALA DUNIA

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Senin, 14 Maret 2022 lalu menjadi tanggal bersejarah bagi tim nasional (timnas) sepak bola amputasi. Berlaga di Dhaka Bangladesh, setelah meraih dua kemenangan di laga kualifikasi zona Asia Timur, tim asuhan Pelatih Kepala Muhammad Syafei ini memastikan diri berlaga di kejuaraan Piala Dunia Sepak bola Amputasi di Turki pada tanggal 1-9 Oktober 2022. Prestasi tersebut bahkan menyaingi timnas sepak bola reguler yang sampai kini belum mampu menorehkan hasil yang sama.

SEJARAH SEPAK BOLA AMPUTASI

Prestasi yang diukir oleh timnas sepak bola amputasi tentunya tidak muncul secara tiba-tiba. Perjuangan dan peluh keringat mereka hingga dapat mewakili Indonesia di kancah kejuaraan dunia ternyata penuh dinamika dan problem. Merujuk pada awal pembentukan, bisa dibilang bahwa ide

pembentukan tim sepak bola amputasi Indonesia justru bersifat independen. Tim yang digawangi oleh Kapten Aditya ini terorganisir karena terdorong oleh perkembangan sepak bola sejenis di tingkat dunia, dimana di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Turki, Jepang dan lainnya memberikan ruang khusus bagi penyandang disabilitas amputasi untuk mengaktualisasikan dirinya lewat olahraga sepak bola. Hal inilah yang lalu mendorong penyandang disabilitas amputasi di tanah air yang memiliki minat dan bakat bermain sepak bola untuk membentuk sebuah wadah bagi mereka secara mandiri.

Saat ini, organisasi induk yang mewadahi sepak bola amputasi ialah Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia (PSAI) atau Indonesia Amputee Football Association (INAF) yang telah diresmikan pada 3 Maret 2018. PSAI juga dibentuk untuk menyalurkan minat dan bakat penyandang disabilitas sebagai bentuk dari persamaan kesempatan mengembangkan diri dan berprestasi. Selain itu, tujuan yang saat ini ingin diwujudkan PSAI ialah terbentuknya wadah pembinaan sepak bola amputasi tingkat nasional. Mereka juga ingin mempromosikan dan mempopulerkan sepak bola amputasi di Indonesia.

Dalam konferensi pers dengan media, Komite Humas dan Media PSAI, Vicente Mariano, menyatakan bahwa keberhasilan tim ini menuju Piala Dunia 2022 berawal dari asa sederhana bahwa penyandang disabilitas juga ingin berolahraga seperti individu-individu lainnya. Hanya saja, selama ini akses yang mereka miliki sangat terbatas. Belum lagi fasilitas olahraga di kita kebanyakan hanya didesain untuk orang normal saja.

Selain itu, Vicente juga menyampaikan jika mereka selama 5 tahun terbentuk hanya mengandalkan dana talangan anggota saja. Untuk persiapan pertandingan kualifikasi di Bangladesh pun mereka harus mendanainya secara pribadi. Namun, hal itu tak pernah menyurutkan harapan mereka untuk menampilkan yang terbaik.

Di satu sisi, torehan kerja keras anggota timnas sepak bola amputasi seharusnya bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk

memberi dukungan dan apresiasi bagi mereka. Terlebih, mereka akan membawa nama negara untuk berlaga di piala dunia. Ke depannya, diharapkan keberlanjutan tim ini tidak hanya sebatas tahun ini saja, tetapi pembinaan yang berkesinambungan perlu diperhatikan.

PENYANDANG DISABILITAS: ANTARA PRESTASI DAN PROBLEMATIKA

Sejatinya, prestasi-prestasi atlet penyandang disabilitas kita bukan hanya sebatas di cabang sepak bola. Pada gelaran paralimpiade di Tokyo tahun 2020 lalu, olahragawan kita menggondol sembilan medali, dengan rincian sebagai berikut: dua medali emas, tiga medali perak, dan empat medali perunggu. Hasil tersebut juga terhitung sebagai perolehan medali terbanyak sepanjang keikutsertaan Indonesia di ajang paralimpiade.

Meski terus mencatatkan prestasi, bukan berarti bahwa pembinaan olahraga bagi kelompok difabel selama ini berjalan lancar-lancar saja. Mengutip riset dari Septiya Riskyawan (2020), regenerasi atlet, utamanya di daerah Provinsi DI Yogyakarta, ternyata terhambat oleh dua faktor, yakni minimnya upaya untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran melibatkan semua kelompok umur, dan sedikitnya sumber daya pelatih atau pemandu bakat.

Ketua Umum PSAI Yudhi Yahya menambahkan bahwa dalam sepak bola amputasi mereka juga masih mengalami kendala menghadapi persepsi masyarakat yang masih menilai amputasian/disabilitas sebagai orang yang sakit atau lemah. Padahal bagi penyandang disabilitas fisik, seperti amputasi kaki, tangan, dan *les autres* di tim, memainkan bola sepak justru merupakan suatu kesenangan tersendiri. Sehingga pengenalan cabang olahraga ini diharapkan dapat membantu kaum difabel dan orang-orang di sekelilingnya untuk tidak mudah mengasihani penyandang disabilitas jika ingin berolahraga sesuai kemampuan dan fasilitas yang memadai.

Lebih lanjut, menurut Dr. Yoyos Dias Ismiarto dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, olahraga bagi penyandang disabilitas memiliki banyak manfaat, di antaranya merupakan kesempatan untuk memfasilitasi potensi mereka dalam integrasi sosial, meningkatkan kebugaran, dan mempromosikan kemampuan diri, yang mengarah pada peningkatan harga diri dan meningkatkan nasib diri sendiri. Walalu begitu, perlu diperhatikan bahwa tujuan kegiatan olahraga yang dilakukan bagi mereka adalah untuk menjaga kesehatan dan tetap produktif. Sehingga kebutuhan dan ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangatlah penting untuk dipenuhi.

Poin terakhir juga akan membantu meminimalisir persepsi mayoritas publik kita yang selama ini belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Sebab tanpa dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, mewujudkan cita-cita besar Indonesia inklusif bagi penyandang disabilitas tentu akan sulit terealisasikan.[]

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA

Oleh: **SULMA SAMKHATY MAGHFIROH**

"Politik adalah ruang yang tidak ramah bagi perempuan. Pemilu bukanlah ajang kontestasi bagi perempuan, maka percuma bagi perempuan yang ikut dalam pemilu karena tingkat keterpilihannya pun nadir. Politik dan pemilu adalah ruang publik yang diperuntukkan bagi laki-laki, karena perempuan sudah diberikan ruangnya sendiri, yakni ranah domestik rumah tangga". Rasanya tidak ada habisnya saat menulis stigma negatif yang disematkan pada perempuan tatkala disandingkan dengan dua kata, politik dan pemilu. Namun, benarkah demikian adanya?

Sebagai warga negara Indonesia, baik itu laki-laki maupun perempuan, memiliki hak-hak yang sama dalam politik dan dijamin oleh Undang-undang. Hak-hak itu adalah (1) Hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri dalam aktivitas politik; (2) Hak untuk berkumpul dan ber-

serikat; (3) Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik; (4) Hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan; (5) Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Bukankah perempuan juga merupakan warga negara Indonesia, sehingga ia pun memiliki kelima hak-hak ini.

Di samping itu, perempuan juga memiliki kuota afirmatif sebanyak 30% dalam kancah politik dan pemilu di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Partai Politik dan Pemilu. Dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 245 jelas menyatakan bahwa bakal calon anggota dewan yang diusung oleh partai politik harus memuat keterwakilan perempuan minimal 30%. Yang disusul dengan pasal 248 dimana KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Bahkan pada pasal 249 dinyatakan dengan eksplisit jika tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calonnya.

Kendati negara telah memberikan payung hukum yang memperkuat kedudukan perempuan di ranah politik dan pemilu, fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa implementasi dari undang-undang itu masih jauh dari harapan. Seakan-akan partai politik kesusahan dalam mencari sedikitnya 30% perempuan sebagai bakal calon anggota dewan yang akan diajukan. Sehingga tidak sedikit yang mengatakan bahwa proses pengaderan di partai politik gagal. Hal ini dapat dilihat dari mulai struktur kepengurusan partai politik yang masih didominasi oleh laki-laki, padahal idealnya 30% keterwakilan perempuan juga dimulai dari kepengurusan di internal partai politik. Sehingga yang terjadi, pemenuhan 30% kuota perempuan dilakukan secara asal-asalan, asal jenis kelaminnya perempuan meski potensi keterpilihannya nyaris mustahil.

Menurut ibu Dr. Dra. Sulistyowati, S.H, C.N, Wakil Rektor 1 Universitas Muria Kudus, seharusnya perempuan bakal calon anggota dewan yang diajukan oleh partai politik tidak hanya memenuhi syarat normatif pemenuhan kuota afirmatif 30% saja, melainkan

harus potensial terpilih. Beliau juga menyampaikan lima kriteria yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota dewan, yakni: (1) Sumber daya manusia; (2) Sumber daya ekonomi; (3) Sumber daya sosial; (4) Sumber daya politik; (5) Sumber daya budaya. Dan saya sepenuhnya sepakat dengan kelima kriteria yang dituturkan oleh beliau. Kedudukan politik perempuan di Indonesia akan menguat jika bakal calon anggota dewannya memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai sumber daya manusia yang dicalonkan. Selain itu, faktor ekonomi dari perempuan bakal calon juga harus dipertimbangkan, setelah kriteria sebelumnya telah terpenuhi.

Karena nantinya kedudukan politik perempuan akan selalu bersinggungan dengan masyarakat dengan menyuarakan aspirasi masyarakat, maka bakal calon pun harus memiliki sumber daya sosial yakni komunikasi dan relasi yang baik di masyarakat. Barulah setelah itu mensyaratkan kriteria keempat yakni sumber daya politik, dimana bakal calon diharuskan mengerti dan paham betul tentang seluk beluk politik dan pemilu yang akan diikutinya, dari mulai regulasi hingga implementasinya di lapangan. Dan yang terakhir adalah sumber daya budaya yang dapat diasumsikan sebagai bentuk dukungan nyata dari pihak-pihak yang bersinggungan dengan perempuan bakal calon. Akan sia-sia saja, jika empat dari lima kriteria itu dapat dipenuhi oleh perempuan bakal calon jika keluarga dan lingkungan terdekatnya tidak mendukung.

Pada akhirnya, kedudukan perempuan dalam politik dan pemilu masih membutuhkan kerja sama dan kesalingan dari banyak pihak. Saat payung hukum telah tersedia, maka sisanya adalah mengawal implementasi dari payung hukum tersebut. Kedudukan perempuan dalam politik dan pemilu menjadi penting agar kebijakan publik dan regulasi yang adil gender dapat terealisasi. Tidak hanya itu, iklim politik dan pemilu yang ramah bagi perempuan juga tidak lagi sekadar harapan. Juga menjadi bukti nyata bahwa baik ranah publik maupun ranah domestik adalah milik bersama, yakni laki-laki dan perempuan.[]

REFLEKSI SEJARAH PEMBENTUKAN PANCASILA YANG PATRIARKIS, SUDAHKAH AKOMODATIF TERHADAP PEREMPUAN

Oleh: **LUTFIANA DWI MAYASARI**

Patriarki dalam tulisan ini dimaknai sebagai sebuah keadaan tidak dilibatkannya perempuan dalam penyusunan Pancasila. Dalam konteks sejarah, peran perempuan memang nyaris tak dilibatkan dalam momentum lahirnya ideologi dan dasar negara. Hal ini adalah sebuah kecelakaan sejarah, bagaimana sebuah ideologi justru lahir dari proses yang tidak mempertimbangkan keadilan gender.

Pancasila dirumuskan oleh panitia yang dikenal dengan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Negara). Panitia ini dibentuk sebagai sebuah upaya pemenuhan janji Jepang yang akan membantu proses kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke-II telah mendistorsi kekuatan militer Jepang. Tak ada pilihan lain bagi Jepang kecuali merealisasikan janjinya.

Dari 67 anggota BPUPKI, terdapat dua orang perwakilan perempuan, yaitu Maria Ulfa dan Soenarjo Mangoenpoespito. Namun sayang, peran kedua perwakilan perempuan tersebut tidak pernah disinggung oleh sejarah. Sejauh mana perannya, bagaimana pendapatnya, apa yang diperjuangkan, tidak terekam oleh sejarah. Informasi yang sampai kepada kita adalah tentang dialektika golongan agamis dan nasionalis dalam pembahasan dasar negara yang menghasilkan lima sila dalam Pancasila. Dan pada sidang kedua BPUPKI melahirkan Undang-undang Dasar 1945.

Setelah dasar negara dan UUD 1945 berhasil dirumuskan, BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945. Seluruh anggota PPKI adalah laki-laki, dan sama sekali tidak melibatkan perempuan dalam kepanitiaannya. Hal ini tentu bertentangan dengan bagaimana perempuan ikut berjuang pada masa pra-kemerdekaan. Perempuan bekerja sama dengan laki-laki dalam menyingkirkan penjajah. Muncul banyak organisasi perempuan antara lain Poetri Mahardika 1912, Poetri Sedjati, Wanita Oetama, Jong Java, Pawijatan Wanito tahun 1915 di Magelang, Organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun (PIKAT) tahun 1917 di Manado, Poetri Boedi tahun 1919 di Surabaya, Wanita Taman Siswa (1922). Organisasi keagamaan juga mengambil peran, antara lain Aisyiyah 1917, Muslimat NU, dan Poesara Wanita Katolik. Namun perannya justru dihilangkan dalam proses penentuan dasar negara.

Melihat minimnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan Pancasila, lantas apakah substansi dari sila-sila di dalamnya akomodatif terhadap perempuan? Dan bagaimana seharusnya perempuan memaknai hari lahir Pancasila?.

PASANG SURUT GERAKAN PEREMPUAN PASCA-PERUMUSAN DASAR NEGARA PANCASILA

Meskipun tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Pancasila, namun tak menyurutkan semangat kelompok perempuan untuk menyuarakan haknya. Pasca-kemerdekaan, perempuan membentuk

sebuah organisasi politik seperti Wanita Marhaen yang merupakan bagian dari Partai Nasional Indonesia. Kemudian Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Perwani (Persatuan Wanita Indonesia), dan masih banyak organisasi lainnya.

Gerwani berhasil mengantarkan anggotanya di kursi parlemen pada pemilu 1955 dengan mengusung isu perkosaan, memperjuangkan hak perempuan untuk menduduki jabatan lurah, mendirikan warung koperasi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, menuntut perubahan UU perkawinan agar lebih demokratis, dan masih banyak lagi agenda yang diusung untuk perempuan.

Gerakan menolak poligami juga santer diagungkan, gerakan ini berawal dari keputusan Presiden Soekarno untuk berpoligami di tahun 1954. Sehingga muncul aksi tuntutan penghapusan poligami, namun sayangnya tuntutan itu diabaikan. Hal ini merupakan konsekuensi subordinasi perjuangan *gender interest* di bawah proyek nasionalisme yang harus ditanggung gerakan perempuan. Jika menolak poligami, beberapa pihak khawatir dianggap anti-Soekarno dan anti-nasionalis, karena Soekarno sebagai aktor poligami.

Gerakan perempuan pada masa ini memiliki *bargaining position* yang tinggi. Di tengah upaya Indonesia mencari pola-pola pemerintahan dan demokrasi yang akan diambil, perempuan masuk ke dalam diskusi wacana politik di dalamnya. Sehingga banyak aspirasi perempuan yang ikut dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan negara.

Namun, di periode selanjutnya, gerakan perempuan mengalami kemunduran. Diawali dengan dibubarkannya Gerwani pada tahun 1965 karena dianggap melakukan pemberontakan terhadap Orde Baru dan berafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Secara otomatis, gerakan perempuan yang tadinya masif memperjuangkan kesetaraan gender menjadi mati suri. Muncul kekhawatiran dianggap sebagai organisasi kiri jika terus menuntut pada rezim (Ruth:1996).

Perwani yang tadinya sangat aktif menentang langkah poligami Soekarno, berubah menjadi organisasi yang beranggotakan istri-

istri pegawai yang kegiatannya dikhususkan bagi perempuan dari kalangan menengah keatas. Program yang dijalankan sebatas pada pemberian dukungan pada suami-suami yang bekerja.

Kemudian di tahun 1974, dibentuklah persatuan istri-istri pegawai negeri atau Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi sebagai organisasi yang beranggotakan istri-istri ABRI. Program yang dijalankan oleh organisasi ini adalah mengajak para perempuan untuk kembali pada kodratnya. Sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi kebersihan rumah, sebagai istri yang tunduk pada suami, sebagai ibu yang wajib mendidik anak-anak. Organisasi perempuan mengalami domestikasi dan pengebirian yang masif. Perempuan tak lagi menjadi manusia merdeka yang bebas mengekspresikan ide-idenya untuk kemajuan perempuan dari sisi perempuan. (Hubies: 2001).

Gerakan perempuan kembali bangkit pasca-reformasi 1998. Peristiwa yang terjadi pada Mei 1998 adalah pembuka keran reformasi di Indonesia. Berawal dari tuntutan demonstran yang menginginkan rezim Soeharto dilengserkan akibat krisis moneter yang menjerat Bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut juga menjadi titik awal pergerakan perempuan yang sebelumnya terbelenggu oleh kebijakan Orde baru yang diskriminatif terhadap perempuan.

Perlawanan memuncak menjadi gerakan yang masif dan terstruktur saat gerakan perempuan juga menuntut penyelesaian tragedi 12-14 Mei 1998 di Jakarta. Banyak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, hak bicaranya dibungkam, dan hak politiknya dikebiri. Maka bersamaan dengan mosi menggulingkan Soeharto, isu tentang keberdayaan perempuan juga dimunculkan. Hingga pada 14 Desember-22 Desember 1998 diadakanlah Kongres Perempuan di Yogyakarta dengan agenda memperjuangkan keterwakilan 30% suara perempuan dalam parlemen. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau mengangkat secara langsung 4 menteri perempuan dalam kabinetnya. Kemudian pada periode keduanya, Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat 5 menteri perempuan.

SUDAHKAH PANCASILA AKOMODATIF TERHADAP PEREMPUAN?

Berkaca pada pasang surutnya gerakan perempuan pasca perumusan Pancasila, tampak bahwa akomodatif atau tidaknya Pancasila terhadap perempuan sangat tergantung pada dua hal. *Pertama,* sejauh mana kemauan negara untuk merumuskan kebijakan yang adil gender. *Kedua,* sejauh mana negara mau melibatkan perempuan dalam mengambil kebijakan. Meskipun kesadaran perempuan akan kesetaraan tinggi, namun tidak akan berdampak jika negara enggan mengakomodir dan memfasilitasi dalam bentuk regulasi dan keterbukaan akses.

Kita telah melihat tingginya semangat toleransi pada sila pertama, kemanusiaan pada sila kedua, persatuan pada sila ketiga, gotong royong pada sila keempat, dan keadilan substantif pada sila kelima. Jika kelima sila tersebut diaplikasi dengan baik dalam bentuk kebijakan, maka tidak akan ada lagi peluang berlaku tidak adil. Perempuan juga harus menyadari bahwa gerakan menuju keadilan gender belum sampai pada garis finish. Masih ada perjuangan panjang yang harus terus dikawal. Untuk memastikan tidak ada lagi domestikasi, diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan.[]

POLITIK BUTUH PEREMPUAN

Oleh: **SULMA SAMKHATY MAGHFIROH**

"Saya menegaskan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan", ujar ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta 20 Oktober 2020 silam. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Puan Maharani perlu diamini karena bagaimanapun berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia 269.603,4 juta jiwa, yang terdiri dari laki-laki 135.337 juta jiwa (50,2%) dan perempuan 134.266,4 juta jiwa (49.8%). Bukankah menjadi tidak masuk akal jika politik negeri hanya melibatkan laki-laki saja, sedangkan hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan.

Tahun 2004 menjadi titik balik bagi perempuan di kancah politik negeri. Melalui gerakan perempuan, hak-hak politik perempuan secara perlahan berangsur pulih. Terlepas

dari segala kontroversi yang ada tentang politik, sesungguhnya politik masih merupakan alat yang paling memungkinkan untuk menciptakan kesempatan, wewenang, hingga kebijakan dalam tata kelola sebuah negara. Dan dalam hal ini, sungguh perempuan tidak dapat ditinggalkan, bahkan Pasal 45-51 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jelas menegaskan bahwa di antara hak perempuan adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang sama dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Bukan tanpa sebab mengapa politik butuh perempuan, Rasyidin dan Aruni dalam bukunya *Gender dan Politik: Keterwakilan Perempuan dalam Politik* menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik selama ini merupakan salah satu *pre-existing conditions* bagi demokrasi. Sebuah kondisi ketidakberdayaan yang sudah diketahui penyebabnya, namun belum diupayakan penanganannya secara maksimal. Tidak heran jika ada yang menyatakan perlunya melakukan sejumlah intervensi untuk memastikan perempuan masuk dalam institusi legislatif. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap isu-isu perempuan.

Dikarenakan politik membutuhkan perempuan, maka kuota 30% bagi perempuan di parlemen dalam pemilu menjadi sangat penting sebagai tindakan afirmatif. Dengan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, maka kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah dan memberikan kontribusi di bidang politik bagi negeri menjadi lebih besar. Selain itu, politik butuh perempuan karena dengan majunya perempuan di ruang publik dan menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan dapat mewakili kepentingan perempuan. Bahkan menurut Adriana Venny, dalam artikelnya "Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk" yang dimuat dalam *Jurnal Perempuan* tahun 2004, kehadiran perempuan dalam politik terlebih di pos-pos penting pemerintahan diyakini mampu membawa perubahan sistem yang lebih berkeadilan dan bersih dari korupsi.

Dalam khazanah Islam, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tentu saja meliputi laki-laki dan perempuan sama-sama

mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 30 “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi’...”. Menurut Profesor M. Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, ayat ini menginformasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban khalifah. Unsur-unsur itu adalah: (1) Bumi atau wilayah; (2) Khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris); (3) Hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah Swt.).

Jika demikian, bukankah tidak salah jika lantas politik membutuhkan perempuan. Karena bagaimanapun perempuan juga bagian dari makhluk ciptaan Allah Swt. yang juga mengemban amanah sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana sering diingatkan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Qadir, bahwa khalifah di bumi berarti memastikan visi besar Islam yang *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta) dan misi besar kenabian Muhammad Saw. yakni menyempurnakan *akhlaqul karimah* (akhlak mulia) tetap berjalan. Maka, apabila politik yang merupakan salah satu unsur kekhalifahan menurut Quraish Shihab hanya dijalankan oleh laki-laki dengan tidak mengindahkan keberadaan perempuan, bukankah ini sama dengan menafikan wujud perempuan sebagai makhluk Allah yang setara dengan laki-laki?

Untuk itu, stigma politik sebagai ranah laki-laki harus segera diakhiri, karena faktanya politik juga butuh perempuan. Politik adalah salah satu sarana bagi khalifah, manusia, laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan visi besar Islam sebagai rahmat bagi semesta dan misi besar kenabian Muhammad Saw. sebagai penyempurna akhlak mulia. Bukankah visi dan misi besar ini menjadi lebih mudah dijalankan apabila keduanya berjalan bersama-sama, saling bahu-membahu, tolong-menolong, menghormati dan menghargai satu sama lain.[]

5 PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN: Urgensi Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Revisi UU Pesantren

Oleh: **IRFAN HIDAYAT**

Beberapa hari terakhir, kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan menjadi perbincangan panas di berbagai media, khususnya pondok pesantren yang bahkan menjadi topik utama berita nasional. Kasus yang masih ramai ialah kasus yang menjerat Moch Subchi Azal Tzani (Bechi) yang merupakan anak kandung pengasuh dari salah satu pesantren di Jombang. Bechi menjadi sorotan, bahkan objek hujatan masyarakat di dunia maya karena kasus pencabulan terhadap beberapa santriwatinya.

Keadilan bagi korban/penyintas (dalam kasus Bechi) menjadi sulit digapai dikarenakan telah terjadi perbedaan pandangan 'kebenaran' antara warga pesantren dan pihak kepolisian. Proses penyidikan pun menjadi sulit ketika wibawa dan otoritas kiai dengan subjektifitas religi yang memantik gerakan warga pesantren termasuk santri-santrinya.

Kondisi tersebut membenarkan penelitian Siti Komariah (2022) yang berjudul: "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren", bahwa petinggi pesantren sering kali menggunakan posisinya sebagai alat untuk melakukan kekerasan seksual di pesantren. Hal itu tidak lepas dari adanya budaya patriarki yang abadi dan telah terlembagakan di lingkungan pesantren tersebut. Selain itu, terdapat ketimpangan relasi kuasa antara petinggi pesantren dengan santri-santrinya.

Sebenarnya, kasus kekerasan seksual di pesantren bukanlah hal baru di Indonesia. Kasus kekerasan seksual juga telah menelan 11 korban santriwati di salah satu pesantren di Depok. Pelakunya terdiri dari 4 orang ustaz serta 1 orang kakak tingkat korban. Selain itu, tahun 2021 lalu, 12 santriwati menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pengajar di salah satu pesantren di Jawa Barat.

Tidak berhenti di situ, melansir dari kemenag.go.id (03-02-2022), Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, mengungkapkan bahwa terdapat 12 laporan yang muncul terkait kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan, yaitu di Tasikmalaya, Bandung, Kuningan, Cilacap, Bantul, Kulonprogo, Pinrang, Ogan Ilir, Lhokseumawe, Jombang, Mojokerto dan Trenggalek. Beberapa kasus di antaranya masih dalam proses persidangan di pengadilan.

Lebih parah, beberapa kasus kekerasan seksual di pesantren diselesaikan melalui cara mediasi antara korban dan pelaku yang ditengahi oleh pimpinan pesantren, sehingga kasus ditutup dan berujung damai. Padahal, trauma korban akan begitu membekas dan pelaku belum tentu benar-benar bertobat atau malah mencari korban lainnya.

PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, mengapa pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi santri tidak bisa terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual? Tidak bijak rasanya apabila

memukul rata dengan menyebut semua pesantren bukanlah ruang aman bagi santri. Karena masih banyak pesantren yang menjadi ruang aman bagi santri-santri dari tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Namun, berdasarkan beberapa kasus di atas, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di pesantren.

Pertama, narasi kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya diterima di semua pesantren. Mengutip pendapat Muhammad Naziful Haq, salah satu staf International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dalam laman infid.org (07-07-2022), bahwa gagasan tentang keadilan gender masih diperdebatkan beberapa pesantren karena dinilai mengandung nilai-nilai Barat yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dikhawatirkan dapat mengganggu tatanan dan nilai-nilai yang ada di pesantren. Hal itu kemudian dapat membuka peluang munculnya kasus kekerasan seksual di pesantren-pesantren yang belum mengadopsi wawasan keadilan gender.

Kedua, terdapat prinsip ‘kepatuhan total’ (*sami’na wa atho’na*) di lingkungan pondok pesantren yang sering dijadikan alat untuk memperdaya korban. Sebenarnya, prinsip ini sangat penting dalam hal adab seorang santri terhadap kiai, anak ke orangtua, atau yang muda terhadap yang tua selama dalam hal kebaikan. Namun, jika disalahgunakan, dapat menjadi celah untuk melakukan kejahatan termasuk kekerasan dan pelecehan seksual.

Disamping itu, menurut Siti Komariah (2022), konsep ‘kepatuhan total’ di lingkungan pesantren juga cenderung bersifat mengultuskan para petinggi pesantren, yang mana hal itu justru dapat menjadi *boomerang* bagi para santri. Masih ingat kasus Gus Romli? Salah seorang pengajar pesantren yang melakukan kekerasan seksual dengan modus santriwati yang hendak memasuki kelas XII akan banyak menghadapi ujian di pesantren, dan supaya dapat melewati ujian tersebut dengan lancar, santriwati akan ditransfer ilmu melalui hubungan seksual, dan santriwati tersebut harus mendengar, mematuhi dan menurut apa pun yang diperintahkannya.

Ketiga, terdapat penyalahgunaan wewenang. Masih banyak petinggi pesantren yang sering menyalahgunakan status atau jabatannya yang sakral untuk mendapat kepercayaan korban dan orang di sekitarnya agar dapat melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian Geoff Mcmaster (2020) yang berjudul: "*Researches Reveal Patterns of Sexual Abuse in Religion Settings*", menjelaskan bahwa terdapat karakteristik dalam lembaga agama termasuk pesantren seperti kekuasaan, patriarkis, ketaatan, dan penghormatan terhadap figur otoritas justru dapat memfasilitasi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual.

Keempat, menggunakan dogma dengan embel-embel agama sebagai alat untuk mendominasi. Hal ini dapat dilihat dari kasus Bechi dengan menawarkan ilmu metafakta yang dapat bebas menikahi siapa pun serta doktrin 'vagina jalan mulia yang tidak boleh dimasuki orang lain selain dirinya (Bechi)'. Atau juga kasus di salah satu pesantren di Solo pada tahun 2018 yang bagaimana seorang petinggi pesantren melakukan modus terhadap santrinya untuk menghafal kitab suci di ruang privat dengan melakukan ritual yang disebut dengan 'ritual pembersihan vagina'.

Kelima, regulasi negara kita yang belum mampu menjangkau secara kuat terkait kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Sebenarnya telah terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal harus melaksanakan pengarusutamaan gender. Selain itu juga terdapat Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun, mengingat pesantren tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan melainkan Kementerian Agama, maka aturan tersebut secara hukum tidak dapat diberlakukan di pesantren.

URGENSI PMA DAN REVISI UU PESANTREN

Mengingat semakin maraknya kasus kekerasan seksual di pesantren, maka diperlukan suatu regulasi yang kuat untuk mencegah kasus-

kasus serupa terjadi. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mendorong Kementerian Agama untuk mengeluarkan PMA terkait penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren. Selain itu, diperlukan juga revisi terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren supaya dapat dilakukan pengawasan terhadap aktivitas pesantren.

Perumusan dan penerbitan PMA terkait edukasi, pencegahan, dan penanganan serta pemulihan korban pelecehan atau kekerasan seksual merupakan payung hukum yang sangat ditunggu sebagai upaya memutus rantai perilaku predator seksual di pesantren. Dilansir dari kemenag.go.id (03-02-2022), PMA tersebut saat ini telah disusun oleh Kementerian Agama. Inisiasi Kementerian Agama ini disambut dengan komitmen, baik dalam bentuk pengembangan gagasan, kebijakan internal pesantren, hingga kedewasaan dalam bersikap, supaya semua warga pesantren dapat terjamin rasa aman dari kekerasan seksual.

Selain itu, perlu diingat bahwa Indonesia telah memiliki aturan tentang masalah tersebut, yakni UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan April lalu. Namun, belum dalam UU tersebut belum adanya mekanisme khusus terkait kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Hal ini menjadi penting mengingat kasus kekerasan seksual di pesantren tidak bisa disamakan dengan di tempat biasa. Seperti kasus Bechi yang sangat sulit untuk diproses dan membutuhkan waktu yang berlarut-larut. Artinya, PMA yang tengah dirumuskan Kemenag tetap harus didorong dan disambut dengan baik oleh masyarakat.

Revisi terhadap UU Pesantren juga merupakan hal urgen yang perlu dilakukan mengingat dalam UU tersebut masih banyak kelemahan. Selain tidak adanya ketentuan pengawasan seperti diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi, bahwa dalam UU Pesantren tidak ada yang namanya pengawasan, adanya Dewan Masyai lebih kepada penguatan konten pendidikan (detik.com 13-01-2022), diperlukan juga ketentuan yang

mewajibkan standar pengajaran, pengelolaan dan kurikulum dengan pengarusutamaan gender di pesantren.

Untuk itu, baik PMA ataupun revisi UU Pesantren, keduanya memiliki urgensi yang sangat vital dalam hal kasus kekerasan seksual di pesantren. Keduanya saling berkaitan sebagai suatu hierarki perundang-undangan, dan mengingat UU Pesantren belum memiliki aturan turunan yang mampu menghadirkan keadilan gender di lingkungan pesantren. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat melindungi korban kekerasan seksual di pesantren serta mampu menjadi suatu payung hukum pencegahan kasus serupa.

Sebagai penutup, yang perlu digarisbawahi dari kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren adalah bahwa 'yang cacat dan rusak serta wajib dicaci maki bukanlah pesantrennya, tetapi pelaku!'. Sebab, sebaik dan sebagus apa pun suatu pesantren, jika otak dan nafsu predator seksual tidak bisa dikontrol, maka kekerasan dan pelecehan seksual masih mungkin terjadi.[]

SELAIN UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU PTPO, KORPORASI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL JUGA BISA DIJERAT UU TPKS

Oleh: **IRFAN HIDAYAT**

Kasus kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Kekerasan di ruang privat, terdapat istilah atau fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bisa saja berwujud kekerasan seksual. Sedangkan di ruang publik, kekerasan bisa terjadi di mana saja seperti di jalan, pasar, mal, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah.

Berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, bisa terjadi secara horizontal yang dilakukan oleh teman kerja atau juga secara vertikal seperti antara atasan dengan bawahan (vertikal), atau antara pemberi kerja dengan pekerja. Masih hangat di ingatan terkait kasus yang menimpa karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang sempat viral di penghujung tahun 2021. Melansir okezone.com (16/11/2021), Kekerasan seksual di KPI muncul ketika

MS yang merupakan seorang karyawan KPI Pusat mengaku telah mendapatkan pelecehan seksual dan perundungan, bahkan perbuatan tersebut telah dialaminya selama bertahun-tahun dan dilakukan oleh seniornya di kantor.

Selain itu, pada tahun 2018 lalu, terdapat juga kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan berinisial RA yang dilakukan oleh atasannya sendiri yang berinisial SAB. Menurut RA, pelecehan seksual tersebut telah terjadi hampir selama 2 tahun yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kantor. RA kemudian melaporkan kejadian ini kepada Dewan Pengawas yang juga teman pelaku, namun diabaikan. RA lantas mencari keadilan serta menceritakan kejadian yang dialaminya di media sosial, namun RA malah mendapatkan surat pemberhentian kontrak (tribunnews.com, 29/12/2018).

KORPORASI BISA DIJERAT UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU PTPO

Korporasi yang melakukan kekerasan seksual sebenarnya bisa dipidanakan. Hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Melalui tulisan ini, saya hendak mengulas terkait bagaimana UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga dapat menjerat korporasi yang melakukan kekerasan dan pelecehan seksual.

UU Perlindungan Anak dapat menjerat korporasi sebagai pelaku TPKS, khususnya yang menimpa anak (Kekerasan terhadap Anak/KtA). Ketentuan umum Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan: "Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi". Pasal-pasal yang menyebutkan subjek atau pelaku kekerasan dengan diksi "Setiap Orang" dapat menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu, seluruh bentuk KtA yang tercantum dalam UU tersebut berlaku juga terhadap Korporasi.

Lebih jelasnya, pidana terhadap korporasi diatur dalam Pasal 90 ayat (1 dan 2) UU Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi:

"(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh Korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau Korporasinya. (2) Pidana yang dijatuhkan kepada Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat."

Ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa pidana penjara dapat diterapkan kepada pengurus dan jajarannya. Sedangkan dalam ayat (2), pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi ialah pidana dengan tambahan 1/3 dari pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian, dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 atau UU PTPPO, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi pelaku kekerasan seksual, khususnya perdagangan perempuan dan anak, diatur secara lebih rinci. Berikut ini rincian pasalnya:

Pasal 13 yang berbunyi: "(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama Korporasi atau untuk kepentingan Korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan Korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya".

Kemudian dalam Pasal 14 yang berbunyi: "Dalam hal panggilan terhadap Korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat Korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus".

Selanjutnya, Pasal 15 yang berbunyi: "(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu Korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a) pencabutan izin usaha, b) perampasan kekayaan hasil tindak pidana, c) pencabutan status badan hukum, d) pemecatan pengurus, dan/atau e) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan Korporasi dalam bidang usaha yang sama".

Sanksi terhadap Korporasi dalam UU Perlindungan Anak dan UU PTPPO diberikan dalam bentuk sanksi pidana penjara kepada Pengurus, pidana denda korporasi dengan penambahan 1/3 dan pemberatan 3 kali, serta pidana tambahan kepada Korporasi.

PIDANA BAGI KORPORASI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM UU TPKS

Disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 atau UU TPKS semakin meneguhkan bahwa korporasi pelaku kekerasan seksual dapat dipidana. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan umum yang mencantumkan definisi "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Selain itu, penjelasan mengenai korporasi itu sendiri yang berbunyi: "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."

Dalam UU TPKS, korporasi yang melakukan kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal 9, yang berbunyi:

"(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan

oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. (3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pencabutan izin tertentu, pengumuman putusan pengadilan, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau pembubaran Korporasi".

Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam seluruh bentuk dan wujud kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS ini merupakan kemajuan signifikan dalam memberantas serta mencegah praktik kekerasan seksual di lingkungan kerja. Selain itu, UU tersebut juga telah mengatur sanksi bagi korporasi.

Berdasarkan ketentuan di UU TPKS, proses pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup komprehensif. Pengurus korporasi beserta jajarannya juga memiliki tanggung jawab hukum apabila korporasi melakukan kekerasan seksual. Bahkan, UU ini lebih awal melakukan upaya untuk mencegah korporasi menjadi pelaku kekerasan seksual karena pengaturannya yang cukup memadai.

Harapannya, dengan adanya UU TPKS ini tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk di lingkungan kerja. Jangan sampai kasus seperti yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan dan KPI terjadi lagi di kemudian hari. Setiap individu di lingkungan kerja harus sama-sama menjunjung dan menjaga kesetaraan dan keadilan gender, serta menjadikan lingkungan kerja sebagai ruang aman bagi semua orang, baik pemberi kerja, pekerja, dan rekan kerja.[]

MEMBANGGAKAN TRADISI LOKAL

POLEMIK WAYANG DAN TELADAN DAKWAH KULTURAL SUNAN KALIJAGA

Oleh: HASNA AZMI FADHILAH

"Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, budaya di Islamkan. Susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, standar yang mana yang harus dipegangi?"

Pernyataan tersebut diutarakan oleh Ustaz Khalid Basalamah ketika seorang jemaahnya menanyakan hukum wayang dan bagaimana jalan tobat seorang yang berprofesi sebagai dalang. Meski tidak memfatwakan langsung bahwa wayang itu haram. Namun, secara tersirat tergambar jelas jika bagi dai tersebut wayang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meski akhirnya pria bernama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah tadi menyampaikan permintaan maaf dan mengunggah video klarifikasi, tetapi polemik kesenian wayang sudah terlanjur menuai pro kontra di tengah masyarakat, utamanya umat Islam.

SEJARAH WAYANG

Wayang sendiri sejatinya bukan barang baru di negeri ini. Merujuk riset Awalin (2018), wayang diperkirakan sudah ada sejak 1500 SM. Pada awalnya, wayang dijadikan medium untuk mendatangkan arwah leluhur. Tradisi ini berkelindan dengan sistem kepercayaan masyarakat Jawa zaman pra-sejarah. Ritual wayang tak serta-merta berhubungan dengan pemujaan semata, kepercayaan itu kemudian memengaruhi bagaimana pembuatan tokoh-tokoh dalam wayang, yaitu gambar bayangan para leluhur yang sudah meninggal. Penegasan paradigma makna wayang adalah bayangan. Seiring waktu, dinamika budaya, mata pencaharian, dan sistem kepercayaan masyarakat setempat, wayang tak selalu lekat dengan kegiatan ritual komunikasi dengan arwah leluhur, justru selanjutnya mengalami perubahan makna serta media.

Realitas wayang sebagai produk seni budaya mencapai puncaknya pada tahun 907 Masehi dan abad XI. Pergelaran wayang dipergelarkan dan menjadi daya tarik bagi yang menontonnya. Pokok pergelaran wayang sifatnya masih magis-religius. Alat-alat pendukung yang digunakan amatlah sederhana dan *gendhing-gendhing* yang mengiringi bernuansa Hindu, sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa dengan nilai-nilai Hindu yang masuk dari India (Mulyono, 1989).

WAYANG SEBAGAI MEDIA DAKWAH ISLAM

Pola dakwah kultural agama di Jawa dengan medium wayang ternyata tak sampai di situ saja, di zaman Sunan Kalijaga, pendekatan budaya juga diterapkan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Wali yang juga murid Sunan Bonang tersebut mengawali dakwahnya di Desa Kalijaga, Cirebon. Dalam melakukan syiar Islam, khususnya di Jawa, beliau selalu mencoba memahami karakter dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat. Tak sekali pun beliau mendikte secara kaku warga lokal untuk menerima langsung agama yang telah ia anut.

Saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabarata dari cerita ajaran Hindu menjadi cerita yang lekat dengan ajaran Islam. Bentuk wayang juga diubah. Awalnya serupa bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur.

Contohnya, orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Meski menghadap ke depan, matanya dibuat tampak utuh. Apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga menegaskan bahwa terjadinya perubahan wayang dari realistik-naturalistik menjadi abstrak dekoratif dan simbolik, dengan tetap fokus pada tujuan dan spirit dakwah yang diemban.

Figur-figur wayang yang paling dikenal luas adalah punakawan yang berarti mentor bijak bagi para Pandawa. Sunan Kalijaga serta para wali lainnya juga banyak memperkenalkan ajaran-ajaran Islam (*aqidah*, syariah, dan akhlak) melalui plot cerita yang dibangun berdasarkan perilaku punakawan tersebut.

Nama-nama punakawan sendiri (Semar, Nala Gareng, Petruk, dan Bagong) sebagai satu-kesatuan sebenarnya merepresentasikan karakteristik kepribadian Muslim yang ideal. Semar, sebagaimana dijelaskan Sudarto, berasal dari kata *ismar* yang berarti seorang yang mempunyai kekuatan fisik dan psikis. Ia sebagai representasi seorang mentor yang baik bagi kehidupan, baik bagi raja maupun masyarakat secara umum.

Nala Gareng berasal dari kata *nála qarín* yang berarti seorang yang mempunyai banyak teman. Ia merupakan representasi dari orang yang supel, tidak egois, dan berkepribadian menyenangkan sehingga ia mempunyai banyak teman. Petruk merupakan kependekan dari frase *fatruk ma siwá Allah* yang berarti seorang yang berorientasi dalam segala tindakannya kepada Tuhan. Ia merepresentasikan orang yang mempunyai konsen sosial yang tinggi dengan dasar kecintaan pada Tuhan. Bagong berasal dari kata *bagháyang* berarti menolak segala hal yang bersifat buruk atau jahat, baik yang

berada di dalam diri sendiri maupun di dalam masyarakat (Marsaid, 2016).

BERDAKWAH DENGAN PENDEKATAN BUDAYA

Dari apa yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga, bisa dilihat bahwa budaya asli nusantara tidak perlu dieliminasi dalam sistem kehidupan masyarakat untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Justru, sejarah Walisongo menunjukkan bahwa Islam berkembang pesat melalui adaptasi budaya dengan tetap menjaga etika, sopan santun, dan prinsip-prinsip perdamaian. Dengan syiar yang lembut, menghindari konflik, tanpa langsung menghilangkan tradisi lama yang telah turun-temurun dianut, penyebaran Islam Nusantara model Walisongo dapat bertahan hingga sekarang, malah semakin menguatkan sikap toleransi antar-umat beragama.

Sehingga model sejenis yang sepatutnya perlu dilestarikan oleh pendakwah Indonesia sekarang, terlebih dakwah kaku dan penuh kekerasan yang banyak diimplementasikan di Timur Tengah terbukti kurang efektif. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah ateis di sana dalam satu dekade terakhir. Wawancara Kantor Berita Jerman DW (2021) dengan beberapa responden yang mengaku meninggalkan agama memperlihatkan bahwa mereka memilih murtad karena ajaran Islam yang mereka terima kerap didakwahkan dengan bentakan, dan ancaman kekerasan, sehingga mereka merasa tidak mendapatkan kedamaian.

Apa yang terjadi di Timur Tengah tentu kita harapkan tidak terjadi juga di Indonesia. Oleh karenanya ke depan kita sepertinya perlu mendalami kembali nasihat almarhum Gus Dur semasa hidup, “Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinan ada dua, yaitu pertama, kebudayaan akan mati, kedua, Islam akan hancur.”[]

NYAI AGENG MALOKA DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI LASEM PADA ABAD 15 M

Oleh: **MOH. RIVALDI ABDUL**

Perkembangan Islam di Lasem turut mendapatkan sentuhan dari Nyai Ageng Maloka. Sosoknya merupakan adipati (pemimpin) perempuan di Kadipaten Lasem yang mulai menjabat sekitar 1479. Dia memimpin Lasem menggantikan Adipati Wiranagara, suaminya, yang meninggal pada tahun itu.

Nyai Ageng Maloka merupakan putri Sunan Ampel. Dijelaskan Agus Sunyoto dalam *Atlas Wali Songo*, bahwa dari pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila putri Arya Teja, Bupati Tuban, dikarunai lima anak, yaitu Nyai Patimah bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, Nyai Taluki bergelar Nyai Gedeng Maloka, Mahdum Ibrahim bergelar Sunan Bonang, dan Raden Qasim bergelar Sunan Drajat. Jadi, Nyai Ageng Maloka atau Nyai Taluki adalah anak ketiga dari Sunan Ampel, dan merupakan kakak dari Sunan Bonang dan Sunan Drajat.

Saya belum tahu pasti kapan Nyai Ageng Maloka lahir. Namun, jika mengacu dari tahun lahir adiknya, Sunan

Bonang, yang sebagaimana dijelaskan Agus Sunyoto dengan mengutip perhitungan dari B.J.O. Schrieke dalam *Het Book van Bonang* (1916), bahwa Sunan Bonang diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 M dan tidak bisa lebih awal dari tahun itu. Maka, Nyai Ageng Maloka seharusnya sudah lahir sebelum tahun 1465 M.

M. Akrom Unjiya dalam *Lasem Negeri Dampoawang* menjelaskan, Nyai Ageng Maloka wafat pada 1490 M, dan dimakamkan di komplek Taman Sitaresmi, Gedhong Caruban. Sebuah taman di kawasan Caruban yang dibangun atas perintah Nyai Ageng Maloka. Setelah kematian suami dan putranya yang masih balita, serta kematian putri sulungnya, Putri Solekah yang menikah dengan Raden Patah, Nyai Ageng Maloka merasa sangat berduka, sehingga taman itu menjadi tempat mencari ketenangan untuk pelipur duka baginya.

Sebagai putri seorang ulama terkemuka, Nyai Ageng Maloka sudah barang tentu mendapatkan pendidikan Islam yang baik, dan itu turut membentuk pribadinya sehingga memiliki perhatian dalam penyebaran dan perkembangan Islam. Dalam upaya mengembangkan dakwah Islam di Lasem, Nyai Ageng Maloka berjasa dalam menghadirkan Sunan Bonang.

Agus Sunyoto dalam *Atlas Wali Songo* menjelaskan bahwa dakwah Sunan Bonang di Kediri kurang berhasil. Hal ini disebabkan oleh sikapnya yang agak keras dalam mendakwahkan Islam pada masyarakat Kediri. Sunan Bonang kemudian pergi ke Demak atas panggilan Raden Patah untuk menjadi Imam Masjid Demak. Selanjutnya, dia meninggalkan jabatan Imam Masjid Demak, dan memenuhi panggilan Nyai Ageng Maloka ke Lasem.

Nyai Ageng Maloka meminta Sunan Bonang untuk merawat makam Putri Bi Nang Ti dari Champa, yang masih terhitung nenek mereka, di Puthuk Regol. Sunan Bonang juga diminta merawat makam Pangeran Wirabajra dan Pangeran Wiranagara, mendiang ayah mertua dan suami Nyai Ageng Maloka. Naskah *Carita Lasem* menuturkan kalau Sunan Bonang merawat makam neneknya dari Champa dengan baik. Bahkan, sebuah batu di dekat makam diratakan untuk dijadikan tempat sujud.

Menurut Agus Sunyoto, kalau tugas Sunan Bonang, yang diberikan oleh Nyai Ageng Maloka, untuk merawat makam di Puthuk Regol yang melahirkan berbagai cerita legenda tentang petilasan pasujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar di timur Kota Lasem, yaitu tempat yang dikenal dengan nama Desa Bonang.

Keputusan Nyai Ageng Maloka memanggil Sunan Bonang sudah barang tentu memberi pengaruh baik terhadap perkembangan dakwah di wilayah Lasem. Sunan Bonang sendiri juga telah belajar dari pengalaman sewaktu melakukan dakwah di Kediri, sehingga dakwahnya kali ini semakin baik. Agus Sunyoto menjelaskan, berdasarkan naskah *Carita Lasem*, bahwa pada tahun 1402 Saka (1480 M), Sunan Bonang tinggal di bagian belakang dalem Kadipaten Lasem yang merupakan kediaman Nyai Ageng Maloka.

Ini sejalan dengan penjelasan M. Akrom Unjiya, yang menjelaskan bahwa tidak kurang setahun menjadi adipati, Nyai Ageng Maloka memindahkan Kadipaten Lasem dari Bonang Binangun ke Cologawen, yaitu tepat di seberang jalan depan istana lama Kriyan. Kemudian, istana Kadipaten Bonang Binangun dikuasakan kepada Sunan Bonang untuk keperluan pendidikan dan dakwah Islam.

Kebijakan Nyai Ageng Maloka, yang memberi ruang bagi Sunan Bonang untuk mengembangkan dakwah di Lasem, sudah barang tentu mendorong kemajuan dakwah Islam di kawasan itu. Menurut M. Akrom Unjiya, bahwa salah satu jejak (kemajuan) penyebaran Islam di masa Nyai Ageng Maloka dapat dilihat dengan keberadaan masjid tua di daerah Gedongmulyo, yaitu adanya Masjid Tiban. Keberadaan masjid ini menunjukkan bahwa pada masa itu penyebaran Islam telah meluas dari yang awalnya di Bonang Binangun telah sampai ke kawasan Masjid Tiban.

Meski bukan sebagai eksekutor dakwah, namun Nyai Ageng Maloka turut berjasa dalam perkembangan Islam di Lasem. Sebagai seorang adipati, dia mampu menciptakan ruang dakwah bagi Sunan Bonang, sehingga dapat memajukan Islam. Hal ini menunjukkan kalau Nyai Ageng Maloka punya peranan penting dalam kemajuan karier dakwah Sunan Bonang dan perkembangan Islam di wilayah Lasem.[]

ZIARAH KUBUR: Akulturasi Budaya Lokal dan Nilai-Nilai Islam

Oleh: **MOH. RIVALDI ABDUL**

Bulan puasa bagi mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam selalu terasa istimewa. Bagaimana tidak, tiap daerah di negara kita tercinta biasa menyambut bulan suci ini dengan beragam tradisi yang penuh sukacita. Indonesia yang kaya akan budaya memiliki banyak cara dalam menyambut bulan penuh berkah. Bahkan di berbagai daerah di Indonesia, perayaannya tersaji karena ada akulturasi budaya lokal lama dengan nilai-nilai Islam, contohnya saja ziarah kubur, yang di beberapa daerah dikenal dengan *nyekar*.

AWAL MULA TRADISI ZIARAH

Secara etimologis kata ziarah berasal dari bahasa Arab, kata ziarah ini merupakan *isim masdar* dari kata *zara*, *yazuru*, *ziyarah*, yang berarti berkunjung. Sedangkan kata makam juga berasal dari bahasa Arab yang berarti kubur. Dari

pengertian ini, maka ziarah kubur secara sederhana dapat berarti berkunjung ke makam. Menurut Quraish Shihab kata ziarah dalam al-Quran selalu disandarkan atau beriringan dengan kata kubur yang mengindikasikan adanya keterkaitan yang erat antara ziarah dan sebuah makam atau kuburan. Kunjungan seseorang ke makam-makam tertentu bukanlah kunjungan biasa. Namun kunjungan yang mempunyai maksud, makna dan tujuan tertentu. Dilengkapi dengan bacaan-bacaan tertentu sesuai dengan keinginan dan tradisi dimana ziarah makam tersebut dilakukan.

Dosen ilmu sejarah Universitas Airlangga (Unair) Purnawan Basundoro mengatakan bahwa tradisi ziarah kubur merupakan tradisi yang sudah berumur sangat tua. Tradisi tersebut dilakukan dengan mengadopsi keyakinan dalam rangka memberikan penghormatan terhadap leluhur atau nenek moyang. Ketika Islam datang, alih-alih meniadakan kebiasaan tersebut, para pendakwah Islam zaman dulu kemudian menyesuaikan kebiasaan setempat dengan menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sehingga, penerimaan masyarakat setempat terhadap Islam justru amat terbuka. Mereka melihat Islam adalah ajaran universal, bukan agama yang asing/anti akan budaya lokal.

Meski begitu ziarah kubur termasuk ibadah yang pada awalnya diharamkan saat perkembangan Islam. Namun kemudian dianjurkan dalam agama. Pengharaman ziarah kubur sendiri disebabkan para sahabat yang baru memeluk Islam, melakukan ziarah dengan niatan untuk meminta kekayaan kepada leluhur, bukan untuk mendoakan mereka. Padahal perbuatan itu termasuk perbuatan syirik yang dosanya tidak akan diampuni bila terbawa mati dan belum bertobat. Termasuk kebiasaan mereka mengeramatkan kuburan serta melakukan berbagai ritual lainnya yang hukumnya haram. Namun ketika para sahabat lebih kuat keimanannya, lebih dewasa cara berpikirnya serta sudah berpegang teguh pada Allah, ziarah kubur semakin dianjurkan karena kebiasaan ini membawa umat pada hikmah mengingat kematian.

Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Al-Quran, yakni QS. Al-Mu’min: 67, yakni

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).*

BERBAGAI HIKMAH ZIARAH KUBUR

Rasulullah juga mengimbau umatnya untuk ziarah kubur untuk terus mengingat kehidupan akhirat. Dengan kata lain, ketika orang mengunjungi makam orang yang sudah tiada, mereka yang masih hidup tergerak untuk terus berbuat kebaikan agar ke depannya ketika ia meninggal dunia, ia akan membawa bekal yang cukup. Sehingga, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada dakwah dan nilai edukasi yang terselip di balik sebuah prosesi pemakaman.

Tak hanya itu, ziarah kubur diharapkan bisa membuat peziarah menitikkan air mata agar hati menjadi semakin lembut. Dengan berziarah kubur diharapkan membuat keluarga yang ditinggalkan juga bersikap *qonaah* atau merasa cukup, serta lebih bersyukur. Jika dikaitkan dengan relasi antar-manusia, berziarah kubur diharapkan bisa mengenang jasa-jasa orang yang sudah dimakamkan. Terlebih bila sosok yang meninggal telah memberikan teladan baik ketika ia di dunia, tentu kita yang masih hidup harus mengikuti jejak baiknya agar dapat meneruskan amal-amal yang ia wariskan.

Melihat akar dari tradisi ziarah kubur, sangat jelas terlihat bahwa Islam adalah agama yang terbuka dengan budaya adat istiadat setempat dan mengakomodasinya dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga, akan salah kaprah jika kita memukul rata bahwa semua budaya lokal adalah haram dan tak perlu dilestarikan. Padahal, sejak kedatangan Islam, para pendakwah kita dulu justru mencontohkan untuk mengakulturasinya, alih-alih melarangnya sekaligus.[]

MEMPERKUAT SOLIDARITAS SOSIAL MELALUI TRADISI HAUL

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Di beberapa daerah, lebaran tidak hanya identik dengan tradisi mudik dan silaturahmi, tetapi juga dilengkapi dengan tradisi haul atau acara memperingati kematian kerabat yang telah meninggal dunia ketika berkumpul di kampung halaman. Haul berasal dari Bahasa Arab, *al-haulu* yang berarti sekitar, perpindahan waktu, pemisah, dan setahun. Dalam Kamus Bahasa Arab kata tersebut memiliki dua makna. *Pertama*, haul berarti berlakunya waktu dua belas bulan, tahun Hijriah terhadap harta yang wajib dizakati di tangan muzaki/pemiliknya. *Kedua*, haul berati upacara peringatan ulang tahun wafatnya seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haul diartikan sebagai peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali. Dari sini kemudian dipahami bahwa haul merupakan peringatan tahunan wafatnya seseorang, terutama wafatnya seorang tokoh yang berjasa, ulama besar dan karismatik, imam tarekat

dan sufi. Meski realitanya haul juga diselenggarakan bagi kalangan warga biasa.

SEJARAH TRADISI HAUL

Tak ada penjelasan pasti kapan tradisi haul pertama kali dilaksanakan, namun haul diyakini pertama kali berkembang di kalangan masyarakat Muslim di Hadramaut, Yaman. Dengan berkembangnya niaga dan dakwah agama Islam di masa lampau, budaya haul pun turut dibawa semasa migrasi kalangan *sayyid* dari Hadramaut ke Asia Tenggara yang puncaknya terjadi sekitar abad ke-19. Kalangan *sayyid* ini kemudian banyak diterima baik oleh pihak Hindia Belanda maupun Malaya Britania yang mengikutsertakan mereka dalam aktivitas perdagangan. Para *sayyid* ini kemudian mendapat tempat tersendiri di kalangan para penguasa daerah maupun masyarakat setempat karena selain sukses dengan kegiatan perdagangan, namun juga dikenal sebagai tokoh spiritual karena kedalaman ilmu agama dan pertalian darahnya dengan Nabi Muhammad (Muslih, 2006).

Sekali dalam setahun, para *sayyid* dan *masyayikh* tersebut akan berkumpul/memperingati haul di makam tokoh spiritual dan mengundang semua orang. Acara ini biasanya dipimpin oleh keturunan/penerus tokoh yang telah wafat. Bagian inti kegiatan berisi orasi/ceramah yang dimaksudkan untuk mengingat kembali memori leluhur yang telah tiada, dari sinilah haul semakin memperkuat fungsi sosial para *sayyid* yang dikenal sebagai pewaris kekuatan spiritual dari para pendahulunya (Alatas, 2007; Algar, 2018).

Ketika Islam masuk ke Indonesia, terutama di Jawa, haul tidak terlihat seperti budaya baru. Sebab budaya lokal zaman dahulu sudah familier dengan penghormatan individu-individu yang telah meninggal dunia. Sehingga ketika haul diperkenalkan oleh para *sayyid*, yang terjadi justru akulturasi budaya. Tradisi penyembahan kepada tokoh atau benda yang dikeramatkan berganti dengan pembacaan doa dan mengenang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia (Al-Hasan, 2014).

Lalu, apa yang membedakan haul dengan ziarah kubur? Perbedaan keduanya terletak pada esensi acara. Ziarah kubur dilakukan khusus untuk mendoakan mayit; haul lebih merupakan tradisi reflektif terhadap sejarah, mereka yang melaksanakan haul mencoba menghadirkan kembali seorang tokoh yang telah wafat dengan berbagai perjuangan atau perbuatan baik yang dapat menginspirasi orang yang masih hidup. Dan ziarah kubur, bisa jadi merupakan salah satu rangkaian acara haul.

BAGAIMANA HAUL MEMBENTUK SOLIDARITAS SOSIAL?

Dalam perkembangannya, konsep acara haul diperluas. Tak hanya menjadi peringatan wafatnya individu, tetapi juga menjadi sarana silaturahmi antar-anggota keluarga terutama saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Oleh karenanya haul tak bisa selalu dituding sebagai ritual syirik. Justru haul menyimpan banyak hikmah dan kebaikan.

Dengan praktik umat Muslim sekarang, haul dapat dikatakan sebagai ritual keagamaan yang dikemas secara sosial dengan rangkaian acara yang tidak hanya menyangkut agama secara langsung, tetapi dikombinasikan dengan bermacam-macam acara yang dapat memeriahkan dan menarik minat orang banyak untuk hadir dan mendoakan, serta mendapatkan pelajaran dari sejarah almarhum/almarhumah, dengan harapan dapat memetik hikmah, khususnya dalam hal agama, untuk kehidupan umat Islam selanjutnya.

Melalui pidato atau ceramah yang disampaikan ketika haul diselenggarakan, masyarakat yang hadir diajak melakukan 'napak tilas' sejarah orang yang wafatnya sedang diperingati, terutama berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini ia telah lakukan di dunia. Jika yang wafat, adalah tokoh publik/pemuka agama, jasa-jasa serta pelayanan yang selama ini ia telah dedikasikan pada umat akan dikenang bersama dengan harapan para peserta haul ke depannya akan meneladani tindakan positifnya semasa hidup. Momentum reflektif ini acapkali menggetarkan jiwa karena seakan-akan sosok almarhum tersebut hadir secara utuh bersama para peserta acara, meskipun lebih dirasakan secara subjektif dengan cara beragam bagi masing-masing individu.[]

MENGURAI MAKNA TRADISI REWANG DI BALIK ACARA HAJATAN

Oleh: HASNA AZMI FADHILAH

Usai lebaran, banyak dari kita yang kebanjiran undangan pernikahan di bulan Syawal. Bahkan beberapa orang terdekat yang saya tanya, mengaku bahwa dalam satu hari ia bisa menghadiri tiga bahkan lebih resepsi pernikahan. Geliat pernikahan di bulan Syawal sendiri sebenarnya memiliki sejarah menarik. Dulu, di zaman Jahiliah, bulan Syawal dianggap sebagai waktu sial untuk mengadakan acara perkawinan. Latar belakangnya disebabkan karena pada bulan ini unta menaikkan ekornya sebagai isyarat tidak mau kawin, yang kemudian orang Arab menjadikan bulan ini sebagai bulan pantangan untuk menikah karena menganggapnya sebagai bulan yang penuh dengan kesialan. Namun, saat Islam datang, Islam menghapus tradisi pernikahan Jahiliah ini dengan contoh langsung dari Nabi Muhammad Saw. berupa pernikahan beliau dengan 'Â'isyah. (Muslim (206-261 H)). Teladan inilah yang kemudian banyak ditiru oleh umat Muslim hingga sekarang (Zamzami, 2020).

TRADISI REWANG DARI WAKTU KE WAKTU

Di Indonesia, pesta pernikahan merupakan momen sosial yang terkadang menjadi ajang gengsi seorang individu. Tak heran, gelaran ini dipersiapkan dengan serius karena akan memengaruhi nama baik keluarga. Sebab, tak hanya menjadi perkenalan anggota keluarga baru, tetapi resepsi pernikahan juga menjadi ajang silaturahmi kerabat atau kolega yang sudah lama tak bersua. Oleh karenanya, acapkali pernikahan dibuat semeriah mungkin dan menyajikan berbagai macam hidangan yang dinikmati bersama dengan para tamu undangan.

Demi menyukseskan acara itu, di beberapa daerah, tetangga dan saudara dekat biasanya akan mendatangi rumah keluarga mempelai pengantin untuk membantu menyiapkan pesta. Tradisi lokal ini lah yang selanjutnya terkenal dengan nama "rewangan". Rewangan berasal dari kata "rewang" yang berarti: membantu. Menurut referensi lain, "rewangan" berasal dari kata "rewang" yang berarti *mara perlu tetulung*. Kegiatan para wanita tetangga yang membantu di tempat tuan rumah untuk mempersiapkan makanan di dapur merupakan contoh dari aktivitas "rewang". Merujuk pada riset dari Susanti dan Lestari (2012), rewang merupakan kegiatan sosial di perdesaan yang tidak memandang jenis kelamin sesuai dengan aktivitasnya, walaupun dalam kenyataannya "rewang" lebih banyak ditangani kaum wanita. Meski tidak terbatas pada acara pernikahan, karena membantu tetangga yang anggota keluarganya meninggal juga bisa disebut sama. Namun, rewang sudah terlanjur lekat pada hajatan pernikahan. Padahal, segala perilaku membantu di rumah orang lain di mana orang itu bermaksud mengadakan kegiatan yang melibatkan orang banyak disebut "rewang".

Seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika masyarakat, tradisi rewang yang dulu kerap menjadi simbol kesuksesan acara hajatan, utamanya pernikahan, kini semakin terkikis. Di wilayah perkotaan, dengan terbatasnya lahan dan banyaknya warga yang bekerja di perindustrian atau perkantoran yang terikat waktu, tradi-

si rewang tak bisa lagi menjadi andalan untuk mengoptimalkan gelaran acara hajatan. Belum lagi karena tingginya harga properti yang membuat rumah di daerah urban kian sempit, hal itu tentu tak lagi menunjang untuk diadakannya acara skala besar di lingkungan komplek perumahan. Akhirnya, rewang pun digantikan oleh jasa *catering* atau *event organizer* yang disewa secara profesional oleh tuan rumah (Anwar, 2021).

Meski begitu, banyak wilayah di Indonesia, masih mempertahankan budaya lokal ini. Terlebih kearifan lokal tersebut sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia. Suatu kajian dari IAIN Tulungagung juga menegaskan bahwa rewang sejalan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah dan tidak menyalahi keduanya. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Melihat bagaimana rewang dilakukan, sangatlah cocok hakikatnya dengan prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong dengan tujuan untuk saling membantu pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Apalagi, semua pekerjaan di dunia pastilah membutuhkan bantuan orang lain, sehingga adanya rewang tak hanya meringankan urusan penyelenggara hajatan, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Selain itu, rewang juga memiliki banyak dampak positif lainnya: akan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, memudahkan dalam penyebaran nilai-nilai syiar Islam secara praktis, dengan saling tolong-menolong dan bekerja sama, akan mempermudah melaksanakan perintah Allah Swt., mewujudkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Pada akhirnya, rewang dapat mempertahankan ukhwah antar-sesama manusia sesuai seperti perintah Nabi Muhammad Saw., yakni melahirkan rasa cinta dan kasih sayang di lingkungan komunitas masyarakat.[]

MENGGALI MAKNA TRADISI LEBARAN TOPAT DAN PRAONAN

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Indonesia yang kaya akan berbagai budaya tampaknya tak akan kehabisan cerita mengenai tradisi lokal yang hingga kini tak lekang oleh zaman, salah satunya adalah syawalan atau tradisi di bulan Syawal untuk memperingati lebarannya orang yang berpuasa Sunnah enam hari di bulan tersebut. Penyambutan Syawal sendiri amatlah beragam, ada daerah yang merayakannya dengan memasak ketupat, ada juga yang menggelar doa bersama dan ziarah kubur. Lebih lengkapnya, berikut diuraikan dua contoh budaya menarik dari Lombok dan Pasuruan.

LEBARAN TOPAT DI LOMBOK

Tak hanya masyarakat Jawa yang punya gelaran acara setelah puasa Sunnah Syawal, warga Lombok pun tak ketinggalan memiliki perayaan 'lebaran kedua' ini. Namanya pun hampir mirip. Di Lombok, biasa disebut "lebaran topat". Lebaran

Topat merupakan tradisi masyarakat Sasak, yang merupakan suku asli Lombok. Budaya tersebut biasanya banyak dilaksanakan di Lombok Barat, Mataram dan Lombok Utara. Ada beberapa tempat yang dijadikan pusat perayaan Lebaran Topat, antara lain di kompleks pemakaman dan Pantai Loang Balloq, Kota Mataram, dan Pantai Batu Layar, serta Lombok Barat.

Lebaran Topat sendiri merupakan perayaan syukur kepada Allah karena telah selesai melaksanakan puasa Sunnah Syawal selama enam hari terus-menerus dari tanggal 2 hingga 7 Dzulhijjah. Karena sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, ritual ini seakan-akan berhukum wajib untuk dilakukan bagi warga di sana. Tak hanya berbagi makanan dan sajian istimewa lokal, ajang Lebaran Topat juga merupakan tempat bertemu kolega dan saudara bila pada hari H Idul Fitri, mereka tak sempat bersua dan berjabat tangan. Tak heran momen Lebaran Topat selalu disambut antusias.

Pada Lebaran topat di Lombok Barat, warga lokal juga akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mempunyai nilai-nilai sakral, terutama makam. Mereka mendoakan dan menghormati leluhur yang berdakwah membawa Islam di Pulau Lombok. Bahkan terkadang perayaan Lebaran Topat digandeng dengan prosesi *ngurisang* (potong rambut bayi), atau syukuran sunatan untuk anak-anak mereka. Sehingga Lebaran Topat bisa dikatakan sebagai momen perayaan besar-besaran bagi umat Islam di Lombok.

Kini dengan peningkatan ekonomi warga, prosesi budaya tersebut sudah bergeser dan tidak hanya sekadar prosesi ritual kebudayaan, namun menjadi kegiatan pelesiran keluarga pasca-puasa pada Ramadan dan puasa Syawal. Dari pihak pemerintah setempat pun turut mendukungnya dengan menjadikan momen Lebaran Topat sebagai bagian dari kalender pariwisata (Nursyamsi, 2019).

PRAONAN DI PASURUAN

Di Pasuruan, berakhirnya puasa Sunnah setelah bulan Ramadan juga dirayakan secara meriah. Di sana para warga menggelar tradisi Praonan, yang berarti berkeliling dengan menaiki perahu, untuk

merayakan Hari Raya Ketupat. Terdapat tujuh titik kumpul penyelenggaraan tradisi Praonan di Kabupaten Pasuruan. Ketujuh titik kumpul tersebut berada di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Kraton, Kecamatan Lekok, dan Kecamatan Nguling. Pada setiap titiknya para nelayan menyiapkan perahu guna disewakan ke warga yang ingin ikut serta dalam tradisi Praonan.

Menurut perangkat desa Kalirejo, tradisi Praonan ini sendiri bermula saat warga sekitar melakukan silaturahmi layaknya hari raya Idul Fitri seperti biasanya. Namun, sejumlah sanak saudara ternyata ingin menaiki perahu, dan kemudian diajaklah mereka untuk melihat suasana Laut Pasuruan. Lambat laun, keluarga lain yang melihat kemudian mencontoh. Akhirnya, tambah ramailah wilayah Pesisir Pasuruan. Akhirnya, setiap tahun ada tradisi Praonan ini, dan bahkan beberapa kali pemerintah daerah setempat turut berkontribusi memeriahkan perayaan dengan menggelar berbagai lomba, di antaranya: kompetisi ski lumpur dan hias perahu.

Yang menarik, tradisi lokal Praonan sekarang tak hanya dihadiri oleh warga lokal. Karena peran media sosial, masyarakat di luar Pasuruan pun turut berduyun-duyun datang ke sana untuk menikmati meriahnya perayaan Syawalan. Keriuhan ini tak hanya membuat Lebaran Ketupat semakin ramai, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan nelayan yang menyewakan perahunya. Dengan semakin longgarnya pengetatan wilayah karena pandemi, Praonan tahun ini seperti membuka keran rezeki lebih bagi mereka (Atma, 2022).

Melihat kedua tradisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara Islam sebagai agama universal dan tradisi lokal terjalin dengan baik. Budaya setempat justru berkelindan dan saling memengaruhi bagaimana syiar Islam ditebarkan. Justru ketika Islam datang, tradisi lokal tidak pernah sepenuhnya dilenyapkan. Ada bagian-bagian dari tradisi lokal (ikon atau konsep) yang terus bertahan dipelihara dan tidak tergantikan oleh ajaran universal (Abidin, 2009). Dengan cara ini dapat dikemukakan bahwa ajaran universal diapropriasi untuk mengisi ruang konsepsi yang pada tradisi lokal masih bersifat terbatas, sedangkan cara-cara hidup di

ruang lokal tetap menggunakan tradisi lama. Dari sana, semakin terlihat bahwa karakter masyarakat Muslim Indonesia sebagai bangsa majemuk dan kaya akan nilai-nilai kultural melihat Islam sebagai pedoman hidup sejati, tanpa meminggirkan jati diri. Sehingga sikap keterbukaan semacam inilah yang perlu terus dipelihara, bukan kemudian bersikap eksklusif dengan memandang bahwa semua hal yang bernuansa lokal secara gamblang dilabeli syirik tanpa menggali lebih dalam esensi dasarnya.[]

KEARIFAN LOKAL ACEH DALAM MENJAGA KEKAYAAN LAUT NUSANTARA

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Sejak 2008 lalu, tiap tanggal 8 Juni PBB mencanangkan peringatan hari kelautan sedunia. Walau begitu, perayaan laut internasional sebenarnya sudah dimulai pertama kali di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992 dalam konferensi PBB Environment and Development. Perayaan Hari Laut Sedunia pada intinya adalah momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut agar generasi selanjutnya tetap bisa menikmati hasil laut dengan maksimal.

Sebagai negara maritim, Indonesia diberkahi oleh banyaknya keajaiban laut dan bagaimana laut hingga kini menjadi sumber kehidupan kita. Dengan anugerah ini, tentu kita semua berharap bahwa laut yang terjaga kearifannya akan mendukung kehidupan setiap organisme di bumi, termasuk umat manusia.

Sayangnya, dari hari ke hari laut kita mengalami banyak problematika. Saat ini wilayah kelautan Indonesia banyak

tercemar oleh sampah dan juga limbah industri. Salah satu penyebab pencemaran air, termasuk laut adalah penggunaan detergen yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan detergen yang berlebihan dan mengandung bahan berbahaya dapat merusak ekosistem air dan laut. Apabila laut telah tercemar, ikan-ikan yang berada di ekosistem tersebut tidak akan bisa bertahan hidup. Jika pun bisa bertahan hidup, ikan yang tersisa tidak baik untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya.

Limbah dari sisa detergen dan pestisida (misalnya DDT) bisa merangsang pertumbuhan kanker (bersifat karsinogen), menyebabkan gangguan ginjal, dan gangguan kelahiran. DDT (Dikloro Difenil Trikloroetana) bersifat non-biodegradable yang artinya tidak dapat terurai secara alamiah. Selain akibat penggunaan detergen, laut sering kali tercemar oleh kebocoran tangki minyak atau ledakan sumur pengeboran minyak lepas pantai. Minyak yang tumpah juga bisa merusak ekosistem laut. Lapisan minyak di permukaan air bisa menghalangi difusi oksigen ke air laut sehingga berakibat terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut. Hal ini tentunya akan membahayakan kehidupan di laut (Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, 2020).

Meski dibayangi berbagai masalah, kita patut bersyukur bahwa banyak suku di berbagai belahan Nusantara memiliki tradisi lokal untuk menjaga laut, salah satunya di Aceh. Di sana, mematuhi aturan adat merupakan kewajiban masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dilakukan untuk menjamin tangkapan ikan yang telah mereka lakukan turun-temurun. Aturan adat laut yang dipimpin Panglima Laot [Laut] tersebut telah diberlakukan sejak Aceh berbentuk kerajaan. Poin-poin hukumnya sendiri dibuat nelayan bersama pimpinan adat laut. Dalam implementasi penegakan hukum, Panglima Laot bertugas memastikan nelayan menangkap ikan dengan cara tidak merusak serta menentukan bersama hari-hari yang tidak boleh melaut.

Semua nelayan di pelabuhan biasanya dipimpin seorang Panglima Laot Lhok. Sementara, Panglima Laot Provinsi bertugas me-

ngoordinir seluruh nelayan di Aceh. Panglima Laot tidak hanya bertugas menjaga hukum adat tetap berjalan dan meningkatkan taraf hidup nelayan, tetapi juga memastikan nelayan tidak mencemari laut, tidak merusak terumbu karang dan hutan bakau.

Secara spesifiknya, terdapat larangan agar nelayan tidak menangkap ikan dengan cara merusak, seperti menggunakan racun, bom, pukat harimau atau cantrang. Dan ternyata, pencanangan regulasi ini telah berlaku cukup lama. Bagi yang melanggar selanjutnya akan dikenakan sanksi.

Nelayan juga tidak dibenarkan menangkap ikan yang tidak bisa dimakan. Bahkan, ada pantangan menangkap ikan yang sangat besar, selain mengancam nyawa nelayan juga akan membunuh induk ikan. Tak hanya itu, nelayan Aceh tidak memburu paus dan lumba-lumba. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa mereka secara tidak langsung membantu proteksi satwa yang dilindungi.

Nelayan juga memiliki hari pantang melaut, yang jika dikalkulasikan dalam setahun ada 63 hari. Seperti setiap Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kenduri laut, 17 Agustus atau 26 Desember yang merupakan peringatan bencana tsunami. Jika pada hari itu sedang cuaca buruk, para nelayan juga tidak akan memaksakan diri untuk melaut. Dengan begitu mereka sedang memberi kesempatan ikan berkembang biak.

Satu hal lagi yang menarik, nelayan mencari ikan tidak di tempat yang sama dalam setahun. Ini dipengaruhi arah angin enam bulanan. Saat angin bertiup dari barat, nelayan mencari ikan dari Selat Benggala hingga Selat Malaka, sementara saat angin timur, nelayan mencari ikan dari Selat Benggala hingga Samudra Hindia. Hal ini dilakukan untuk menghindari angin dan ombak besar, sehingga keselamatan para nelayan akan terus terjamin, sembari mereka senantiasa menjaga kelestarian kekayaan laut (Hanafiah, 2019).[]

GREBEG BESAR DEMAK: Membumikan Dakwah Islam Kultural

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Salah satu acara yang dinanti menjelang Idul Adha di Kabupaten Demak, Jawa Tengah selain semarak pengajian bertema kurban adalah perayaan Grebeg Besar. Grebeg Besar sendiri merupakan upacara tradisional yang sarat akan nilai-nilai ke-Islam-an bagi warga masyarakat Kabupaten Demak untuk menyambut datangnya hari raya Lebaran Haji pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Semula Grebeg pertama kali diadakan untuk memperingati hari jadi Masjid Demak yang dibangun oleh Sunan Kalijaga bersama Sunan Bonang, Sunan Gunung Jawi dan Sunan Ampel dengan potongan-potongan kayu atau tata dalam tempo sehari. Pada waktu itu, Masjid Demak masih merupakan satu-satunya masjid di Jawa, sehingga sebelum peringatan dimulai, diupayakanlah bagaimana caranya untuk memancing kedatangan masyarakat yang waktu itu belum mengenal Islam. Maka diadakanlah berbagai rangkaian acara yang selanjutnya lebih familier disebut dengan Grebeg Demak.

Kesenian tradisional maupun permainan yang disenangi masyarakat pada waktu itu turut ditampilkan sehingga orang awam banyak yang berduyun-duyun datang. Karena seringnya mendengar dan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Muslim yang digawangi oleh para wali, masyarakat yang belum tahu akan Islam, selanjutnya menaruh rasa penasaran dan tergerak untuk belajar. Dan dari sinilah dialog keislaman mulai masuk.

Ditilik dari sejarahnya, Grebeg berakar pada tradisi masa lampau yang telah ada sejak 1428 tahun saka, atau 1506 Masehi pada zaman Majapahit. Para Raja Jawa secara turun-temurun menyelenggarakan upacara pengorbanan dengan menyembelih seekor kerbau jantan yang masih liar untuk dipersembahkan sebagai sesajian kepada dewa atau arwah para leluhur. Upacara yang mirip dengan kurban tersebut merupakan upacara kenegaraan yang disebut Rajaweda dengan harapan mendapatkan kemakmuran dan dijauhkan dari segala malapetaka. Pada zaman Kesultanan Demak Bintoro, yang diperintah Raden Patah, kebiasaan Raja Jawa mengadakan upacara Rajaweda sempat ditiadakan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun, alih-alih melarang secara keras, para wali yang memahami karakter masyarakat pun mengambil kebijaksanaan agar tradisi Grebeg dilestarikan dengan konsep yang berbeda: daging sembelihan tidak lagi menjadi sesajen, tetapi dibagikan kepada umat yang kurang mampu, dan rangkaian acaranya dikaitkan dengan penyambutan hari raya Idul Adha (Ahmad, 2013).

Di masa sekarang, Grebeg Besar dilaksanakan setahun sekali untuk kepentingan dakwah Islamiyah di Masjid Agung Demak. Adapun prosesnya meliputi ziarah ke makam Sultan-Sultan Demak dan Sunan Kalijaga. Kemudian ada juga ritual Tumpeng Sanga yang diselenggarakan pada malam menjelang tanggal 10 Dzulhijjah. Pada saat yang sama di Kadilangu juga dilakukan kegiatan serupa yaitu selamatan Ancakan. Selamatan Ancakan mengambil tempat di Pendapa Natabratan yang terletak di sebelah timur Kasepuhan Kadilangu sekitar 500 meter. Ancakan adalah tempat nasi dan lauk pauk yang terbuat dari anyaman bambu. Nasi dan lauk pauk sebe-

lum diletakkan diatas Ancak, dilapisi terlebih dahulu dengan daun jati. Tumpeng Ancakan terdiri dari nasi, lauk pauk, *kluban*.

Pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah, setelah masyarakat menunaikan Shalat Idhul Adha di Masjid Agung Demak, sekitar pukul 09.00 WIB di pendapa Kabupaten selanjutnya akan diadakan acara iring-iringan *uborampe minyak jamas* (*uborampe* secara harfiah artinya perlengkapan). *Uborampe minyak jamas* ini lalu digunakan untuk menyucikan pusaka peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga yang berupa Kotang Ontokusumo, keris pusaka Kyai Sirikan dan keris pusaka Kyai Carubuk. Acara *penjamasan* Pusaka peninggalan Sunan Kalijaga menjadi inti dari ritual Grebeg Besar. pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang *dijamasi* antara lain adalah Kotang Ontokusumo, keris Kyai Carubuk dan keris Kyai Sirikan. Berbeda dengan masa lalu, fungsi ritual Grebeg Besar di Demak bagi masyarakat sekarang ini lebih ditekankan sebagai sarana upacara adat, hiburan, komunikasi, integrasi kemasyarakatan, hingga menjaga keharmonisan norma-norma, dan daya tarik objek wisata. Bahkan, jika diurai lebih dalam, tiap ritual dan kegiatannya mengandung banyak nilai dan hikmah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam antara lain: religi/ibadah, kegotong-royongan, kerukunan, solidaritas, cinta tanah air, kepemimpinan, tanggung jawab, etika, estetika, ekonomi (Setiyarini, 2011).

Pada akhirnya, upaya melestarikan Grebeg Besar sejatinya merupakan jalan dakwah kultural dan media pelembagaan religi yang bertujuan untuk mengekspresikan rasa syukur atas limpahan Rahmat Allah Swt. serta menghormati Walisongo yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam Khususnya di Demak. Stigma seni yang sering kali dipandang sebelah mata pun nyatanya ketika dikemas dengan baik, justru kemudian mempunyai sifat multimedia yang membawa kebaikan lebih luas (Yudoseputra 1986). Bahkan kini Grebeg Besar juga menjadi alternatif media hiburan rakyat yang murah meriah untuk dapat menghilangkan sejenak kepenatan atau kejenuhan dalam menjalani rutinitas sehari-hari di tengah impitan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.[]

UPACARA ADAT MENYAMBUT ANAK DI INDONESIA: Penuh Pengharapan dan Sukacita

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Sebagai masyarakat yang amat menghargai konsep keluarga dan kerabat, orang-orang Indonesia melihat anak tidak hanya sebatas sebagai penerus, tetapi anak juga dipandang sebagai aset dan manifestasi kebanggaan untuk jangka panjang. Dengan landasan tersebut, keluarga memerankan fungsi penting dalam hal penjagaan dan perawatan anak hingga ia tumbuh besar nanti. Tak heran, dengan pandangan bahwa anak adalah harta keluarga, banyak tradisi atau budaya yang diadakan dengan tujuan untuk memohon keselamatan buah hati kepada Sang Maha Pencipta.

Salah satu contoh tradisinya adalah pelaksanaan upacara adat jelang kelahiran anak di masyarakat Sunda, Jawa, dan di beberapa daerah lainnya. Tahapannya sendiri tidak hanya satu langkah saja, namun melewati beberapa proses yang dimulai dengan pembacaan doa bersama sebelum sang anak lahir. Selanjutnya, diikuti dengan mandi-mandi. Makna dibalik acara ini yaitu memberikan simbol bahwa anak sejatinya

adalah anugerah terbesar dari Tuhan bagi orangtua. Dalam prosesi mandi-mandi, seorang ibu dimandikan dengan air yang berisi tujuh macam bunga dan tujuh air sumur dari rumah yang berbeda. Acara ini diakhiri dengan pembelahan kelapa gading. Ritual pemotongan kelapa ditautkan dengan pertanda jenis kelamin sang anak. Bila ketika dibelah, air kelapa yang dikeluarkan amat banyak, dipercaya bahwa nantinya anak yang akan lahir berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan bila yang terjadi sebaliknya, masyarakat meyakini bahwa anak yang lahir akan berjenis kelamin perempuan.

Usai prosesi mandi sang ibu tadi, acara akan dilanjutkan dengan tradisi 'berjualan' rujak oleh si ibu hamil tadi. Lazimnya rujak yang dijajakan, rujak pada tradisi jelang lahiran juga berisi aneka macam buah. Semua buah tadi akan disajikan dan diramu langsung oleh si ibu hamil kepada kerabat atau orang yang hadir dalam upacara tradisional yang digelar.

Bahkan di Jawa Timur, yang menjajakan rujak tidak hanya ibu saja, tapi sang ayah juga dilibatkan. Rujaknya pun spesial, rujak yang digunakan dalam prosesi ini ialah rujak gobet. Rujak gobet merupakan salah satu makanan tradisional Jawa yang berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Rujak yang terdiri dari beraneka buah seperti bengkuang, nanas, pencit (mangga muda), blimbing, jambu, babal (nangka muda), kedondong, asem dan racikan bumbu lainnya memiliki rasa asam, manis, pedas dan segar menjadi satu. Hal ini membuat rujak gobet ini menjadi menarik dan unik, bahkan baunya yang menggoda membuat semua orang mendekat dan ingin mencicipinya.

Meski terkesan sederhana, berjualan rujak yang dijajakan memiliki makna mendalam. Harapan tersirat dari acara ini yaitu anak yang dilahirkan di kemudian hari dapat memiliki masa depan yang cerah dan kemampuan finansial yang cukup ketika ia dewasa. Tak hanya itu, ia juga diharapkan dapat bergaul dengan semua kalangan masyarakat, seperti yang disimbolkan melalui beragam buah yang tersaji dalam rujak. Dari makna simbolik upacara adat tadi dapat diartikan bahwa tradisi kita sejatinya amat menjunjung tinggi tole-

ransi dan amat mengharapkan bila generasi penerus dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Di samping rujak, ada juga yang melengkapinya dengan dawet/cendol dan hidangan pendamping lainnya. Yang unik, menurut tradisi yang dipercayai oleh masyarakat setempat, bila rasa dawet dan rujaknya sedap, kemungkinan besar anaknya perempuan. Bila kurang mantap, dipercayai anaknya laki-laki.

Prosesi *dodol* rujak dan cendol yang dilakukan oleh calon ayah dan calon ibu ini dimulai dari calon ayah yang memabawa payung untuk memayungi calon ibu yang sedang membawa wadah untuk menampung hasil jualan. Uang yang digunakan yaitu uang koin yang terbuat dari tanah liat atau biasa disebut *kreweng*. Setelah itu, calon ayah akan menerima uang dari pembeli untuk dimasukkan dalam wadah tersebut dan sang calon ibu melayani para pembeli.

Jika diamati dengan saksama, cendol dan rujak yang sepertinya sepele ternyata menyimpan pengharapan mendalam berkaitan dengan makna anak sebagai generasi penerus di masa depan. Sayangnya, kita sebagai masyarakat yang lahir di era digital menganggap bahwa semua prosesi tradisional adalah hal kuno yang tidak perlu dilestarikan, dan lebih memilih mengikuti tren modern ala masyarakat kapitalis yang penuh dengan pesta pora. Padahal, jika kita gali nilai-nilainya, adat Indonesia untuk menyambut kelahiran anak menyimpan pengharapan besar orangtua yang sangat selaras dengan ajaran Islam, yakni menjadi khalifah di muka bumi.

Bagaimana tidak, dari awal sebelum lahir, sang anak sudah dikenalkan dengan berbagai diversitas/keragaman, yang tentu hal ini menyiapkan mereka agar tidak bersikap eksklusif. Tak hanya itu, keinginan agar sang anak memiliki rezeki yang melimpah juga berkelindan dengan harapan bahwa modal yang ia miliki dapat dikontribusikan kepada masyarakat luas (disimbolkan dengan 'menjajakan' cendol dan rujak). Oleh karenanya, tak perlu kiranya memandang sebelah mata upacara adat tradisional sebab bila kita mau belajar, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya justru sangat positif dan merupakan bentuk dukungan bagi para orangtua, terutama ibu dalam menjalankan amanah dari Tuhan Yang Mahakuasa.[]

KHILMA ANIS, SOSOK IBU NYAI YANG MENCINTAI WAYANG DAN KERIS

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

Jagat sosial media dihebohkan dengan pandangan Ustaz Khalid Basalamah tentang wayang. Pada video berdurasi 2 menit 23 detik yang diunggah di akun YouTube Afdal Mishary dengan judul "Hukum Wayang", Ustaz Basalamah mengatakan bahwa wayang dihukumi haram.

"Kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya, jangan kita balik. Jangan budaya dan tradisi di-Islam-kan. Susah," dikutip dari isi ceramahnya.

Pandangan Ustaz Basalamah sebagai tokoh agama ini sangat berbanding terbalik dengan Ning Khilma Anis, sosok Ibu Nyai penulis novel best-seller Hati Suhita. Dalam sebuah talkshow yang saya ikuti, beliau justru mencintai wayang sebagai warisan budaya nusantara.

Bentuk kecintaan beliau terhadap wayang juga diekspresikan dengan menciptakan berbagai produk yang bertema-

kan wayang, seperti tas, baju dan kerudung. Tak hanya wayang, Ning Khilma Anis juga menulis sebuah novel berjudul *Wigati* yang menggambarkan keris dan budaya leluhur Indonesia.

"Wayang dan keris itu budaya leluhur Bangsa Indonesia. Yang paham betul tentang wayang dan keris kebanyakan orang sepuh. Saya sebagai orang muda merasa perlu untuk mempelajarinya. Karena kalau tidak ada yang meneruskan dan menjaganya, dua warisan budaya itu akan punah," ucap Ning Khilma Anis saat *talkshow* yang diadakan SMA Nuris, Jember.

Tak hanya itu, *caption* di akun Instagramnya @khilma_anis juga tertulis sebuah nasihat dalam bahasa Jawa dari Semar, tokoh utama dalam punakawan (ksatria) di pewayangan Jawa.

> *"Wayang iki biyen dinggo nyebarke agomo karo kanjeng Sunan Kalijogo. Wayang ket biyen ki dadi tontonan, tuntunan, tatanan, lan tantangan. Wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan leh ndelok, mesti bakal entuk ngelmu seng apik. Entuk ngelmu seng becik.*"

(Wayang ini dari dulu digunakan untuk menyebarkan agama oleh Sunan Kalijaga. Wayang juga dari dulu menjadi tontonan, tuntunan, tatanan, dan tantangan. Orang yang melihat wayang dengan sungguh-sungguh, pasti akan dapat ilmu yang baik. Mendapatkan ilmu yang bagus sekali.)

Di akhir nasihat Semar dalam *caption* Ning Khilma Anis, dituliskan bahwa "*ojo nyepelekke wayang. Lakon lakon wayang ki iso nggo sangu sakjroning urip.*" Artinya, jangan menyepelekan wayang karena tokoh-tokoh wayang ini bisa jadi panutan untuk hidup.

Ning Khilma Anis justru melihat wayang sebagai kearifan tradisi Bangsa Indonesia yang agung. Dari pertunjukan wayang, justru banyak sekali nilai-nilai dan pelajaran yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang semakin baik.

Dengan mencintai wayang dan melestarikannya, sama halnya dengan melestarikan budaya Indonesia. Menghukumi wayang de-

ngan dalih haram karena bukan tradisi Islam adalah pemikiran yang salah. Justru wayang berperan besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam, seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga.

Dalam memandang suatu objek, dalam hal ini adalah wayang, harus fokus pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti nasihat Semar dalam *caption* Ning Khilma Anis, banyak ilmu yang didapat dari pertunjukan wayang.

Walaupun wayang adalah budaya Jawa, tetapi nilai-nilai yang disampaikan dalam pertunjukannya bisa berupa nilai-nilai kemanusiaan, ketauhidan, dan ajaran agama. Maka, pada dasarnya tidak ada yang salah dari budaya wayang.

Hal ini sejalan dengan salah satu gagasan besar Gus Dur yang luar biasa, yakni pribumisasi Islam, bukan arabisasi Islam. Artinya, konteks ajaran agama Islam menyesuaikan dengan nilai-nilai, budaya dan tradisi yang ada dan berlaku pada suatu masyarakat tertentu, alih-alih menggeneralisasi ajaran Islam dengan budaya Arab.

Perbedaan yang dimiliki oleh setiap kultur masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Maka Islam hadir dengan esensi dari kehidupan, bukan perihal eksistensinya. Selagi nilai-nilai yang disampaikan oleh wayang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka wayang tidak bisa dihukumi haram.

Dari gagasan Gus Dur, pendekatan yang dilakukan Sunan Kalijaga, serta sosok Ning Khilma Anis yang mencintai wayang dan juga keris ini mengajak kita semua untuk lebih mengenal jati diri sebagai Bangsa Indonesia dengan warisan budaya yang sangat istimewa dan membanggakan, yakni wayang.[]

RITUAL KENDI NUSANTARA: Simbol Persatuan Menuju Indonesia Damai

Oleh: **WAFIROH**

Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur selalu menuai kontroversi. Mulai dari ide dan rencana, polemik pengesahan RUU IKN hingga yang baru-baru ini terjadi, adalah kontroversi terhadap ritual Kendi Nusantara. Ritual tersebut dilaksanakan pada Senin, 14 Maret 2022 di titik nol yang bertempat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Prosesi yang disebut-sebut sebagai ritual Kendi Nusantara tersebut diawali dengan imbauan Presiden RI Joko Widodo kepada gubernur 34 provinsi untuk membawa 2kg tanah dan 1 liter air dari daerah masing-masing. Selanjutnya, tanah tersebut dikumpulkan dalam satu kendi besar. Disampaikan oleh beliau ketika sedang memberikan sambutan di otoritas IKN, ritual ini dilakukan sebagai bentuk

dari kebinekaan serta membangun persatuan yang kuat dalam rangka membangun IKN baru.

Selain itu, tujuan memilih untuk menggunakan tanah dan air sebagai media ritual, adalah karena keduanya merupakan komponen yang membentuk bangsa kita: Indonesia. Selain itu, tanah dan air juga menjadi idiom dari tanah air, bangsa dan tanah tumpah darah kita yang merupakan kesatuan dari tanah dan air dari seluruh wilayah di Nusantara. Sementara pilihan untuk menggunakan kendi, disampaikan oleh Presiden RI karena kendi merupakan bagian dari budaya Indonesia. Kendi sering digunakan oleh warga Nusantara untuk berbagai kepentingan. Mulai dari wadah air hingga media sejumlah prosesi sakral yang notabene menjadi bagian budaya banyak suku di Indonesia.

Namun sayangnya, keputusan Presiden untuk melakukan hal ini menuai kontroversi. Mulai dari cibiran di media sosial yang hanya bermodal celaan, atau dengan berbagai tulisan yang mengemukakan sejumlah argumentasi. Bahkan, tagar #RitualSyirik sempat viral beberapa saat yang lalu di platform Twitter. Hal ini tentunya membuat banyak orang mulai meragukan niat baik Presiden dan ikut-ikutan menyalahkan. Padahal sudah disampaikan oleh beliau bahwa tujuan ritual yang dilakukan adalah dalam rangka melindungi, membersihkan serta permohonan agar dijauhkan dari marabahaya serta selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Yang Maha Esa.

Hemat penulis, perdebatan ini cenderung meresahkan dan rentan merusak kebhinnekaan. *Pertama*, menyalahkan pemimpin adalah kecenderungan sikap anarkisme. Karena lumrahnya, pemimpin tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan rakyatnya. *Kedua*, tagar dan tulisan di media sosial dengan ungkapan kasar dan anarkis dapat menjadi bibit intoleransi yang rentan memecah belah masyarakat. *Ketiga*, dalih agama serta penggunaan istilah-istilah keagamaan, seperti musyrik, bidah dan lain-lain dapat merugikan tubuh Islam sendiri. Terlebih doktrin agama tersebut digunakan oleh pihak tertentu saja namun mengatasnamakan Islam ataupun

ajaran Nabi Saw. Hal ini tentunya dapat merusak citra Islam dan orang Muslim secara keseluruhan.

Oleh karena itu, mari kita bertanya: pernahkah Rasulullah Saw. melakukan ritual yang bersifat profan untuk merujuk kepada sesuatu yang sakral, seperti doa, harapan dan meminta kepada Tuhan? Karena jika jawabannya adalah tidak, belum tentu juga lantas tiba-tiba masuk kategori bidah yang tercela seperti yang dituding-kan. Namun jika jawabannya adalah pernah, atau bahkan sering, bukankah tudingan tersebut lantas hanya menjadi komentar kosong belaka? Berikut penulis sajikan tiga kisah, di mana Nabi Saw. melakukan hal-hal yang secara zahir profan namun bernilai sakral atau meminjam istilah Kaswad Sartono, Ka. PCNU Kota Makassar, adalah materialisasi doa.

1. MENDOAKAN ORANG LAIN DENGAN PELEPAH KURMA

Poin ini sebenarnya penulis baca dari tulisan ketua PCNU Kota Makassar. Dikisahkan oleh riwayat hadis Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Rasulullah Saw. berjalan di salah satu kebun di Kota Madinah atau Makkah. Lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang tengah disiksa di dalam kubur. Beliau bersabda: “dua orang ini tidaklah disiksa karena dosa besar. Salah satu dari mereka kencing tidak sampai bersih dan yang lain suka fitnah dan adu domba”.

Setelah itu, beliau mengambil sebatang pelepah kurma dan membaginya menjadi dua bagian dan meletakkan masing-masing di atas tiap kubur. Ibnu Abbas pun bertanya: “wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini?” Nabi Saw. pun menjawab: “semoga pelepah kurma itu bisa meringankan siksa keduanya selama belum kering”. (Sahih Bukhari, Juz 1: 53. Hadis nomor 216).

Dari kisah ini Nabi Saw. menjadikan pelepah kurma sebagai media yang mewakili doa beliau untuk mayat dalam kubur. Perilaku ini tidak sedang menunjukkan bahwa Nabi Saw. percaya dan menyandarkan doa dan keyakinannya terhadap pelepah kurma. Namun justru menjadikan pelepah kurma secara material mewakili doa beliau. Nabi tidak sedang menyekutukan kemahakuasaan Allah

Swt. dalam meringankan dosa dengan pelepah kurma yang sedikit pun tidak memiliki kemampuan untuk meringankan dosa.

2. MENGUSAP TUBUH DENGAN TANGAN SEBELUM TIDUR

Contoh kedua adalah hadis riwayat Sayyidah Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw. setiap kali hendak istirahat pada malam hari, beliau merapatkan kedua telapak tangan lalu meniupnya dan membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu, beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuh sejauh yang bisa dijangkau dengan diawali kepala, wajah dan anggota tubuhnya yang lain. Beliau mengulang hal ini sebanyak tiga kali. (Sahih Bukhari, Juz 6: 190. Hadis nomor 5017).

Kita tahu secara logis maupun menurut medis tidak ada manfaat yang signifikan dari perbuatan mengusapkan telapak tangan ke anggota tubuh. Namun Nabi Saw. melakukan hal tersebut dan melalui perantara Sayyidah Aisyah. Perilaku tersebut dapat ditiru oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tak lain hal tersebut sebagai simbol doa dan permohonan perlindungan yang dipanjatkan Nabi Saw. setelah sebelumnya membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain.

3. MENDOAKAN ORANG SAKIT DENGAN AIR MINUM

Dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Saw. menjenguk Tsabit bin Qais yang sedang sakit. Ketika itu, Nabi Saw. berdoa:

اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ

yang artinya: “*hilangkanlah penyakit Wahai Tuhan manusia dari Tsabit bin Qais bin Syammas*” *lalu beliau mengambil debu dari Lembah Bathaan dan diletakkan dalam wadah, diisi air lalu ditiup oleh beliau. Setelah itu, beliau memercikkan air tersebut kepada Tsabit.* (Sunan Abi Daud, Juz 4: 10. Hadis nomor 3885).

Tiga contoh di atas menunjukkan bahwa Nabi Saw. tidak alpa dari perbuatan-perbuatan yang meski profan, sama sekali tidak ada hubungannya secara langsung dengan agama, tetapi dijadikan sebagai perantara atau media bagi sesuatu yang sakral. Dalam hal ini adalah doa. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan ritual Kendi Nusantara, tidak bijak kiranya jika menyematkan label musyrik atau bidah terhadap perbuatan tersebut. Terlebih, Presiden sudah secara eksplisit menyatakan bahwa ritual tersebut dilakukan murni untuk mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Allahu A'lam.[]

MUNGGAHAN DAN MEGENGAN: Islam Hadir dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal

Oleh: **ASPIYAH KASDINI**

Menghitung bulan Ramadan yang akan tiba dalam beberapa hari lagi, masyarakat Muslim Indonesia sedang bersukacita menyambut kedatangannya. Banyak tradisi unik yang ditunggu dan dipersiapkan setiap bulan Sya'ban akan berakhir, seperti Mak Meugang dalam tradisi Aceh, Munggahan dalam tradisi Sunda, atau Megengan dalam tradisi Jawa.

Pada tradisi masyarakat Sunda (khususnya tradisi keluarga suami saya), Munggahan dilaksanakan dengan kerabat serta sanak-saudara. Umumnya, para keturunan yang masih hidup pergi ke makam-makam orangtua dan leluhur yang telah tiada. Mereka membersihkan makam bersama-sama. Tradisi membersihkan makam ini dikenal juga dengan istilah *ngoret*. Biasanya mereka membawa nasi liwet yang dihidangkan di atas daun pisang dan kemudian disantap bersama setelah kegiatan *ngoret* selesai. Tentunya, saat makan bersama (*botram*) ini, tidak lupa mereka melaksanakan doa

bersama untuk kebahagiaan arwah para leluhur yang telah tiada, dan juga untuk mereka yang masih hidup di muka bumi, *ngaruwah-keun*.

Pada era modern saat ini, terdapat perubahan budaya. Munggahan tidak sekadar tradisi saja, melainkan agenda kegiatan yang dilakukan pada segala instansi ketika Ramadan akan segera tiba. Dengan tidak menghilangkan substansi-substansi yang ada, Munggahan tetap dilaksanakan dengan cara yang lebih kekinian, seperti dilakukan di tempat-tempat wisata, tempat bekerja, lembaga pendidikan, dan lainnya. Yang menjadi poin pentingnya, perubahan yang ada lagi-lagi tidak meniadakan doa bersama, makan bersama, dan berkumpul bersama-sama orang yang dikasihi.

Tradisi yang demikian tentunya merupakan manifestasi dari istilah itu sendiri, yakni Munggahan yang memiliki arti naik. Maksudnya ialah hamba manusia memanjatkan dan melangitkan rasa syukurnya kepada Yang Kuasa karena dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia, sehingga mereka saling berbagi rezeki, dan juga berkumpul antar sesamanya.

Serupa namun tak sama. Dalam tradisi masyarakat Jawa, tradisi menyambut bulan suci Ramadan dikenal dengan istilah Megengan. Megengan sendiri memiliki makna menahan. Hal ini sebagai tanda dan peringatan, bahwa bulan Ramadan yang identik dengan menahan nafsu akan segera datang, sehingga manusia harus segera mempersiapkannya dengan sukacita.

Selain membersihkan makam leluhur, masyarakat Jawa juga melakukan Selametan yang diadakan secara individu (tiap rumah) maupun secara kolektif (Masjid, Musola, dan RT). Seperti halnya Liwet, dalam masyarakat Jawa juga terdapat suguhan yang menjadi ciri khas dalam tradisi Megengan, yakni Ambengan dan Apem. Saya masih ingat dengan jelas, Bude-bude dan Mbah selalu antusias saat telah memasuki bulan Ruwah. Bahkan Mbah membuat Ingkung khusus beserta komponen yang lain dan diletakkan dengan apik dalam *lengser* yang besar. Suguhan ini Mbah simpan di kamar pribadinya. Kata Mbah, "*Ngko Mbah Nang-mu teko.*" Walaupun ruh

Mbah Nang datang, ia tidak akan akan memakan sajen/makanan yang disajikan ini, melainkan yang masih hiduplah yang akan menikmatinya.

Mbah juga *ater-ater* kepada anak-menantunya yang telah berkeluarga, dan anak-menantunya juga mengirimkan hal serupa kepada Mbah. Kadang saya berpikir, kalau isinya sama, kenapa harus diputar-putar dan *riwa-riwi* sih? Namun sebagai anak-anak tentu suka-suka saja, karena ketika kita diminta untuk *ater-ater*, di saat itulah pundi-pundi rupiah juga bertambah. Yang menarik lagi, Mbah juga selalu membuat Apem. Apem yang sudah jadi ini biasanya Bude (kakak Ayah) lempar ke atap rumah gedek Mbah sambil komat-kamit. Tentunya dalam hati, "Wah, mubazir banget makanan dibuang-buang, walaupun cuma satu, tidak seperti Ingkung yang masih bisa dimakan, Apem yang dilempar dan jatuh kena pasir Kelud ini pasti kotor." Kata Bude, "*Ra popo, iki mang digawe awak dewe njaluk ngaporo (Afwu) nang Pengeran*."

Ketika semua makanan sudah siap, yang memiliki hajat mengundang sanak-saudara dan tetangga untuk mengirimkan doa kepada ruh para leluhur dan dilanjutkan dengan makan *ambengan* bersama. Sungguh nikmat, bahkan rasa masakan khas Megengan buatan Mbah masih bisa dibayangkan hingga saat ini.

Saat itu, saya melihat hal-hal ini sebagai sesuatu yang unik, banyak hal baru yang saya temui dalam tradisi ini dan juga pada diri Mbah dan Bude-bude dalam mempersiapkannya. Sekarang saat memikirkannya, saya bisa mengatakan, bahwasanya Islam hadir di masyarakat kita dengan tetap menghargai dan menghormati budaya lokal. Islam yang berkembang di masyarakat kita telah sesuai dengan visi-misinya, yakni sebagai rahmah (kasih sayang) kepada seluruh alam. Bagaimana tidak, mari kita intip sedikit:

Secara psikologi, tradisi Munggahan dan Megengan ini memberikan rasa 'bahagia' kepada mereka yang melakukannya. Bahagia yang tercipta karena mereka dapat berkumpul dengan mereka yang dikasihi dan masih hidup. Bahagia pula karena mereka memiliki momen untuk mengingat orang terkasih yang telah tiada.

Seperti contoh Mbah saya, dengan senang hati ia menyiapkan sajen yang dibuat untuk suaminya, walaupun dia tahu hal tersebut tidak mungkin dimakan oleh suaminya yang telah tiada, namun persiapan memasakkan makanan terbaik untuk suaminya 'kembali' membawanya kepada peristiwa-peristiwa indah di masa lampau. Momen ini memberikan semangat dan kebahagiaan yang hanya dapat ia sendiri ciptakan.

Berkumpulnya sanak-saudara yang masih hidup pun tentunya membawa kebahagiaan. Berkumpul bukanlah suatu hal yang mudah, butuh pengorbanan untuk mewujudkannya di balik kesibukan keseharian masing-masing individu. Dengan berkumpul, tiap individu akan berbagi sukacita, dan melakukan hal-hal yang dinantikan saat berkumpul bersama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Seligman dalam *Authentic Happines*, bahwasanya dalam mencapai kebahagiaan, manusia memiliki cara yang berbeda antara satu dan lainnya, oleh karena itu cara untuk mencapainya juga berbeda-beda. Termasuk dalam tradisi ini, bagi leluhur kita, mengingat mereka yang telah tiada dan berkumpul bersama orang terkasih merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahagianya mereka dapat kita lihat dari antusiasnya yang tinggi dalam penyelenggaraan Munggahan dan Megengan, semangat berbagi, semangat berkumpul, dan semangat saling membahagiakan dengan bersama-sama memanjatkan doa-doa kebaikan.

Secara teologi, tradisi ini merupakan tradisi lokal yang dibalut dengan nilai-nilai Islami. Apakah bertentangan? Saya rasa tidak: semua berkumpul untuk saling mendoakan, kepada yang telah tiada dan yang masih ada; semua berbagi dengan liwet, ambengan, bahkan Rupiah, sebagai bentuk syukur yang merupakan bagian dari sedekah; semua saling berkumpul dan mengunjungi, yang merupakan bagian dari silaturahim; semuanya memberikan tanda, bahwa manusia adalah hamba yang memiliki kewajiban secara vertikal kepada Tuhannya, dan juga horizontal kepada sesamanya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa Sunan Kalijaga tetap melestari-

kan tradisi yang tidak memiliki pertentangan dengan *Syara'* tersebut (Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya).

Secara sosial, tradisi ini memberikan ruang agar sesama manusia memiliki kesadaran bahwa sebagai makhluk sosial, masing-masing individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk saling membahagiakan: dengan membantu yang memiliki hajat Munggahan atau Megengan untuk mempersiapkan sajen yang berupa liwet dan ambengan; meluangkan waktu untuk berkumpul demi kebutuhan bersama; mengikhlaskan hati dan diri untuk mendoakan, yang bukan hanya dituju untuk diri sendiri, melainkan juga orang lain; dan lain-lain.

Dari sini dapat kita lihat, banyak hal-hal positif yang kita dapatkan dari tradisi peninggalan leluhur yang tetap kita lestarikan bersama ini. Tradisi yang berisikan nilai-nilai Islami yang telah dibangun para leluhur bahkan sebelum Islam datang. Tradisi yang menjadi bagian dari kebahagiaan kita. Tradisi yang mengikat kita untuk memiliki identitas sebagai Muslim Indonesia yang beragam. Sebagaimana pernyataan Presiden ke-4 NKRI, KH. Abdurrahman Wahid, "Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk 'aku' jadi 'ana,' bukan 'sampean' jadi 'antum,' bukan 'sedulur' jadi 'akhi.' Pertahankan apa yang menjadi milik kita, kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya."[]

MENGHIDUPKAN TOLERANSI

BUDAYA *SRAWUNG* DALAM TRADISI BUKA BERSAMA

Oleh: HASNA AZMI FADHILAH

Ramadan bagi umat Islam di Indonesia identik dengan melakukan lebih banyak ibadah dan kumpul bersama. Di kampung-kampung maupun di daerah perkotaan, masyarakat dengan semarak bergembira menggelar berbagai kegiatan, dari pasar Ramadan, beduk sahur keliling hingga buka puasa. Untuk kegiatan terakhir, yakni buka bersama, penyelenggaraannya selalu dinanti. Entah itu dibingkai dengan keperluan keluarga, acara kantor, ataupun reuni sekolah. Semua dipersiapkan dengan antusias, tak kalah gempitanya dengan ibadah puasa itu sendiri.

Tradisi buka bersama sejatinya adalah akulturasi budaya lokal dengan perpaduan nilai-nilai Islami. Menurut Devie Rahmawati, pengamat sosial vokasi Universitas Indonesia, karakteristik masyarakat Indonesia yang sejak dulu sudah bersifat komunal, kemudian mendorong akulturasi budaya Islam dengan tradisi asli daerah yang telah terbiasa melakukan kegiatan secara berkelompok. Tak heran,

hingga sekarang kegiatan buka bersama terus mendarah daging di masyarakat kita. Meski belum ada data pasti kapan kegiatan buka bersama pertama dalam sejarah Islam Nusantara, namun hal ini diasumsikan bahwa kegiatan berkumpul untuk buka puasa bersama telah dilakukan ketika Islam mulai banyak dipeluk oleh warga. Ketika sebelumnya mereka hanya kumpul dan makan-makan saja, setelah memeluk Islam, kegiatan tersebut tetap berlanjut di bulan Ramadan dengan landasan yang berbeda.

Dalam Islam, buka bersama atau *ifthar jamai* nyatanya berkorelasi erat dengan semangat kebersamaan. Terlebih, prinsip jemaah atau berkelompok sangat dianjurkan dalam beberapa ibadah ritual, seperti salat yang perolehan pahalanya jauh lebih besar ketika dikerjakan bersama daripada sendiri. Perbandingannya bahkan cukup jauh, dua puluh tujuh banding satu.

Kembali ke makna buka puasa bersama, selain mengingatkan kita akan nilai-nilai integritas, menurut Gus Baha, ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari Rembang, tradisi tersebut juga menganjurkan kita untuk terus bersyukur dan banyak berbagi dengan sesama. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih rincinya, syukur itu menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak, memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit. Dari sana, kita sebagai makhluk akan terus membiasakan untuk bersikap rendah hati dan terus ingat bahwa sejatinya rezeki serta nikmat kita sangat bergantung pada Yang Mahakuasa.

BUKA BERSAMA DAN MELESTARIKAN BUDAYA SRAWUNG

Pada konteks budaya lokal Jawa, buka bersama juga berkelindan dengan tradisi srawung. Dikutip dari hasil riset Setiawan dan Sibarani (2020), *srawung* yang mengandung arti kumpul atau pertemuan besar, biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Pada masyarakat pedesaan, istilah ‘srawung’ sudah menjadi aktivitas keseharian. Sebab, inilah cara mereka untuk saling bercerita tentang realitas kehidupan. Srawung juga diartikan sebagai kontak sosial, dimana satu sama lain bertemu, saling sapa dan ngobrol bareng dengan waktu yang tidak sebentar dalam suasana keakraban di

dalamnya. Tak heran, saat Islam datang, srawung tak lantas ditinggalkan begitu saja. Justru kebiasaan lokal setempat berpadu manis dan lestari sampai saat ini.

Di luar Ramadan sendiri, srawung memiliki banyak tujuan positif, tak hanya menjadi sarana untuk saling belajar dan mencari inspirasi dari orang lain, tetapi juga momen tepat untuk membahas isu-isu aktual di Indonesia, dari membahas program-program kegiatan daerah hingga topik tentang lingkungan hidup maupun aksi sosial kemanusiaan. Dari prinsip-prinsip tadi, sangat terlihat jelas bahwa akulturasi srawung dan buka bersama ternyata saling terkait. Bahkan realitanya, konten buka bersama jauh melebihi batas srawung. Dilihat dari fakta di lapangan, implementasi srawung saat buka bersama nyatanya tak eksklusif pada internal umat Muslim semata.

Di Sukoharjo, kegiatan buka bersama diadakan oleh komunitas lintas agama. Tak hanya makan bersama, mereka jugaa berbagi takjil kepada para pengguna jalan. Agus Widanarko, salah satu penggagas gerakan, mengatakan bahwa kegiatan yang melibatkan sejumlah pemuda lintas agama ini merupakan upaya menumbuhkembangkan rasa persatuan kesatuan dan kebersamaan antar-umat beragama. Selain itu, kegiatan ini juga mengampanyekan pentingnya toleransi antar-umat beragama. Ia menambahkan juga, "komitmen menjaga persatuan dan persaudaraan antar-anak bangsa perlu digelorakan secara terus-menerus. Tanpa menghilangkan perbedaan, jiwa toleran setiap pemuda perlu dipupuk sejak dini."

Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh koleganya, Nandi Dwi, perwakilan pemuda dari Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Sukoharjo, berpendapat bahwa bulan puasa adalah momen yang tepat untuk menunjukkan semangat toleransi dan tenggang rasa. Lewat acara bagi-bagi takjil kepada umat Islam yang berpuasa, Nandi dan pemuda lintas agama lainnya berharap bisa berbagi kasih dan memupuk jiwa saling menghargai antarumat beragama. Dari apa yang dicontohkan oleh Agus dan komunitasnya, terlihat jelas bahwa nilai-nilai dalam srawung saat buka bersama melintas batas, tak hanya awet dari guncangan globalisasi, tetapi juga membawa banyak manfaat yang perlu terus dirawat hingga anak cucu kita nanti.[]

HATE SPIN, ANCAMAN BAGI DEMOKRASI

Oleh: **SULMA SAMKHATY MAGHFIROH**

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh Economist Intellegence Unit (EIU), ada dua hal yang masih stagnan dalam demokrasi Indonesia, yakni proses elektoral dan pluralisme, serta budaya politik di Indonesia. EIU sendiri adalah sebuah perusahaan media bagian dari Economist Group atau The Economist Newspaper Limited yang berkantor di Inggris yang mengeluarkan indeks demokrasi untuk 167 negara, termasuk Indonesia. Stagnansi indeks demokrasi Indonesia pada proses elektoral, pluralisme, hingga budaya politik tentu saja berhasil membuat kita bertanya-tanya. Karena Indonesia adalah negara yang sangat plural, baik dalam keragaman suku, budaya, golongan, ras, hingga bahasa.

Lantas mengapa sebuah negara yang sangat plural dengan kearifan lokal yang beragam menjadi minim dalam pluralisme, hingga menimbulkan stagnansi nilai pada salah satu kategori indeks demokrasi? Aku merasa bahwa Internet dan media sosial menjadi salah satu yang memegang

peranan penting dalam hal ini. Arus informasi bak air bah yang tidak terbendung. Kabar benar dan salah seakan bias. Tidak heran jika ujaran kebencian (*hate speech*) dan semburan kebohongan (*firehose of falsehood*) makin terasa subur saat tahapan pesta demokrasi akan dimulai. Keduanya secara nyata telah menjadi duri dalam demokrasi yang ada.

Namun ternyata selain *hate speech* dan *firehose of falsehood*, muncul juga istilah *hate spin* atau pemelintiran kebencian. Istilah ini dikemukakan oleh Cherian George, seorang pengajar di Hongkong Baptist University melalui bukunya "*Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*". *Hate Spin* atau pemelintiran kebencian sendiri menurutnya adalah gabungan dari konsep *hate speech* (ujaran kebencian) dengan kemarahan karena ketersinggungan (*offence-taking*), dimana hal ini banyak digunakan oleh para "enterpreneur" politik untuk memobilisasi pendukung dan menyerang kelompok sasaran tertentu.

Dalam sebuah diskusi publik pada 2 Mei 2017 di gedung Tempo, Cherian George menyampaikan bahwa studinya mengamati bagaimana kebencian dan kekhawatiran digunakan sebagai senjata politik. Selain itu, George juga menyoroti naiknya intoleransi agama yang makin mengancam kelompok rentan. Parahnya, intoleransi yang kemudian dimanfaatkan dalam beberapa pemilu, masih meninggalkan residu polusi seperti polarisasi masyarakat, yang sangat mungkin menjadi masalah jangka panjang jika tidak ditangani sedari kini. George juga mengungkapkan bahwa intoleransi bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil rekayasa para enterpreneur politik. Sontak, hal ini mengembalikan ingatan kita pada pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, yang hingga kini masih terasa dampaknya.

Ihsan Ali Fauzi, Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina pernah mengatakan bahwa *hate spin* sangat berbahaya bagi dunia demokrasi. Hal ini dikarenakan *hate spin* memunculkan sentimen kebencian dan menjadikan seseorang tidak menghargai orang lain dengan alasan identitas tertentu. Ihsan juga memperki-

rakan bahwa *hate spin* akan mungkin terjadi dalam perhelatan pemilu mendatang. Menurutnya, reduplikasi cara pemenangan Pilkada DKI Jakarta 2017 hanya akan melihat keberhasilan dari langkah tidak etis yang sudah pernah terjadi. Senada dengan itu, Syamsu Rizal Panggabean, Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM menuturkan bahwa Indonesia sudah kehilangan demokrasi jika melihat cara pemenangan Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut dia, pemilihan pemimpin yang seharusnya berdasarkan kualitas, justru berbalik berdasarkan faktor *hate spin*.

Mengingat tahun politik dalam menyambut pesta demokrasi negeri telah tiba, tidak menutup kemungkinan jika *hate spin* akan kembali terjadi, maka penting bagi kita semua untuk mengenali ciri-ciri *hate spin*. Dengan begitu, upaya pencegahan dan penindakan atas kemunculan *hate spin* dapat masif dilakukan. Adapun ciri-ciri *hate spin* antara lain: (1) Biasanya digunakan untuk menyerang lawan politik; (2) Melibatkan banyak massa; (3) Pengobar kebencian menyerang melalui hasutan dengan alasan mereka menjadi korban (*playing victim*); (4) Menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Dalam *Meredam Kebencian* yang diterbitkan oleh Wahid Foundation, disebutkan ada tiga rekomendasi dalam mengatasi tren siar kebencian, yakni: *Pertama*, merevisi UU ITE dan Surat Edaran SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. *Kedua*, meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dan kejaksaan terkait pemidanaan kasus-kasus siar kebencian dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan forum bertukar pengetahuan dengan para ahli atau organisasi masyarakat sipil. *Ketiga*, memaksimalkan upaya-upaya pencegahan siar kebencian melalui pendekatan sosial berupa dan tidak terbatas pada pemantauan, diskusi, dialog terbuka, memobilisasi masyarakat sipil termasuk ormas keagamaan, mendorong perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha untuk aktif mengonter narasi melalui media sosial dan menggerakkan literasi informasi. Bukankah kita berhak optimis jika ketiga rekomendasi ini telah dilakukan, maka ancaman *hate speech, firehose of falsehood*, dan *hate spin* bagi demokrasi negeri dapat dihindari?[]

PUTRI PRAMODHAWARDHANI: TOKOH TOLERANSI DI MASA MATARAM KUNO

Oleh: **MOH. RIVALDI ABDUL**

Dalam satu video singkat di akun Tiktok @Buddhazine, Bhante Panyavaro menjelaskan, "...Raja-raja Syailendra dan rakyatnya gotong royong dengan penuh rasa *bhakti*, dengan iman yang kuat, mendirikan Borobudur yang selesai dua generasi. Sang ayah tidak melihat waktu Borobudur diresmikan. Yang meresmikan adalah putrinya, Pramodhawardhani...," demikian penggalan penjelasan Bhante Panyavaro dalam video tersebut.

Saya tidak akan membahas berita viral harga tiket Borobudur yang naik, namun saya tertarik pada penjelasan Bhante Panyavaro bahwa yang meresmikan Borobudur adalah Pramodhawardhani. Tentu perempuan ini bukan sosok yang biasa saja, namun adalah sosok yang pantas dikenang dalam panggung sejarah Nusantara.

Sebagaimana dijelaskan oleh Drs. R. Soekomono dalam *Pelita Borobudur*, Seri A, No. 1 (1972), bahwa "*Tjandi Borobu-*

dur didirikan sekitar tahun 800 tarich Masehi. Tidak diketahui berapa lama tjandi itu berfungsi sebagai bangunan sutji agama Bud[dh]a....” Dan, sebagaimana dijelaskan oleh Bhante Panyavaro bahwa yang meresmikan Borobudur adalah Pramodhawardhani.

Tim Balai Konservasi Borobudur dalam https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/, menjelaskan, pada 842 M, Pramodhawardhani mengeluarkan prasasti, yang sekarang disebut Prasasti Tri Tepusan/Sri Kahulunan, untuk menganugerahkan tanah di Desa Tri Tepusan. Hal ini dilakukan untuk pemeliharaan sebuah bangunan suci bernama Kamulan I Bhumisambhara, atau tempat asal muasal Bhumishambara. J.G. de Casparis, seorang epigraf dari Belanda, mengartikan nama bangunan tersebut sebagai nama asli Borobudur.

PEREMPUAN PENGUASA MATARAM KUNO

Pramodhawardhani merupakan putri dari Raja Medang atau Mataram Kuno, yaitu Rakai Warak Dyah Manara atau dikenal sebagai Raja Samaratungga. Pramodhawardani diketahui berasal dari Wangsa Syailendra yang beragama Buddha. Dia naik takhta menggantikan ayahnya, Raja Samaratungga, pada 833 M. Pramodhawardhani juga dikenal sebagai Sri Kahulunan.

Iswara N. Raditya dalam “Ratu Pramodhawardhani: Kawin Beda Agama, Menganjurkan Toleransi” (dimuat di Tirto.id) menjelaskan bahwa, ada pihak yang tidak setuju dengan pengangkatan Pramodhawardhani sebagai penerus singgasana Samaratungga. Pihak tersebut adalah Balaputradewa dan pendukungnya.

Mengenai sosok Balaputradewa, ada yang mengatakan bahwa dia merupakan adik kandung Pramodhawardhani artinya anak dari Raja Samaratungga. Menurut pendapat ini, Balaputradewa merasa lebih berhak menduduki takhta Medang (Mataram Kuno). Hal itu dikarenakan menurut Balaputradewa takhta raja hanya untuk laki-laki, bukan perempuan, sehingga meski dia adalah adik dan Pramodhawardani adalah anak tertua, namun dialah yang lebih berhak menduduki takhta. Pendapat lain mengatakan kalau Balaputradewa merupakan paman Pramodhawardhani atau adik dari Raja Sa-

maratungga. Sehingga, Balaputradewa merasa berhak atas takhta, sebab kakaknya tidak memiliki anak laki-laki.

Pemikiran bahwa raja (penguasa) harus laki-laki juga mewarnai isi kepala sebagian orang pada masa itu. Dalam hal ini, pandangan raja seharusnya laki-laki, bukan perempuan, dijadikan alasan untuk merebut takhta oleh Balaputradewa. Namun, Raja Samaratungga agaknya memiliki pemikiran yang lebih maju, sehingga tetap mewariskan takhta kepada anak tertuanya, Putri Pramodhawardhani, meski sang anak adalah perempuan.

Pramodhawardhani tidak menyerah dari gangguan Balaputradewa. Dia mempertahankan haknya, tahta Medang, dengan melawan Balaputradewa. Dengan dibantu oleh suaminya, Rakai Pikatan yang berasal dari Wangsa Sanjaya, pada 833 M Balaputradewa dapat dikalahkan dan lari ke Sumatra.

Sejak saat itu, Ratu Pramodhawardhani menjadi penguasa Kerajaan Medang. Sebagaimana dijelaskan oleh Iswara N. Raditya, bahwa tidak diketahui pasti kapan Ratu Pramodhawardhani meninggal. Namun, diperkirakan pemerintahannya berakhir pada 856 M. Itu artinya, Ratu Pramodhawardhani menjadi penguasa Medang (Mataram Kuno) selama 23 tahun, sejak 833 hingga 856 M, meski di tahun-tahun terakhir jabatan Pramodhawardhani kendali kekuasaan beralih kepada Rakai Pikatan.

TOKOH TOLERANSI DI MASA MATARAM KUNO

Pada masa Ratu Pramodhawardhani, agama Buddha berkembang dengan baik. Saking majunya peradaban Buddha kala itu telah mampu mengembangkan arsitektur rumah suci khas Nusantara. Hal ini tergambar dalam penjelasan Bhante Panyavaro, “Para Raja Syailendra, nenek moyang kita sendiri, bukan orang asing. Dan langgam Borobudur, ukirannya itu tidak sama dengan di India, di negara lain, *mboten sami*. Itu unik Borobudur....” Jadi, pada masa itu, agama Buddha berkembang dengan baik di Nusantara, sehingga mampu melahirkan Borobudur sebagai rumah suci agama Buddha yang memiliki kekhasan Nusantara.

Pramodhawardhani adalah seorang Wangsa Syailendra yang beragama Buddha, meski begitu agama Hindu juga tumbuh dengan baik di bawah kekuasaannya. Bahkan, diketahui kalau pada tahun 832M, Pramodhawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang berasal dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tim Balai Konservasi Borobudur pada laman @kebudayaan.kemdikbud.go.id, bahwa dalam sejarah Nusantara kuno, pernikahan Ratu Pramodhwardhani dengan Rakai Pikatan, dianggap sebagai salah satu momen pertama pernikahan lintas agama antara ratu dan raja yang berkuasa terhadap sebuah kerajaan. Secara tidak langsung hal ini membuat Borobudur menjadi bukti toleransi beragama pada periode Mataram Kuno.

Pada masa Ratu Pramodhawardhani, banyak candi Buddha dan Hindu yang dibangun. Candi Plaosan—yang berada di Desa Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten—dibangun dengan perpaduan arsitektur Hindu-Buddha. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Birsyada Sahruni dalam "Makna Akulturasi Hindu Buddha pada Arsitektur Candi Plaosan," bahwa setelah membandingkan Candi Plaosan dengan candi Hindu (yaitu Candi Prambanan) dan candi Buddha (yaitu Candi Borobudur), terlihat bahwa Candi Plaosan memiliki arsitektur candi Hindu dan Buddha.

Hal ini paling nampak dari bentuk dan struktur bangunan Candi Plaosan. Yaitu, terdapat bangunan menjulang tinggi yang merupakan ciri candi peninggalan Hindu, dan dasar candi dengan struktur yang lebar menunjukkan ciri candi peninggalan Buddha. Sehingga, Candi Plaosan menunjukkan wujud akulturasi Hindu-Budha pada masa Ratu Pramodhawardhani.

Majunya agama Buddha dan Hindu di masa Ratu Pramodhawardhani menunjukkan bahwa kepemimpinan sang ratu dijalankan dengan memerhatikan nilai toleransi antarpemeluk agama. Meski Pramodhawardhani memeluk agama Buddha, namun sang ratu tidak membatasi perkembangan agama Hindu. Sikap dan peran Ratu Pramodhawardhani ini menjadikannya sebagai sosok tokoh toleransi pada masa Mataram Kuno.[]

BELAJAR TOLERANSI DARI FILM *NGERI-NGERI SEDAP*

Oleh: **HASNA AZMI FADHILAH**

Film terbaru yang disutradarai komedian Bene Dion, "Ngeri-ngeri Sedap" dalam satu minggu terakhir berhasil menyita perhatian para pecinta film tanah air. Merujuk akun media sosial perusahaan produsen sinema tersebut, mereka berhasil mendatangkan satu juta lebih penonton dalam masa tayang 11 hari. Angka yang cukup fantastis bagi film bertema komedi keluarga.

Rekor cemerlang tadi tentu bukan tanpa alasan. Dinamika cerita film "Ngeri-ngeri Sedap" yang berpusat kepada keluarga pasangan Pak Domu (Arswendy Beningswara Nasution) dan Mak Domu (Tika Panggabean) ternyata amat relevan dengan banyak keluarga di Indonesia. Rincinya, film ini mengisahkan Pak Domu dan Marlina alias Mak Domu yang dikaruniai empat anak, yaitu Domu (Boris Bokir), Sarma (Gita Bhebhita), Gabe (Lolox), dan Sahat (Indra Jegel).

Suatu hari, Nenek Domu ingin mengadakan upacara adat dan meminta Pak Domu dan Mak Domu untuk menghadir-

kan cucu-cucunya. Tak ayal, mereka berdua gelisah karena ketiga anak laki-lakinya enggan pulang karena berselisih dengan sang ayah akibat keputusan pribadi mereka yang tak sesuai dengan kehendak Pak Domu. Akibatnya, mereka terus menghindar untuk berkunjung ke kampung halaman. Tak mau mengecewakan sang ibu, Pak Domu dan Mak Domu pun akhirnya menyusun rencana agar seluruh anaknya pulang dari perantauan. Dilandasi kerinduan yang sangat, Mak Domu lalu menyetujui ide suaminya untuk berpura-pura bertengkar agar seluruh anaknya kembali berkumpul di kampung halaman.

Pertengkaran itu bahkan diatur sedemikian rupa agar terdengar ke telinga anak-anaknya. Ketika mengetahui kabar tersebut, keempat anaknya akhirnya pulang dari perantauan. Namun, mereka terkejut saat tiba di Medan karena pertengkaran tersebut ternyata hanya kebohongan belaka. Dari sini, dinamika hubungan orangtua-anak ini pun menjadi kian kompleks dan menyimpan banyak pelajaran berharga, dari makna keluarga hingga nilai-nilai budaya.

Tak hanya menjadi hasil karya apik yang menyajikan kultur Batak yang kaya, film Bene juga berhasil mengungkap plus minus dari gaya pengasuhan otoriter yang dominan diterapkan pada mayoritas keluarga Indonesia. Pengasuhan autokratis mengacu pada gaya pengasuhan yang kaku yang juga dikenal sebagai gaya otoriter. Orang tua autokratis ingin anak-anak mereka berperilaku baik dan sukses, tetapi cara mengasuh mereka yang ketat tidak memungkinkan banyak fleksibilitas. Orangtua yang autoriter juga mengharapkan anak-anak untuk memenuhi tuntutan mereka tanpa penjelasan. Jenis pola asuh ini memang memiliki keuntungan, tetapi anak dari orangtua yang autokratis dapat mengalami efek samping seperti harga diri yang rendah. Dan, di sisi lain bila buah hatinya beranjak dewasa, mereka bisa jadi memberontak, yang lalu justru akan memicu konflik dengan orangtua.

Tipikal pengasuhan ini digambarkan “Ngeri-ngeri Sedap” lewat karakter Pak Domu yang keras kepala. Orangtua autokratis seperti Pak Domu ini biasanya menyediakan lingkungan rumah yang ter-

struktur dengan baik untuk anak-anak mereka. Mereka menetapkan harapan yang tinggi dengan aturan yang jelas dan mengharapkan anak-anak mereka untuk mematuhi aturan tersebut. Orangtua ini sangat menuntut, dan mereka tidak merasa perlu menjelaskan diri mereka kepada anak mereka. Orangtua autokratis mengharapkan anak-anak untuk melakukan apa yang diperintahkan, dan itu final. Aturan mereka tidak bisa diperdebatkan atau dipertanyakan. Pengasuhan otokratis menyisakan sedikit ruang untuk perasaan atau kreativitas. Orangtua autokratis mendisiplinkan dengan kontrol psikologis (Zagata, 2013).

Di satu sisi, seiring dengan pergaulan yang makin luas dan tingkat pendidikan yang tinggi, perspektif Pak Domu dan anak-anaknya bagaikan persimpangan jalan: memiliki alur yang berbeda. Salah satunya berkaitan dengan pemaknaan internalisasi nilai-nilai budaya. Hal inilah yang mungkin menimbulkan 'gegar budaya' pengasuhan orangtua masa kini. Perkembangan zaman dan segala dinamikanya ternyata tak selalu berbanding lurus dengan sudut pandang serta pola berpikir tentang masa depan dan definisi kesuksesan yang diterapkan orangtua di masa lampau. Namun, lewat diskusi panjang dan rekonsiliasi, film "Ngeri-ngeri Sedap" seakan ingin mengungkapkan harapan bahwa nilai-nilai budaya lokal akan tetap relevan seiring dengan pergolakan zaman, meski untuk mencapai itu semua perlu upaya bersama antara orangtua dan anak.

Hal menarik lainnya dalam film ini adalah sorotan sineas pada budaya lokal setempat seperti mie gomak, dan Danau Toba yang ditampilkan secara spektakuler. Kedua hal tadi terus 'menyihir' penonton untuk datang ke Sumatra Utara dan melihat ikon Suku Batak tersebut secara langsung. Tak hanya itu, dari testimoni yang disampaikan para penonton, kita bisa melihat bahwa sejatinya budaya lokal di satu daerah terutama yang berkaitan dengan pentingnya posisi keluarga, ternyata amat relevan dengan kultur lainnya di seantero Nusantara.[]

TOLERANSI DALAM SEPIRING GADO-GADO

Oleh: ASPIYAH KASDINI

Ada sebuah analogi bagus, yang dapat merepresentasikan tentang bagaimana cara agar kita dapat memiliki sikap toleransi yang baik. Mengingat model kehidupan masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, baik kepercayaan, suku, budaya, bahasa, dan agama. Analogi ini disampaikan oleh Dr. Chris Seiple, Senior Research Fellow University of Washington, dalam penutupan pemaparannya pada Webinar Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang diselenggarakan oleh Institut Leimena akhir tahun lalu.

Analogi yang dimaksud adalah sepiring gado-gado. Nilai toleransi yang bagaimana yang terdapat dalam sepiring gado-gado? Makanan yang hampir bisa dijumpai di manapun ini memiliki filosofi yang tinggi, jika sebelumnya kita memakannya hanya menikmati rasanya saja, sudah saatnya mulai merenungkan juga nilai baik yang terdapat di dalamnya. Nilai baik yang dimaksud adalah:

Pertama, kita tetap menjadi diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Umumnya, yang dikhawatirkan seseorang jika bersama dengan yang berbeda adalah takut jika akan terpengaruh, takut untuk murtad, takut menjadi diri yang berbeda, dan ketakutan-ketakutan lainnya yang membuat pergaulannya menjadi begitu eksklusif. Pergaulan yang tertutup ini adalah suatu tanda bahaya, karena orang yang bersangkutan akan sulit memahami dan merasakan perbedaan yang ada, sehingga mudah baginya untuk merasa paling benar dan salah milik liyan.

Dari gado-gado kita belajar, kita akan tetap menjadi kentang, tauge, tahu, lontong, tempe, ataupun telur rebus tanpa terpengaruh oleh kehadiran komponen lainnya. Komponen-komponen yang terdapat dalam gado-gado memiliki cita rasa masing-masing yang membuat makanan ini menjadi istimewa. Manusia juga sama; dengan bersama mereka yang tidak seagama, tidak serta-merta menjadikan kita murtad; dengan bersama mereka yang tidak sebudaya, tidak serta-merta menjadikan kita menjadi diri mereka. Ya, kita akan tetap menjadi diri kita sendiri.

Kuncinya, menurut Dr. Chris, kita harus memiliki kompetensi pribadi, yakni kemampuan untuk dapat memahami diri sendiri, berikut moral-moral yang kita yakini. Dengan demikian, kita dapat menentukan sikap bagaimana bereaksi terhadap orang lain yang berbeda tanpa menghilangkan jati diri sendiri. Kita tidak sedang menyatukan perbedaan yang memang berbeda, namun kita sedang bersikap untuk saling rendah hati, mau saling mendengarkan, mau saling belajar, dan mau untuk saling menghargai.

Pentingnya memiliki kompetensi pribadi ini sejalan dengan pendapat Buya Hussein Muhammad, "Orang dengan pikiran yang tercerahkan tak akan mudah menerima ajaran-ajaran dogmatik." Baik itu ajaran dogmatik atas dasar agama, kepercayaan, maupun suku budaya tertentu.

Kedua, kita harus mau bercampur dan berdampingan dengan yang lain. Dari gado-gado kita juga belajar, bahwa tidak masalah jika kita berdampingan dan berinteraksi dengan yang berbeda.

Bagaimana kita akan belajar memahami, jika kenal saja tidak, jika berkomunikasi saja tidak, apa yang akan kita pahami? Saat kita mau mengenal, kita akan mengetahui dan memahami, dan saat itulah kita dapat menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA, toleransi bukan hanya menerima umat yang berbeda, tetapi adanya komitmen untuk memahami, menjaga hak-hak, bahkan melindungi mereka saat dalam ancaman. Artinya, toleransi pada dasarnya bersifat resiprokal (saling). Sehingga, kita juga perlu menyadari, bahwa bagi orang lain, kita juga berbeda, sehingga kita semua perlu untuk saling berinteraksi, agar saling mengenal dan memahami, sehingga terdapat kesalingan dalam kehidupan yang lebih luas.

Ketiga, kita harus berkolaborasi untuk bekerja sama menciptakan tujuan bersama. Walaupun memiliki banyak jurang perbedaan, namun kita semua memiliki banyak jembatan persamaan, terutama dalam hal-hal kemanusiaan. Sebagaimana gado-gado, yang berkolaborasi bersama dengan bumbu kacangnya yang gurih untuk menciptakan makanan yang bermanfaat bagi yang menikmatinya, manusia juga hendaknya demikian. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal untuk dapat menggali semua potensi yang dimiliki, di sinilah ruang untuk kita bersama berkolaborasi memahami konteks-konteks kemaslahatan yang memungkinkan untuk kita wujudkan bersama. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama yang sifatnya menyeluruh, tanpa batas apa pun.

Bukankah dalam pernikahan juga demikian, suami-istri yang memiliki banyak perbedaan juga bekerja sama dalam mewujudkan impian pernikahan yang didamba para anggota keluarga, masing-masing tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bersama. Terlebih dalam relasi yang lebih luas, relasi antarumat beragama, antar-suku-budaya, antarbahasa, antar-manusia-lingkungan, semuanya butuh kerja sama bersama demi kemaslahatan bersama pula.

Bapak Bangsa kita, KH. Abdurrahman Wahid, telah menjadi figur untuk isu ini. Beliau tidak segan melakukan ketiga hal di atas

dalam segala lini kehidupan, tidak lain untuk memberikan contoh, bahwa toleransi hanya dapat diciptakan jika kita mau melakukan interaksi timbal-balik yang jelas dan etis untuk saling mengenal, terbuka, empatik, bekerja sama, serta tetap menjadi diri sendiri.

Makanan khas Indonesia ini, makanan peranakan Cina yang meniru menu Belanda, merupakan lambang dan identitas diri bangsa. Yuk, nikmati, cermati, dan wujudkan dalam keseharian kita semua sebagai bangsa Indonesia satu yang kuat.[]

WASIAT TOLERANSI SUNAN DRAJAT

Oleh: **ASPIYAH KASDINI**

Masyarakat Muslim Indonesia pastinya mengenal siapa Sunan Drajat, salah satu Wali Songo yang makamnya terletak di pesisir Lamongan ini merupakan anak dari Sunan Ampel Surabaya, dan juga saudara dari Sunan Bonang. Jika kita menziarahi makamnya yang berada di Desa Paciran ini, maka kita akan menjumpai petuah-petuahnya yang ditulis pada papan kayu yang berada di sekitar pesareannya. Ada satu rangkaian petuah yang syarat akan makna, dan siapa pun sangat mengenal petuah atau wasiat ini. Wasiat ini dikenal dengan Catur Piwulang.

Catur Piwulang lahir dari pengamalan terhadap ajaran agama yang luhur, disertai kondisi sosial masyarakat setempat yang menjadi konteksnya. Maka tidak heran jika Sunan Drajat dikenal sebagai sosok yang humanis juga agamis. Mendapati daerah dakwah yang masyarakatnya merupakan masyarakat miskin, membuat Sunan Drajat

memiliki pendekatan yang khas dalam penyebaran agama Islam di Paciran. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Drajat adalah metode yang sangat penting, dan juga merupakan metode yang paling toleran, karena menyentuh kebutuhan dasar manusia.

Jika meminjam istilah Abraham Maslow, pelopor aliran psikologi humanistik, yang terkenal dengan konsep teori hierarki kebutuhan, Sunan Drajat memenuhi kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia, yakni kebutuhan-kebutuhan fisiologis, seperti makanan, minuman, tempat untuk istirahat, pakaian, dan lain-lain. Hal ini tampak sepele, namun Catur Piwulang adalah wujud dari toleransi yang tinggi, karena tidak sekadar berkata-kata, atau menghargai semata, namun turut andil dan berpartisipasi dalam menjembatani perbedaan yang ada. Perbedaan yang dimaksud lagi-lagi adalah perbedaan dasar yang kerap luput dari perhatian kita semua. Empat unsur Catur Piwulang tersebut adalah:

Pertama, *wenehono teken marang wong kang wuto* (berilah tongkat kepada orang yang buta). Jika pada umumnya kalimat ini ditafsirkan menggunakan penafsiran majasi, saya sedang ingin menggunakan pemaknaan secara hakikat lafaznya saja. Iya, kalimat ini secara harfiah dan zahir menyatakan, bahwa orang yang buta adalah orang yang membutuhkan bantuan. Orang buta di sini adalah simbol dari orang-orang yang terlahir dengan kekurangan yang terdapat pada anggota tubuhnya secara jasmani, atau dikenal juga sebagai kaum difabel. Konstruk sosial kerap menempatkan mereka sebagai kaum yang cacat atau tidak normal, sehingga tidak jarang dari mereka menjadi bahan olokan dan tertawaan orang-orang di sekitarnya.

Mereka dengan kondisi khusus ini merupakan kaum yang rentan, kaum yang sering dipinggirkan dan dinomorduakan, tidak sering juga kemampuan yang mereka miliki diremehkan bahkan tidak dihargai. Mereka membutuhkan tempat dan ruang untuk menjadi pribadi yang utuh pula, oleh karena itu, Sunan Drajat menempatkan hal ini menjadi urutan teratas di antara komponen Catur Piwulang. Tidak lain karena kekurangan fisik seseorang adalah takdir Tuhan yang diberikan sejak ia lahir, takdir ini melekat sepanjang

hidupnya, hingga menjadi hal wajib bagi siapa pun untuk menghargai, menghormati, serta membantu mereka. Sekali pun tidak dapat memberikan bantuan apa pun, setidaknya tidak menjadikan mereka bahan olok-olokan yang menyakitkan dan mengecilkan hati mereka, seperti yang ditulis Syekh Abu Nu'aim Al-Ashhabani, ahli hadis Persia w. 430 H, dalam kitab *Hilyatul Awliya fi Thabaqat al-Ashfiya'* jilid 4 hal. 51 yang artinya: "Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah setelah syirik adalah perbuatan mengolok-olok."

Kita sangat bersyukur, di negeri ini, pemerintah mulai memberikan pelayanan-pelayanan yang ditujukan bagi kaum difabel, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi diri sebagai bentuk syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan YME kepada mereka. Bahkan melalui Stafsusnya, Kak Angkie Yudistia, pemerintah mencoba membuktikan bahwasanya penyandang disabilitas tidak lagi dapat dipandang sebelah mata, kita semua sama, makhluk Tuhan dan warga negara yang dijamin secara konstitusional.

Kedua, *wenehono mangan marang wong kang luwe* (berilah makan kepada orang yang kelaparan). Tanpa kita sadari, masih banyak orang di sekeliling kita yang masih tidak mampu memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman untuk kesehatan jasmaninya. Terlebih pada kondisi wabah saat ini, banyak kepala keluarga yang di-PHK, kehilangan mata pencahariannya, bahkan kehilangan asa untuk mencari sesuap nasi.

Mereka yang tidak dapat memenuhi hajat diri untuk makan dan minum sehari-harinya merupakan kelompok yang disorot pada banyak ayat Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, sedekah, dan pemberian dalam bentuk akad lainnya dalam ranah *syara'*. Bahkan Allah Swt. kerap mengiming-imingi pahala yang bilangannya tidak terduga bagi mereka yang dengan kedermawanannya mau memberikan makanan kepada kaum fakir dan miskin ini, bahkan juga Allah Swt. mengutuk mereka sebagai pendusta agama jika enggan memberi makan kaum fakir dan miskin, sebagaimana QS. Al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Mereka adalah orang

yang menghardik anak yatim. Dan enggan memberi makan orang miskin."

Adanya makanan untuk dimakan menyebabkan seseorang merasa kenyang, jika perut seseorang telah kenyang, seseorang akan dapat dengan mudah menjalani hidupnya. Ia akan melakukan kewajibannya dengan baik sebagai khalifah di muka bumi saat perutnya sudah terisi dengan makanan yang halal. Perut yang terisi membuat seseorang dapat beribadah dengan baik, belajar dengan baik, bekerja dengan baik, dan beramal dengan baik. Jika kita mau menelisik kembali, tidak sedikit kasus kriminal yang terjadi karena adanya dorongan untuk dapat memenuhi kebutuhan perut, *ben pawone ngebul*. Hal ini terjadi karena desakan-desakan dasar yang kerap sebagai sesama kita lewati. Di sinilah ruang kosong yang harus senantiasa kita perhatikan. Bukan toleransi yang jauh, namun bentuk toleransi yang sangat begitu dekat, yakni menghargai dan berempati kepada mereka yang kelaparan dengan memberinya makanan atau jalan agar mereka mendapatkan makanan. Toleransi yang tidak jauh dari mulut, yakni berupa kebutuhan perut.

Bentuk toleransi ini juga wajib semua manusia lakukan dan wujudkan pada diri sendiri. Seseorang kadang merasa cukup, saking cukupnya atas rezeki yang diterima, tidak sedikit yang lalai untuk mengisi perutnya, sehingga banyak dari kita semua yang terkena penyakit lambung dan pencernaan. Bahkan untuk diri sendiri, terkadang manusia kurang memiliki rasa toleransi yang berarti.

Ketiga, *wenehono busono marang wong kang wudo* (berilah pakaian kepada orang yang telanjang). Lagi-lagi, tampaknya sepele, namun jika kita mampu merasakan, masih banyak di sekeliling kita yang memerlukan sandang yang layak guna untuk sehari-hari. Saat manusia pada umumnya menjadi konsumtif akan pakaian yang dikenakan, tanpa sua dan kata, banyak mata yang menatap asa. Terlebih pakaian yang digunakan untuk ibadah. Tanpa kita sadari, sikap yang kita lakukan terhadap diri terkadang membuat beberapa yang lain berkecil hati. Maka tidak menjadi suatu kerugian, jika ada yang sekiranya membutuhkan sandang berada di antara kita, dengan su-

karela tangan ini memberikannya. Agar tubuh-tubuh yang lain juga bisa merasakan hangat dalam kedinginan, sejuk dalam suhu yang panas, dan terhindar dari debu maupun bakteri yang dapat membahayakan jiwa.

Banyak kisah kedermawanan para sufi perihal ini, dalam manakib, Syekh Abdul Qadir al-Jilani juga tidak ragu untuk memberikan jubah kebesarannya yang bertakhtakan batu-batu mulia kepada mereka yang membutuhkan, lagi-lagi, ini adalah puncak toleransi yang paling tinggi dan paling dekat dengan kita semua. Bagaimanapun, pakaian memiliki banyak fungsi bagi pemakainya, tidak saja bernilai etis dan sosial, tetapi juga kesehatan.

Keempat, *wenehono ngiyup marang wong kang kudanan* (berilah tempat berteduh bagi orang yang kehujanan). Tempat berlindung merupakan kebutuhan primer semua makhluk hidup. Sungguh menyakitkan seandainya kita tidak memiliki tempat untuk berteduh, namun tidak sedikit dari kita yang merasakan hal ini. Adanya jaminan pemerintah terhadap kaum papa, juga kemudahan kepemilikan hunian bagi keluarga-keluarga baru adalah salah satu ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Kebutuhan yang mungkin hanya pemerintah yang memiliki biaya, wewenang, dan kuasa untuk merealisasikannya.

Menjadi toleran, walaupun sederhana, bukanlah perkara mudah, terlebih di era saat ini, oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan banyak pihak agar kaum-kaum rentan dan harus diperhatikan ini mendapatkan kesejahteraan secara merata. Semua manusia tidak ada yang sempurna, kita diciptakan untuk saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi kekurangan yang kita miliki, tidak lain adalah untuk mewujudkan kehidupan yang saling membahagiakan di antara semua makhluk seluruh alam. Mewujudkan Catur Piwulang ini sama artinya dengan mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian, karena pada umumnya konflik hadir atas sekat-sekat yang ada di antara hal-hal tersebut.

Mengutip perkataan Rumi yang menjadi nasihat Buya Husein Muhammad, "Allah mengajarkan kami untuk memberi dan tidak

untuk meminta." Agamawan yang mewujudkannya adalah agamawan dengan pengamalan agama yang mendalam, dan Sunan Drajat adalah buktinya, ia mengajarkan bagaimana bertoleransi dengan mengedepankan *maqshid syariah* untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisiologis manusia. Seperti namanya, Sunan Drajat, semua kemuliaan atas derajat yang ia miliki sudah seharusnya diikuti dan diamalkan. *Wallahu A'lam bi al-Shawaab*.[]

AKANKAH KATA *'HAIHATA'* UNTUK BUDAYA TOLERANSI DI BUMI INDONESIA SAAT INI?

Oleh: **AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT**

Melihat apa yang sempat ramai akhir ini lantaran *statement* Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas tentang pengaturan kadar volume toa di masjid dan musala di seluruh Indonesia, membuat saya berkesimpulan bahwa budaya toleransi kita sangat jauh dari yang digariskan Walisongo. Para ulama kita tempo dulu berhasil mencapai titik maksimal dalam mengejawantahkan toleransi di bumi Nusantara. Setiap agama mampu berdamai dengan yang lain. Wayang salah satu contohnya.

Di Jawa, wayang adalah media terampuh untuk melicinkan misi dakwah. Sebelum Islam datang, agama Hindu sudah menggunakannya terlebih dahulu. Dan, mereka sukses mendapatkan hasil maksimal untuk membumikan ajarannya. Demikian juga Islam, keberhasilan dakwahnya tak lepas dari media wayang di bawah tangan kreatif Sunan Kalijaga. Melalui pertunjukan wayangnya, ia berhasil menanamkan

ajaran tasawuf, moral, dan lain-lain kepada masyarakat Jawa. Bahkan, setelah Walisongo pun media ini tetap relevan di mata umat. Terbukti, dunia pewayangan mengenal istilah Wayang Krucil. Sebuah pertunjukan wayang yang menceritakan tokoh Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga.

Itu artinya, dahulu agama-agama di Indonesia hidup berdampingan dengan rukun, menyebarkan ajaran luhur mereka dengan media yang sama. Bukan berarti ketika wayang telah digunakan lebih dahulu oleh Hindu, kemudian Islam anti dan menjauhinya. Melainkan, justru semakin dikembangkan. Sebab, mereka semua tahu bahwa wayang hanyalah media. Umat Hindu mengisi konten wayang dengan cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata, sedangkan Sunan Kalijaga mengisinya dengan ajaran-ajaran tasawuf dan kisah-kisah sufi.

Terlebih lagi, mereka tidak risih dengan aktivitas dan kegiatan satu sama lain. Saat Islam memainkan wayang, para pembesar Hindu tidak mengajak umatnya untuk mencibir. Demikian pula sebaliknya, cerita-cerita pewayangan Hindu tak pernah sekali pun membuat Sunan Kalijaga—misalnya—merasa terganggu, apalagi sampai mengajak kaumnya untuk mengolok-olok mereka.

Sekarang malah jauh berbeda. Caci-maki antar sesama Muslim saja tak bisa dibendung, datang dari pelbagai aliran dan kepentingan. Malah, sepertinya kita cenderung lebih akur dengan umat agama lain daripada dengan kaum muslimin sendiri lantaran berbeda paham dan teologi, padahal kita masih meyakini Tuhan dan nabi yang sama. Entah apa yang melatarbelakangi konflik berkepanjangan ini. Atau, apakah ini berarti bahwa misi perdamaian yang dibawa agama lain lebih besar dibandingkan 'beberapa aliran' dalam agama kita? Hanya bisa berucap *wallahu a'lam.*

Jika memang benar-benar demi perdamaian—salah satunya dengan memerdekakan toleransi dari kungkungan stigma negatif, fanatisme; baik kelompok, keyakinan, dan kedaerahan, juga membebaskannya dari egoisme personal—maka kita akan akur dengan siapa saja. Kita bisa dengan lapang dada menoleransi budaya, ritual,

paham, dan pola hidup masyarakat sekitar kita. Tanpa perlu diatur Kementerian Agama Republik Indonesia. Aturan itu sebenarnya muncul dari rasa risi kita terhadap sesama; personal maupun kelompok. *Wallahu a'lam* apakah Bapak Menag juga termasuk.

Kalau mengikuti rasa risi, aturan demi aturan untuk menegakkan toleransi tak akan pernah usai. Setiap orang punya rasa risi, jijik, jenuh dan seterusnya, dan rasa itu beranak-pinak. Kita tidak bisa membebek itu terus. Kita harus mulai berlapang dada, menerima kondisi masyarakat kita yang multikultural. Selama apa yang mereka lakukan tidak bermaksud mengganggu, murni sedang menjalankan ritual adat, budaya, dan seterusnya.

Urusan toleransi, sejatinya tak lepas dari prinsip pepatah, "Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung". Bila berkunjung ke sebuah kampung sampah di Malang, kita tak boleh tutup hidung berlagak sok bersih, sok higienis. Kita harus menghargai kampung mereka. Jika ke terminal, jangan larang para sopir menyalakan mesin dengan alasan bau knalpot. Salah. Begitu pun kalau berkunjung ke Pulau Dewata, jangan risih dengan anjing piaraan mereka, posisinya sama seperti memiliki kambing kacang di rumah kita. Pepatah di atas adalah bahasa sederhana dari hakikat toleransi dengan segenap dimensi maknanya.

Ada sebuah kaidah fikih yang cukup keren yang mungkin luput dipahami serius. Dalam *I'anah at-Thalibin 'ala Halli Alfadhzi Fathil Mu'in* (juz 2, hal. 316) syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi—seorang ulama kesohor kelahiran Makkah al-Mukarramah pada tahun 1226 H-1310 H-menulis:

أن حق الله مبني على المسامحة وحق الأدمي مبني على المشاحة

"*Sesungguhnya hak Allah berdiri di atas maaf, dan hak sosial dibangun di atas egoisme dan pertikaian.*"

Dalam kitab-kitab fikih, berdasar pada kaidah ini, kita kerap diajarkan bahwa hak Allah itu bisa ditunda ketika berhadapan dengan hak sosial yang lebih mendesak. Seperti dalam *al-Fiqh al-*

Islami wa Adillatuhu (juz 2, hal. 1053) Syekh Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, sang mufasir besar, fakih (pakar fikih), juga *ushuli* (pakar *ushul fiqh*) kelahiran Damaskus ini menjelaskan konsep perihal kebolehan memutus salat bagi seseorang yang mengetahui keberadaan tunanetra atau anak kecil yang akan tercebur ke sumur. Alasannya, selain karena salat bisa dikerjakan nanti, juga merupakan bagian dari hak Allah yang berdiri di atas pengampunan.

Berarti, menyelamatkan satu nyawa jauh lebih berpahala daripada meneruskan salat sekaligus membiarkannya masuk sumur. Sehingga, dalam satu kondisi bukan hanya boleh, tetapi wajib memutus salat.

Perlu diketahui, ada satu sudut pandang yang penting ditekankan pada kaidah dan contoh di atas, yaitu sudut pandang toleransi. Jika tidak, maka hanya akan menjadi sebatas hiasan hafalan dan contoh fikih yang jarang ditemukan. Mari kita pahami dan kaji perspektif lebih jauh. Saya ingin mengawalinya dengan pertanyaan, Mengapa dalam kaidah di atas menggunakan redaksi '*musyâhhah*'? Mengapa tidak menggunakan redaksi '*at-ta'âwun 'ala al-birri wa at-taqwa*' saja? Bukankah inti dari hak sosial adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan?

Baik, kita mulai. Secara bahasa, *musyâhhah* adalah derivasi dari kata *syâhha-yusyâhhu* yang menyimpan dua makna; (1) bermakna *dhanna* (kikir), seperti dalam contoh *syâhha bi mâlihi 'ala ahlihi* (Dia kikir terhadap keluarganya). (2) bermakna *khâshama* (memusuhi atau bertikai), seperti contoh *syâhha shâhibahu* (Dia memusuhi sahabatnya). Makna yang kedua inilah yang paling sesuai dengan maksud kaidah tersebut diucapkan.

Adapun alasan menggunakan kata *musyâhhah*, secara tersirat yaitu untuk menggambarkan watak manusia pada umumnya—yang banyak salah lagi berlumur dosa—di mana, mereka mudah berpecah belah, berbuat kerusakan, dan melakukan pertumpahan darah. Terkait watak manusia kelas ini, imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari menjelaskannya dalam tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (juz 1, hal. 289) saat menafsiri surah al-Baqarah:[30]. Se-

lain itu, secara tidak langsung menginformasikan akan minimnya manusia dengan mental pemaaf, rata-rata manusia menyimpan stok benci dan dendam lebih banyak daripada stok maafnya.

Lalu, alasan tajam tidak menggunakan kata '*at-ta'âwun 'ala al-birri wa at-taqwa*', yaitu karena tolong-menolong dalam kebaikan bukanlah karakter dan prinsip hidup umat manusia kebanyakan. *ta'âwun* di sini hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mereka yang memiliki budi luhur, pemahaman mendalam, kemampuan tafakur yang menembus masa lalu, dan rasa syukur yang tinggilah yang dihiasi karakter *ta'âwun* ini. Maka wajar ketika kita terus diseru oleh penggalan surah al-Maidah:[6], *Wa ta'âwanû 'ala al-birri wa at-taqwa, walâ ta'âwanû 'ala al-itsmi wa al-'udwân*, "Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman".

Oleh karena hak anak Adam berdiri di atas *musyâhhah*, maka toleransi harus ditegakkan setegak-tegaknya, mesti dibumikan seluas-luasnya, wajib ditanamkan sedalam-dalamnya, dan patut dijunjung setinggi-tingginya. Inilah kajian dengan perspektif toleransi yang kami maksud di atas. Namun, untuk mencapai itu semua, seluruh umat, khususnya di bumi Indonesia membutuhkan kedewasaan yang matang dan moralitas yang tinggi. Kedewasaan itu bersumber dari pengalaman, sedangkan moralitas tumbuh dari pendidikan.

Lalu, sudah sampai manakah budaya toleransi kita saat ini? Lihat saja sampai mana kedewasaan dan moralitas anak bangsa. '*Haihata*' (sungguh sangat jauh) mungkin kata yang tepat. *Wallahu a'lam bisshawab*.[]

BELAJAR NILAI TOLERANSI DAN PERDAMAIAN DARI PIAGAM MADINAH

Oleh: **WAFIROH**

Berbicara tentang toleransi, maka penting bagi kita sebagai umat Islam untuk berbicara tentang Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah pionir toleransi di tanah Arab dan dunia Islam secara keseluruhan. Semenjak sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah menjadi teladan kedamaian di tanah Arab. Semisal ketika pemugaran Ka'bah, dengan cerdiknya beliau menanamkan nilai perdamaian terhadap kabilah-kabilah yang bersitegang memperebutkan kesempatan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Namun jika kini ditemukan bahwa umat Islam bertikai, saling menyalahkan dan semacamnya, maka dapat dipahami bahwa mereka tidak meneladani sejarah kehidupan Rasulullah dengan baik.

Semenjak hijrah ke Madinah, Nabi Saw. mulai membangun fondasi kehidupan sosial bernegara. Hal pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara Muslim

pendatang (muhajirin) dengan Muslim lokal (anshar). Kedua belah pihak dipersaudarakan karena adanya kesamaan agama (*ukhuwah islamiyyah*). Tak hanya itu, beliau juga membangun solidaritas yang kuat antara muslim dengan penduduk yang beragama Nasrani dan Yahudi dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesatuan tanah air (*ukhuwah insaniyah* dan *wathaniyah*).

Solidaritas dengan non-muslim maupun penduduk lokal yang dilakukan Nabi Saw. di Madinah adalah dengan membuat satu kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut terkait dengan hak, kewajiban serta perlindungan keamanan dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan tersebut ditulis dan menjadi undang-undang konstitusi yang mengatur jalannya kehidupan majemuk di negara Madinah. Dalam tahap berikutnya, kesepakatan tersebut dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Bahkan, Menurut Zainal Abidin Ahmad, seorang cendekiawan Muslim dalam bukunya, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, 1973 (baca: Republika.co.id, post 04 Oktober 2020, Piagam Madinah Bukti Ajaran Muhammad Saw...) Piagam Madinah tersebut menjadi konstitusi bernegara tertulis pertama di dunia. Jauh melampaui sejumlah konstitusi lainnya di dunia, seperti Magna Charta dan Konstitusi Amerika Serikat.

Tindakan membangun fondasi kenegaraan yang berbasis persaudaraan ini adalah langkah pertama yang Nabi Muhammad Saw. lakukan tepat setelah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan kegiatan kemasyarakatan umat Muslim. Disebutkan dalam *Fikih Sirah Nabawiyah* karya Said Ramadan Al-Buthi, bahwa Piagam Madinah memiliki 4 poin penting nilai-nilai kedamaian (*Fikih Sirah Nabawiyah*, 151-154). Yaitu sebagai berikut:

1. KONSTITUSI BERNEGARA SUDAH ADA DALAM ISLAM SEMENJAK AWAL

Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Saw. dan disepakati oleh seluruh penduduk Madinah saat itu menjadi bukti bahwa komunitas Muslim dari awal sudah berdasarkan atas undang-undang

konstitusional yang kokoh. Piagam tersebut juga menunjukkan bahwa negara Islam semenjak awal sudah memenuhi kebutuhan primer sebuah negara, yaitu unsur-unsur manajerial yang valid dan terstruktur. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapa pun dan dalam komunitas apa pun selama masih dalam batas teritori akan tergabung dalam persatuan Negara Madinah dan dalam naungan Islam. Mereka—tanpa melihat perbedaan yang dimiliki—akan disatukan dalam naungan yang sama dengan posisi yang setara sebagai warga negara, sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama pula.

Poin-poin ini secara eksplisit tertuang dalam pasal pertama yang berbunyi: "Muslim Quraisy maupun Yatsrib dan orang-orang di luar mereka tetapi ikut bergabung dan berjuang bersama, adalah kesatuan komunitas manusia secara utuh". Pasal ini memperlihatkan bahwa Islam sangat ramah terhadap perbedaan apa pun yang dimiliki selama masih memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini, kita kemudian dapat memahami bahwa istilah Negara Madinah sebagai negara Islam tidak merujuk kepada pemahaman bahwa negara ini hanya dikhususkan untuk umat Muslim. Justru sebaliknya, Islam menerima semua perbedaan yang ada untuk tergabung dalam satu komunitas yang seluruh undang-undangnya bernapaskan Islam yang notabene mengedepankan kedamaian.

2. SOLIDARITAS DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal kedua dan ketiga dalam Piagam madinah menunjukkan bahwa Islam memiliki kepedulian besar terhadap kemanusiaan. Khususnya manusia dalam statusnya sebagai bagian dari komunitas. Pasal kedua adalah "orang-orang Muslim sekalipun berbeda asal suku, wajib untuk saling bekerja sama dan saling menebus jika ada yang menjadi tawanan dengan cara-cara yang baik dan dibagi secara adil antara sesama Muslim". Sementara pasal ketiga adalah "sesama kaum Muslim tidak akan ditinggalkan dalam keadaan memiliki utang atau tanggung jawab besar. Namun mereka saling membantu untuk meringankan kesulitan saudaranya".

Dua pasal di atas menunjukkan bahwa kerja sama dan gotong royong sudah ditanamkan oleh Islam (melalui Rasulullah Saw.) Masing-masing anggota masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurus kehidupan dunia dan akhirat. Jika ada sebagian sedang kesusahan, maka menjadi kewajiban saudaranya untuk membantu meringankan. Bahkan jika kita teliti lebih lanjut, mayoritas syariat Islam berfondasikan akan nilai ini. Seperti syariat membayar zakat, sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain.

3. KESETARAAN DALAM HAK DAN KEWAJIBAN

Nilai ini terangkum dalam pasal ketujuh. "Tanggungan Allah adalah satu. Allah melindungi manusia yang paling rendah (sekalipun). Mukmin yang satu harus mengasihi mukmin lainnya sebagai sesama manusia". Pasal ini menunjukkan bahwa nilai kesetaraan sesama manusia tidak hanya slogan yang dikoar-koarkan dalam Islam. Namun justru menjadi salah satu fondasi penting yang diperhitungkan dalam syariat untuk kehidupan berbangsa yang berbasis Islam.

Pasal ini merangkum banyak hukum. Misalnya, ketidakbolehan merusak kehormatan orang lain sebagaimana dia juga memiliki hak untuk dihormati; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban secara sosial; serta hukum-hukum fikih seperti syariat hudud dan lain-lain.

4. HUKUM ISLAM SEBAGAI UNDANG-UNDANG PERADILAN

Poin ini dirangkum oleh pasal kedua belas. "Apa pun yang terjadi pada anggota kesepakatan ini (Muhajirin-Anshar, Muslim-Yahudi, Quraisy-Yatsrib-Aus-Khazraj dan lainnya) berupa kasus atau perselisihan yang rentan mendatangkan kekacauan, maka dikembalikan kepada hukum Allah Swt. dan Muhammad Saw.". Pada pasal ini tampak bahwa syariat Islam diposisikan sebagai pusat undang-undang. Sebagian orang mungkin mengira bahwa pasal ini menunjukkan bahwa Islam 'memonopoli' hukum. Padahal jika kita lebih teliti, pasal ini justru menunjukkan bahwa Islam mengambil

posisi urgen dalam menghormati hak setiap individu. Islam tidak menghendaki adanya hal yang mengganggu anggota kesepakatan ini. Alih-alih memonopoli, Islam justru tampil menengahi setiap konflik yang mungkin terjadi nantinya.

Dari paparan di atas, kita dapat belajar bahwa perumusan Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah tonggak baru dalam sejarah Islam. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Islam telah menjadi pionir dalam membentuk konstitusi yang toleran, cinta damai dan peduli pada hak masing-masing individu dan golongan. Tulisan di atas hanya memaparkan poin-poin yang mencakup nilai toleransi antar sesama Muslim atau antara Muslim dengan non-Muslim. Padahal perjanjian ini juga mencakup terhadap nilai-nilai toleransi resiprokal antar sesama non-Muslim. *Insya Allah* akan dibahas pada tulisan berikutnya. *Allahu A'lam*.[]

REFLEKSI *ISRA' MI'RAJ* DALAM BINGKAI TOLERANSI

Oleh: YULINAR AINI RAHMAH

Isra' Mi'raj, sebagaimana masyhur di kalangan umat Islam merupakan peristiwa bersejarah diperintahkannya salat. Sebab nilainya yang bersejarah, Isra' Mi'raj selalu diperingati setiap tahun oleh umat Islam. Dalam setiap momentum peringatan Isra' Mi'raj, para tokoh ulama selalu mengajak umat Islam untuk merefleksikan nilai keteladanan dalam peristiwa Isra' Mi'raj sebagai nilai luhur yang sesuai dengan situasi zaman.

Yang menarik dari peringatan Isra' Mi'raj adalah rentetan peristiwa-peristiwa yang bersumber dari hadis-hadis dan dinarasikan secara apik oleh para mubalig. Rentetan peristiwa tersebut diantaranya meninggalnya paman dan istri Rasulullah, diperlihatkannya Rasulullah terhadap situasi surga neraka, pertemuan Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu dan lain sebagainya.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, pertemuan Rasulullah dengan Nabi Musa menjadi salah satu yang menarik. Perte-

muan ini digambarkan sebagai proses negosiasi yang selanjutnya menghasilkan keputusan lima waktu salat.

Proses negosiasi merupakan salah satu strategi untuk menyelesaikan berbagai kepentingan atau setidaknya dua kepentingan yang berbeda. Tujuan dari penyelesaian ini adalah terciptanya harmonisasi atau rasa nyaman dari berbagai pihak. Rasa nyaman inilah yang akan mengantarkan pada kedamaian. Untuk menuju suasana yang damai, diperlukan adanya sikap toleran.

Dalam definisi yang diungkap oleh Buya Husein Muhammad, makna toleran adalah saling menghargai eksistensi yang lain sekaligus saling menyambut, menyediakan tempat dan memudahkan yang lain (mubadalah.id). Toleran setara dengan kata *samahah* dalam bahasa arab yang arti dasarnya adalah mudah, membuat orang mudah, nyaman (fahmina.or.id). Dengan begitu, memudahkan yang lain menjadi salah satu syarat yang perlu digarisbawahi sebagai syarat menumbuhkan sikap toleran.

Lebih lanjut dalam keterangannya tersebut, Buya Husein menunjukkan dasar kuat dari Rasulullah dalam semangat memerintahkan untuk memberikan kemudahan bagi yang lain. Hal ini sebisa mungkin dipraktikkan Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj salah satunya.

Dikisahkan dalam hadits:

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسٌ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ ، حَتَّى آتِيَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ مُوسَى : مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي ، فَوَضَعَ عَنِّي شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى , فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ , فَرَاجَعْتُ رَبِّي ، فَقَالَ : هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي.

Diriwayatkan dari Ibn Hazm dan Anas: Rasulullah bersabda: "Allah mewajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Kemudian aku turun menemui Musa. Lalu dia bertanya: "Apa

yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?". Aku menjawab: "50 salat". Dia berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya".

Maka aku pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata: "Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku". Maka dikurangi dariku 5 salat. Kemudian aku kembali kepada Musa dan berkata: "Allah mengurangi untukku 5 salat". Dia berkata: "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan".

Maka aku pun kembali kepada Tuhanku. Maka Tuhan berfirman: "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 waktu yang nilainya sama dengan 50 waktu dan Kalam-Ku tidak dapat berubah lagi". Kemudian saya turun bertemu dengan Musa. Dia berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan", maka aku pun berkata: "Sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku pun malu kepada-Nya". (HR. Imam Nasa'i)

Dalam narasi hadis tersebut, terlihat dua praktik sikap toleran yang ditunjukkan Rasulullah. *Pertama*, sikap toleran dalam menghargai pendapat Nabi Musa yang memberikan masukan kepada Rasulullah. Rasulullah memiliki kedudukan yang tinggi di atas nabi-nabi dan semua makhluk Allah yang lain. Namun hal ini tidak lantas membuat Rasulullah menutup telinga atas masukan yang datang kepadanya.

Kedua, sikap toleran dalam memberikan kemudahan bagi umatnya. Dengan mengupayakan negosiasi dari 50 menjadi 5 waktu merupakan bukti bahwa Rasulullah memiliki sikap toleran yang tinggi terhadap umatnya.

Sebagai hamba yang telah dijamin Allah atas surga, tidak menjadikan Rasulullah semena-mena dengan *taklif* (beban) yang diberikan Allah. Rasulullah bisa saja mengiyakan perintah salat 50 waktu tersebut karena bagi Rasulullah, tidak ada ibadah yang berat baginya. Semuanya dilakukan sebagai perwujudan hamba yang bersyu-

kur. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang sudah masyhur dari Mughirah bin Syu'bah yang menyatakan bahwa Rasulullah melakukan ibadah hingga tungkak kakinya bengkak.

Namun sekali lagi, ini tidak membuat Rasulullah menetapkan standarnya sebagai standar yang harus dikerjakan orang lain. Rasulullah selalu mengajarkan untuk menetapkan sesuatu sesuai kadar kelompok yang dihadapi dengan semangat memudahkan.

Dari sikap-sikap yang diajarkan Rasulullah tersebut, mari kita maknai Isra' Mi'raj dalam bingkai toleran dengan semangat memberikan kemudahan kepada siapa pun. Jangan biarkan jargon "kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah" mengakar dalam diri kita. Percayalah, konsisten mempermudah orang lain akan mengantarkan seseorang menemukan kemudahan-kemudahan bagi diri kita sendiri.[]

TOLERANSI BERAGAMA BUTUH PENDAKWAH DENGAN PENDEKATAN GANDA; Rasional dan Emosional

Oleh: AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT

Apa jadinya agama ini bila para pemeluknya, terutama para pendakwah, hanya menanam dan menanamkan paham dengan emosional, tentu semua titah dan sabda agama menjadi sakral. Kita harus manggut-manggut menyikapi apa saja yang dipercaya keluar dari tubuhnya. Padahal, bisa jadi bersumber dari tubuh lain yang hanya menumpang bahu agama. Artinya, sebuah kekacauan besar akan terjadi. Agama yang suci sedang ditunggangi berbagai kepentingan.

Demikian tak kalah kacau jika kita menanam dan menanamkan paham agama secara rasional semata. Karena tidak semua mampu dijangkau logika dengan utuh. Isra' Mi'raj misalnya. Di sana butuh peran iman untuk membuka pintu kejadian luar biasa tersebut. Setidaknya, meyakini ada makhluk bernama Burak dengan segenap kecepatannya—yang tidak pernah dilihat dan didengar dalam cerita—sebagai transportasi Nabi ke Sidratulmuntaha.

Tulisan ini, terinspirasi oleh catatan guru saya, Kiai Muhammad Rizqil Azizi di akun Facebook-nya dengan judul 'Dakwah Rasional dan Emosional' dan dimuat di sebuah media online, Aswaja Dewata dengan judul yang sama. Di awal tulisan, dosen Ma'had Aly Situbondo itu mengutip buku *Islam Aktual* karya Jalaluddin Rahmat, bahwa saat ini para mubalig dengan pendekatan dakwah emosional yang kerap mengabaikan porsi rasional sudah kian menjamur. Tak terbendung lagi banyaknya, baik di kota apalagi di pelosok-pelosok desa. Tentu, dampaknya cukup besar.

Kendatipun pendekatan dakwah emosional lebih hangat di masyarakat serta lebih cepat meningkatkan gairah beragama mereka, tetapi metode dakwah ini menancapkan akar yang lemah. Nilai keberagamaan umat sangat mudah rapuh saat diterpa berbagai gelombang besar. Seperti isu-isu toleransi, keragaman budaya, tali kelindan antara budaya dan agama, dan seterusnya. Sehingga, wajar kiranya banjir sikap intoleransi di mana-mana.

Karena itu, untuk mengejawantahkan toleransi, para pendakwah kita perlu menggawangi keduanya, sisi emosional dan rasional. Sebab, dakwah rasional ini selain memuaskan nalar, juga bertujuan membentengi umat dari logika-logika yang menyesatkan. Dalam teks-teks agama, kita diajarkan untuk menyandingkan kedua pendekatan tersebut. Karena itu, Allah tidak hanya menyeru hamba-Nya dengan *la'allakum tattaqun* (agar kalian bertakwa), melainkan juga dengan seruan *afala tatafakkarun* (apakah kalian tidak berpikir?), *la'allakum tatafakkarun* (agar kalian berpikir), *afala ta'qilun* (apakah kamu tidak mengerti?), *la'allakum ta'qilun* (agar kalian mengerti), dan redaksi lain yang terkait dengan akal budi.

Gampangnya, kita sedang dididik agar tidak menomorsatukan wahyu dan menomorseratuskan akal. Melainkan membuatnya berdampingan. Guru kami di Ma'had Aly Situbondo, KH Afifuddin Muhajir dalam buku *Membangun Nalar Islam Moderat* (hal. 10) menulis sebuah sub pembahasan yang berjudul Sumber Kebenaran antara Akal dan Wahyu. Di sana, Rois Syuriah PBNU itu menegaskan bahwa akal dan wahyu memiliki peranan penting dalam Islam secara

komplementer. Ia mengutip sebuah *statement* dalam *al-I'tisham* (juz 2, hal. 840) karya Abu Ishaq as-Syathibi (w. 790 H) yang berbunyi:

إجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك

> "*Letakkanlah syariat di tangan kananmu dan akal di tangan kirimu*".

Tak bisa dimungkiri, bahwa kita dihadapkan dengan tiga spektrum intelektual yang amat dahsyat. Yaitu paham tekstualisme *(ahl an-naql*), paham rasionalisme (*ahl al-'aql*), dan paham intuisionisme (*ahl ad-dzau*q). Dan, kita berada pada paham moderatisme (*ahl al-wasath*) yang memadukan peran wahyu, akal, dan intuisi dalam beragama.

Saya meyakini, tragedi pembakaran masjid dan beberapa unit mobil milik salah seorang tokoh Salafi di Lombok Timur, NTB beberapa waktu lalu, tiada lain akibat ekspresi beragama masyarakat kita yang terlalu lama dicekoki oleh dakwah-dakwah dengan pendekatan emosional. Baik dari pihak korban maupun pelaku yang emosinya tersulut oleh sikap intoleransi tokoh Salafi tersebut. Alhasil, sikap intoleransi itu muncul karena miskin pemahaman serta kesadaran akan perbedaan dan keragaman yang ada. Dan, inilah kemiskinan terburuk.

Kemiskinan semacam ini bisa jadi lahir dari egoisme dan fanatisme. Dua faktor yang dapat membutakan siapa saja bagi yang memilikinya. Atau, mungkin juga lahir dari kabut tebal kebodohan yang menutupi hati dan pikiran umat. Masih ingatkah nama Abdurrahman bin Muljam? Seorang sahabat yang berbeda haluan politik dengan sang khalifah keempat, sayidina Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*. Dari sanalah muncul sikap-sikap beragama yang eksklusif dan ekstrem dari seorang Ibnu Muljam. Sampai pada akhirnya, ia dengan hati dingin membunuh sayidina Ali dengan pedang beracun saat sang khalifah di tengah sujud subuhnya.

Hal yang penting digarisbawahi dari sosok Abdurrahman bin Muljam, bahwa ia bukan orang biasa, melainkan seorang ahli fikih

(*faqih*), ahli ibadah, penghafal juga pengajar al-Qur'an. Tetapi, itu semua tidak menjamin sikap beragama yang merepresentasikan akhlak al-Qur'an. Ajaran-ajaran al-Qur'an yang dihafalnya itu tertutupi oleh fanatisme golongan Khawarij yang dianutnya. Sebab itu, Imam Ali pun harus merasakan hangat darahnya di waktu subuh yang dingin.

Sikap fanatisme lainnya juga pernah dialami oleh Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i (w. 204 H), saat hijrahnya yang terakhir kali dari negeri Bagdad ke Mesir. Di mana, waktu itu Mesir dipadati oleh dua corong besar fikih; (1) Mazhab Maliki, dan (2) Mazhab Hanafi. Dalam biografi singkat as-Syafi'i yang ditulis oleh tim Percetakan Dar al-Fikr di kitab *ar-Risalah*, pada lembaran awalnya (hal. 5), sedikit bercerita bagaimana kondisi masyarakat Mesir pasca-kehadiran Imam Syafi'i di sana.

Singkat cerita, di Mesir, Imam Muhammad bin Idris membuka sebuah majelis kajian, dan menyebarkan paham atau mazhab barunya (*qoul jadid*) melalui majelis tersebut. Hari demi hari, seiring berjalan waktu, majelis tersebut semakin sesak oleh masyarakat dari berbagai daerah di sana. Terutama dari kalangan penganut mazhab Maliki dan Hanafi. Guncangan besar intelektual as-Syafi'i rupanya mampu mengaduk-aduk hati mereka. Sehingga, banyak pakar fikih dari golongan mereka banting setir menuju Mazhab Syafi'i. Para penggawa mazhab lain pun ketar-ketir, terutama dari kalangan Maliki. Sampai-sampai, mereka berani mengumumkan 'permusuhan' (*munashabatul 'ada'*) kepada Imam Syafi'i sendiri.

Tak heran bila salah seorang promotor mazhab Maliki bernama Syekh Asyhab bin Abdil Aziz sampai memanjatkan doa buruk untuk Imam Syafi'i. Dan, itu tidak tanggung-tanggung. Ia berdoa sangat serius dalam sujudnya. Ia memohon:

اللهم أمت الشافعي وإلّا مات علم مالك

"*Ya Allah, cabutlah nyawa as-Syafi'i, jika tidak, pastilah ilmu (guru kami) Imam Malik akan musnah tak tersisa.*"

Secara logika normal, pantaskah seorang imam besar, pengemban agama Tuhan yang penuh kasih-sayang ini, mendoakan celaka kepada sesama? Tiada alasan untuk menyebutnya pantas. Namun, lagi-lagi bukan mustahil sikap tersebut muncul dari seorang pakar agama, imam besar, juga ahli hadis ini, ketika terserang penyakit fanatisme.

Pendek kata, kita saat ini berada pada titik urgensitas yang cukup tinggi untuk menanamkan toleransi, utamanya kepada para mubalig dan tokoh agama terlebih dahulu. Sebab, sangat tidak etis jika sikap intoleransi muncul dari lisan dan tingkah polah mereka. Tentunya, dengan melahirkan sosok para pendakwah baru yang tidak hanya berdakwah dengan emosional, tetapi disandingkan pula dengan pendekatan rasional. Sehingga, umat ini tidak hanya beragama dengan emosi, tetapi juga dengan akal mereka.

Akhirnya, saya ingin mengutip sebuah hadis dalam kitab *Tuhaf al-'Uqul 'an Alirrosul* (hal. 54) karya seorang ulama kesohor abad keempat Hijriah, Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Husein bin Syu'bah al-Harroni, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إنما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عقل له

"*Kebaikan itu—seluruhnya—hanya mampu dijangkau oleh akal (yang jernih), dan tiada agama bagi yang yang tidak menggunakan akal budinya.*"

Semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam bisshawab.*[]

BELAJAR TOLERANSI INTRA-AGAMA DALAM SALAT BERJEMAAH

Oleh: YULINAR AINI RAHMAH

Toleransi secara luas tidak terbatas pada toleransi antar-agama, namun juga toleransi antar-budaya, suku, ras dan lain sebagainya. Lebih dalam lagi, banyak yang tidak menyadari pentingnya toleransi intra-agama. Dalam ritual ibadah salat jemaah di masjid, toleransi intra-agama dapat kita temui dan terapkan.

Pada dasarnya, masjid dihuni oleh sekelompok komunitas homogen yaitu umat Islam. Sewajarnya, komunitas homogen tidak memunculkan banyak perbedaan antar-anggotanya. Namun hal itu tidak sepenuhnya benar. Sebuah komunitas menyatukan banyak anggota yang semuanya datang dari berbagai macam latar belakang, karena anggota disatukan dalam kehomogenitasan tertentu, inilah yang justru akan semakin menampakkan perbedaan-perbedaan kecil antar anggotanya.

Jika kita renungkan, tidak sedikit perbedaan-perbedaan coba disatukan dalam prosesi salat berjemaah di masjid.

Masjid di-*setting* menjadi tempat terbuka bagi siapa pun umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah salat. Karena terbuka bagi siapa pun, maka semua umat Islam dari golongan atau mazhab apa pun mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses masjid manapun untuk menjalankan ibadah.

Perbedaan mazhab sejatinya akan berdampak pada perbedaan cara beribadah satu jemaah dengan jemaah yang lain. Satu contoh diantaranya adalah penggunaan doa Qunut atau tidak. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan sikap toleransi. Mereka yang *kekeh* doa Qunut adalah *sunnah maqshudah*, tidak akan mau bermakmum dengan imam yang tidak berdoa Qunut. Jika pemahaman ini dibiarkan meliputi pemahaman masyarakat, maka ibadah salat jemaah di masjid akan sulit didirikan.

Sisi toleransi didapat melalui kesalingan antara imam dan makmum demi tetap terciptanya keberlangsungan salat jemaah. Apresiasi setinggi-tingginya pada imam-imam yang beraliran tidak mewajibkan Qunut namun berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan pada makmumnya yang membaca doa Qunut. Dalam hal ini, imam telah menjalankan toleransi aktif terhadap makmumnya. Sedangkan makmum menjalankan toleransi pasifnya dengan cara tetap menyelesaikan salat jemaah dengan imam tersebut tanpa perlu melakukan *mufaraqah* dalam shalat.

Dalam kacamata fikih, hal ini tentu menjadi permasalahan yang tidak mudah. Makmum (dengan mazhab Qunut merupakan *sunnah maqsudah* dalam salat) yang mengetahui imamnya tidak menggunakan Qunut maka sunnah untuk melakukan *mufaraqah*. Hal ini sebagaimana dalam Kitab *Al-Majmu* karya Imam Nawawi yang menyebutkan sebagaimana berikut:

وَأَلْحَقُوا بِهِ مَا إذَا تَرَكَ الإِمَامُ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ وَالْقُنُوتِ

"*Para ulama menambahkan bagian dari uzur yang membolehkan mufaraqah, yaitu jika imam meninggalkan sunnah maqshudah, seperti tasyahhud awal dan Qunut*".

(Sumber: https://bincangsyariah.com/ubudiyah/bolehkah-makmum-mufaraqah-karena-imam-tidak-qunut/)

Dalam perspektif yang lain, Imam Al-Ghazali dalam hal ini membolehkan makmum tetap mengikuti imam dan salat makmum tetap terhitung sebagai salat yang sah. Keterangan ini termaktub dalam kitab *Al-Wajiz* karya Imam Ghazali sebagaimana berikut:

> وَإِذَا جَوَّزْنَا اقْتِدَاءَ اَحَدهمَا بِالْآخَرفَلَوْ صَلَّي الشَّافعيُّ الصُّبْحَ خَلْفَ حَنَفِيٍّ وَمَكَثَ الْحَنَفِيُّ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَلِيلًا وَاَمْكَنَهُ اَنْ يَقْنُتَ فِيهِ فَعَلَ وَاِلَّا تَابَعَهُ
>
> Artinya, “*Ketika kita membolehkan mengikuti salah satu dari keduanya, maka seadainya penganut mazhab Syafi’i bermakmum di belakang penganut mazhab Hanafi dan ia (penganut mazhab Hanafi) setelah ruku‘ berdiam sejenak dan memungkinkan si makmum untuk membaca doa qunut, maka bacalah. Jika tidak (berhenti sejenak), maka ikutilah imam,*”.

(Sumber: https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/qunut-subuh-antara-imam-dan-makmum-1-OWqiz)

Selain contoh di atas, ada lagi contoh toleransi yang bisa didapatkan dari prosesi salat berjemaah di masjid salah satunya adalah toleransi terhadap jemaah yang membawa anak kecil ke masjid. Dalam hal ini ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung hak antara jemaah satu dengan jemaah yang lainnya.

Jemaah yang membawa anak untuk ikut serta dalam salat jemaah membawa misi *tarbiyah* kepada anak. Hal ini menjadi hak yang dilegitimasi oleh beberapa riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah beberapa kali menjalankan ibadah di masjid bersama dengan cucunya. Dengan demikian, membawa anak-anak ke masjid merupakan hak bagi setiap jemaah masjid.

Namun lagi-lagi, kebebasan seseorang itu terbatasi oleh kebebasan yang lainnya. Bagi jemaah yang lain, mereka berhak memperoleh ketenangan dalam menjalankan ibadah di masjid. Adanya anak kecil di masjid beberapa kali dikeluhkan karena tidak jarang menimbulkan kegaduhan. Disinilah perlunya sebuah sikap toleran-

si bagi jemaah yang tidak membawa anak kecil. Dengan membiarkan anak jemaah lain dengan segala konsekuensinya turut serta menjadi bagian dalam prosesi salat jemaah di masjid, hal ini merupakan toleransi pasif yang tidak semua bisa melakukannya.

Pada akhirnya, toleransi membutuhkan kesalingan antar dua yang berbeda untuk saling memaklumi dan merelakan satu sama lain. Jika dua yang berbeda tersebut saling menyadari batasan hak dirinya yang terbatasi hak orang lain, maka keharmonisan akan terwujud.[]

PAWANG HUJAN DI MANDALIKA, KAJIAN ISLAM DAN BAGAIMANA MESTINYA MUSLIM MENYIKAPI?

Oleh: **AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT**

Ada yang tak kalah heboh dari balapan perdana di Mandalika International Street Circuit, di Lombok Tengah, NTB pada Ahad 20 Maret 2022 lalu. Yaitu, aksi ritual seorang pawang hujan (baca Sasak; pawang ujan), Rara Istiati Wulandari atau yang akrab disapa Mbak Rara. Perempuan kelahiran Papua pada 22 Oktober 1983 ini berhasil membagi perhatian publik, baik yang saat itu berada di Sirkuit Mandalika maupun yang menyaksikannya lewat berbagai *platform* berita di media sosial.

Namun, tetap seperti biasa, media sosial selalu menjadi tempat komentar paling empuk dan nyaman bagi para netizen. Kelap-kelip pendapat mereka tampak begitu cepat memadati panggung publik tersebut. Mulai dari yang membela dan memuji, sampai yang memaki-maki. Saya sempat tertawa bersama kawan-kawan remaja saat membincang soal kekurangan yang kerap kali hinggap di bahu Indonesia—

seperti yang mereka sebutkan, Indonesia kekurangan minat baca, kekurangan orang jujur, bahkan saat ini sedang kekurangan minyak goreng—namun satu hal yang cukup aneh, Indonesia tidak pernah kekurangan netizen.

Begitulah kondisi kebebasan berpendapat dan berkomentar di tanah air kita. Tetapi, seiring itu, umat harus terus dibimbing agar tetap elegan bertutur di ruang publik.

Baik, di sini saya ingin mengkaji pawang hujan dalam sudut pandang Islam dan bagaimana seharusnya Muslim menaruh sikap. Berbicara ihwal pawang hujan di Indonesia—sebagaimana yang disaksikan di berbagai daerah—tentu tidak lepas dari bicara soal ritual dan doa. Sampai di sini, tidak ada persoalan sama sekali. Tidak ada yang salah dengan keduanya. Namun, saat dikaitkan dengan ritual seperti apa dan berdoa kepada siapa, mulailah terbentuk silang pendapat di tengah umat.

Terlepas dari ini, bagaimana Islam menilai pawang hujan? Apakah ini benar-benar baru alias kreasi budaya murni? Mari sedikit mengintip ke kitab dan syarah hadis terdekat. Dalam *Shahih al-Bukhari* (pada hadis ke 1017 hal. 190) terdapat sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik tentang dua orang sahabat yang menyampaikan keluhnya terkait cuaca Kota Madinah saat itu—dalam waktu dan keluh yang berbeda—kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Berikut redaksi lengkapnya:

> جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة إنجاب الثوب.

> "*Seorang lelaki datang kepada baginda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia menyampaikan, 'Wahai Rasulullah, ternak kami banyak mati, jalanan panah tak bisa dilalui, (tolong!) berdoalah*

kepada Allah (agar menurunkan hujan untuk kami)'. Lalu, Rasulullah pun berdoa, seketika juga hujan mengguyuri Kota Madinah dari hari Jumat sampai ke Jumat berikutnya. Lalu, sahabat yang lain pun datang dan mengadu, 'Wahai Rasulullah, rumah banyak yang rusak, jalanan pun sulit dilalui (karena genangan air), demikian juga binatang ternak kami banyak mati', ucapnya sendu. Lalu, Rasulullah pun berdoa kembali, 'Ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke puncak-puncak gunung, ke bukit-bukit, ke perut-perut lembah, dan ke tempat pepohonan banyak tumbuh'. Seketika juga awan gelap di Kota Madinah mulai terbelah (dan menjadi cerah)."

Dari kisah dua sahabat tadi, kita bisa menarik sehelai kesimpulan yang amat terang. Yakni, bahwa aksi 'menurunkan' dan 'memindahkan' hujan itu sudah ada sejak zaman baginda Nabi, dan beliaulah sebagai pelaku langsungnya. Namun, hal ini hanya berada dalam taraf doa atau permintaan. Bukan atas kemampuan manusia itu sendiri. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar disebutkan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غدٍ ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأيّ أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر

"*Ada lima kunci gaib yang pengetahuan pasti tentangnya hanya dimonopoli Allah; (1) Peristiwa apa yang terjadi esok hari, (2) Apa yang ada di dalam rahim, (3) Aktivitas yang akan engkau kerjakan esok hari, (4) Di bumi mana nyawamu akan dicabut, dan (5) Kapan waktu pasti turunnya hujan.*" (Shahih al-Bukhari (pada hadis ke 1039 hal. 194))

Di antara lima yang disebut baginda Nabi, poin pembahasan kita ada di bagian terakhir. Tentang waktu turun hujan. Tidak ada yang dapat menjamin secara pasti pada jam, menit dan detik berapa ia turun, kecuali Allah *subhanahu wa ta'ala*. Bahkan, Badan Meteorolo-

gi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam kapasitasnya sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian di Indonesia hanya sampai pada taraf perkiraan semata. Tidak lebih dari itu. Sebab, siapa yang menjamin hujan di balik mendung tebal, dan kepastian tidak hujan di balik kecerahan?.

Singkatnya, terkait ini, Islam mengenal dua istilah, *istisqa'* (doa minta hujan) dan *istishha'* (doa minta cuaca terang). Tetapi, ada beberapa ketentuan yang berbeda antara keduanya. Saat *istisqa'* mengenal ritual salat dan memindahkan selendang, *istishha'* sendiri tidak. Ia hanya sebatas mengangkat tangan dan berdoa sebagaimana biasa.

Dalam *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (juz 2, hal. 592), Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Atsqallani (w. 852 H) saat mensyarahi hadis di atas sedikit menyinggung lebih jauh tentang *istishha'*. Ia menulis:

> وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا وكلام الشافعي في الأمّ يوافقه وزاد: أنه لا يسن الخروج للإستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصلاة
>
> "*Jelasnya, bahwa doa istishha' itu dilakukan setelah turun hujan (atau lebih tepat mungkin di musim hujan), dan imam as-Syafi'i dalam kitab al-Umm sepakat dengan ketentuan ini. Bahkan, ia menambahkan ketentuan bahwa tidak dianjurkan keluar untuk doa istishha', untuk salat dan untuk memindahkan selendang. Melainkan, cukup berdoa di waktu khutbah Jumat atau setelah salat.*"

Lalu, bagaimana terkait ritual Mbak Rara di Mandalika beberapa waktu lalu? Sudah barang tentu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Karena itu kreasi budaya murni. Yang tidak boleh, yaitu saat melabelkan ritual-ritual tersebut sebagai produk agama. Mengingat, dalam satu kaidah fikih disebutkan:

> الأصل في العبادات الحظر وفي العادات الإباحة

> "*Prinsip dasar ibadah adalah al-hadhzar (dilarang, sebelum mendapat legalitas dari Allah atau rasul-Nya), sedangkan dalam sosial adalah al-ibahah (diperbolehkan)." (al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fi al-Madzahib al-Arba'a*h (juz 2, hal. 769), buah karya Muhammad Muthafa az-Zuhaili).

Maknanya, jika menyematkan ritual-ritual tersebut masuk dalam ranah ibadah murni, tentu salah. Karena tidak pernah ada yang mengajarkan hal itu. Namun karena menjadi bagian dari budaya, maka no problem. Sama seperti tradisi 'sedekah laut' di mana terselip munajat dalam ritual adat tersebut.

Sehingga, status keislaman seorang Rara Istiati Wulandari yang telah tersebar di berbagai platform berita di media sosial, tak semestinya dipertentangkan dengan ritual yang dilakukannya. Kecuali jika netizen sekalian mengetahui pasti bahwa Mbak Rara meminta kepada selain Tuhan Yang Maha Esa itu. Tetapi, siapa yang tahu isi hati seseorang?.

Karena ini menjadi bagian dari kreasi budaya, maka prinsip-prinsip universal seperti *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), *as-syura* (musyawarah), *at-ta'awun* (saling membantu), dan *at-tasamuh* (toleransi), harus dijunjung tinggi. *Wallahu a'lam bisshawab.*[]

IBNU MISKAWAIH, BAPAK MODERAT ERA KEKHALIFAHAN ABBASIYYAH

Oleh: YULINAR AINI RAHMAH

Untuk menciptakan sebuah perdamaian, banyak kelompok yang berupaya merumuskan konsep-konsep perdamaian berikut dengan aksinya. Salah satu konsep yang masih *happening* untuk dibicarakan adalah konsep moderasi beragama.

Moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama RI mensyaratkan sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU dan Muhammadiyah telah mengakomodir konsep serupa dengan konsep moderasi beragama ala Kementerian Agama RI. Jika Muhammadiyah punya konsep "*Wasatiyah*" maka NU juga punya konsep "*Tawasuth*" yang keduanya memiliki arah tujuan yang sama dalam upaya menjauhi ekstremisme kiri (liberal) maupun kanan (radikal).

Dalam merumuskan konsep moderasi ini, tentu banyak sekali rujukan bacaan maupun tokoh. Dari banyaknya bacaan dan tokoh yang dibuat rujukan, saya teringat salah satu tokoh yang tidak jarang disebut dalam *headline* sebagai Bapak Etika. Sebutan ini tentu tidak berlebihan. Selain disematkan kepada Ibnu Miskawaih, sebutan Bapak Etika juga lekat dengan Al-Ghazali yang pada keduanya, kita beruntung sekali diwarisi dua *masterpiece* buku induk tentang akhlak; *Ihya' 'Ulumiddin* karya Al-Ghazali dan *Tahdzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq* karya Ibnu Miskawaih.

Ibnu Miskawaih, seorang tokoh Muslim yang hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, bernama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawaih dan terlahir di Ray (sekarang Teheran). Kepastian tahun kapan Ibnu Miskawaih lahir masih menjadi perbedaan di kalangan penulis namun secara sama, sepakat dalam menyebutkan tahun wafatnya yaitu 1030 H/ 421 M.

Julukan Miskawaih memiliki arti seharum minyak misk yang dimaksudkan karena Ibnu Miskawaih memiliki budi pekerti dan keluasan ilmu. Pemikiran-pemikiran Ibnu Miskawaih tentang filsafat etika dipengaruhi oleh filsuf Aristoteles yang didapatnya dari berguru kepada Ibn al-Khammar, sedangkan ilmu tentang sejarah didapatnya dari Abu Bakar Ahmad ibn Kamil al-Qadhi yang mengajarkannya kitab *Tarikh Thabari*. Selain belajar dua hal tersebut, Ibnu Miskawaih juga belajar ilmu eksak seperti kimia dengan gurunya Abu Thayyib.

Tahdzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq menjadi karya monumental Ibnu Miskawaih yang saat ini menjadi rujukan dalam bidang etika/ akhlak. Disamping itu, Ibnu Miskawaih juga produktif menghasilkan buku dalam beberapa bidang lain seperti bidang sejarah berjudul *Tajarib al-Umam* (pengalaman bangsa-bangsa) yang bercerita tentang sejarah penemuan mesin pemintal, bidang kedokteran berjudul *Syaribah* (minum) dan beberapa kitab lainya.

Dalam kitab *Tahdzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq*, Ibnu Miskawaih juga merumuskan konsep istilah-istilah dasar dalam Ilmu Akhlak

seperti pengertian akhlak dan jiwa. Definisi akhlak menurut Ibnu Miskawaih sebagaimana berikut:

حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية

> *Sifat yang tertanam pada jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan*.

Sedangkan jiwa, dalam *fasl* قوي النفس الثلاث, Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa jiwa memiliki tiga potensi bertingkat dari rendah, menengah hingga tinggi yaitu *an-nafs al-bahimiyyah* (daya kebinatangan), *an-nafs as-sabu'iyyah* (daya buas) dan *an-nafs an-nathiqah* (daya berpikir). Tiga potensi tersebut yang akan menentukan seseorang bertindak oleh karenanya perlu dikelola dengan baik agar tidak melahirkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum syariat.

Bapak Etika, bagi saya terlalu mainstream sebagai gelar yang disandangkan pada Ibnu Miskawaih. Lebih spesifik, Ibnu Miskawaih adalah seorang Bapak Moderat. Penyebutan ini tentu bukan tanpa alasan. Dalam kitab *Tahdzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq*, ada satu pembahasan menarik yang menjadi *pattern* dalam Ilmu Akhlak. *Pattern* inilah yang selanjutnya bisa dijadikan dasar penyebutan Ibnu Miskawaih sebagai Bapak Moderat.

Pembahasan tersebut termaktub dalam *fasl Fadhilah* (Bab Keutamaan). Ibnu Miskawaih secara sistematis menyebutkan 4 kaidah dalam memformulasikan apa yang disebut sebagai sifat utama. Secara dasar, Ibnu Miskawaih menempatkan 4 sifat keutamaan ini dalam kerangka keseimbangan (*al-wast*). Jika terlalu ekstrem kurang maka disebutnya sifat tersebut masuk golongan *at-tafrith*. Sebaliknya, jika terlalu ekstrem berlebih, maka masuk pada golongan *al-ifrath*.

Empat sifat utama tersebut adalah *al-hikmah* (kebijaksanaan), *al-ifffah* (kehormatan), *as-saja'ah* (keberanian), dan *al-'adalah* (keadilan). *Al-hikmah* (kebijaksanaan) adalah sifat seimbang antara السفه (kedunguan) dan البله (kelancangan). *Al-iffah* (kehormatan) adalah

sifat seimbang antara خمود الشهوة (memendam) dan الشره (rakus). *As-saja'ah* (keberanian) adalah sifat seimbang antara الجبن (pengecut) dan التهور (nekat). Sedangkan *Al-'adalah* (keadilan) adalah sifat seimbang antara الظلم (teraniaya) dan الانظلام (menganiaya).

Membaca *pattern* tersebut, kita menyadari bahwa manusia memiliki potensi besar untuk berada posisi ekstrem kanan atau kiri. Jika ia mampu berdiri tegak ditengah dengan memegang teguh empat sifat utama tersebut, maka hidup manusia akan dilingkupi dengan kedamaian dan inilah yang disebut sebagai kesempurnaan akhlak.[]

MENGENAL AHLI KITAB: Batas Toleransi Islam dalam Relasi Non-Muslim

Oleh: **WAFIROH**

Bibit ujian terhadap nilai-nilai toleransi kembali muncul—walau sejatinya tak pernah benar-benar habis—dengan viralnya pemberitaan pernikahan beda agama belakangan ini. Pernikahan stafsus (staf khusus) Presiden, Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Bastian. Pernikahan yang dilakukan dengan prosesi dua agama (Islam-Katolik) itu dilaksanakan pada 28 Maret 2022. Sontak saja, hal tersebut menuai ragam komentar dari netizen Indonesia. Tak sedikit yang menyayangkan keputusan tersebut walaupun ada pula yang mengklaim bahwa hal tersebut adalah wujud nyata dari isu toleransi beragama.

Di awal, klaim penulis bahwa peristiwa ini adalah 'ujian toleransi' bukan tanpa alasan. *Pertama*, banyak kita temukan di laman media sosial maupun website artikel-artikel yang dengan mengatasnamakan agama (Islam atau Katolik) melakukan kritik pedas hingga melabeli kafir, murtad dan

lain-lain disematkan kepada pasangan ini. *Kedua*, kampanye toleransi yang belakangan masif, kini seakan mendapatkan bumerang. Isu-isu serta aktivis kedamaian dan toleransi antar-umat beragama kini mendapatkan beban berat untuk menjelaskan, *menjlentrehkan* dan mendudukkan masalah ini pada posisi adil dengan menyingkirkan bias sejauh mungkin.

Dari pihak umat Islam, banyak bermunculan artikel tentang hukum pernikahan dengan pasangan yang beda agama. Di antara yang banyak disebut-sebut adalah istilah ahli kitab. Nah, apakah ahli kitab itu? Apa kriterianya? Relasi apa saja yang boleh dan tidak boleh jika itu kaitannya dengan ahli kitab? Mari kita bahas satu-persatu.

1. AHLI KITAB, KRITERIANYA?

Untuk mengenal istilah ahli kitab, kita perlu merujuk kepada ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya sebagai berikut: "pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu…".

Ayat di atas secara eksplisit menyebutkan kebolehan relasi antara umat Islam dengan non-Muslim yang berlabel 'ahli kitab'. Namun ayat di atas juga belum secara detail menyebutkan kira-kira, siapakah yang masuk kategori ahli kitab tersebut. Disebutkan bahwa ahli kitab adalah mereka yang berpegang teguh kepada ajaran dalam kitab Taurat atau Injil (Yahudi dan Nasrani: Kristen). Dalam istilah lain, laki-laki ahli kitab disebut dengan kitabi dan perempuannya disebut kitabiyah. (baca: *Fikih Islami wa Adillatuhu*, 9:6653). Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak semua non-Muslim berlabel ahli kitab. Karena kita juga tidak dapat mengenyampingkan agama-agama samawi lain maupun agama *ardli* yang tidak dapat dipungkiri, banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.

2. MENIKAH DENGAN AHLI KITAB

Islam, dalam hal ini disuarakan oleh berbagai mazhab fikih yang ada, kompak untuk membolehkan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab. Namun tidak sebaliknya. Poin ini seakan memperlihatkan bahwa ajaran Islam sangat misoginis mengingat kenapa jika laki-laki boleh menikah dengan non-Muslim (baca: ahli kitab). Jika dilihat secara singkat, seakan Islam tidak adil dan hanya memberikan kesempatan ekstra bagi laki-laki.

Namun, para ulama justru menemukan hikmah lain di balik hukum ini. Bahkan hikmah tersebut memiliki nilai filoginis yang sangat tinggi. Khususnya dalam memuliakan dan menjaga keutuhan akidah perempuan. Ali As-Shabuni dengan menggunakan QS. Al-Baqarah ayat 221 sebagai argumentasi, menyebutkan sejumlah alasan bagi hukum ini.

Pertama, dalam relasi pasangan, laki-laki kerap muncul lebih superior daripada perempuan. Karena kelembutan hati dan kehalusan sikapnya, tak jarang perempuan lebih memilih untuk mengalah kepada laki-laki. Jika poin ini muncul dalam pernikahan dengan ahli kitab, maka dikhawatirkan perempuan Muslim akan cenderung untuk ikut dan meniru keberagamaan suaminya yang ahli kitab. Tentu ini degradasi keimanan. Kok bisa? Karena dikhawatirkan perempuan yang sudah beriman dengan ajaran Nabi Muhammad yang notabene sudah menjadi amandemen bagi ajaran agama yang Nabi-nabi sebelumnya, justru beralih mengikuti agama suaminya yang masih belum 'beralih' kepada agama Allah yang 'terbaru' dan lebih 'disempurnakan' (baca: Islam).

Alasan *kedua*, hak untuk membimbing dan mengayomi (baca: hal wilayah) bagi seorang istri diberikan kepada suami. Islam kemudian melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki ahli kitab, karena hendak menjaga agar bimbingan dan pengayoman yang dia peroleh tetap berasal dari laki-laki yang beragama Islam. Alih-alih dibimbing oleh laki-laki yang masih *stuck* dengan agama terdahulu.

Alasan *ketiga*, mirip poin kedua, hak perwalian terhadap anak dalam Islam diberikan kepada ayah. Ayah adalah pemegang tanggung jawab utama untuk membiayai, mendidik dan mengajarkan agama terhadap anak. Hal ini tentu meresahkan jika seorang anak dari perempuan Muslim, dididik dengan ajaran agama selain Islam. Konflik kepentingan dan tarik-menarik dalam hal ini pun tak urung akan terjadi. Terlebih bagi seorang ibu Muslim, lumrah terjadi dia tidak akan terima jika anaknya dididik dengan ideologi yang jelas berbeda dengan dirinya.

Alasan *keempat*, agama Islam mengakui kenabian Nabi Musa dan Nabi Isa serta keabsahan ajaran keduanya. Ajaran Islam hadir untuk mengamandemen ajaran beliau berdua, namun tidak untuk menyalahkan. Artinya, jika laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab, maka pelecehan atas nama agama minim kemungkinan terjadi. Karena laki-laki Muslim tetap akan memuliakan keberagamaan istrinya karena apa yang dianut oleh istrinya tetap diakui oleh Islam. Namun hal ini tidak terjadi jika situasinya berbalik. Laki-laki ahli kitab secara teologis tidak beriman dan membenarkan ajaran Islam. Bukankah pelecehan agama akan rentan terjadi jika begini?

3. RELASI LAIN DENGAN AHLI KITAB, MENGAPA TIDAK?

Al-Maidah ayat 5 di atas secara eksplisit juga melegalkan umat Muslim untuk ikut menikmati makanan (binatang halal yang disembelih) ahli kitab. Selain itu, Islam juga mempersilakan umatnya untuk menggunakan peralatan ataupun barang-barang milik ahli kitab selama diyakini status kesuciannya. Bahkan, relasi sosial-finansial juga dipersilakan dilakukan dengan ahli kitab. Nabi Saw. pernah mencontohkan hal ini dalam beberapa kondisi. Seperti pernah membeli senjata dari orang Yahudi (*Fathur Rabbani*: 15, 188), membeli makanan dari orang Yahudi secara kredit dengan menggadaikan pakaian besi (*Fathur Rabbani*: 5, 1429), melakukan transaksi bagi hasil lahan (*Ahkam Ahli Dzimmah li Ibni Qayyim*: 1, 269) serta pernah memakan makanan ahli kitab yang disebutkan dalam banyak kitab hadis. *Allahu A'lam.*[]

3 KISAH TOLERANSI NABI MUHAMMAD SAW. DALAM PEPERANGAN

Oleh: **WAFIROH**

Berbicara tentang toleransi dalam agama Islam, maka kita tidak bisa lepas dari kisah hidup Nabi Muhammad Saw. Sepanjang hidupnya, beliau tinggal dalam komunitas majemuk. Baik di Makkah maupun Madinah, Nabi Saw. selalu hidup berdampingan dengan komunitas yang homogen suku, kabilah hingga agama. Bahkan, dalam membawa risalah agama Islam, beliau selalu mendapatkan siksaan dan perundungan dengan berbagai macam bentuknya dari mereka yang berbeda dengan beliau. Mulai cibiran hingga percobaan pembunuhan.

Namun sebagai manusia mulia, manusia pilihan yang mendapatkan tanggung jawab besar untuk membawa agama yang fitrah, beliau mampu melewati semua tantangan itu dengan baik. Alih-alih menaruh dendam, beliau justru menampilkan sikap penuh toleransi. Memaafkan, tidak menyakiti hingga menaruh belas kasih kepada mereka yang

bersikap keji kepada beliau. Mulai dari kehidupan sehari-hari hingga pada momentum tertentu beliau tetap konsisten bersikap toleran. Bahkan dalam peperangan, beliau sering kali tetap menampilkan sikap toleran.

Dari semua konfrontasi dengan kafir yang terjadi, banyak terdapat kisah di mana Nabi Saw. menampilkan toleransi tingkat tinggi. Sikap ketika Nabi Saw. memilih untuk menghormati nyawa dan kehidupan lawannya meski dalam kondisi unggul. Terdapat pula kisah ketika Nabi Saw. menganjurkan, alih-alih melarang para Muslim saat itu untuk belajar kepada musuh mereka. Berikut penulis sajikan tiga kisah fenomenal sikap toleransi Nabi Saw. dalam peperangan melawan orang kafir.

1. TAWANAN PERANG BADAR

Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu, dengan jumlah pasukan hanya 313 orang, Nabi Saw. dan orang Muslim berhasil mengalahkan 950 pasukan Quraisy. 70 orang mati dan 70 orang lagi menjadi tawanan orang Muslim.

Perang dengan kemenangan pihak Muslim tersebut tidak membuat Nabi Saw. sewenang-wenang. Justru beliau menampilkan sejumlah sikap toleransi yang layak dijadikan teladan oleh umatnya. *Pertama*, beliau memerintahkan agar semua mayat yang ada, baik Muslim maupun musyrik untuk dikuburkan. Alih-alih membiarkan mayat lawan, beliau tetap memberikan penghormatan terakhir kepada mereka yang semasa hidupnya melawan dan menyakiti.

Kedua, terkait dengan tawanan Perang Badar, Nabi Saw. tidak mengambil keputusan secara sepihak. Beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat apa yang sekiranya layak dilakukan. Saat itu, Umar bin Khattab menyarankan agar mereka dibunuh saja. Karena andai mereka dilepaskan, kelak akan ada kemungkinan mereka akan kembali melawan Nabi Saw.

Sementara Abu Bakar, justru menyarankan sikap yang lebih lunak. Beliau menyarankan Nabi Saw. untuk mengambil tebusan dari mereka. Mendengar pendapat ini, Nabi Saw. setuju dan melaksana-

kan hal tersebut. Tawanan yang mampu, diminta untuk membayar harga kebebasan sejumlah 1000-4000 dirham.

Sementara untuk mereka yang tidak memiliki harta dan kebetulan memiliki keahlian baca tulis, Nabi Saw. memberikan tebusan yang sangat solutif. Beliau memberikan 10 anak Madinah untuk diajari membaca dan menulis. Jasa itulah yang kemudian dijadikan sebagai penebus kebebasan oleh Nabi Saw.

Disebutkan oleh Mustafa bin Hasani, bahwa pilihan toleran Nabi Saw., untuk mengambil tebusan daripada membunuh tawanan, adalah satu sikap yang sesuai dengan nilai dakwah serta misi besar Nabi Saw. membawa akhlak yang mulia. Karena dengan begitu, secara tidak langsung Islam sudah dicitrakan dengan lemah lembut, pemaaf serta solutif. Selain itu, besar harapan mereka yang dibiarkan hidup pada saatnya nanti akan masuk Islam atau setidaknya melahirkan anak-anak yang beragama Islam. *Subhanallah*.

2. KISAH DU'TSUR

Pada tahun ketiga Hijriah, terjadi konflik antara umat Islam dengan masyarakat Yahudi Bani Ghathafan. Mereka bermaksud untuk menyerang Madinah yang notabene adalah basis Islam terbesar. Nabi Saw. dan sejumlah sahabat pun bersiap untuk mengadang mereka. Singkat cerita, di tengah perjalanan terjadi hujan hingga membasahi baju yang dipakai oleh Nabi Saw. sembari menunggu pakaiannya kering, Nabi Saw. beristirahat di bawah pohon. Sementara umat Muslim istirahat di lain tempat.

Nabi Saw. dilihat oleh seorang laki-laki yang bernama Du'tsur. Dengan garang, dia menghunuskan pedang kepada Nabi Saw. sembari berkata: "Sekarang, siapa yang akan melindungimu, wahai Muhammad?" Nabi Saw. pun menjawab: "Allah Swt." secara ajaib, Du'tsur tiba-tiba gemetar ketakutan. Hingga pedang yang dihunusnya terjatuh ke tanah. Nabi pun mengambilnya dan mengarahkan pedang tersebut kepada Du'tsur. "Sekarang, siapa yang akan melindungimu?" Du'tsur menjawab: "Tidak ada!" Nabi Saw. lalu memaaf-

kan dan melepas pedang tersebut. Du'tsur tersungkur dan menyatakan keimanannya.

Dengan sifat pemaaf dan toleran Nabi Saw., beliau mampu mengubah mereka yang benar-benar membencinya menjadi berbalik mencintai sepenuh hati. Mereka yang sebelumnya berhati gelap dan membenci Islam, tak dinyana mendapat hidayah dan mencintai Islam sepenuh hati. Buntut dari peristiwa tersebut, Du'tsur menjadi perantara kaumnya masuk Islam. Perang dengan Bani Ghathafan pun urung terjadi, berkat kelembutan dan sikap toleran yang dicontohkan oleh Nabi Saw.

3. KISAH ZAID BIN TSABIT

Sejak tahun-tahun awal hijrah ke Madinah, konfrontasi dan konflik kepentingan dengan kaum Yahudi sering terjadi. Pada tahun keempat Hijriah Nabi Saw. pun mengambil tindakan dengan menyuruh sekretarisnya, Zaid bin Tsabit untuk belajar baca tulis abjad yang dipakai umat Yahudi. Perintah ini bertujuan agar antara umat Islam dan Yahudi tercipta korespondensi positif sehingga dapat mengurangi konflik.

Tindakan ini juga menjawab banyak pertanyaan yang kerap dilontarkan oleh radikalis. Tentang bagaimana hukum belajar ilmu, guru maupun wilayah non-Muslim. Jika yang dituju adalah ilmu itu sendiri, terlebih untuk meminimalisir sekat-sekat bias antar-agama atau golongan, kenapa tidak? Sebagaimana perilaku Nabi Saw. menyuruh Zaid belajar tulisan dan abjad Yahudi. *Allahu a'lam*.[]

MUBADALAH DALAM TOLERANSI, MUNGKINKAH?

Oleh: **WAFIROH**

"Barangsiapa yang banyak ilmunya, maka akan sedikit melakukan pengingkaran"

Ungkapan di atas adalah terjemah bebas dari sebuah pepatah Arab. Kalimat tersebut menjadi standar yang meski singkat, namun memiliki makna yang lugas. Bahwa jika kita temukan individu atau kelompok yang memiliki level toleransi tinggi, tidak mudah menyalahkan dan mengingkari sikap pihak lain serta seimbang (baca: *mubadalah*) dalam menilai suatu peristiwa, dapat disimpulkan bahwa dia memiliki wawasan keilmuan yang luas. Namun sebaliknya, ketika kita temukan ada sosok yang dengan mudah menyalahkan, klaim sepihak dan semacamnya terhadap orang lain, maka cobalah kita cek keilmuannya.

Mereka yang berilmu luas, memahami bahwa kebenaran mutlak hanya milik Tuhan semata. Sementara makhluknya,

bagaimanapun selalu berada di antara dua ambang: benar atau salah. Benar dari satu sudut pandang, tidak menafikan kemungkinan salah dari sisi lainnya. Mustahil ditemukan manusia, peristiwa maupun sesuatu lainnya yang murni salah atau benar. Mereka dengan sepenuh hati mengilhami bahwa perbedaan adalah rahmat. Perbedaan itu indah selama tidak saling serang, menyalahkan serta menghindar dari klaim sepihak.

Dalam sejarah perkembangan Islam, bahkan semenjak masa Nabi Muhammad Saw. sekalipun, umat Islam tidak begitu saja berkumpul dalam satu pandangan saja. Banyak kita temukan kisah ketika para sahabat berbeda pendapat dan ketika diajukan kepada Nabi Saw., semua pendapat itu benar dan direstui oleh beliau. Pada perkembangannya, Islam pun memiliki pionirnya sendiri dalam berbagai bidang.

Dalam fikih, tercatat ada sembilan mazhab meski hanya empat yang dipakai oleh Ahlussunnah Waljamaah. Bahkan dalam tiap mazhab itu pun, terdapat puluhan pendapat yang berbeda dalam masalah-masalah *furuiyah*. Rincian ini belum menghitung mazhab-mazhab yang tersebar dalam bidang tauhid, tasawuf, gramatika dan lain sebagainya.

Tantangan untuk bertoleransi dalam kemajemukan tingkat tinggi seperti di Indonesia, merupakan satu hal yang berat dan tentu saja, tidak mudah untuk dilakukan. terlebih dengan masifnya penggunaan media sosial dan internet, isu-isu sensitif dengan mudah disebarkan dan tentunya, semakin mudah pula untuk disalahpahami. Terlebih oleh mereka yang tidak dibekali dengan wawasan yang cukup untuk memahami isu tersebut secara utuh. Minimnya minat baca semakin memperburuk keadaan dan sering malah memperparah konflik.

Belakangan ini, viral pemberitaan di media tentang Ustad Abdul Somad yang dideportasi dari Singapura. Beliau dinilai telah menyebarkan ajaran ekstremis, berceramah tentang isu-isu sensitif seperti tentang bom bunuh diri bahkan juga dinilai pernah merendahkan agama lain (Kristen) dengan mengatakan bahwa salib adalah tem-

pat setan. Peristiwa ini pun menuai kritik, pembelaan serta cuitan netizen. Berbagai pro kontra pun mencuat.

Tulisan ini tidak sedang ingin menentukan keberpihakan dengan membela salah satu pihak. Baik itu yang membela maupun yang bersikap kontra, mereka sama-sama mengatasnamakan kebebasan berekspresi dalam ruang publik. Sayangnya, mereka melupakan hal-hal mendasar seperti menghindari untuk mencaci, klaim sepihak dan tentunya, mencari tahu dan membaca informasi tersebut secara lebih menyeluruh sebelum berkomentar.

Seorang asketis Muslim, Dzun Nun Al-Mishri berkata: "manusia adalah musuh bagi hal-hal yang tidak mereka ketahui". Ungkapan ini mengafirmasi bahwa kita akan cenderung membenci hal-hal yang belum kita ketahui. Atau dalam hemat penulis, hal yang belum seutuhnya kita pahami. Oleh karena itu, khususnya bagi netizen Indonesia penulis ajukan beberapa saran di bawah ini. Meski tak dapat menghindar dari dorongan untuk berkomentar, setidaknya bisa berkomentar dengan santun dan melihat satu isu dengan lebih seimbang dan secara timbal balik dari sudut pandang kedua pihak (baca: *mubadalah*).

1. Biasakan membaca. Saran ini akan terasa sulit, khususnya bagi mereka yang tidak terbiasa. Padahal, dengan perilaku ini, mereka akan dapat memahami satu isu secara menyeluruh. Hendaknya ketika ada satu isu, muncul dari media sosial apa saja, usahakan untuk melakukan mengecek kebenaran isu tersebut di media sosial lain atau website terpercaya. Dengan demikian, justifikasi sepihak yang muncul dari sikap terburu-buru dapat dihindari.
2. Jangan mencaci simbol agama lain. Mengapa? Karena simbol yang bagi kita terlihat remeh bahkan hina, bisa jadi mulia bagi mereka yang mengimani. Tidak bisa kita mengklaim simbol agama lain sebagai sarang setan, misalnya. Karena kita pun tidak akan rela jika simbol-simbol keyakinan kita dicela sebegitu rupa. Bagi umat Muslim, jangan lupakan bahwa Nabi Muhammad Saw. selama masa hidupnya, hidup berdampingan dengan

mereka yang berbeda agama. Beliau beribadah, tawaf di Ka'bah, berdampingan dengan berhala-berhala yang menjadi sesembahan Quraisy saat itu.

3. Jangan membela secara membabi buta. Fanatisme itu merugikan. Kembali kepada pernyataan di awal, bahwa tak ada kebenaran mutlak pada makhluk. Kebenaran yang tanpa kesalahan murni hanya milik Tuhan semata. Nabi Saw. sendiri pernah bersabda, untuk mencintai dan membenci satu objek sekadarnya saja. Karena bisa jadi, di waktu lain, kita akan berbalik mencintai atau membenci objek tersebut.
4. Utamakan kemanusiaan secara menyeluruh dan persatuan bangsa daripada kepentingan golongan tertentu saja. Karena dalam hidup, kita tidak akan bisa terlepas dari interaksi dengan golongan lain yang bisa jadi memiliki ideologi berbeda dengan kita. Tak lain karena fitrah kita sebagai makhluk sosial. *Allahu a'lam*.[]

MENGENAL KLASIFIKASI NON-MUSLIM: Upaya Membangun Toleransi Beragama

Oleh: **WAFIROH**

Merupakan hal yang sudah maklum, Indonesia adalah sebuah negara dengan komposisi keberagamaan yang homogen. Ratusan juta penduduknya memeluk berbagai macam agama. Sedikitnya, terdapat 6 agama besar yang secara resmi tercatat. Masing-masing dari keenam agama tersebut memiliki sejumlah besar aliran atau sempalan yang secara ideologis, memiliki jurang perbedaan yang cukup jauh dari agama induknya. Namun, masih terdapat begitu banyak kepercayaan atau agama *indegenous* suku tertentu. Seperti kepercayaan animisme, dinamisme (baca: agama *ardli*) maupun kepercayaan hasil kolaborasi agama lokal dengan agama samawi.

Tak dapat dipungkiri, kondisi semacam rentan memunculkan sikap intoleran antar masing-masing pemeluk agama. Sepanjang sejarah, masih sering kita temukan kasus-kasus diskriminasi dan marginalisasi kelompok-kelompok

tertentu yang mengatasnamakan agama. Baik itu agama-agama besar maupun agama minoritas kerap kali saling memojokkan hingga melecehkan ajaran dan simbol agama masing-masing.

Khususnya kita sebagai umat Muslim, alangkah elok jika bisa untuk lebih mengedepankan nilai-nilai toleransi, perdamaian dan saling menghargai terhadap pemeluk agama lain. Hal ini tentu tidak mudah untuk diwujudkan tanpa adanya lingkungan yang kondusif dan pembiasaan dalam jangka waktu lama. Jauh sebelum itu, terdapat bekal yang jauh lebih penting lagi untuk dimiliki dalam menjalani hidup bersosial di komunitas majemuk. Yaitu pemahaman beragama berbasis toleransi. Bagaimana menggunakan ilmu agama seramah dan setoleran mungkin terhadap komunitas beragama lain.

Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan dua pengetahuan dasar tentang sudut pandang Islam dalam mewujudkan nilai toleransi dengan komunitas beragama lain. Yaitu tentang klasifikasi non-Muslim menurut Islam serta bagaimana Islam memandang wilayah teritori berdasarkan sudut pandang agama yang toleran. Pengetahuan ini penting untuk dimiliki oleh setiap Muslim agar tidak mudah terjebak dalam stigma negatif serta bersikap radikal terhadap agama lain.

Salah satu ulama Islam, yaitu Imam Al-Kisani yang merupakan salah satu ulama dalam Mazhab Hanafi dalam kitabnya *Badai' Shanai'* mengategorikan non-Muslim menjadi empat kelompok. *Pertama*, yaitu mereka yang mutlak mengingkari adanya pencipta dan kenabian Muhammad Saw. Mereka dikenal dengan ateis murni. Ateis sendiri terbagi menjadi dua macam. Pertama, mereka yang semenjak awal memang tidak percaya terhadap Tuhan, Nabi dan ajaran agama secara keseluruhan. Kedua, mereka yang pada awalnya percaya kepada Tuhan bahkan bisa jadi beragama Islam, namun kemudian kehilangan keyakinannya hingga tidak percaya terhadap agama apa pun.

Kedua, adalah mereka yang percaya kepada pencipta tetapi tidak percaya terhadap keesaan Tuhan. Bagi mereka, Tuhan itu tak me-

lulu Zat Yang Esa. Tuhan bisa berjumlah dua, tiga atau sebanyak apa pun sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Mereka adalah penyembah berhala, dewa-dewi atau yang kita kenal dengan pemeluk animisme dan dinamisme. Masuk dalam kategori ini adalah mereka yang beragama Majusi, Shinto dan kepercayaan lainnya.

Ketiga, adalah mereka yang mengakui keesaan Tuhan namun mengingkari kebenaran rasul atau nabi. Mereka adalah mayoritas kaum ahli filsuf. Mereka lebih mendahulukan rasio yang mereka miliki daripada hati untuk meyakini kebenaran Nabi dan ajaran agama lainnya.

Keempat, adalah kelompok yang mengesakan Tuhan, mengakui kerasulan namun mengingkari Nabi Muhammad sebagai rasul. Kelompok ini dapat banyak kita temukan pada saat ini. Tak jarang kita temukan orang yang mengaku mendapat wahyu hingga mengaku diangkat menjadi Nabi. Mereka dikategorikan sebagai non-Muslim tak lain karena mereka mengingkari salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh umat Muslim secara menyeluruh.

Pengetahuan dasar kedua yang idealnya dimiliki oleh umat Muslim adalah tentang batas wilayah teritori komunitas berdasarkan sudut pandang agama. Hal ini juga penting untuk dimiliki agar terhindar dari klaim sepihak terhadap suatu wilayah. Semisal mengklaim sebuah wilayah sebagai negara kafir, negara *thaghut* dan sejumlah pandangan lain yang mengandung sentimen beragama.

Dalam Islam, wilayah bernegara dalam sudut pandang keberagamaan itu dibagi menjadi 4 macam pula. *Pertama* Darul Islam, yaitu wilayah di mana hukum Islam menjadi satu-satunya hukum yang berlaku terhadap semua penduduk. Contoh seperti ini mungkin bisa kita temukan di wilayah Timur Tengah seperti kerajaan Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. *Kedua* adalah Darul Baghyi atau wilayah pemberontak. Yaitu sebagian dari wilayah Islam namun dikuasai oleh sekelompok orang yang melawan terhadap pemimpin yang sah. Penulis tidak bisa menyebutkan secara khusus contoh negara ini. Namun belakangan kita dapat temukan sejumlah negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama

Islam namun mereka dikuasai (dijajah) oleh kekuasaan yang mencoba untuk menggulingkan pemerintahan yang tengah berkuasa.

Ketiga adalah Darul Harbi. Yaitu wilayah yang notabene kebalikan dari yang pertama. Adalah wilayah di mana hukum selain Islam menjadi satu-satunya hukum yang berlaku. Bahkan hukum yang senapas dengan Islam sekalipun, meski bukan hukum Islam secara khusus juga tidak berlaku di negara ini.

Terakhir, adalah Darul Ahdi. Yaitu wilayah yang pemimpinnya melakukan kesepakatan dengan rakyatnya untuk saling berdamai. Negara atau wilayah yang meski tidak mengatasnamakan Islam, namun secara esensi memiliki hukum dan undang-undang bernapas Islam. Mereka biasanya memberikan kebebasan terhadap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing yang mereka miliki. Secara ekonomi, mereka juga memiliki kesepakatan dengan para penduduknya untuk mewajibkan membayar pajak sebagai wujud simbol persatuan dalam banyak perbedaan. Contoh poin keempat ini adalah negara kita, Negara kesatuan Republik Indonesia.

Setelah memahami poin-poin di atas dengan baik, maka kita tidak akan mudah melakukan klaim sembarangan terhadap pihak-pihak yang berbeda dengan komunitas yang kita miliki. Tidak semua pihak yang berbeda, itu kafir dan layak untuk diperangi—dibenci. Tidak mudah pula menyematkan istilah-istilah seperti negara kafir, *thaghut* dan sebagainya kepada mereka yang tidak menerapkan ajaran agama Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa bernegaranya. *Allahu A'lam*.[]

CIRI TAFSIR TOLERAN

Oleh: **ASPIYAH KASDINI**

Agama kerap dijadikan sebagai alat menindas kaum yang lemah oleh sebagian kelompok tertentu. Ini bukanlah hal baru, melainkan telah terjadi sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mendiskriminasi kaum rentan, agama juga sering difungsikan sebagai modal untuk memperoleh kekuasaan, pemenuhan kepentingan kelompok, atau juga sebagai pemicu konflik dan peperangan. Lagi-lagi ini bukanlah hal yang baru, namun sudah terjadi sejak dahulu. Namun, apakah kita semua menginginkan kehidupan yang terus-menerus demikian? Kehidupan dengan kehadiran 'agama' yang sungguh intoleran dan menakutkan? Sungguh tidak ada satu manusia pun yang berharap demikian, sehingga kita semua memerlukan tafsir yang toleran.

Banyaknya pendapat para mufasir atas teks, dan juga kaum agamawan yang kembali menyampaikan penafsiran

tersebut juga memberikan ruang terhadap keberadaan tafsir-tafsir yang intoleran. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk dapat memilah penafsiran yang toleran, penafsiran yang sungguh kita butuhkan dalam menjalani semua bentuk relasi kehidupan? Berikut ciri-cirinya :

Pertama, pastikan isi dan arah tafsir mengarah kepada *akhlakul karimah*. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Buya Hussein di banyak pertemuan, sejatinya semua agama itu mengajarkan kebaikan, termasuk Islam. Akan tetapi, dalam agama yang sama pun kita kerap berselisih, semua itu dikarenakan perbedaan pemahaman atas teks agama yang dihayati. Agar agama menjadi agama yang toleran dan mendamaikan, tentu Buya Hussein memberikan tolak ukur tersendiri dalam corak penafsirannya, yakni tafsir yang mendekati keadilan.

Mendekati keadilan di sini memiliki indikator inti yang berupa *akhlakul karimah*, atau prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus mencakup tentang nilai-nilai kebebasan (*al-hurriyyah*), kesetaraan (*al-musawwa*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), keadilan (*al-adalah*), dan penghormatan kepada manusia (*karamah al-insan*) dengan melihat kategorisasi ayat bersangkutan (universal dan partikular). Jika dalam metode tafsir mempertimbangkan indikator ini, tentu 'Agama' sangat kecil kemungkinannya untuk memiliki wajah yang sangar, beringas, dan intoleran. *So*, jika ada agamawan yang menafsirkan teks agama tanpa menitik-beratkan poin ini, lebih baik untuk tidak dihiraukan.

Kedua, harus merupakan perwujudan dari visi al-Quran, yakni rahmat untuk semesta alam. Sebagai objek tafsir para mufasir, posisi al-Quran harus diteguhkan kembali, al-Quran adalah wahyu Tuhan kepada Nabi Muhammad Saw. yang diperuntukkan untuk manusia. Seperti yang dikatakan Buya Hussein, bahwa al-Quran memiliki karakter khusus yang membuatnya selalu relevan dengan tuntutan zaman, yakni melengkapi risalah ketuhanan, abadi, universal, komprehensif, dan tidak saling bertentangan. Berikut fungsi dan visi dari al-Quran itu sendiri, yakni menjadi rahmat untuk se-

mesta dengan segala tuntunan budi pekerti/*akhlakul karimah* yang terdapat di dalamnya. Dari sini dapat dipahami secara ringkas, bahwa kehadiran agama sejatinya berfungsi sebagai tuntunan dalam mewujudkan harmoni dalam kehidupan, bukan sebagai sumbu perpecahan. Jadi, jika ada panutan yang menyampaikan teks ayat namun tidak sesuai dengan visi al-Quran, maka tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan.

Ketiga, tafsir tersebut harus dapat dilihat dari multidisiplin ilmu pengetahuan. Semua ilmu yang ada di dunia ini dapat dijelaskan oleh al-Quran, sehingga penafsiran atas ayat/teks pun harus dapat dilihat dari berbagai perspektif keilmuan yang ada. Oleh karena itu, mufasir saat ini tidak saja dituntut untuk mendalami ilmu yang berhubungan dengan agama saja, melainkan juga memahami ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya tafsir yang dihasilkan olehnya sungguh-sungguh dapat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat secara kontekstual, bukan secara tekstual keagamaan belaka.

Di antara keahlian yang harus dimiliki para mufasir saat ini antara lain: memahami bahasa (*nafs al-khitab*), memahami situasi dan kondisi orang yang menyampaikan (*mukhatib*/*author*), memahami situasi dan kondisi penerima (*mukhatab*/*audiens*), memahami latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*), memahami tradisi dan sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta memahami rasionalitas teks. Saat mufasir dan agamawan mengusai ini semua, *Insya Allah* tafsir yang disampaikan oleh mereka adalah tafsir yang toleran.

Akhirnya, mengutip pernyataan Buya Hussein, mengikuti Nabi adalah mengikuti cita-citanya, karena dunia ini tidak berhenti, berhenti adalah kematian, dan jika seseorang berhenti tanpa sebab, maka ia akan ditinggalkan.[]

UPAYA MENGATASI EKSTREMISME AGAMA

Oleh: **ASPIYAH KASDINI. R. A**

Pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 (19.00-21.00 WIB), Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Institut Leimena mengadakan seminar Internasional dengan tajuk "Literasi Keagamaan Lintas Budaya untuk Mengatasi Ekstremisme Beragama: Menjawab Pesan Kairo" secara daring. Menjadi pembicara kunci seminar, Ambasador Lutfi Rauf (Duta Besar Indonesia untuk Mesir) mengatakan bahwa isu ektremisme merupakan isu yang dekat dengan kita semua. Menurutnya, belum ada definisi yang tepat untuk dapat menggambarkan apa itu ekstremisme, kendati demikian, beliau menggunakan definisi milik Unesco yang intinya menggambarkan bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak kasat mata, karena menyangkut alam pemikiran manusia, lebih tepatnya ideologi yang memberikan dampak pada tindakan, sehingga sulit dideteksi secara akurat.

Berdasarkan pengamatan beliau, sebelum tahun 2020, isu ini merupakan isu global dan menjadi pekerjaan bersama

bangsa-bangsa di dunia. Hingga akhirnya, datanglah pandemi yang mengalihkan isu ini. Akan tetapi, saat dunia sedang sibuk jatuh bangun karena pandemi, aktor-aktor ekstremisme justru tidak berhenti bekerja. Kondisi pandemi digunakan aktor-aktor tersebut untuk menyebar paham-paham mereka bahkan melalui ruang privat, yakni melalui dunia digital. Hingga dapat dikatakan bahwa *platform* digital dan *platform* daring selama pandemi inilah yang menjadi ancaman untuk kita semua saat ini. Siapa pun itu, sangat mudah untuk mengakses dan membagikan hal-hal propaganda.

Sesuai pengalamannya, dulu sangat jarang gerakan ekstremisme yang bergerak secara individu. Namun yang menjadi tantangannya sekarang, gerakan ini bahkan telah berubah menjadi gerakan individu, ibu-ibu rela melakukan bom bunuh diri dengan anaknya, ini adalah tantangan dan ancaman bagi kita semua. Jumlah tersangka terorisme Indonesia meningkat tiap tahunnya, yakni hampir 60% per tahun 2021. Oleh karena itu, ancaman terorisme ini sangat nyata, mereka cenderung mengeskploitasi ajaran agama, dan hal-hal yang berbau rasisme. Dalam konteks Indonesia, Indonesia ini merupakan ladang yang subur bagi merebaknya paham ekstremisme, tidak lain karena keberagaman yang dimilikinya. Beliau juga mengungkap fakta bahwa Mesir juga tengah menghadapi ancaman nyata disebabkan ekstremisme, Mesir juga menggunakan pendekatan yang sama dengan Indonesia dalam menangani hal ini. Salah satu dari usaha pencegahan tersebut yakni dengan mengadakan seminar pada 7-9 Juni 2022, yang juga dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, yang kemudian isi dari seminar tersebut disebut dengan "Pesan Kairo" yang menjadi bahan *brainstomming* dalam acara ini.

H. Muh. Hattah Fattah (Wakil Rektor bidang Kerja sama dan Promosi Universitas Muslim Indonesia/UMI Makassar) juga mengungkap hal serupa. Bagi beliau, acara di Mesir merupakan rangkaian acara yang memberikan paham bahwa paham ekstremisme itu tumbuh di banyak agama dan di banyak negara, sehingga ini menjadi tugas kita bersama. Perkembangan paham radikal ini terus berkembang dengan berbagai bentuk, oleh karena itu kita perlu

melakukan banyak kajian dan mengoneksikan seluruh kerja sama yang mungkin kita lakukan dan kita miliki dengan harapan membicarakan tindak lanjut untuk berkolaborasi bersama guna mencegah berkembangnya paham radikalisme ini. Sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat penting, oleh karena itu sektor ini dapat menjadi wahana yang potensial untuk disusupi, sehingga kita wajib menjaga sektor ini dari ancaman radikalisme dan ekstremisme. Di UMI sendiri, nilai-nilai moderasi beragama ini sedang diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan dan berbagai kerja sama yang dijalin.

Dengan tegas beliau berkata bahwa kita semua harus bekerja sama untuk membangun persamaan konsepsi dan persepsi untuk mencegah tindakan ekstremisme. Adanya *platform* digital juga menjadi wahana empuk bagi mereka, oleh karena itu kita harus mengadopsi upaya yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar yang mempelajari konten-konten yang beraroma radikal, dan dengan aktif kita (sebagaimana Al-Azhar) dapat memberikan fatwa atas konten-konten yang berbau radikal tersebut. Ini bisa kita adopsi dalam pengembangan digitalisasi dengan dan menjadi strategi penting dalam realisasi pencegahan radikalisme. Memberikan paham moderasi harus dimulai sejak usia dini, sehingga anak-anak bangsa lebih dini juga memahami adanya paham toleransi, moderasi, sehingga saat ada yang mulai menyusupi dengan paham intoleran, mereka dapat memahami dan menangkalnya. Dengan demikian, mereka dapat memahami konsistensi Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Sebagai pembicara selanjutnya, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi (Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia) mengutip dua kaul ulama yang berkaitan dengan tindakan ekstremisme: Muhammad Ibnu Sirrin, yang menekankan agar para pencari ilmu agama hendaknya mencari ilmu tersebut dari mereka yang kompeten; Abdullah bin Mubarok yang mengatakan bahwa rantai keilmuan adalah bagian dari agama, dan pentingnya rantai keilmuan tersebut dalam validasi keilmuan

yang bersangkutan. Kedua tokoh ini dapat berkata demikian karena mereka berdua melihat kehancuran yang bermula dari benih-benih destruktif yang ada di tengah-tengah masyarakat Islam saat itu. Dan hal ini adalah bagian dari ekstremisme beragama yang disebabkan oleh kesalahpahaman. TGB juga mengungkapkan bahwasanya Ibnu Sirrin saat kecil sudah mendengar kisah tentang Perang Siffin, dan kisah inilah yang kerap menjadi embrio terjadinya perpecahan.

Kemudian, TGB kembali berkata bahwa, sejak awal para ulama melihat adanya kesalahpahaman terhadap agama merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam menimbulkan ekstremisme beragama, yang berpengaruh pada segala sendi kehidupan dan mengakibatkan perang berkepanjangan dalam masyarakat beragama. Radikalitas dan ekstreminitas adalah term yang otentik, bukan jualan kaum Barat, jangankan ekstrem, *al-ghulluw* atau melampaui batas itu saja sudah dilarang. Melawan radikalitas, ekstreminitas, dan hal-hal yang menuju kepadanya adalah sesungguhnya kita sedang menjalankan amanat Allah dan Rasul-Nya.

TGB kemudian memberikan insight tentang apa yang harus kita lakukan. *Pertama*, intervensi dalam pendidikan. Materi-materi keislaman yang kita ajarkan dalam semua jenjang pendidikan harus kita sisir dengan benar, karena ini adalah basis wajah-wajah bangsa 10 bahkan 20 tahun kedepannya. Kita harus memastikan materi-materi keagamaan yang kita asupkan kepada anak didik tidak mengandung paham intoleransi dan ekstremisme. *Kedua*, para guru yang mengajar, kita harus berani dan memiliki pemahaman yang moderat. *Ketiga*, khususnya tentang akidah, hari ini kita bicara akidah maka harusnya selalu mengaitkan dengan akhlak. Bagaimana nilai-nilai akidah kita wujudkan dalam akhlak/interaksi sosial. Akidah tidak selalu norma, melainkan tentang akhlak. Akidah yang selalu berbentuk norma jadi mudah menyalahkah orang lain. *Empat*, memperbanyak dan menghadirkan dalam materi pendidikan kita, maupun narasi keagamaan kita hal-hal yang terkait dengan kebudayaan agama. Ya, Islam tidak hanya agama, tetapi juga budaya. Jika kita menghadirkan Islam yang berwarna-warni dengan budaya

yang beragam, maka ia akan menghadirkan kenyamanan bersama dan adanya keseimbangan dalam beragama dan bermasyarakat.

Sepaham dengan TGB, Dr. Alwi Shihab (Senior Fellow, Institut Leimena) juga menegaskan bahwa fokus *training* ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya Muslim berinteraksi dengan pihak lain. Ini untuk mengantisipasi paham ektremisme yang tejadi di luar lingkungan kita, dan juga yang berada dalam sekitar dan diri kita. Pandangan kita terhadap keberadaan agama lain adalah penting, seperti contoh, apa pandangan umat Muslim Indonesia saat melihat kaum Yahudi? 90% menjawab mereka (Yahudi) adalah musuh. Menurut beliau, kita tidak bisa mengeneralisasi, karena ada dari mereka yang zionis, dan ada juga yang tidak zionis.

Selengkapnya, Dr. Alwi memberikan resep untuk kita dapat berhubungan baik dengan pihak lain dengan cara yang dianjurkan (dengan mengutip teori Chris Seiple), yakni dengan memiliki 3 kompetensi. Dalam lingkup ahlulkitab, kita ambil contoh Ibrahim as. yang menjadi tokoh sentral bagi 3 agama, ini bisa mendekatkan 3 agama kepada 1 sumber, sehingga terdapat simpati yang dapat diterima, dan bahkan Al-Quran menekankan hal itu. Ibrahim adalah hal yang baik/tokoh yang menjadi teladan kita semua, dan disebutkan bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, melainkan dia adalah Nabi Hanifan yang pasrah kepada Allah semata. Ada banyak hal dalam Al-Quran yang dapat menjadi inspirasi untuk kita berinteraksi baik dengan agama yang berbeda. Syariah kita berbeda-beda, namun agama kita satu. Agama tetap satu, yakni Islam/pasrah, namun syariat yang diberikan berbeda antar kelompoknya.

Yang menarik dari pernyataan Dr. Alwi Shihab, menurut beliau, perbedaan aliran, agama, akidah maupun ajaran itu tidak apa-apa, yang perlu diwaspadai adalah ajaran akidah yang mengandung dan mengajarkan nilai-nilai/unsur-unsur perpecahan yang dapat memberikan pengaruh buruk dalam interaksi sosial.

Sebagai pembicara terakhir, Muhammad Suaib Tahir (Staf Ahli Satgas Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia,

mengungkap bahwa hambatan utama dalam BNPT adalah narasi. Narasi yang digaungkan oleh kaum ekstremis ternyata lebih efektif daripada yang kita/BNPT bangun. Mereka ini sedikit tetapi aktif di media sosial, sedangkan pihak yang moderat jumlahnya banyak namun tidak aktif (masih minimnya narasi-narasi alternatif yang moderatif di media sosial). Oleh karena itu BNPT sangat berterima kasih dan membanggakan kepada instansi-instansi yang dapat berkolaborasi untuk menyebarkan narasi alternatif di berbagai media, khususnya media sosial dan pendidikan. Akhirnya, kaum radikal dan ekstrem tidak selalu teroris, tetapi kaum teroris sudah pasti radikal dan ekstrem. Akan tetapi yang pasti, kelompok-kelompok ini (ekstremis, radikalis, dan teroris telah melakukan distorsi terhadap nilai-nilai luhur agama.[]

GOWES, KESALINGAN, DAN TOLERANSI

Oleh: AHSAN JAMET HAMIDI

Aku menerima nasihat sederhana dari seorang kawan yang menyukai olahraga gowes. "Kalau kamu lagi stres, bersepedalah sendirian. Tetapi kalau pengen senang-senang, bersepedalah ramai-ramai".

Setelah kurenungkan, nasihat itu banyak benarnya. Saat bersepeda sendirian, aku bebas menentukan tujuan, jalur hingga ritme kecepatan yang sesuai kehendakku. Tidak perlu banyak bertenggang rasa, ataupun memperdulikan pegowes lain. Hanya perlu fokus pada keselamatan dan tujuanku sendiri.

Saat bersepeda berjemaah, aku harus patuh menggunakan prinsip kesalingan. Karena dengan ketaatan pada prinsip itulah, bersepedaku mampu menumbuhkan rasa bahagia.

Dalam praktik prinsip kesalingan, para pegowes harus saling memahami, saling memaklumi, saling membantu, hingga saling menyepakati tujuan dan *track* yang akan dilalui. Selain itu, ritme kecepatan selama mengayuh pedal sepeda

pun, juga harus disamakan. Jika tidak, maka niat bisa bersepeda bareng-bareng dengan senang bisa berantakan. Bahkan, untuk menentukan tempat makan yang enak dan nyaman sekalipun, perlu ada kesepakatan bersama. Intinya, harus bisa saling memahami.

Bagi para penggemar olah raga sepeda, biasanya mereka tidak terikat pada satu komunitas. Satu orang, bisa ikut dalam berbagai komunitas, sesuai dengan pilihan dan kesesuaian topik obrolan saat bersepeda. Aku sendiri tergabung dalam berbagai komunitas. Mulai dari komunitas lingkungan tempat tinggal, kantor, sekolah, profesi dst. Setiap akhir pekan, aku bebas memilih hendak bersepeda dengan komunitas mana.

BERSEPEDA YANG MEMBAURKAN

Aku punya tetangga baik. Namanya Mbak Lucy, asal Yogyakarta. Kami tinggal dalam satu komplek perumahan. Meski jarak rumah masing-masing cukup jauh, namun tautan persaudaraan kami dekat. Dia memilih rumah yang dekat dengan masjid. Hanya berjarak kurang lebih 5 meter. Meski tinggal di lingkungan masjid, ia tidak memeluk agama Islam.

Sejak berkenalan, aku sudah menaruh rasa hormat kepada Mbak Lucy dan Mas Rendra, suaminya. Bagiku, mereka adalah teladan dalam bertoleransi dalam keseharian. Betapa tangguhnya mereka. Bayangkan, setiap hari, saat tidur lelap di pagi hari sekali, mereka harus terbangun oleh suara azan Subuh dengan *loudspeaker*.

Bagiku, yang memang harus menunaikan salat Subuh, suara azan itu memang menjadi pertanda untuk membangunkan tidur lelapku. Ada kewajiban yang harus segera aku tunaikan. Tetapi bagi yang tidak harus salat Subuh, tentu itu tantangan luar biasa.

Sikap hormatku tidak berhenti di situ. Pada saat salat Jumat, atau ketika ada kegiatan keramaian di masjid. Mbak Lucy sering tidak bisa memasukkan mobil ke garasi rumahnya. Ada banyak sepeda motor yang terparkir sehingga menghalangi mobilnya hingga tidak bisa lewat. Namun, alih-alih ia mengeluh, Mbak Lucy akan parkir di

tempat yang agak jauh, sambil senyum menyapa kami hingga masuk ke dalam rumah dengan ringan sekali.

Ketika ada prosesi penyembelihan hewan kurban, Mbak Lucy mempersilakan garasi rumahnya untuk digunakan sebagai tempat masak dan lain-lain. Bahkan, saat masjid kami kekurangan air, dia mempersilakan kami untuk menggunakan air bersih dari rumahnya untuk berwudhu dan aktivitas masak dan lain-lainnya. Sungguh ketulusan yang luar biasa.

Sebagai orang yang sudah kenal dekat, aku secara pribadi merasa sangat tidak enak. Dengan sedikit malu aku meminta maaf dan sesekali membantunya. Aku meminta orang-orang untuk memarkirkan motornya dengan bijaksana, sehingga jalanan tersebut tetap bisa dilewati kendaraan lain. Cara yang kutempuh itu hanya sporadis dan tidak efektif. Aku juga tidak selalu ada di lingkungan itu setiap ada keramaian. Selain itu, Mbak Lucy dan suami (saat itu) juga belum banyak kenal dengan warga lain di dalam satu komplek.

Suatu hari, aku mengajak Mbak Lucy untuk bergabung dalam komunitas gowes warga komplek. Ia menjadi satu-satunya perempuan yang bergabung. Awalnya agak canggung, namun setelah aku yakinkan, dia bersedia gabung. Dalam puluhan kali gowes bareng, secara alamiah terjadi pembauran antar-warga. Mbak Lucy menjadi cukup dikenal baik. Awalnya di kalangan pegowes. Selanjutnya oleh banyak warga lain yang selama ini canggung untuk mengenalnya.

Proses pembauran itu tidak hanya terjadi pada diri Mbak Lucy. Mas Rendra, suaminya, kini juga ikut *srawung*, ngobrol dengan para mahasiswa, marbot dan para jemaah masjid lain yang sering nongkrong di area *pantry* masjid. Bilik terbuka yang memiliki peralatan masak lengkap itu tidak pernah sepi. Ada wifi gratis, makanan, lauk-pauk, minuman, kopi, teh, gula, dan kue-kue kecil, selalu datang silih berganti.

Aku sering bergurau dengan Mas Rendra dan menjulukinya sebagai “marbot masjid yang beragama Katolik”. Kami tertawa lebar.

Saat waktu salat tiba, aku sering meledeknya : “Ayo Mas Rendra, salat jamaah dulu”.

Dia pun menjawab sambil senyum lebar : “Saya hari Minggu saja nanti Pak, dirapel”.

SIKAP TOLERAN

Sikap saling pengertian yang muncul dari diri Mbak Lucy dan Mas Rendra, tidak datang dari ruang kosong. Selain karena karakter dasar mereka memanglah orang baik, namun ada satu usaha yang diupayakan untuk ada. Sikap kesalingan itu tumbuh, salah satunya melalui proses perjumpaan dan pembauran dalam aktivitas gowes bareng.

Gowes berjemaah cukup baik sebagai medium untuk menumbuhkan jiwa dan pikiran sehat. Ketika sedang gowes bareng-bareng, para pegowes secara alamiah akan belajar melapangkan hati dan pikirannya. Mereka mengasah prinsip kesalingan dalam diri masing-masing, sambil menebalkan sikap permakluman terhadap keinginan orang lain. Melalui pergulatan batin seperti itulah, proses penghargaan terhadap hal-hal yang sejatinya tidak selalu sejalan dengan harapan kita, itu bisa terjadi. Manusia memang akan selalu hidup dan berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak akan pernah selalu selaras dengan egonya.

Manusia harus bisa menoleransi orang lain dan lingkungannya, jika ingin hidup bahagia. Seseorang yang merasa telah bersikap toleran, bukan berarti telah tuntas melakukan kebaikan untuk orang lain. Karena suatu saat, orang lain juga akan menoleransi sikap kita yang mungkin juga tidak selalu selaras dengan orang lain. Untuk itulah, menerapkan prinsip kesalingan dalam menghormati perbedaan itu telah menjadi keniscayaan.

Gowes berjemaah, juga menjadi sarana baik untuk melatih diri dalam menaklukkan ego manusia yang terus tumbuh subur. Mengendalikan ego, sama halnya dengan mengatur nafsu makan ataupun hasrat seksual. Gejolak nafsu yang bisa terus tumbuh subur dan bisa sangat liar. Untuk itu, ia harus dikendalikan dan ditaklukkan, agar tidak menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri dan orang lain.

Gowes bareng, sejatinya adalah miniatur kehidupan bermasyarakat. Setiap pegowes, niscaya akan berusaha menaklukkan egonya. Ia harus belajar menyadari bahwa tidak hanya keinginan dirinya sendirilah yang paling baik. Mereka harus menghormati aspirasi orang lain.

Pada puncaknya, jika seseorang sudah bersedia berkorban demi terwujudnya kehendak orang lain demi kemaslahatan bersama. Maka itulah manifestasi sikap toleran manusia yang sesungguhnya. Tentu, setiap manusia memiliki standar norma dan kebaikan yang berbeda-beda. Sikap toleran adalah akan berwujud pada penghormatan pada setiap perbedaan, tanpa ada upaya menghalang-halanginya.[]

INDEKS

yang muda merawat bangsa

Buku *Yang Muda Merawat Bangsa* merupakan sebuah ikhtiar orang-orang muda yang menjadi kontributor Mubadalah.id untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan dan kerja sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini berbicara tentang kebangsaan, toleransi, dan perdamaian untuk mengembangkan sikap cinta tanah air.